



PROFIL 2013

DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN



TIM PERUMUS

Penanggung Jawab

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Editor

Sekretaris Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes

Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian

Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan

Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Konsep

Kepala Bagian Program dan Informasi

Kasubag Data dan Informasi

Kontributor

Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian; Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas; Kepala Bagian Keuangan; Kasubag Program; Kasubag Evaluasi dan Pelaporan; Kasubag Kepegawaian; Kasie Evaluasi Program Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes; Kasubag TU Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes; Kasubag TU Dit Bina Pelayanan Kefarmasian; Kasubag TU Dit. Bina Prodis Alkes; Kasubag TU Dit. Bina Prodis Kefarmasian; Ari Budiyanto, S.Si, Apt; Apriliya Prihayati; Ali Kurniadi; Ayu Ramadaniaty, S.Farm, Apt; Priyadi; Erik Permana Jaya, SE; Ibnu Fatih; Paramita Nandini Amd.KL; Aryo Genta, S.Farm, Apt; Devina Lesthana, SE, MM.

KATA PENGANTAR

Profil kefarmasian merupakan salah satu upaya pemenuhan dalam memperoleh gambaran tentang capaian kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien oleh setiap unit teknis di Lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes diharapkan mampu menggambarkan kinerja dan pencapaian terhadap target indikator melalui pendekatan yang berbasis bukti (*evidence-based*).

Dalam memperoleh kelengkapan data dan informasi, penyusunan profil kefarmasian ini melibatkan seluruh Provinsi dalam permintaan dukungan data dan informasi terkait indikator-indikator yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan sehingga diperoleh data dan informasi yang akurat, valid dan terkini.

Data yang tersaji dalam Profil Kefarmasian ini diharapkan mampu menjadi sumber data dan informasi yang berkualitas bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya sebagai dasar dalam perumusan dan pengambilan kebijakan bagi pimpinan di jajaran Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang dengan segenap hati telah membantu dan berperan aktif dalam penyusunan Profil Kefarmasian dan Alat Kesehatan ini.

Direktur Jenderal,

Dra. Maura Linda Sitanggang, Ph.D

DAFTAR ISI

Tim Perumus.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Lampiran.....	viii
BAB I. Pendahuluan	1
A. Kebijakan dan Strategi	1
B. Gambaran Organisasi	1
BAB II. Profil Kefarmasian dan Alat Kesehatan	4
BAB III. Pencapaian Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	6
A. Peningkatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	6
1. Kebijakan Rasionalisasi Harga Obat Generik.....	8
2. Penyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan Vaksin.....	10
3. Penggunaan Obat Generik di Pelayanan Kesehatan Pemerintah	14
4. Realokasi Dana Alokasi Khusus Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2012	15
B. Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	16
1. Struktur Organisasi IFK	17
2. Sumber Daya Manusia Pengelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	18
3. Sarana dan Prasarana Penyimpanan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	18
4. Pengamanan.....	20
5. Penyimpanan dan Distribusi.....	21
6. Penunjang	23
7. Administrasi	24
8. Penilaian Tenaga Kefarmasian Pengelolaan Obat Berprestasi Prov/Kab/Kota	24
C. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian	26
1. Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pemerintah yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar	27
2. Puskesmas Perawatan yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar	32
3. Persentase Penggunaan Obat Rasional (POR) di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Pemerintah....	34
D. Peningkatan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan	37
1. Persentase Produk Alat Kesehatan dan PKRT yang Beredar Memenuhi Persyaratan Keamanan, Mutu dan Manfaat	39
2. Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT yang Memenuhi Persyaratan Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) dan Cara Pembuatan PKRT yang Baik (CPPKRTB)	40
3. Persentase Sarana Distribusi Alat Kesehatan yang Memenuhi Persyaratan Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB)	41
4. Pelayanan Perizinan di Bidang Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	42
E. Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian	46
1. Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional Produksi di Dalam Negeri	46
2. Standar Produk Kefarmasian yang Disusun Dalam Rangka Pembinaan Produksi dan Distribusi	49
3. Perizinan Produksi dan Distribusi Kefarmasian Tahun 2013	51

4. Pasar Farmasi	53
F. Cakupan Sumber Daya Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Indonesia	55
1. Cakupan Sarana Produksi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan	55
2. Cakupan Sarana Distribusi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan	65
3. Cakupan Sumber Daya Manusia Kefarmasian	75
G. Sistem Pelaporan dan Perizinan Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan	78
1. STRA Online	78
2. Aplikasi Pemetaan Sarana Kefarmasian	79
BAB IV. Penunjang Program	80
A. Pembiayaan	80
1. Kantor Pusat	80
2. Dana Dekonsentrasi	81
B. Peraturan Perundang-undangan, Organisasi dan Hubungan Masyarakat	82
C. Ketenagaan	91
1. Distribusi PNS di Lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes	93
2. Distribusi PNS menurut Jabatan	94
3. Distribusi PNS menurut Golongan	94
4. Distribusi PNS berdasarkan Jenjang dan Jenis Pendidikan	95
5. Distribusi PNS berdasarkan Kategori Usia	96
D. Inventaris	97
BAB V. Penutup	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Anggaran Pusat untuk Pengadaan Obat, Perbekkes dan Vaksin Tahun Anggaran 2012-2013	10
Tabel 2.	Tenaga Kefarmasian Pengelola Obat Berprestasi Tahun 2013	25
Tabel 3.	Pembekalan Tenaga Farmasi tentang Pelayanan Kefarmasian untuk ODHA	30
Tabel 4.	Rumah Sakit yang menjadi Tempat Pelaksanaan Kegiatan IFRS Pelayanan Farmasi Klinik	31
Tabel 5.	Data Alat Kesehatan dan PKRT yang Terdaftar di Kementerian Kesehatan Tahun 2013	38
Tabel 6.	Izin Edar Alkes dan PKRT Tahun 2013 per Bulan	43
Tabel 7.	Jumlah Sertifikat Produksi Alkes, PKRT dan Izin Penyalur Alkes Tahun 2013 per Bulan	44
Tabel 8.	Jumlah Sertifikat Produksi dan IPAK Tahun 2013	45
Tabel 9.	Surat Keterangan Tahun 2013 per Bulan	45
Tabel 10.	Surat Keterangan Tahun 2013	45
Tabel 11.	Daftar Nama Bahan Baku Obat dan Bahan Baku Obat Tradisional yang Telah Siap Diproduksi di Dalam Negeri	48
Tabel 12.	Sepuluh Obat Terbanyak Dalam Pasar Farmasi Nasional	54
Tabel 13.	Pasar Farmasi Nasional Berdasarkan Provinsi.....	54
Tabel 14.	Jumlah Industri Farmasi per Provinsi Tahun 2011-2013	57
Tabel 15.	Jumlah Industri Obat Tradisional per Provinsi Tahun 2011-2013	59
Tabel 16.	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional per Provinsi Tahun 2011-2013	61
Tabel 17.	Jumlah Sarana Produksi Alat Kesehatan per Provinsi Tahun 2011-2013.....	62
Tabel 18.	Jumlah Sarana Produksi Perbekalan Kesehatan dan Rumah Tangga per Provinsi Tahun 2011-2013	63
Tabel 19.	Jumlah Industri Kosmetika per Provinsi Tahun 2011-2013.....	64
Tabel 20.	Jumlah Pedagang Besar Farmasi per Provinsi Tahun 2011-2013.....	67
Tabel 21.	Jumlah Apotek per Provinsi Tahun 2011-2013	69
Tabel 22.	Jumlah Toko Obat per Provinsi Tahun 2011-2013	70
Tabel 23.	Jumlah Sarana Penyalur Alat Kesehatan per Provinsi Tahun 2011-2013.....	72
Tabel 24.	Jumlah Sarana Cabang Penyalur Alat Kesehatan per Provinsi Tahun 2012-2013	74
Tabel 25.	Perbandingan BMN di Lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes 2011-2013	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Berdasarkan Permenkes RI No. 1144/Menkes/Per/VIII/2010	3
Gambar 2.	Jumlah Item Obat Generik yang Diatur Oleh Pemerintah Tahun 2010-2013	8
Gambar 3.	<i>e-Procurement Award</i> 2013	9
Gambar 4.	Ketersediaan Obat dan Vaksin dalam Bulan pada Tahun 2010-2014	12
Gambar 5.	Persentase Penggunaan Obat Generik Tahun 2010-2013	14
Gambar 6.	Struktur Organisasi IF Kab/Kota Tahun 2013	17
Gambar 7.	Penanggung Jawab IF Kab/Kota Tahun 2013	18
Gambar 8.	Luas Tanah IF Kab/Kota 2013	19
Gambar 9.	Luas Bangunan IF Kab/Kota 2013	20
Gambar 10.	Sarana Pengamanan IF Kab/Kota 2013	21
Gambar 11.	Sarana Distribusi IF Kab/Kota 2013	22
Gambar 12.	Sarana Penyimpanan IF Kab/Kota 2013	23
Gambar 13.	Sarana Penunjang IF Kab/Kota 2013	23
Gambar 14.	Sarana Administrasi IF Kab/Kota 2013	24
Gambar 15.	Capaian Indikator Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pemerintah yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar	27
Gambar 16.	Data Intervensi DitBinyanfar Dalam Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit	28
Gambar 17.	Puskesmas Perawatan yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar	34
Gambar 18.	Penggunaan Obat Rasional di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Pemerintah	36
Gambar 19.	Produk Alat Kesehatan dan PKRT yang Beredar Memenuhi Persyaratan Keamanan, Mutu dan Manfaat Tahun 2010-2014	40
Gambar 20.	Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT yang Memenuhi Persyaratan CPAKB dan CPPKRTB Tahun 2010-2014	41
Gambar 21.	Sarana Distribusi Alat Kesehatan yang Memenuhi Persyaratan CDAKB Tahun 2010-2014	42
Gambar 22.	Izin Edar Alkes dan PKRT per Bulan	44
Gambar 23.	Jumlah Izin Edar Alkes dan PKRT Tahun 2012	44
Gambar 24.	Jumlah Sertifikat Produksi Alkes, PKRT dan IPAK Tahun 2013	45
Gambar 25.	Persentase Surat Keterangan Tahun 2013	46
Gambar 26.	Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional Produksi di Dalam Negeri	48
Gambar 27.	Standar Produk Kefarmasian yang Disusun Dalam Rangka Pembinaan Produksi dan Distribusi	50
Gambar 28.	Sebaran Izin Pada Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional Tahun 2013 ..	51
Gambar 29.	Sebaran Izin Pada Sub Direktorat Produksi Kosmetik dan Makanan Tahun 2013	52
Gambar 30.	Sebaran Izin Pada Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus Tahun 2013	52
Gambar 31.	Grafik Proyeksi Pasar Farmasi Indonesia 2012-2020	53
Gambar 32.	Grafik Cakupan Sarana Produksi di Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tingkat Nasional Tahun 2011-2013	56
Gambar 33.	Grafik Jumlah Industri Farmasi per Provinsi Tahun 2011 – 2013	57
Gambar 34.	Grafik Jumlah Industri Obat Tradisional per Provinsi Tahun 2011-2013	59
Gambar 35.	Grafik Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional per Provinsi Tahun 2011-2013	60

Gambar 36.	Grafik Jumlah Sarana Produksi Alat Kesehatan per Provinsi Tahun 2011-2013	62
Gambar 37.	Grafik Jumlah Sarana Produksi Perbekalan Kesehatan dan Rumah Tangga per Provinsi Tahun 2011-2013	63
Gambar 38.	Grafik Jumlah Industri Kosmetika per Provinsi Tahun 2011-2013	64
Gambar 39.	Grafik Cakupan Sarana Distribusi di Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2013	66
Gambar 40.	Grafik Jumlah Pedagang Besar Farmasi per Provinsi Tahun 2011-2013	67
Gambar 41.	Grafik Jumlah Apotek per Provinsi Tahun 2011-2013	68
Gambar 42.	Grafik Jumlah Toko Obat per Provinsi Tahun 2011-2013	70
Gambar 43.	Grafik Jumlah Sarana Penyalur Alat Kesehatan per Provinsi Tahun 2011-2013	72
Gambar 44.	Grafik Jumlah Sarana Cabang Penyalur Alat Kesehatan per Provinsi Tahun 2012-2013	74
Gambar 45.	Grafik SDM Kefarmasian yang Bekerja di Dinas Kesehatan	75
Gambar 46.	Grafik SDM Kefarmasian yang Bekerja di RSUD	77
Gambar 47.	Grafik SDM Kefarmasian yang Bekerja di Puskesmas	77
Gambar 48.	Aplikasi STRA Online	78
Gambar 49.	Aplikasi Pemetaan Sarana Kefarmasian	79
Gambar 50.	Laporan Realisasi Anggaran Kantor Pusat Ditjen Binfar dan Alkes Tahun 2011-2013	80
Gambar 51.	Laporan Realisasi Anggaran Dekonsentrasi Ditjen Binfar dan Alkes Tahun 2011-2013	82
Gambar 52.	Grafik Perbandingan Jumlah PNS di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2011-2013	92
Gambar 53.	Grafik Perbandingan Distribusi Jumlah PNS Berdasarkan Unit Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2011-2013	93
Gambar 54.	Grafik Distribusi Jumlah PNS menurut Jabatan di Lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes Tahun 2013	94
Gambar 55.	Grafik Distribusi Jumlah PNS menurut Golongan di Lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes Tahun 2013	94
Gambar 56.	Grafik Perbandingan Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes Tahun 2013	96
Gambar 57.	Grafik Perbandingan Distribusi Jumlah PNS berdasarkan Kategori Usia di Lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012–2013	97
Gambar 58.	Grafik Aset BMN di Lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes Tahun 2013	98

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan 2011-2013	105
Lampiran 2	Data Struktur Organisasi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia	119
Lampiran 3	Data Riwayat Bangunan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia	131
Lampiran 4	Perbandingan SDM di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia	143
Lampiran 5	Data Sarana Penyimpanan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia	155
Lampiran 6	Data Sarana Pengamanan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia	167
Lampiran 7	Data Sarana Penunjang Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia	179
Lampiran 8	Data Sarana Distribusi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia	191
Lampiran 9	Data Sarana Administrasi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia	203
Lampiran 10	Alokasi Dekonsentrasi Ditjen Binfar dan Alkes Tahun 2011-2013	215

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan dan Strategi

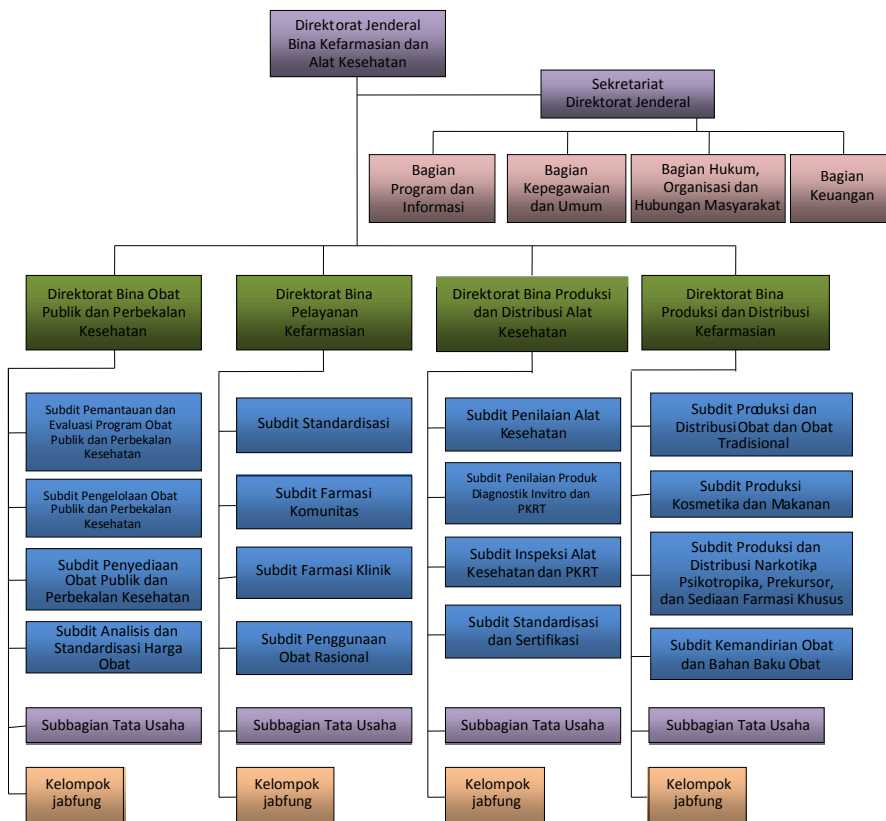
Sasaran hasil dari Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32/Menkes/SK/I/2013 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014 adalah meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat dengan indikator programnya yakni persentase ketersediaan obat dan vaksin sebesar 100% di tahun 2014. Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka dilakukan kegiatan yang meliputi: peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan, peningkatan produksi dan distribusi alat kesehatan, peningkatan pelayanan kefarmasian, peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kefarmasian dan alat kesehatan. Dalam upaya peningkatan program tersebut diperlukan dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis pada program kefarmasian dan alat kesehatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

B. Gambaran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Adapun bagan Struktur Organisasi sesuai Permenkes RI Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Berdasarkan Permenkes RI No. 1144/Menkes/Per/VIII/2010

BAB II

PROFIL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan periode 2010-2014 mengamanatkan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk dapat meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Untuk itu, dibangun kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mencapai hal tersebut, yaitu kebijakan peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan, peningkatan produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), peningkatan pelayanan kefarmasian, peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian dengan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Operasionalisasi kebijakan-kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari tersedianya data dan informasi yang lengkap, akurat dan mutakhir terkait bidang kefarmasian dan alat kesehatan. Ketersediaan data dan informasi tidak hanya penting dalam tahap perumusan suatu kebijakan, namun juga pada tahap implementasi dan tahap evaluasi. Untuk itu, perlu dirancang berbagai strategi dalam mewujudkan ketersediaan data dan informasi tersebut, mulai dari *entry point*, manajemen, pemanfaatan, hingga publikasinya. Data dan informasi yang menjadi sumber dalam penyusunan profil ini didapat dari seluruh Dinas Kesehatan Provinsi di Indonesia dan Kegiatan Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan tingkat Nasional, serta capaian hasil aktivitas Unit Eselon II di lingkungan

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Melalui profil ini hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan program obat dan perbekalan kesehatan sampai dengan tahun 2013 yang berupa cakupan-cakupan program, hasil-hasil kajian dan cakupan sarana produksi dan distribusi kefarmasian dan alat kesehatan digambarkan dalam bentuk narasi, tabel maupun grafik.

Penyusunan Profil Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2013 ini bertujuan untuk memberikan data dan informasi yang berbasis bukti terkait pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang dibatasi pengambilan datanya mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sebagai referensi dalam perumusan kebijakan dan perencanaan bagi pimpinan dan sebagai referensi bagi pelaksana kegiatan di bidang kesehatan.

Muatan Profil Kefarmasian dan Alat Kesehatan ini diarahkan kepada data dan informasi yang mendukung pencapaian indikator Rencana Strategis (Renstra) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan hingga tahun 2013 yang mencakup aktivitas sebagai berikut:

1. peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan
2. peningkatan produksi dan distribusi alat kesehatan
3. peningkatan pelayanan kefarmasian
4. peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian
5. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kefarmasian dan alat kesehatan

BAB III

PENCAPAIAN

PROGRAM KEFARMASIAN DAN

ALAT KESEHATAN

A. Peningkatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kebijakan Pemerintah menyangkut peningkatan akses obat telah ditetapkan antara lain dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Indonesia Sehat 2010, Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Kebijakan Obat Nasional (KONAS). Dalam upaya pelayanan kesehatan, ketersediaan obat dalam jenis yang lengkap, jumlah yang cukup dan terjamin khasiat, aman, dan bermutu dengan harga terjangkau serta mudah diakses adalah sasaran yang harus dicapai. Salah satu tujuan KONAS yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 adalah menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat terutama obat esensial dengan ruang lingkup yang mencakup pembiayaan, ketersediaan serta pemerataan obat bagi masyarakat. Di dalam KONAS dijelaskan bahwa akses masyarakat terhadap obat esensial dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu penggunaan obat rasional, harga yang terjangkau, pembiayaan yang berkelanjutan dan sistem pelayanan kesehatan serta suplai obat yang dapat menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan.

Salah satu sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam Rencana Strategis 2010-2014 adalah meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat dengan indikator sasarnya yakni persentase ketersediaan obat dan vaksin

sebesar 100% pada tahun 2014. Hal ini diwujudkan melalui upaya penyediaan obat dan vaksin di tingkat pelayanan kesehatan dasar yang senantiasa dilaksanakan secara berkelanjutan (*sustainable effort*) yang sudah dilakukan sejak dibentuknya Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Indikator ini juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan di lingkungan Unit Eselon I Kementerian Kesehatan RI.

Upaya Pemerintah Pusat untuk memperluas cakupan dan pemerataan akses obat dan perbekalan kesehatan juga telah dilakukan dengan pemberian Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penyediaan obat dan perbekalan kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota yang realisasinya dilaksanakan oleh masing-masing kabupaten/kota dan telah dimulai sejak Tahun Anggaran 2009. Data Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian dapat dilihat dalam LAMPIRAN 1.

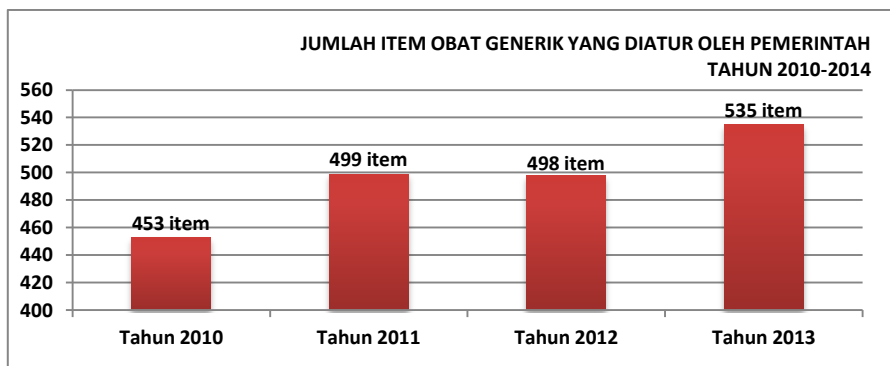
Program pengadaan obat, perbekalan kesehatan dan vaksin di tingkat Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai amanat KONAS sebagai upaya pembiayaan yang berkelanjutan sehingga Pemerintah Pusat diharapkan dapat menjamin ketersediaan obat, perbekalan kesehatan dan vaksin untuk program imunisasi dasar hingga di tingkat pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas). Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan obat melalui pengadaan obat-obat program seperti Obat Program Penyakit Menular, Filariasis, AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PMS), TB Paru, Flu Burung, Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak, Gizi, Obat Haji, Obat *Buffer* untuk Bencana/KLB dan Obat *Buffer Stock* Pusat dan Provinsi sebagai stok penyangga di tingkat nasional dan provinsi yang digunakan untuk mengantisipasi kekosongan obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan dasar/Puskesmas dan pada saat terjadinya kejadian luar biasa (KLB)/bencana. Selain itu juga dilakukan pengadaan vaksin antara lain Vaksin Anti Rabies, Vaksin Reguler, Vaksin Haji dan Vaksin Umroh.

Dalam rangka mencapai sasaran hasil berupa peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melakukan upaya antara lain dengan kebijakan rasionalisasi harga obat generik, penyediaan obat dan vaksin, penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan memfasilitasi proses realokasi Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian untuk meningkatkan sarana dan prasarana instalasi farmasi.

1. Kebijakan Rasionalisasi Harga Obat Generik

Kebijakan rasionalisasi harga obat generik dilakukan untuk menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat. Rasionalisasi harga obat generik dilakukan berdasarkan pertimbangan dan masukan dari Tim Evaluasi Harga Obat, yang beranggotakan para ahli/pakar, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Pemerintah (Kementerian Kesehatan dan Badan POM), mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harga obat antara lain bea masuk bahan baku obat, tingkat inflasi, kenaikan harga bahan baku obat, dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Jumlah item obat generik yang diatur Pemerintah senantiasa mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Penetapan harga obat generik terakhir dilakukan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436/Menkes/SK/XI/2013 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Generik.



Sumber: Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekkes

Gambar 2. Jumlah Item Obat Generik yang Diatur Oleh Pemerintah Tahun 2010-2013

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, sejak tahun 2013 penetapan harga obat untuk pengadaan pemerintah dilaksanakan melalui lelang harga satuan (*e-catalogue*), dengan harapan agar pengadaan obat pemerintah lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka menjamin tersedianya obat yang aman, bermutu dan berkhasiat. Lelang harga obat melalui *e-catalogue* merupakan kerjasama antara Kementerian Kesehatan dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Dengan telah terbangunnya sistem *e-catalogue* obat, maka Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I) tidak perlu melakukan proses pelelangan, namun dapat langsung memanfaatkan sistem *e-catalogue* obat dalam pengadaan obat dengan prosedur *e-purchasing*.

Pengadaan obat melalui *e-purchasing* maupun secara manual berdasarkan *e-catalogue* telah dilaksanakan sejak tahun 2013 untuk 196 item obat dalam 327 sediaan generik, dan melibatkan kurang lebih 29 industri farmasi. Sampai dengan bulan November 2013, terdapat 432 Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Pemerintah yang telah menggunakan *e-catalogue* dalam pengadaan obat dengan prediksi terjadi penghematan sebesar 30%. Atas pengembangan *e-catalogue* obat generik dan partisipasi dalam penerapannya, Kementerian Kesehatan menerima *e-Procurement Award* dari LKPP.



Sumber: Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekkes
Gambar 3. *e-Procurement Award* 2013

2. Penyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan Vaksin

Program peningkatan ketersediaan obat dan vaksin dilaksanakan sebagaimana amanat yang juga tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Obat dan vaksin adalah komoditi kesehatan yang menjadi salah satu kebutuhan dasar dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan merupakan barang publik yang perlu dijamin ketersediaannya dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan.

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan pengadaan obat, perbekalan kesehatan dan vaksin dengan mekanisme perhitungan kebutuhan obat, perbekalan kesehatan dan vaksin secara *bottom-up* yakni dengan memperhitungkan cakupan ketersediaan obat, perbekalan kesehatan dan vaksin terhadap jumlah penduduk miskin dan seluruh penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik dengan nilai obat perkapita yang digunakan. Rencana Kebutuhan Obat (RKO) disusun untuk mendapatkan data kebutuhan obat mulai dari tingkat kabupaten/kota yang direkapitulasi di tingkat provinsi dan diteruskan ke tingkat Pemerintah Pusat. Nilai alokasi dan realisasi pengadaan obat, perbekalan kesehatan dan vaksin pada tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

DATA ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PENGADAAN OBAT, VAKSIN DAN PERBEKALAN KESEHATAN TAHUN 2012 DAN 2013

NO	PAKET PENYEDIAAN	2012		2013	
		ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI
1	Penyediaan Vaksin Reguler	565,000,000,000	564,074,280,418	475,764,603,000	475,764,603,292
2	Penyediaan Obat Buffer Stok Provinsi	20,750,000,000	20,121,792,674	15,167,557,000	1,642,136,796
3	Penyediaan Obat Buffer Stok Pusat			3,864,152,000	1,842,299,882
4	Penyediaan Obat Buffer Bencana/KLB	2,611,600,000	2,294,658,168	4,318,329,000	1,398,590,665
5	Penyediaan Obat Penyakit Menular	19,100,000,000	19,037,692,421	17,998,223,000	13,100,422,795
6	Penyediaan Obat Filariasis	16,000,000,000	15,970,178,598	7,920,724,000	5,628,783,165
7	Penyediaan Obat AIDS dan PMS Paket 1	79,000,000,000	78,375,121,600	229,942,938,000	224,818,659,253
8	Penyediaan Obat AIDS dan PMS Paket 2	57,500,000,000	56,998,665,350		

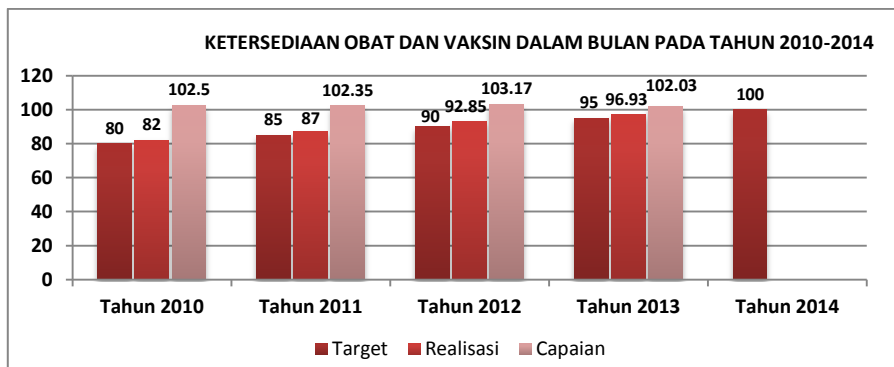
NO	PAKET PENYEDIAAN	2012		2013	
		ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI
9	Penyediaan Obat Malaria	35,000,000,000	34,936,000,000	39,464,947,000	38,026,163,154
10	Penyediaan Obat TB Paru	120,000,000,000	119,503,434,358	69,743,682,000	69,218,648,906
11	Penyediaan Vaksin Flu Burung	7,200,000,000	7,004,745,000	-	-
12	Penyediaan Vaksin Anti Rabies (VAR)	-	-	-	-
13	Penyediaan Reagen Screening Darah	139,700,000,000	135,458,623,200	124,995,399,000	123,318,256,200
14	Penyediaan Obat dan Perbekkes Haji	27,500,000,000	27,098,843,994	24,284,728,000	23,177,200,112
15	Penyediaan Obat dan Perbekkes Emergency Haji			2,500,000,000	2,481,259,240
16	Penyediaan Obat Kesehatan Ibu	2,500,000,000	2,495,999,605	820,000,000	645,009,235
17	Penyediaan Obat Kesehatan Anak	11,500,000,000	11,440,580,415	8,714,129,000	6,403,765,981
18	Penyediaan Obat Gizi	29,000,000,000	28,550,756,993	24,999,079,000	20,706,817,234
19	Penyediaan Obat Poliklinik Depkes Pusat	1,000,000,000	868,574,491	892,824,000	3,372,610
20	Penyediaan Vaksin Haji	82,500,000,000	82,075,000,000	176,404,878,000	176,216,177,500
21	Penyediaan Vaksin Umrah				
22	Operasi Surya Baskara Jaya	2,800,000,000	1,652,311,374	2,678,472,000	1,027,001,122
23	Penyediaan Vaksin Influenza	27,000,000,000	-	-	-
24	Penyediaan Vaksin Inactivated Polio (IPV)	-	-	9,478,815,000	9,049,611,824
25	Penyediaan Vaksin DPT-HB-Hib	-	-	27,669,172,000	27,609,442,707
26	Penyediaan Obat Anti Psikosis / Kesehatan Jiwa	-	-	25,891,904,000	21,742,060,960
27	Penyediaan Obat Antipsikosis (APBNP)	22,916,679,000	22,782,771,000	-	-
28	Penyediaan Vaksin Meningitis Haji & Umrah (APBNP)	162,897,670,000	108,067,986,000	-	-
29	Penyediaan Reagen NAT (APBNP)	24,970,650,000	24,479,730,000	56,000,000,000	51,922,530,000
30	Penyediaan Vaksin Meningitis Umrah (Pemanfaatan Realokasi Anggaran Kemenkes 2013)	-	-	37,600,000,000	37,519,475,400
31	Penyediaan Tambahan Obat IMS dan OI untuk Penderita HIV/AIDS (Pemanfaatan Realokasi Anggaran Kemenkes 2013)	-	-	17,813,191,000	14,266,923,000
JUMLAH		1,456,446,599,000	1,363,287,745,659	1,404,927,746,000	1,347,529,211,033

Sumber: Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekkes

Tabel 1. Anggaran Pusat untuk Pengadaan Obat, Perbekkes dan Vaksin Tahun Anggaran 2012-2013

Pada tahun 2013, jumlah paket pengadaan sebanyak 24 paket termasuk yang menggunakan dana APBNP dengan realisasi anggaran sebesar 95,91%. Realisasi terbesar pada paket pengadaan vaksin reguler sebesar 100% dan realisasi terkecil ada pada paket pengadaan obat Poliklinik Depkes Pusat yaitu sebesar 0,38%. Sedangkan pada tahun 2012 jumlah paket pengadaan sebanyak 22 paket dengan realisasi anggaran sebesar 93,60%.

Tingkat ketersediaan obat di instalasi farmasi kabupaten/kota mencerminkan tingkat ketersediaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar yang dikelola oleh tenaga kefarmasian di instalasi farmasi kabupaten/kota.



Sumber: Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekkes

Gambar 4. Ketersediaan Obat dan Vaksin dalam Bulan pada Tahun 2010-2014

Sesuai target indikator utama Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yaitu persentase ketersediaan obat dan vaksin adalah 100% di tahun 2014 atau setara dengan 18 bulan dimana perhitungan kebutuhan ini mencakup perhitungan dari riwayat pemakaian rata-rata pada tahun yang lalu dan kebutuhan selama waktu tunggu dan stok penyangga. Adapun target indikator persentase ketersediaan obat dan vaksin di tahun 2013 adalah 95% atau setara dengan 17,10 bulan. Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa Ketersediaan obat dan vaksin (135 item obat dan 9 item vaksin) setiap tahun mengalami peningkatan dan pada tahun 2013 mencapai 96,93% atau setara dengan 17,45 bulan. Capaian ini

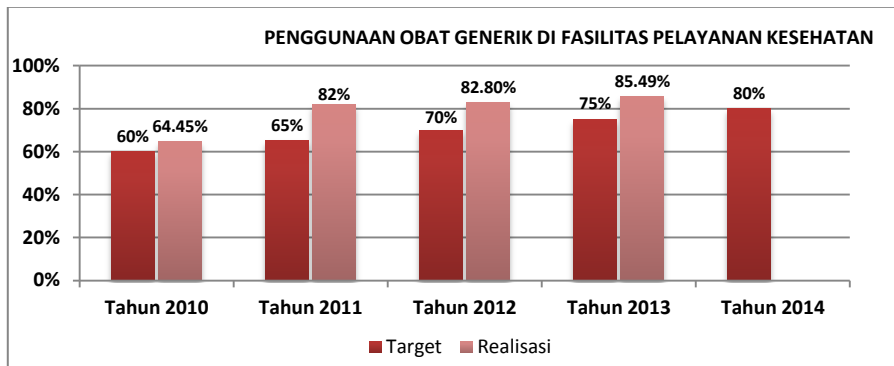
meningkat dibandingkan dengan tahun 2012 dengan tingkat capaian sebesar 102,03%. Ini menandakan bahwa target capaian indikator persentase ketersediaan obat dan vaksin melebihi dari target yang sudah direncanakan dalam Renstra 2010-2014.

Dalam Kebijakan Obat Nasional (KONAS), Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan obat generik antara lain dengan kebijakan yang mewajibkan perusahaan farmasi nasional (terutama BUMN) untuk memproduksi obat generik, mencantumkan nama generik pada label obat dengan nama dagang, kewajiban menggunakan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan menyediakan pedoman pengawasannya. Kemudian untuk menjamin ketersediaan vaksin, PT. Biofarma sebagai pusat produksi vaksin saat ini dapat mencukupi kebutuhan vaksin secara nasional (terutama imunisasi dasar) kecuali vaksin *meningitis meningococcal* dan vaksin anti rabies disamping terus melakukan upaya di bidang penelitian dan pengembangan vaksin. Meskipun demikian terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin, yakni kenyataan bahwa sebagian besar bahan baku yang digunakan untuk produksi obat masih impor, sistem pengelolaan obat di instalasi farmasi milik Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum efektif dan efisien serta sistem pendistribusian obat yang terkendala letak geografis atau daerah kepulauan/kondisi demografis, kurangnya sarana prasarana distribusi dan kurangnya dukungan biaya operasional.

Permasalahan tersebut dapat menjadi peluang jika disikapi dengan positif baik oleh pemerintah maupun swasta, antara lain peluang untuk mengembangkan sistem pengelolaan dan pendistribusian obat dan vaksin yang baik secara nasional, kebijakan yang mendukung perkembangan industri bahan baku obat karena ketergantungan terhadap impor bahan baku dapat menyebabkan tidak stabilnya ketersediaan obat nasional dan fluktuasi harga obat karena pengaruh harga bahan baku di pasar internasional.

3. Penggunaan Obat Generik di Pelayanan Kesehatan Pemerintah

Peningkatan penggunaan obat generik, baik pada sarana pelayanan kesehatan dasar maupun pada pelayanan kesehatan rujukan, menunjukkan bahwa tenaga kesehatan telah memberikan respon yang positif terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Kesehatan Pemerintah. Gambaran penggunaan obat generik di puskesmas dan RS Pemerintah dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber: Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekkes
Gambar 5. Persentase Penggunaan Obat Generik Tahun 2010-2013

Persentase penggunaan obat generik di sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, baik di sarana pelayanan kesehatan dasar (puskesmas) maupun di pelayanan kesehatan rujukan (rumah sakit). Tahun 2010 capaian penggunaan obat generik di puskesmas sebesar 75,61% dan di rumah sakit sebesar 53,35% dengan rata-rata 64,45%. Tahun 2011, capaian penggunaan obat generik di puskesmas sebesar 96,73% dan di rumah sakit sebesar 66,45% dengan rata-rata 81,59%. Tahun 2012, capaian penggunaan obat generik di puskesmas sebesar 95% dan di rumah sakit sebesar 70,61%, dengan rata-rata penggunaan obat generik sebesar 82,80%. Tahun 2013, capaian penggunaan obat generik di puskesmas sebesar 96,11% dan di rumah sakit

sebesar 74,87%, dengan rata-rata penggunaan obat generik sebesar 85,49%.

4. Realokasi Dana Alokasi Khusus Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2013

Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2013 sebanyak 442 kabupaten/kota yang tersebar di 32 provinsi. Ada 1 provinsi yang tidak mendapatkan Dana Alokasi Khusus yaitu Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan Petunjuk Teknis tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2013, kabupaten/kota dapat mengajukan realokasi penggunaan Dana DAK untuk pembangunan baru, rehabilitasi bangunan dan pengadaan sarana dan prasarana instalasi farmasi apabila tingkat kecukupan obat esensial generik di instalasi farmasinya sudah terpenuhi selama 18 bulan. Pada tahun 2013, ada 50 kabupaten/kota di Indonesia yang mengajukan realokasi DAK Pelayanan Kefarmasian, 23 kabupaten/kota diantaranya mengajukan realokasi untuk rehabilitasi instalasi farmasi atau pembangunan baru instalasi farmasi. Adapun rincian peruntukan realokasi DAK tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Bangun gudang	: 4 kabupaten/kota
Rehabilitasi dan perluasan IF	: 19 kabupaten/kota
Sarana penyimpanan	: 29 kabupaten/kota
Sarana distribusi	: 17 kabupaten/kota
Sarana pengaman	: 18 kabupaten/kota
Sarana pengolahan data	: 24 kabupaten/kota
Sarana komunikasi	: 3 kabupaten/kota

Dari data tersebut diatas diketahui bahwa realokasi penggunaan dana DAK tahun 2013 Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian yang paling banyak diusulkan oleh kabupaten/kota adalah untuk sarana penyimpanan (58,00%) sedangkan yang paling sedikit diusulkan adalah untuk sarana komunikasi (6,00%). Tidak ada kabupaten/kota yang menggunakan realokasi DAK untuk pengadaan semua jenis sarana pendukung instalasi farmasi sekaligus. Bila dilihat dari nilai anggarannya, maka sarana pendukung instalasi farmasi

menjadi prioritas kabupaten/kota dalam melakukan realokasi penggunaan DAK tahun 2013, yaitu sebesar Rp. 12.708.435.540,- atau 1,15% dari alokasi total.

Rendahnya jumlah dan kualitas validitas laporan DAK yang masuk menyebabkan sulitnya dilakukan evaluasi secara menyeluruh akan pelaksanaan dan realisasi DAK tahun 2013 sehingga perlu dipertimbangkan adanya mekanisme *reward and punishment* bagi kabupaten/kota yang akan diperhitungkan dalam formula perhitungan indeks teknis yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan.

B. Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah membawa implikasi terhadap organisasi kesehatan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instalasi Farmasi di provinsi/kab/kota. Sejalan dengan misi Undang-Undang tersebut, KONAS Tahun 2006 menyebutkan bahwa keberadaan gudang farmasi kabupaten/kota diubah namanya menjadi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK).

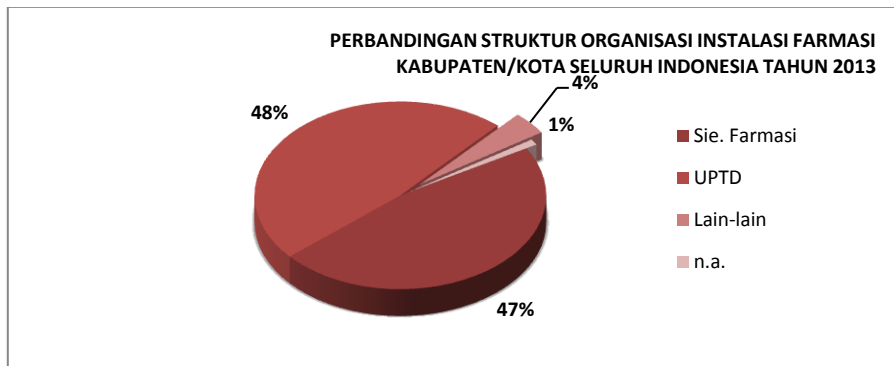
Untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaan obat publik, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan merumuskan kebijakan satu pintu (*one gate policy*) bersama para *stakeholders*. Untuk mendukung akselerasi kebijakan tersebut, perlu membentuk Tim Perencanaan Obat Terpadu di kabupaten/kota. Adapun fungsi yang harus dijalankan meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dengan unit kerja terkait. Pengelolaan mencakup seluruh obat publik dan perbekalan kesehatan termasuk vaksin yang penyediaannya berasal dari berbagai sumber anggaran.

Dari hasil pemantauan yang dilakukan sampai dengan tahun 2013, dilakukan penilaian pengelolaan obat di kabupaten/kota yang meliputi komponen sumber sumber daya manusia, sarana prasarana gudang sebagai

tempat penyimpanan, dan biaya operasional di instalasi farmasi kabupaten/kota dengan hasil sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi IFK

Pembentukan organisasi kesehatan khususnya kefarmasian di daerah perlu mempertimbangkan fungsi organisasi, kapasitas SDM dan kesiapan sarana pendukung dalam melaksanakan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan. Organisasi tersebut juga harus mampu membuat perencanaan operasional, serta mengembangkan berbagai inisiatif baru untuk menjabarkan visi Kementerian Kesehatan.



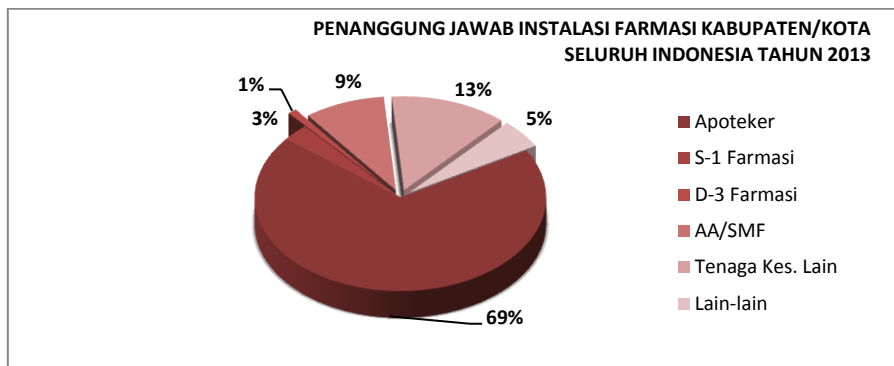
Sumber: Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekkes
Gambar 6. Struktur Organisasi IF Kab/Kota Tahun 2013

Kedudukan organisasi teknis pengelolaan barang farmasi yang akan dibentuk mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Namun pada implementasinya, masih banyak provinsi/kabupaten/kota yang belum membentuk struktur organisasi tersebut. Pada tahun 2013 secara nasional sebanyak 48% (238 kab/kota) instalasi farmasi kabupaten/kota sudah berstatus Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), sedangkan sebanyak 47% (233 kab/kota) instalasi farmasi masih dikelola oleh Seksi Farmasi di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk pengelolaan obat yang masih dikelola unit kerja selain seksi farmasi atau UPTD sebanyak 4% (18 kab/kota).

2. Sumber Daya Manusia Pengelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Gambaran mengenai situasi sumber daya manusia sebagai pengelola obat publik dan perbekalan kesehatan di instalasi farmasi dikelompokkan menjadi Apoteker dan Non Apoteker (tenaga kesehatan lain) sebagai penanggung jawab instalasi farmasi kab/kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, menjelaskan bahwa pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan.

Pada tahun 2013, jumlah kabupaten/kota yang sudah mempunyai apoteker sebagai penanggung jawab instalasi farmasi adalah 348 kab/kota atau 69%. Capaian tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu sebanyak 337 kab/kota. Dengan demikian ada peningkatan sebanyak 11 kab/kota.



Sumber: Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekkes
Gambar 7. Penanggung Jawab IF Kab/Kota Tahun 2013

3. Sarana dan Prasarana Penyimpanan Obat Publik Dan Perbekalan Kesehatan

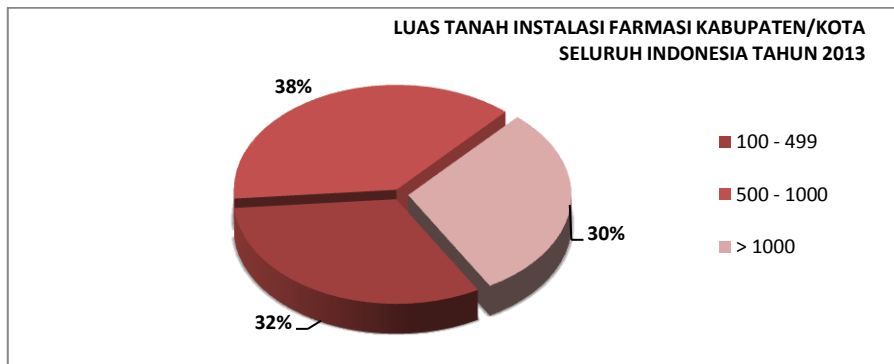
Penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan yang baik bertujuan untuk memelihara mutu obat, menghindari penggunaan yang tidak

bertanggung jawab, menjaga kelangsungan persediaan dan memudahkan pencarian dan pengawasan.

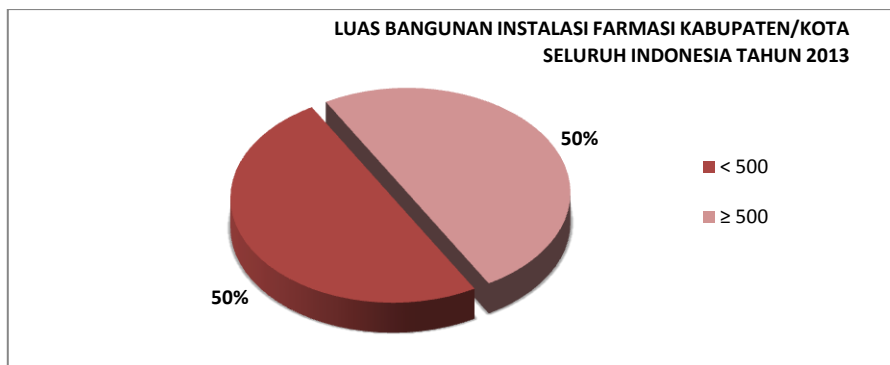
Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya sarana dan prasarana yang ada di instalasi farmasi. Adapun sarana yang minimal sebaiknya tersedia adalah sebagai berikut:

- a) Gedung, dengan luas $\geq 500 \text{ m}^2$
- b) Kendaraan roda dua dan roda empat
- c) Komputer dan Printer
- d) Telepon dan Faksimili
- e) Sarana penyimpanan, seperti: rak, pallet, lemari obat, dan lain-lain.

Gambaran mengenai sarana dan prasarana penyimpanan obat publik dan perbekalan kesehatan di instalasi farmasi dikelompokkan menjadi: luas tanah, luas bangunan.



Sumber: Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekkes
Gambar 8. Luas Tanah IF Kab/Kota 2013

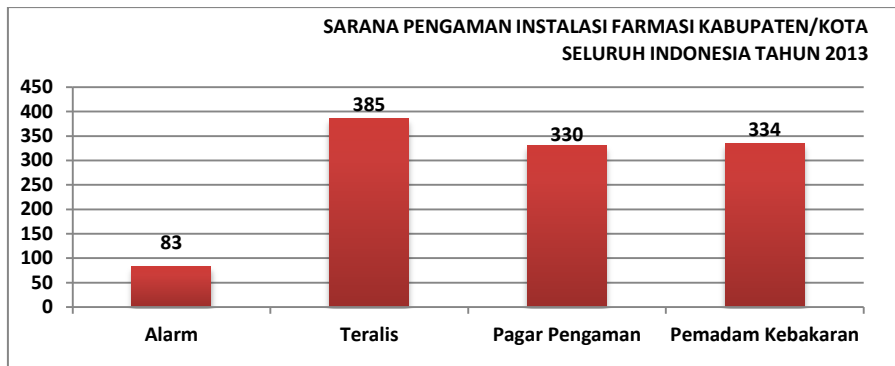


Sumber: Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekkes
Gambar 9. Luas Bangunan IF Kab/Kota 2013

Jumlah kab/kota yang mempunyai luas tanah 100-499 m² sebanyak 32% (153 kab/kota), luas tanah 500-1000 m² sebanyak 38% (181 kab/kota) dan luas tanah > 1000 m² sebanyak 30% (140 kab/kota). Sementara untuk luas bangunan baik yang ≥ 500 m² maupun < 500 m² masing-masing sebanyak 50% (249 kab/kota). Detail luas tanah dan luas bangunan dapat dilihat pada LAMPIRAN 3.

4. Pengamanan

Sarana pengamanan gedung sangat penting dimiliki oleh instalasi farmasi untuk menjaga obat dari pencurian dan bahaya kebakaran. Untuk jenis dan jumlah teralis disesuaikan dengan bentuk bangunan termasuk pintu, jendela dan plafon dengan spesifikasi terbuat dari bahan besi dengan ketebalan 12 mm, untuk jenis pagar dibuat kombinasi tembok yang terbuat dari bata merah, batako atau bahan lain yang cukup kuat dan kawat berduri atau kawat harmonika juga dapat digunakan pagar hidup dari tanaman yang mudah tumbuh dan mudah dipelihara serta mempunyai kerapatan yang dapat mencegah masuknya ternak/hewan peliharaan dengan jumlah yang disesuaikan dengan luas tanah. Sedangkan untuk alat pemadam kebakaran selain digunakan jenis tabung CO² juga dapat digunakan pasir dan karung.

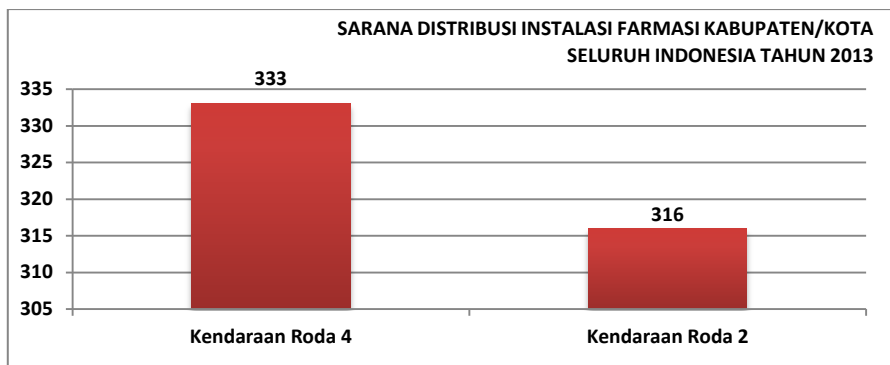


Sumber: Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekkes
Gambar 10. Sarana Pengamanan IF Kab/Kota 2013

Pada tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah kab/kota yang memiliki sarana pengamanan di instalasi farmasinya. Untuk alarm sudah dimiliki oleh 83 kab/kota dimana tahun sebelumnya hanya dimiliki oleh 68 kab/kota. Teralis dimiliki oleh 385 kab/kota dimana tahun sebelumnya hanya dimiliki oleh 332 kab/kota. Pagar pengaman dimiliki oleh 330 kab/kota dimana tahun sebelumnya hanya dimiliki oleh 280 kab/kota. Alat pemadam kebakaran sudah dimiliki oleh 334 kab/kota dimana tahun sebelumnya hanya dimiliki oleh 304 kab/kota. Detail sarana pengamanan dapat dilihat pada LAMPIRAN 6.

5. Penyimpanan dan Distribusi

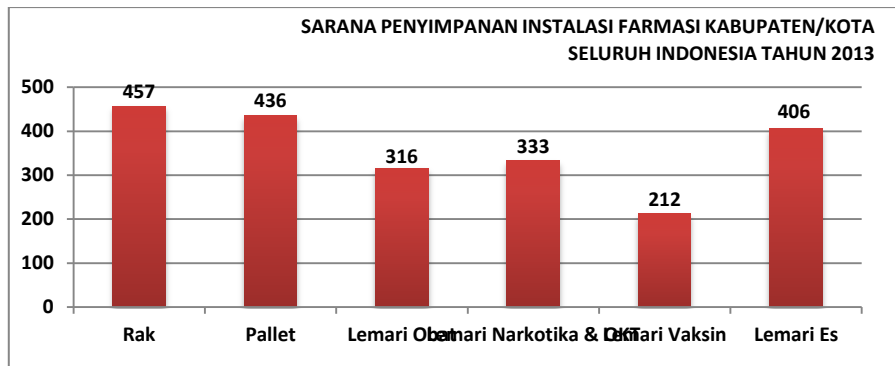
Kegiatan penyimpanan dan distribusi memegang peranan penting dalam pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan. Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh sarana penyimpanan dan distribusi yang memadai.



Sumber: Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekkes
Gambar 11. Sarana Distribusi IF Kab/Kota 2013

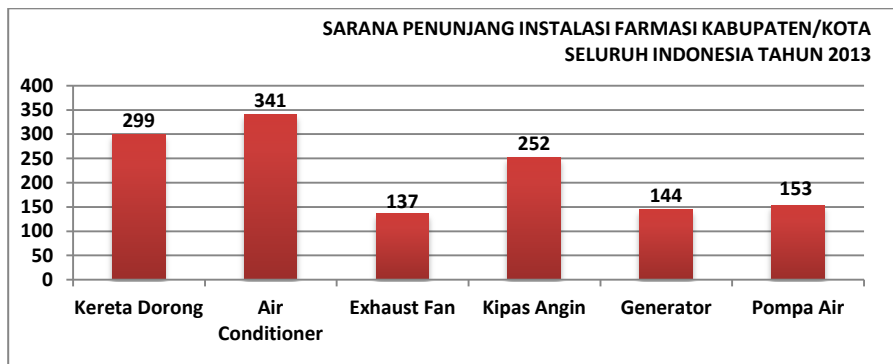
Pada tahun 2013 jumlah kab/kota yang sudah mempunyai kendaraan roda empat meningkat menjadi 333 kab/kota bila dibandingkan tahun 2012 yang hanya 292 kab/kota. Begitupun jumlah kab/kota yang sudah mempunyai kendaraan roda dua di tahun 2013 meningkat menjadi 316 kab/kota bila dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 268 kab/kota. Jumlah kendaraan Roda empat dan Roda dua yang dimiliki instalasi farmasi per kab/kota dapat dilihat pada LAMPIRAN 8.

Pada tahun 2013, gambaran jumlah IFK yang mempunyai sarana penyimpanan berturut-turut seperti rak, pallet, lemari obat, lemari narkotika dan psikotropika, lemari vaksin, dan lemari es yaitu 457 kab/kota; 436 kab/kota; 316 kab/kota; 333 kab/kota; 212 kab/kota; dan 406 kab/kota. Seluruhnya mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2012. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyimpanan narkotika dan psikotropika, bahwa sarana penyimpanan wajib mempunyai lemari narkotika dan psikotropika namun kenyataannya jumlah instalasi farmasi kab/kota yang mempunyai lemari hanya sebanyak 333 instalasi farmasi. Detail sarana penyimpanan dapat dilihat pada LAMPIRAN 5.



Sumber: Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekkes
Gambar 12. Sarana Penyimpanan IF Kab/Kota 2013

6. Penunjang

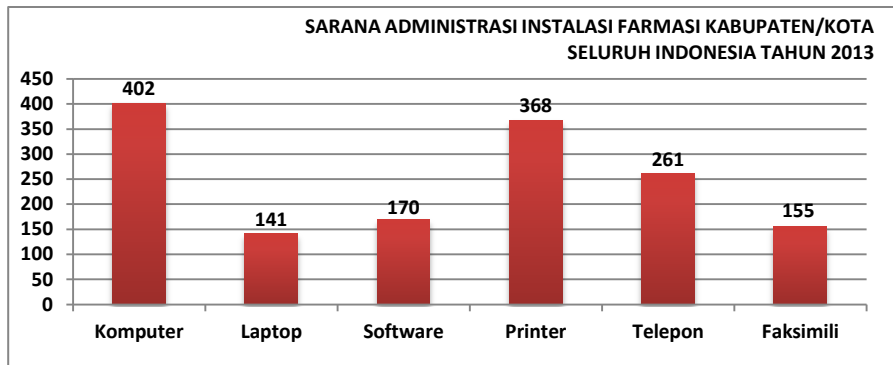


Sumber: Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekkes
Gambar 13. Sarana Penunjang IF Kab/Kota 2013

Pada tahun 2013, gambaran jumlah IFK yang mempunyai sarana penunjang berturut-turut seperti kereta dorong, *air conditioner* (AC), *exhaust fan*, kipas angin, generator dan pompa air yaitu 299 kab/kota; 341 kab/kota; 137 kab/kota; 252 kab/kota; 144 kab/kota; dan 153 kab/kota. Untuk kereta dorong dan generator mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012 dimana masing-masing dimiliki oleh sebanyak 360 kab/kota dan 156 kab/kota. Sementara untuk sarana penunjang yang lain mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2012. Detail sarana penunjang dapat dilihat pada LAMPIRAN 7.

7. Administrasi

Sebagai penunjang terlaksananya suatu kegiatan perlu adanya sarana administrasi.



Sumber: Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekkes
Gambar 14. Sarana Administrasi IF Kab/Kota 2013

Pada tahun 2013, gambaran jumlah IFK yang mempunyai sarana administrasi berturut-turut seperti komputer, laptop, *software*, printer, telepon, dan faksimili yaitu 402 kab/kota; 141 kab/kota; 170 kab/kota; 368 kab/kota; 261 kab/kota; dan 155 kab/kota. Seluruhnya mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2012. Data lebih lengkap terkait sarana administrasi dapat dilihat pada LAMPIRAN 9.

8. Penilaian Tenaga Kefarmasian Pengelola Obat Berprestasi Prov/Kab/Kota

Untuk menimbulkan maupun meningkatkan kemauan pengelola obat di Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota serta meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya maka perlu diberikan suatu penghargaan (*reward*) secara nasional. Pada tahun 2011, Ditjen Binfar dan Alkes telah memulai memberikan *reward* kepada pengelola obat berprestasi tingkat nasional dari Dinkes Prov/Kab/Kota. Penilaian yang dilakukan menyangkut beberapa aspek antara lain aspek penguasaan kompetensi termasuk kepribadian, aspek kemampuan di bidang pengelolaan obat, aspek kesiapan institusi dan

pengembangan diri. Dengan adanya penghargaan ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi instalasi farmasi lainnya yang belum mendapat penghargaan sehingga di kemudian hari akan berusaha lebih giat dalam meningkatkan kemampuan pribadi dan institusi instalasi farmasi.

Nama	Jabatan dan Asal Instansi	Penilaian Individu			Penilaian Institusi	Nilai Akhir
		Penguasaan Kompetensi	Kinerja Lola Obat	Porto Folio		
Decky Ferdiansyah, S.Si., Apt. 	Kepala Seksi Obat dan Napza IF Dinkes Provinsi Lampung	39.00	30.992	6.00	72.63	148.62
Dra. Helmi Rahayu, Apt. 	Ka. UPTD IF Dinkes Kota Semarang	37.00	17.20	5.00	92.37	151.57
Hj. Renny Haslinda, S.Si., Apt. 	Ka. UPTD IF Dinkes Kab. Tapin	18.50	37.392	2.00	91.50	149.39

Sumber: Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekkes
Tabel 2. Tenaga Kefarmasian Pengelola Obat Berprestasi Tahun 2013

C. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian telah melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan mutu dan pelaksanaan pelayanan kefarmasian sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 108 yaitu melaksanakan kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit dan puskesmas. Kegiatan dilaksanakan melalui Percepatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Perawatan/Rumah Sakit dan Pembekalan SDM IFRS dalam Rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit. Masing-masing kegiatan tersebut dilaksanakan di wilayah barat, tengah dan timur.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian menetapkan strategi yaitu:

1. Peningkatan penerapan penggunaan obat yang rasional untuk mengefektifitaskan dan menurunkan biaya pengobatan utamanya program KIA, malaria, TB dan HIV/AIDS, melalui:
 - a) Evaluasi, revisi dan implementasi pedoman-pedoman penggunaan obat rasional program KIA, Malaria, TB dan HIV/AIDS.
 - b) Penggerakan penggunaan obat rasional bertujuan membuat suatu jejaring antara provinsi dan kabupaten dalam meningkatkan Penggunaan Obat Rasional di daerah tersebut.
2. Revitalisasi pelaksanaan pelayanan farmasi klinik, diperlukan langkah-langkah:
 - a) Revitalisasi pelaksanaan pelayanan farmasi klinik di rumah sakit dan komunitas.
 - b) Menempatkan dan meningkatkan peran apoteker dan tenaga teknis kefarmasian sebagai tenaga strategis di rumah sakit dan puskesmas.

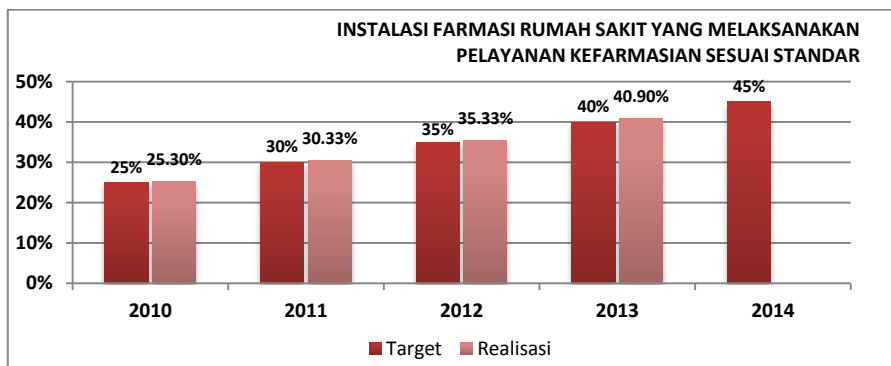
Pelayanan kefarmasian di rumah sakit merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi pada pelayanan pasien, ketersediaan obat yang bermutu dan pelayanan farmasi klinik merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan agar obat yang diberikan bermutu dan terjangkau di seluruh lapisan

masyarakat dan pelayanan kefarmasian yang diberikan akan meningkatkan kepatuhan dan kualitas hidup pasien.

Apoteker khususnya yang bekerja di rumah sakit saat ini juga dituntut untuk merealisasikan pengembangan paradigma pelayanan kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. Untuk dapat merealisasikan hal tersebut, apoteker harus dapat memberikan pelayanan kefarmasian yang simultan dan komprehensif baik yang bersifat manajerial maupun klinik untuk dapat memastikan bahwa obat yang diberikan kepada pasien telah memenuhi prinsip penggunaan obat rasional.

1. Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pemerintah yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar

Sesuai dengan Indikator Renstra Kemenkes 2010-2014, Persentase Instalasi Farmasi Rumah sakit (IFRS) pemerintah yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar mempunyai target sebesar 40% di tahun 2013. Realisasi dari capaian indikator tersebut adalah 40,90% atau sejumlah 338 rumah sakit dari jumlah rumah sakit milik pemerintah seluruh Indonesia sebanyak 827 rumah sakit (data SIRS tahun 2013).

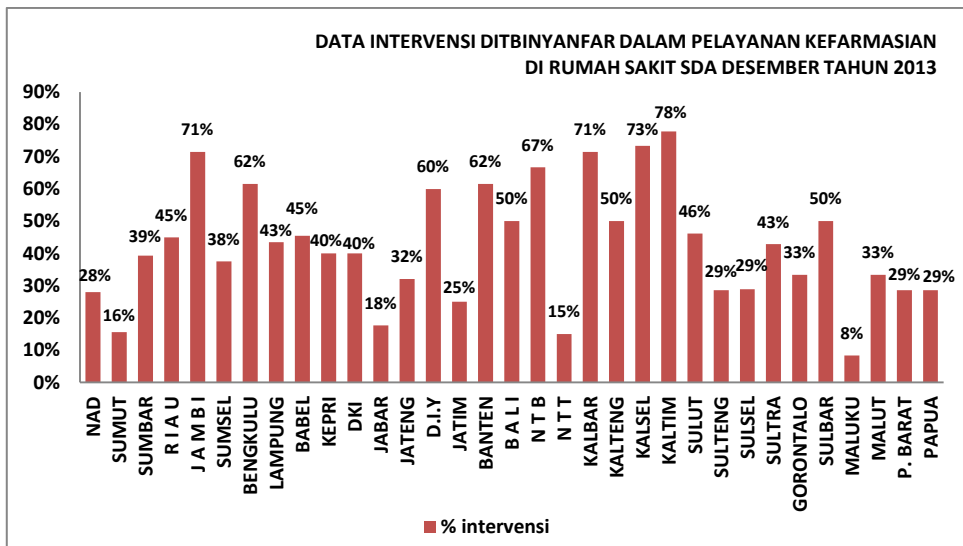


Sumber: Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian

Gambar 15. Capaian Indikator Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pemerintah yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar

Berdasarkan data SIRS tahun 2013 rumah sakit milik pemerintah seluruh Indonesia sebanyak 827 RS. Dalam rangka menunjang kegiatan

Pembekalan SDM IFRS untuk Pelayanan Farmasi Klinik dengan indikator untuk pelayanan kefarmasian di rumah sakit sesuai standar hasil yang dicapai pada triwulan I (satu) adalah 296 RS dengan capaian persentase sebesar 35,79%, pada triwulan II (dua) adalah sebanyak 313 RS dengan capaian persentase 37,80%, pada triwulan III (tiga) adalah sebanyak 317 RS dengan capaian persentase 38,33%, dan untuk triwulan IV (empat) adalah sebanyak 338 RS dengan capaian persentase 40,90%.



Sumber: Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian

Gambar 16. Data Intervensi DitBinyanfar Dalam Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit

Pelaksanaan pelayanan kefarmasian sesuai standar di rumah sakit pada prinsipnya dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya beberapa rumah sakit hanya memiliki apoteker yang terbatas jumlahnya, tidak sesuai dengan rasio jumlah apoteker terhadap jumlah pasien (1:30 pada rawat inap dan 1:50 pada rawat jalan). Akibatnya, apoteker yang ada hanya fokus pada pengelolaan sediaan farmasi dan tidak melaksanakan pelayanan kefarmasian klinik.

Apoteker di rumah sakit masih merasa pengetahuan mereka terbatas sehingga untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian klinik tidak optimal.

Masalah lain adalah tidak tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung untuk melaksanakan pelayanan farmasi klinik (kondisi wilayah juga merupakan kesulitan untuk mencari bahan referensi sehingga minimnya tersedianya *text book* serta pedoman lain di rumah sakit).

Manajemen rumah sakit tidak sepenuhnya mendukung terhadap pelaksanaan pelayanan farmasi klinik oleh apoteker sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan pelayanan farmasi klinik. Dukungan sangat penting agar tercipta suasana kerja yang kondusif dan setiap bagian atau unit dapat memahami ruang lingkup serta fungsi apoteker. Manajemen yang tidak memahami fungsi farmasi klinik di rumah sakit dalam pelaksanaan konseling, visite dan PIO yang merupakan bagian dari pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit dan merupakan Keputusan Menteri Kesehatan.

Dari beberapa permasalahan diatas, dapat diusulkan:

1. Peningkatan kualitas SDM kefarmasian di rumah sakit

Ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk dalam bidang kesehatan setiap waktu berkembang, dan karena itulah apoteker dituntut untuk selalu memperbaharui pengetahuannya. Proses belajar haruslah proses yang berkelanjutan dan terus menerus.

Untuk itu, peran asosiasi profesi besar sekali dalam memberikan kesempatan kepada anggotanya terus menerus meningkatkan kapasitas dirinya melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan agar apoteker berkesempatan meningkatkan dirinya.

2. Pemberian Motivasi dan "*Role Model*" pelayanan kefarmasian di rumah sakit

Apoteker melaksanakan pelayanan kefarmasian harus dimotivasi agar dapat berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, khususnya dokter. Apoteker adalah pihak yang memiliki pengetahuan yang kemampuan serta kewenangan yang dilimpahi oleh Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 108 untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian. Dengan melakukan kolaborasi dengan tenaga

kesehatan lain, membuat peluang “*role model*” dapat dilaksanakan sesuai dengan standar.

3. Advokasi terhadap manajemen rumah sakit

Advokasi kepada rumah sakit, khususnya pihak manajemen rumah sakit terkait tugas dan fungsi seorang apoteker agar melaksanakan tugas kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka diharapkan pihak manajemen mendukung pelaksanaan pelayanan kefarmasian secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga apoteker yang bekerja di rumah sakit dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar dan kompetensinya. Advokasi terhadap manajemen rumah sakit meliputi, tugas dan peran apoteker sesuai Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian.

Dalam rangka pencapaian MDG’s sejak tahun 2005 sampai 2012, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) khususnya Subdit HIV-AIDS telah melakukan pembekalan tenaga farmasi tentang pelayanan kefarmasian untuk ODHA kepada 155 tenaga farmasi di rumah sakit di seluruh Indonesia. Pada tahun 2013, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian menyusun revisi Pedoman Pelayanan Kefarmasian untuk HIV-AIDS.

No	Nama Kegiatan	Jumlah Tenaga Farmasi
1	Pelatihan Tenaga Farmasi Tentang Pelayanan Kefarmasian Untuk Odha (Orang Dengan HIV/AIDS)	108
2	Care Support Treatment (CST) Terapi Untuk ODHA Untuk Kelas Farmasi	25
3	Training Of Trainer (TOT) Care Support Treatment (CST) Terapi Untuk ODHA	22

Sumber: Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian

Tabel 3. Pembekalan Tenaga Farmasi tentang Pelayanan Kefarmasian untuk ODHA

Dalam rangka mencapai indikator persentase Instalasi Farmasi RS Pemerintah yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar dilaksanakan di 3 Regional:

REGIONAL BARAT (REGIONAL I)	REGIONAL TENGAH (REGIONAL II)	REGIONAL TIMUR (REGIONAL III)
Pelaksanaan: Surabaya Tempat Praktek: RS. Dr.Soetomo	Pelaksanaan: Surabaya Tempat Praktek: RS. Dr. Soetomo	Pelaksanaan: Surabaya Tempat Praktek: RS Dr. Soetomo
Prov. Kepulauan Riau: RSU Tanjung Pinang, RSU Kab. Karimun, RS Otorita Batam, RSUL Natuna Anambas Palmatak, RSUL Lingga	Prov. Kalimantan Barat: RS Jiwa Singkawang, RSUD Kab.Bengkayang, RSUD Landak, RSUD Kab.Sekadau, RSUD Melawi Nanga Pinoh, RSUD Kota Pontianak	Prov. Sulawesi Utara: RSU Datoe Binangkan, RSU Dr.Sam Ratulangi, RSU Noongan, RSU Liun Kendage, RSUD Kab Talaud,
Prov. Jambi: RSU May. H.A. Tahalib, RSUD Sultan Taha Saifudin, RSUD Kolonel Abundjani, RSUD Muaro Jambi, RSUD K.H. Daud Arif	Prov. Kalimantan: Tengah: RSU Dr H Soemarno S, RSU Kuala Kurun, RSU Buntok, RSU Tamiang Layang, RSUD Kuala Pembuang, RSUD Pulang Pisau	Prov. Papua: RSU Mimika, RSU Nabire, RSU Biak
Prov. Banten: RSU Pandeglang, RSU Dr Adjidarmo, RSUD Balaraja, RSUD Tangerang Selatan, RSUD Milimping	Prov. Kalimantan Selatan: RSU H Boejasin Pelaihari, RSU Brigjen H Hasan Basry, RSU H Damanhuri Barabai, RSU H.Badaruddin	Prov. Jawa Timur: RSUD Lawang, RSUD Prof, Dr, Soekandar, RS Kusta Sumberglagah, RSU Sumberejo, RSU Padangan, RSUD Tongas, RSUD Kertosono, RS Paru Batu
Prov. Jawa Tengah: RSU Majenang, RSUD Ajibarang, RSU Banjarnegara, RSU Dr. R.Soedjati Soemodiarjo, RSU Blora	Prov. Kalimantan Timur: RSU Panglima Sebaya Pasir, RS Harapan Insani Kubar, RSUD Sangatta Kutai Timur, RSUD Kab.Malinau, RSK Bersalin Sayang Ibu Balikpapan	Prov. NTT: RSU Soe, RSU Larantuka, RSUD Kalabahi, RSUD Kota Kupang

Sumber: Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian

Tabel 4. Rumah Sakit yang menjadi Tempat Pelaksanaan Kegiatan IFRS Pelayanan Farmasi Klinik

Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring pelayanan kefarmasian di rumah sakit didapatkan data bahwa pelayanan farmasi di rumah sakit belum berjalan optimal sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Hal ini disebabkan belum adanya dukungan oleh *stakeholder* maupun tenaga kesehatan lain tentang pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Oleh karena itu pada tahun 2011 Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian telah membuat audio visual tentang pelayanan farmasi klinik di rumah sakit. Diharapkan audio visual ini dapat menjadi bahan advokasi

kepada *stakeholder* dan sosialisasi kepada tenaga kesehatan lain tentang implementasi pelayanan kefarmasian sesuai Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Pertemuan lintas sektor penyusunan konsep *Joint Training* tenaga kesehatan yang melibatkan tenaga kesehatan lain seperti dokter dan perawat sebagai pembelajaran kolaborasi antar tenaga kesehatan.

2. Puskesmas Perawatan yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar

Sesuai dengan Indikator Renstra Kemenkes 2010-2014, Persentase Puskesmas Perawatan yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar pada tahun 2013 sebesar 35%. Dengan capaian indikator 35,15% sebanyak 1.108 puskesmas dari 3.152 puskesmas perawatan seluruh Indonesia. Hal ini terjadi karena terbatasnya jumlah tenaga kefarmasian di puskesmas, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, setiap pelayanan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian.

Untuk mencapai indikator Persentase Puskesmas Perawatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar dilaksanakan percepatan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas perawatan. Pada tahun 2013 kegiatan dilaksanakan di 6 (enam) provinsi, yaitu NAD, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, dan Maluku Utara. Kegiatan yang dilakukan adalah pembelajaran dan pelatihan kepada apoteker/pengelola obat di puskesmas perawatan tentang pelayanan kefarmasian, advokasi kepada Kepala Puskesmas tentang tugas dan tanggung jawab apoteker di puskesmas dalam pelayanan kefarmasian, serta praktik pelayanan kefarmasian langsung pada pasien di puskesmas yang dijadikan tempat praktik.

Pada Laporan Sebaran Jumlah Kefarmasian Di Puskesmas per Provinsi, Badan PPSPDMK (31 Desember 2011), diketahui jumlah apoteker di Puskesmas sebanyak 1561 orang (rata-rata rasio 18.86%) sedangkan jumlah Tenaga Teknis Kefarmasian adalah 8326 orang (rata-rata rasio 91%). Data

apoteker dan tenaga teknis kefarmasian ini mencakup PNS dan tenaga honorer. Pada beberapa puskesmas ternyata masih ada yang belum mempunyai tenaga teknis kefarmasian. Hal ini disebabkan:

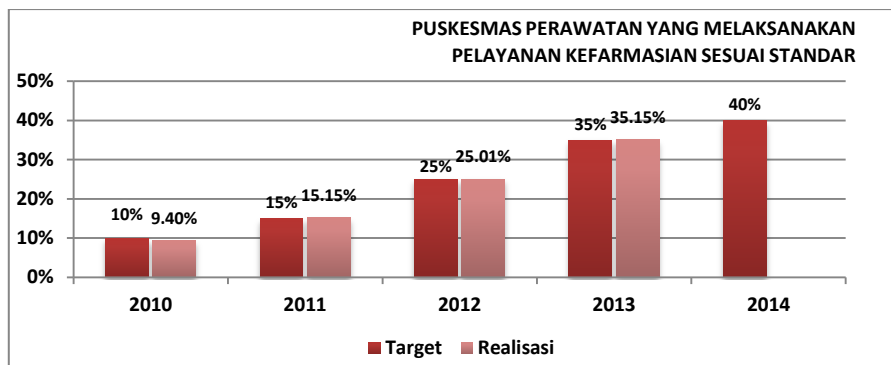
- a. Jumlah Puskesmas cukup banyak, akan tetapi tenaga kefarmasian (apoteker atau tenaga teknis kefarmasian) masih sangat terbatas.
- b. Puskesmas yang sudah memiliki apotekerpun, masih belum melakukan pelayanan kefarmasian. Baru sebatas dalam pengelolaan obat saja.
- c. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di komunitas masih banyak kendala dalam mendapatkan *data based* (peta pelayanan) karena belum adanya sistem pelaporan yang rutin seperti program lain.

Sebagian besar Provinsi tidak memiliki *data based* yang akurat, sehingga secara berjenjang sulit mendapatkan data dari provinsi.

Dari beberapa permasalahan diatas, dapat diusulkan:

- a. Advokasi kepada pemangku kepentingan (Dikti, Perguruan Tinggi, APTFI, Organisasi Profesi, Pemda) terkait kebutuhan apoteker (kualitas maupun kuantitas) dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian.
- b. Meningkatkan peran apoteker dan tenaga teknis kefarmasian di puskesmas, melalui pelatihan mengenai cara Pelayanan Kefarmasian yang Baik sehingga apoteker dapat melakukan pelayanan kefarmasian, minimal melaksanakan pemberian informasi obat dan konseling lalu mendokumentasikan dan melaporkannya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotanya.

Melakukan koordinasi secara berjenjang antara Pemerintah Pusat, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas dalam hal pelaporan pelaksanaan pelayanan kefarmasian.



Sumber: Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian

Gambar 17. Puskesmas Perawatan yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar

3. Persentase Penggunaan Obat Rasional (POR) di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Pemerintah

Kebijakan penggunaan obat rasional merupakan salah satu upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan, efektifitas serta harga yang terjangkau dari obat yang diberikan kepada masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pengobatan sendiri (*Self-medication*).

Pelaku pelayanan kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan harus selalu memegang prinsip rasional yaitu selalu bertindak berdasarkan bukti ilmiah terkini (*Evidence Based Medicine*) dan prinsip tepat biaya (*cost-effective*) serta tepat manfaat (*cost-benefit*) dalam pemanfaatan obat agar memberikan hasil optimal.

Penggunaan obat yang rasional sangat diperlukan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja obat;
- b. Mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh obat dengan harga terjangkau;
- c. Mencegah dampak penggunaan obat yang tidak tepat yang dapat membahayakan pasien;
- d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat (pasien) terhadap mutu pelayanan kesehatan.

Penggunaan obat secara rasional merupakan salah satu langkah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Dengan terlaksananya penggunaan obat secara rasional di seluruh institusi pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta termasuk swamedikasi oleh masyarakat maka mutu pelayanan kesehatan yang optimal dapat tercapai.

Keberhasilan program penggunaan obat rasional di Indonesia diukur dengan menggunakan indikator persentase Penggunaan Obat Rasional di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Pemerintah. Penetapan persentase Penggunaan Obat Rasional di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Pemerintah dilakukan melalui pemantauan indikator persepsian untuk 3 Diagnosis penyakit yaitu ISPA Non-Pneumonia, Diare Non-Spesifik dan Myalgia.

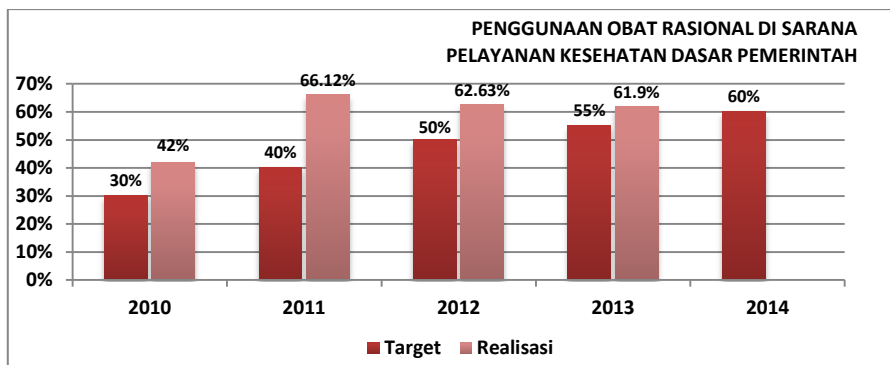
Dasar pemilihan ketiga Diagnosis tersebut adalah:

- a. Termasuk 10 penyakit terbanyak;
- b. Diagnosis dapat ditegakkan oleh petugas tanpa memerlukan pemeriksaan penunjang;
- c. Pedoman terapi untuk ketiga diagnosis jelas;
- d. Tidak memerlukan antibiotika/injeksi;
- e. Selama ini ketiganya dianggap potensial untuk diterapi secara tidak rasional.

Adapun Pemantauan indikator persepsian terhadap 3 diagnosis tersebut dilihat dari:

- a. Penggunaan Antibiotik pada ISPA Non-Pneumonia;
- b. Penggunaan Antibiotik pada Diare Non-Spesifik;
- c. Penggunaan Injeksi pada Myalgia;
- d. Rerata item obat per lembar resep.

Sesuai dengan Indikator Renstra Kemenkes 2010-2014, Presentase Penggunaan Obat Rasional (POR) di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Pemerintah mempunyai target sebesar 55% di tahun 2013. Realisasi dari capaian indikator tersebut adalah 61,9%.



Sumber: Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian

Gambar 18. Penggunaan Obat Rasional di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Pemerintah

Pelaksanaan kebijakan POR di daerah memerlukan pengorganisasian, penggerakan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Selain itu keberhasilan pelaksanaan kebijakan POR sangat tergantung pada moral, etika, dedikasi, kompetensi, integritas, ketekunan, dan kerja keras segenap pemangku kepentingan di bidang obat.

WHO menyebutkan bahwa lebih dari 50% obat-obatan di dunia diresepkan dan diberikan secara tidak tepat, tidak efektif dan tidak efisien, sementara 1/3 penduduk dunia kesulitan mendapatkan akses untuk memperoleh obat esensial.

Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian dalam mendukung penggunaan obat rasional di seluruh lapisan masyarakat, dengan melaksanakan:

- a. Penggerakan POR di Provinsi Bengkulu, NTT dan Papua Barat;
- b. Peningkatan Penggunaan Obat Rasional pada swamedikasi di masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat dengan metode CBIA di Provinsi Bali dan Lampung
- c. Tersebarnya informasi kepada tenaga kesehatan dan masyarakat dalam rangka peningkatan Penggunaan Obat Rasional, berupa *leaflet*, buku saku, poster, *roll banner*, *mug* dan jam dinding;
- d. Peningkatan Kapasitas Teknis Tenaga Kesehatan di Provinsi Bangka Belitung;

- e. Workshop Penggunaan Antibiotik di Provinsi Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan;
- f. Tercetaknya Modul Penggerakan Penggunaan Obat Rasional;
- g. Tercetaknya Modul Peningkatan Keterampilan Memilih Obat pada Tenaga Kesehatan dan Kader.

D. Peningkatan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan

Alat Kesehatan mempunyai peranan penting dalam menunjang diagnosis penyakit atau penentuan status kesehatan seseorang. PKRT adalah alat, bahan atau campuran untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, hewan peliharaan, rumah tangga dan tempat-tempat umum. Alat Kesehatan dan PKRT tersebut harus terjamin keamanan, mutu dan manfaatnya sehingga pada proses produksinya harus memenuhi Pedoman Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) dan Pedoman Cara Pembuatan PKRT yang Baik (CPPKRTB). Kedua pedoman tersebut disesuaikan dengan standar mutu internasional yaitu ISO 9001: 2000 yaitu *Quality Management System Requirements* dan ISO 13485: 2003 yaitu *Quality Management System for Medical Devices*.

Alat kesehatan merupakan komoditi yang spesifik dan mempunyai nilai jual yang besar dan hal ini menyebabkan daya tarik bagi pelaku bisnis. Peluang ini juga menjadi daya tarik bagi pebisnis yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan peredaran alat kesehatan ilegal atau substandar.

Alat kesehatan palsu jarang ditemukan untuk alat kesehatan yang berteknologi tinggi. Umumnya dilakukan pada produk-produk seperti kondom, *Intra Occular Lense* dan IVD. Tetapi yang banyak ditemukan di negara berkembang adalah alat kesehatan yang substandar atau kurang memenuhi persyaratan cara produksi yang baik seperti sarung tangan dan masker yang dijual dengan harga murah.

Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000.000 jiwa merupakan pasar yang sangat menarik bagi pelaku bisnis alat kesehatan luar maupun dalam negeri karena berbagai alasan. Di antara alasan-alasan tersebut adalah: (1) jumlah penduduk yang besar yang

menjadi *potential buyer* dari produk yang dihasilkan; (2) tersedianya angkatan kerja yang produktivitasnya masih sangat berpeluang untuk ditingkatkan; (3) tersedianya sumber daya yang dapat diolah dan merupakan kebutuhan masyarakat kawasan atau dunia; (4) terpeliharanya stabilisasi di bidang politik dan semakin terbukanya ruang bagi bekerjanya mekanisme pasar; dan (5) semakin turunnya biaya yang tak terkait langsung dengan kegiatan produksi dan distribusi (*clean government* atau *good corporate governance*)

Permasalahan lain adalah kurang optimalnya pasar yang besar dimanfaatkan oleh industri dalam negeri. Dari data yang ada di kementerian kesehatan maka jumlah alat kesehatan impor yang beredar di Indonesia jauh lebih besar dari alat kesehatan dalam negeri. Umumnya industri alat kesehatan dalam negeri saat ini menghasilkan produk alat kesehatan yang menggunakan teknologi sederhana sampai dengan sedang antara lain, tempat tidur pasien, tensimeter, stetoskop, kursi roda, inkubator bayi, dental unit.

Sampai saat ini kebutuhan alat kesehatan di Indonesia masih bergantung pada alat kesehatan impor. Dari data yang ada di Kementerian Kesehatan, tercatat jumlah alat kesehatan impor yang beredar di wilayah Indonesia jauh lebih besar dari jumlah alat kesehatan dalam negeri.

Data Alat Kesehatan dan PKRT yang Terdaftar di Kementerian Kesehatan Tahun 2013

NO	ALAT KESEHATAN DAN PKRT	JUMLAH
1	Impor	2467
2	Dalam Negeri	582
3	Perubahan/Perpanjangan	1929
4	Total	4978

Keterangan: Impor : Alat Kesehatan sebanyak 2189 dan PKRT sebanyak 278
 Dalam Negeri : Alat Kesehatan sebanyak 266 dan PKRT sebanyak 316

Sumber: Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan

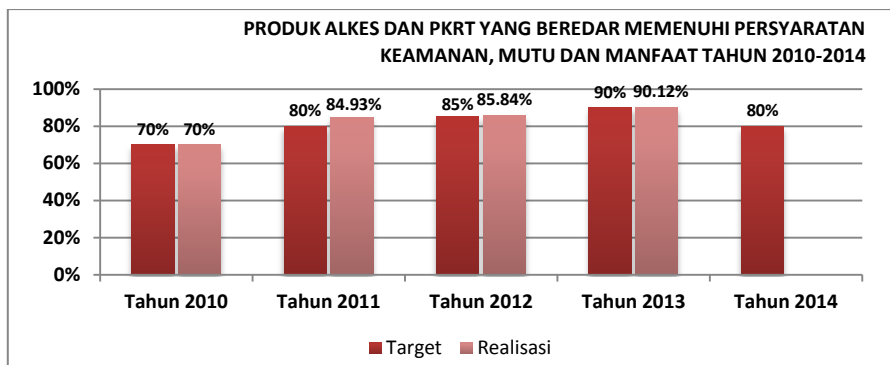
Tabel 5. Data Alat Kesehatan dan PKRT yang Terdaftar di Kementerian Kesehatan Tahun 2013

1. Persentase Produk Alat Kesehatan dan PKRT yang Beredar Memenuhi Persyaratan Keamanan, Mutu dan Manfaat

Sesuai dengan Indikator Renstra Kemenkes 2010-2014, persentase produk alat kesehatan dan PKRT yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat mempunyai target sebesar 90% di tahun 2013. Realisasi adalah 90,12% dengan capaian 100,14%. Salah satu langkah yang ditempuh dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap keamanan, mutu dan manfaat alat kesehatan dan PKRT adalah pelaksanaan sampling yang dilaksanakan di 33 provinsi dengan jumlah sampel sebanyak 1103 sampel. Terhadap seluruh sampel dilakukan pengujian di beberapa laboratorium yang terakreditasi. Jumlah sampel yang telah diperoleh hasil ujinya adalah 982 sampel, terdiri dari 885 sampel yang memenuhi syarat dan 97 sampel tidak memenuhi syarat. Pengambilan sampel produk alat kesehatan dilakukan berdasarkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sampling dan Pengujian Alat Kesehatan. Definisi operasional, formula yang digunakan adalah jumlah sampel yang memenuhi syarat dibandingkan dengan jumlah sampel yang sudah diperoleh hasil ujinya.

Kriteria sampel alat kesehatan dan PKRT yang diuji sebagai berikut:

- a. Produk yang menarik perhatian karena efek samping yang mungkin ditimbulkan dan memiliki pengaruh sosial yang luas.
- b. Produk yang rawan terhadap kerusakan atau kondisinya cenderung tidak stabil.
- c. Produk yang mempunyai batas kadaluarsa.
- d. Produk yang banyak digunakan oleh masyarakat.
- e. Alat kesehatan steril.



Sumber: Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
Gambar 19. Produk Alat Kesehatan dan PKRT yang Beredar Memenuhi Persyaratan Keamanan, Mutu dan Manfaat Tahun 2010-2014

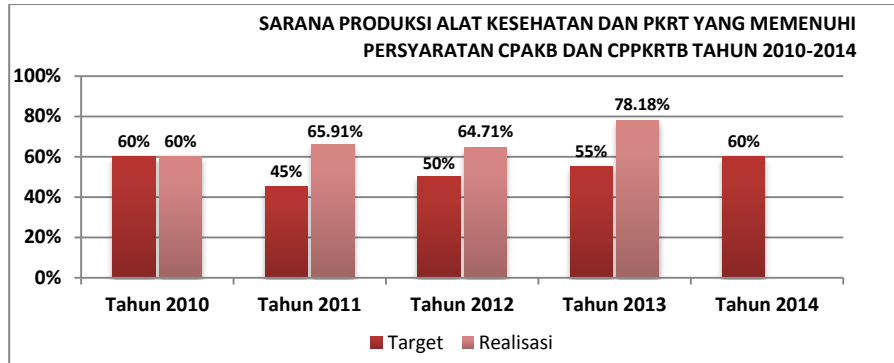
2. Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT yang Memenuhi Persyaratan Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) dan Cara Pembuatan PKRT yang Baik (CPPKRTB)

Sesuai dengan Indikator Renstra Kemenkes 2010-2014, persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi persyaratan cara pembuatan yang baik mempunyai target sebesar 55% di tahun 2013. Realisasi adalah 78,18%. Capaian sebesar 142,15% dapat dilihat di dalam pengukuran indikator dilakukan monitoring terhadap 55 sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang terdapat di provinsi. Dari hasil monitoring ini terdapat 43 sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi syarat CPAKB/CPPKRTB. Definisi operasional yang digunakan adalah jumlah sarana produksi alat kesehatan/PKRT yang memenuhi syarat CPAKB/CPPKRTB dibandingkan dengan jumlah sarana produksi alat kesehatan/PKRT yang disampling secara representatif.

Kriteria sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang disampling secara representatif:

- a. Sarana yang memiliki sertifikat produksi yang masih berlaku.
- b. Sarana yang memiliki sertifikat produksi yang masa berlakunya hampir habis.
- c. Sarana yang belum pernah dilakukan pemantauan.

- d. Sarana yang bermasalah, misalnya perbedaan data antara sertifikat produksi dengan hasil laporan.



Sumber: Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan

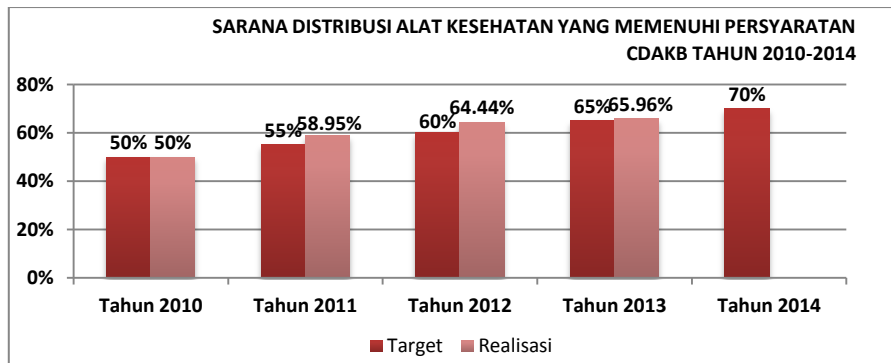
Gambar 20. Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT yang Memenuhi Persyaratan CPAKB dan CPPKRTB Tahun 2010-2014

3. Persentase Sarana Distribusi Alat Kesehatan yang Memenuhi Persyaratan Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB)

Sesuai dengan Indikator Renstra Kemenkes 2010-2014, persentase distribusi alat kesehatan yang memenuhi persyaratan Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik mempunyai target sebesar 65% di tahun 2013. Realisasi adalah 65,96%. Capaian adalah 101,47% diperoleh dengan melakukan pemantauan dan evaluasi di 94 sarana distribusi alat kesehatan, terdapat 62 sarana distribusi yang memenuhi syarat CDAKB. Definisi operasional yang digunakan adalah jumlah sarana distribusi alat kesehatan yang memenuhi syarat CDAKB dibandingkan dengan jumlah sarana distribusi alat kesehatan yang disampling secara representatif.

Kriteria sarana distribusi alat kesehatan yang disampling secara representatif:

- a. Sarana yang memiliki IPAK yang masih berlaku.
- b. Sarana yang memiliki IPAK yang masa berlakunya hampir habis.
- c. Sarana yang belum pernah dilakukan pemantauan.
- d. Sarana yang bermasalah, misalnya perbedaan data antara IPAK dengan hasil laporan.



Sumber: Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
Gambar 21. Sarana Distribusi Alat Kesehatan yang Memenuhi Persyaratan CDAKB Tahun 2010-2014

4. Pelayanan Perizinan di Bidang Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

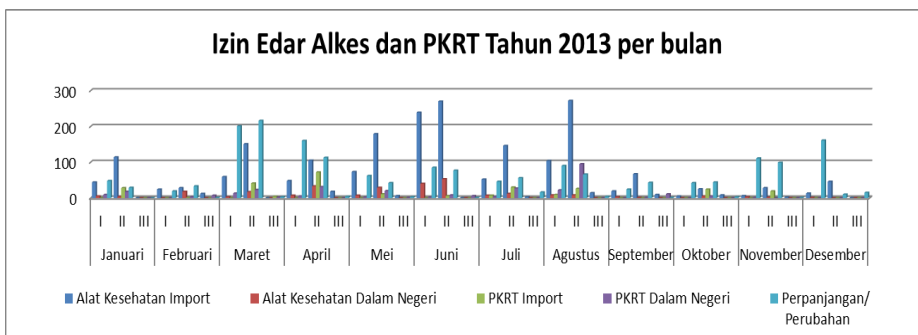
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan mempunyai tugas dan fungsi pembinaan terhadap alat kesehatan dan PKRT yang beredar di masyarakat dengan tujuan tersedia dan terjangkau alat kesehatan yang aman bermutu dan bermanfaat. Tugas tersebut dilaksanakan mulai kesehatan tersebut diproduksi, didistribusikan, sampai bagaimana alat kesehatan tersebut digunakan oleh masyarakat pengguna.

Salah satu tugas dan fungsi Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan adalah memberikan pelayanan sertifikasi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan dan PKRT serta perizinan alat kesehatan dan PKRT. Hal ini merupakan salah satu tahap *Scanning* awal terhadap keamanan mutu dan manfaat alat kesehatan dan PKRT sebelum di berikan izin untuk dapat diedarkan dan digunakan di wilayah Indonesia.

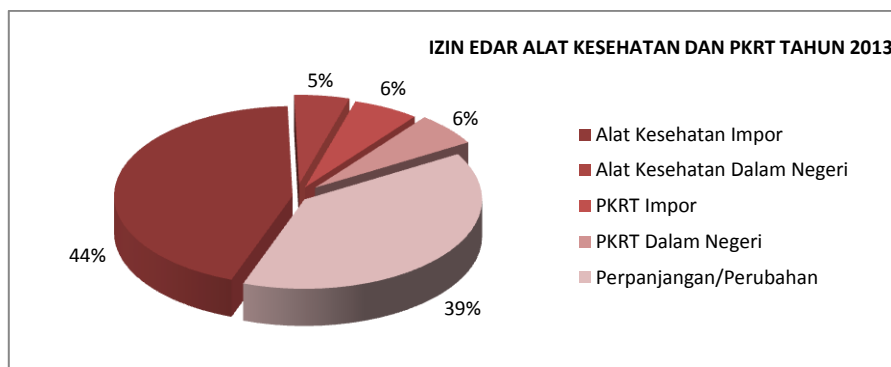
Kegiatan peningkatan produksi dan distribusi alat kesehatan dan PKRT selama tahun 2013 telah memberikan pelayanan perizinan alat kesehatan dan PKRT yang terdiri dari pemberian izin edar alat kesehatan dan PKRT dalam negeri maupun impor, sertifikat produksi dan Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) serta surat keterangan. Jumlah berkas masuk perizinan alat kesehatan dan PKRT tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Bulan	Kelas	Alkes Impor	Alkes Dalam Negeri	PKRT Impor	PKRT Dalam Negeri	Perpanjangan/Perubahan
Januari	I	44	5	0	9	48
	II	114	4	28	18	29
	III	0	0	0	0	0
Februari	I	24	0	0	0	19
	II	28	18	1	3	33
	III	12	0	0	7	1
Maret	I	59	3	0	13	201
	II	151	17	41	23	216
	III	0	0	4	2	3
April	I	48	7	0	5	160
	II	105	33	72	31	113
	III	18	0	0	0	4
Mei	I	73	7	0	2	62
	II	179	29	11	20	42
	III	6	0	0	1	3
Juni	I	239	40	0	2	85
	II	270	53	6	8	77
	III	0	0	0	6	1
Juli	I	52	7	7	4	46
	II	146	12	30	27	56
	III	3	0	0	0	16
Agustus	I	104	8	9	22	90
	II	272	8	26	95	66
	III	14	0	0	0	4
September	I	19	3	0	0	24
	II	67	1	0	1	43
	III	9	0	0	11	1
Oktober	I	5	0	0	0	42
	II	25	5	24	5	44
	III	8	0	0	0	3
November	I	6	3	0	1	111
	II	28	2	19	0	99
	III	2	0	0	0	1
Desember	I	13	1	0	0	161
	II	46	0	0	0	10
	III	0	0	0	0	15
Total		2189	266	278	316	1929

Sumber: Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
Tabel 6. Izin Edar Alkes dan PKRT Tahun 2013 per Bulan



Gambar 22. Izin Edar Alkes dan PKRT per Bulan



Gambar 23. Jumlah Izin Edar Alkes dan PKRT Tahun 2012

NO	PERIZINAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
1	SERTIFIKAT PRODUKSI ALKES	0	6	2	1	6	7	3	6	3	3	4	3	44
2	SERTIFIKAT PRODUKSI PKRT	1	1	5	5	10	6	5	9	1	9	9	3	64
3	IPAK	16	36	54	36	109	86	90	65	44	89	38	45	708
4	IZIN EDAR EL	218	79	446	174	266	171	134	232	83	115	136	90	2144
5	IZIN EDAR NE	200	100	415	413	227	644	245	412	136	101	262	318	3473
6	IZIN EDAR DR	12	13	26	19	52	65	82	32	0	6	31	0	338
7	IZIN EDAR PKRT	98	18	126	182	118	46	115	183	24	29	23	0	962
TOTAL		545	253	1074	830	788	1025	674	939	291	352	503	459	7733

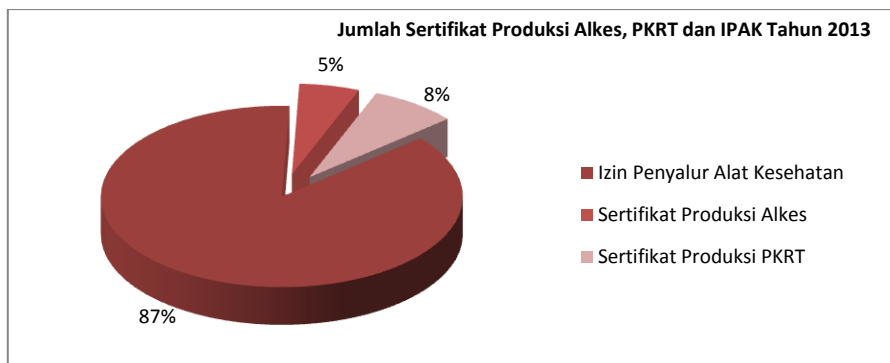
Sumber: Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan

Tabel 7. Jumlah Sertifikat Produksi Alkes, PKRT dan Izin Penyalur Alkes Tahun 2013 per Bulan

NO	PERIZINAN	JUMLAH BERKAS
1	Sertifikat Produksi Alat Kesehatan	44
2	Sertifikat Produksi PKRT	64
3	Ijin Penyalur Alat Kesehatan	708
	TOTAL	816

Sumber: Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan

Tabel 8. Jumlah Sertifikat Produksi dan IPAK Tahun 2013



Sumber: Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan

Gambar 24. Jumlah Sertifikat Produksi Alkes, PKRT dan IPAK Tahun 2013

NO	SURAT KETERANGAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
1	Surat Keterangan Masuk	161	166	174	168	171	220	296	140	217	224	165	223	2325
2	Surat Keterangan Keluar	147	163	153	137	159	198	215	117	237	154	124	211	2015

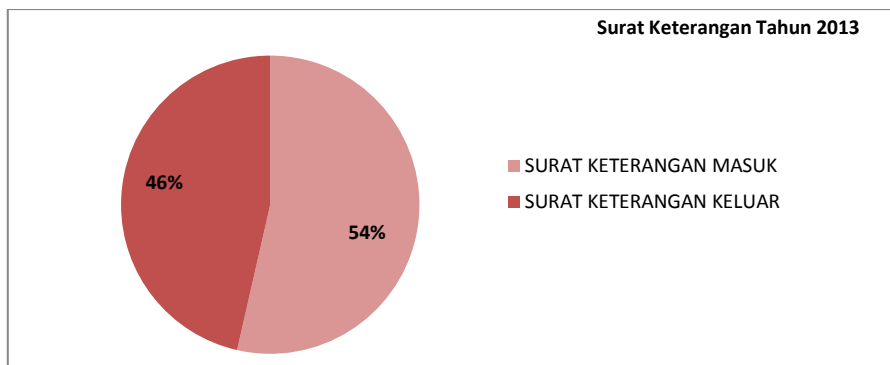
Sumber: Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan

Tabel 9. Surat Keterangan Tahun 2013 per Bulan

NO	SURAT KETERANGAN	TOTAL
1	SURAT KETERANGAN MASUK	2325
2	SURAT KETERANGAN KELUAR	2015

Sumber: Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan

Tabel 10. Surat Keterangan Tahun 2013



Sumber: Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
Gambar 25. Persentase Surat Keterangan Tahun 2013

- Surat keterangan Impor adalah izin yang diberikan kepada perusahaan yang memasukan alat kesehatan dan PKRT yang tidak memiliki registrasi ke dalam wilayah RI untuk kepentingan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
- Surat Keterangan Izin Ekspor adalah izin yang diberikan kepada perusahaan yang memproduksi alat kesehatan dan/atau PKRT khusus untuk ekspor dan tidak diedarkan di wilayah Republik Indonesia.
- Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190/Permenkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan PKRT.

E. Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian

1. Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional Produksi di Dalam Negeri

Pada tahun 2013, jumlah bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri yang tersedia mencapai 39 jenis dari target yang telah ditetapkan. Upaya yang dilakukan adalah dengan pendirian kelompok kerja kemandirian bahan baku obat beranggotakan lintas kementerian dan *stakeholder* terkait lain dengan Kementerian Kesehatan sebagai koordinator. Pencapaian kemandirian obat dan bahan baku obat juga terutama dilakukan melalui kerjasama dan fasilitasi penelitian dengan lembaga penelitian (BPPT, LIPI dan Perguruan Tinggi) di bidang

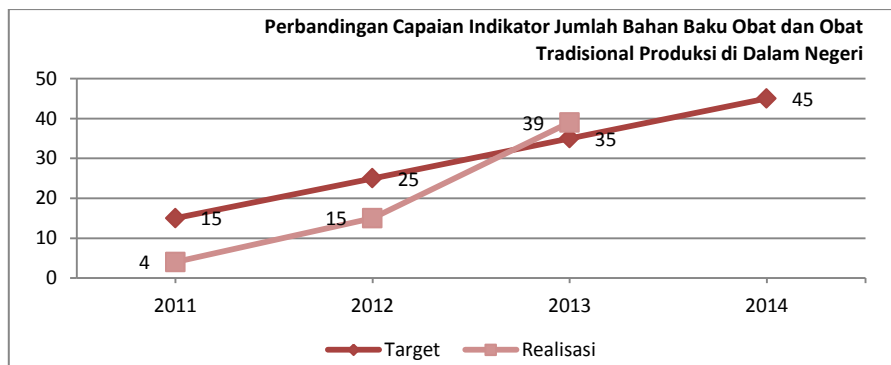
pengembangan bahan baku obat serta pembentukan jejaring dengan berbagai *stakeholder* diantaranya institusi penelitian, kalangan industri dan asosiasi pengusaha.

Optimalisasi koordinasi dengan pihak terkait dilakukan melalui perluasan jaringan kerja sama dengan universitas negeri yang memiliki basis riset dan bermitra dengan industri farmasi dan/atau industri obat tradisional. Pada tahun 2012 kerja sama ini baru dilakukan dengan Kementerian Riset dan Teknologi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pada tahun 2013 dilakukan optimalisasi dengan kementerian terkait yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Negara Ristek, dan Kementerian Perekonomian.

Juga telah dilakukan perbaikan skema kerja sama pengembangan bahan baku dan bahan baku obat tradisional yang tidak hanya berorientasi pada produk, tetapi juga pada proses produksi lebih lanjut. Hal ini diperkuat dengan adanya Peta Jalan Pengembangan Bahan Baku dan Rencana Induk Pengembangan Bahan Baku Obat Tradisional di Indonesia.

Untuk mencapai kemandirian di bidang obat tradisional, pada tahun 2013 Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian telah melaksanakan pembangunan:

- a. Fasilitasi peralatan untuk Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) di empat daerah yaitu Kabupaten Kaur (Bengkulu), Kabupaten Bangli (Bali), Kabupaten Sukoharjo (Jawa Tengah) dan Kabupaten Tegal (Jawa Tengah).
- b. Fasilitasi peralatan untuk Pusat Ekstrak Daerah (PED) di Kota Pekalongan (Jawa Tengah).
- c. Fasilitasi peralatan laboratorium mikrobiologi untuk tiga daerah penerima P4TO tahun 2012, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan Kota Pekalongan



Sumber: Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Gambar 26. Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional Produksi di Dalam Negeri

Tiga puluh sembilan jenis bahan baku obat dan obat tradisional yang telah siap diproduksi di dalam negeri (kumulatif tahun 2011-2013) dapat dilihat pada Tabel 11. berikut:

Nama		Tahun
1.	Fraksi bioaktif kayu manis (<i>Cinamomum burmani</i>)	2011
2.	Fraksi bioaktif bungur (<i>Lagerstroemia speciosa</i>)	
3.	Fraksi bioaktif mahkota dewa (<i>Phaleria macrocara</i>)	
4.	Fraksi protein bioaktif cacing tanah (<i>Lumbricus Rubellus</i>)	
5.	Ekstrak herba sambiloto (<i>Andrographis paniculata</i>)	2012
6.	Ekstrak herba sambiloto terfraksinasi	
7.	Ekstrak pegagan (<i>Centella asiatica</i>)	
8.	Ekstrak pegagan terfraksinasi	
9.	Ekstrak herba meniran (<i>Phyllanthus niruri</i>)	
10.	Ekstrak herba meniran terfraksinasi	2013
11.	Ekstrak rimpang temulawak (<i>Curcuma xanthorrhiza</i>)	
12.	Ekstrak rimpang jahe (<i>Zingiber officinale</i>)	
13.	Ekstrak rimpang kencur (<i>Kaempferia galanga</i>)	
14.	Difruktosa anhidrida III	
15.	Pati ter-pregelatinasi	
16.	Ekstrak terstandar legundi (<i>Vitex trifolia</i> Linn)	
17.	Ekstrak terstandar paliasa (<i>Kleinhovia hospita</i> linn.)	
18.	Ekstrak rumput laut <i>Eucheuma cottonii</i>	
19.	Karaginan rumput laut	
20.	Ekstrak terstandar pugun tano (<i>Curanga fel-terrae</i>)	
21.	Ekstrak terstandar daun jati belanda (<i>Guazuma ulmifolia</i>)	
22.	Ekstrak terstandar herba sidaguri (<i>Sida rhombifolia</i>)	
23.	Ekstrak terstandar daun sirsak (<i>Annona muricata</i> L.)	

Nama		Tahun
24.	Ekstrak terstandar biji buah kedaung (<i>Parkia timoriana</i>)	2013
25.	Ekstrak terstandar daun salam (<i>Syzygium polyanthum</i>)	
26.	Tetrasiklin	
27.	Albumin	
28.	Ekstrak Terstandar Pegagan (<i>Centella asiatica</i> L.)	
29.	Fraksi triterpen Pegagan	
30.	Isolat pegagan (asiatikosida)	
31.	Isolat pegagan (asam madekasat)	
32.	Isolat pegagan (asam asiatat)	
33.	Ekstrak terstandar <i>Ganoderma lucidum</i>	
34.	2-Metoksi-isobutilisonitril (MIBI)	
35.	Amilum jagung pulut ter-pragelatinasi-hidrolisis enzimatik-fosforilasi	
36.	Ekstrak terstandar kulit buah manggis (<i>Garcinia mangostana</i> L.)	
37.	Ekstrak terstandar herba tapak dara (<i>Catharanthus roseus</i>)	
38.	Ekstrak terstandar umbi bawang putih (<i>Allium sativum</i> L.)	
39.	Ekstrak terstandar Biji Mahoni [<i>Swietenia mahagoni</i> (L.) Jacq.	

Sumber: Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Tabel 11. Daftar Nama Bahan Baku Obat dan Bahan Baku Obat Tradisional
yang Telah Siap Diproduksi di Dalam Negeri

Dengan dapat tercapai sebanyak 39 jenis bahan baku dari 35 jenis yang ditargetkan, capaian kinerja indikator tersebut adalah 111,43%.

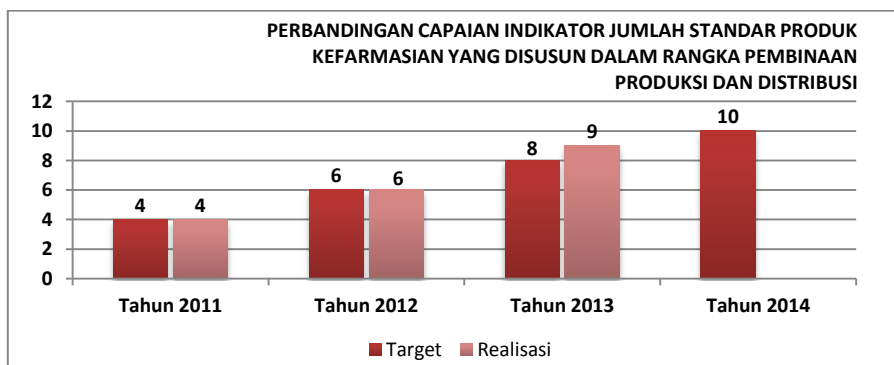
2. Standar Produk Kefarmasian yang Disusun Dalam Rangka Pembinaan Produksi dan Distribusi

Penyusunan standar bidang kefarmasian perlu dilaksanakan untuk meningkatkan mutu produk kefarmasian sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap keamanan, khasiat dan mutu bagi kesehatan masyarakat serta menjadi standar bagi produsen agar bisa menghasilkan produk yang baik dan sesuai standar agar aman dipergunakan dan dikonsumsi oleh masyarakat.

Penyusunan standar dilaksanakan seiring dengan perubahan dan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan di lapangan. Kegiatan penyusunan standar dalam bidang produksi dan distribusi kefarmasian pada dasarnya dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan pembangunan kesehatan yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian.

Mengingat bidang produksi dan distribusi kefarmasian merupakan salah satu bidang yang sangat dinamis, kompleks dan multi-dimensi maka perlu dilaksanakan penyusunan standar yang sistematis dan komprehensif yang dapat menjadi pedoman pelaksanaan produksi dan distribusi yang baik dan benar. Pada tahun 2013 jumlah standar produk kefarmasian yang disusun dalam rangka pembinaan produksi dan distribusi dapat diselesaikan lebih dari 100% dari target yang telah ditetapkan, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Farmakope Herbal Indonesia Suplemen III
- b. Kurikulum Pelatihan Pembinaan Usaha di Bidang Obat Tradisional
- c. FAQ mengenai pelaksanaan Permenkes No. 1148/Menkes/Per/VI/2011
- d. FAQ Mengenai Pelaksanaan Permenkes Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional
- e. Pedoman Pembinaan Industri Obat Tradisional dan Industri Ekstrak Bahan Alam
- f. Pedoman Pelaksanaan Perizinan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi
- g. Daftar Tilik Kosmetika
- h. Pedoman Penilaian Berkas Perizinan Kosmetika
- i. Buku Ingin Sehat, Pilih Makanan yang Aman, Bermutu dan Bergizi



Sumber: Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Gambar 27. Standar Produk Kefarmasian yang Disusun Dalam Rangka Pembinaan Produksi dan Distribusi

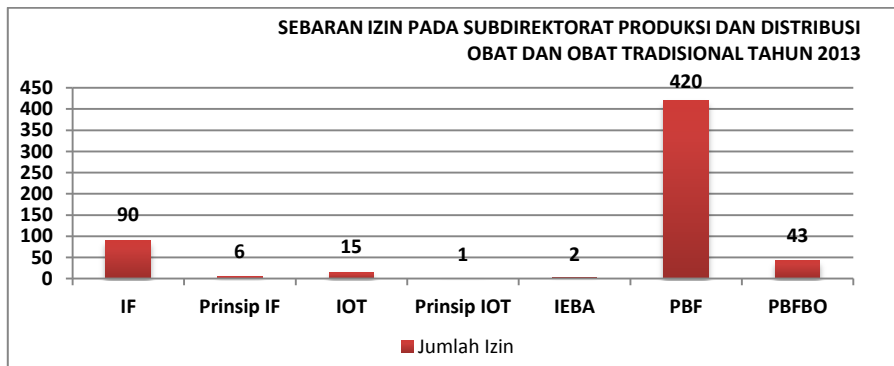
Dengan dapat tercapai sebanyak 9 standar dari 8 standar yang ditargetkan, capaian kinerja indikator tersebut adalah 112,50%.

3. Perizinan Produksi dan Distribusi Kefarmasian Tahun 2013

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian melaksanakan kegiatan perizinan. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian memiliki 14 jenis perizinan. Perizinan tersebut tersebar dalam 3 subdirektorat, yaitu:

a) Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional;

melaksanakan perizinan yang meliputi izin Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Pedagang Besar Farmasi, Pedagang Besar Farmasi Bahan Obat dan Industri Ekstrak Bahan Alam. Selama tahun 2013 jumlah izin yang dikeluarkan sebanyak 577 izin yang terbagi dalam 7 jenis. Sebaran izin tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

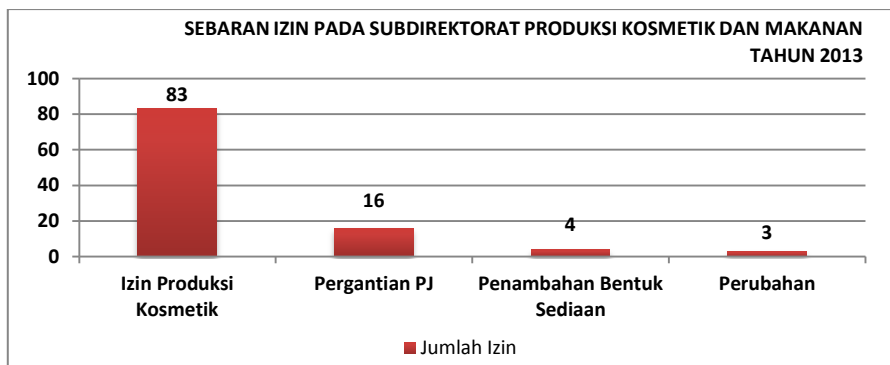


Sumber: Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Gambar 28. Sebaran Izin Pada Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional Tahun 2013

b) Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan;

melaksanakan perizinan di bidang produksi kosmetika. Selama tahun 2013 jumlah izin produksi kosmetika yang masuk sebanyak 106 izin. Sebaran izin tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

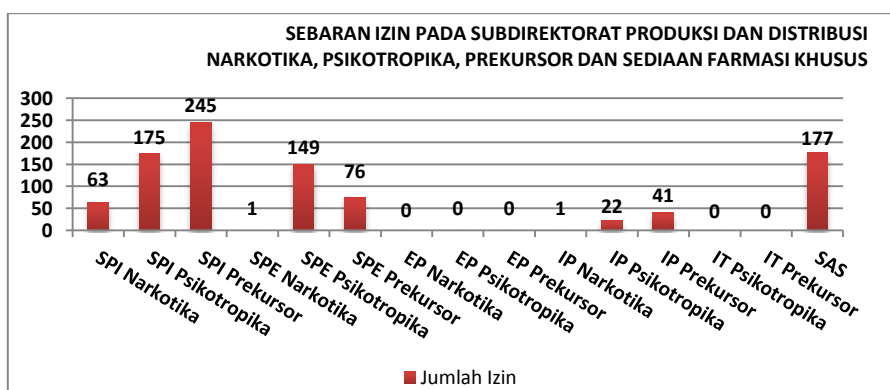


Sumber: Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Gambar 29. Sebaran Izin Pada Sub Direktorat Produksi Kosmetik dan Makanan Tahun 2013

c) Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus;

menerbitkan izin di bidang impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang terdiri dari Surat Persetujuan Impor (SPI), Surat Persetujuan Ekspor (SPE), Importir Produsen (IP), Eksportir Produsen (EP), Importir Terdaftar (IT), Eksportir Terdaftar (ET) dan *Special Access Scheme* (SAS). Rekapitulasi perizinan Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus yang telah diterbitkan pada tahun 2013 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

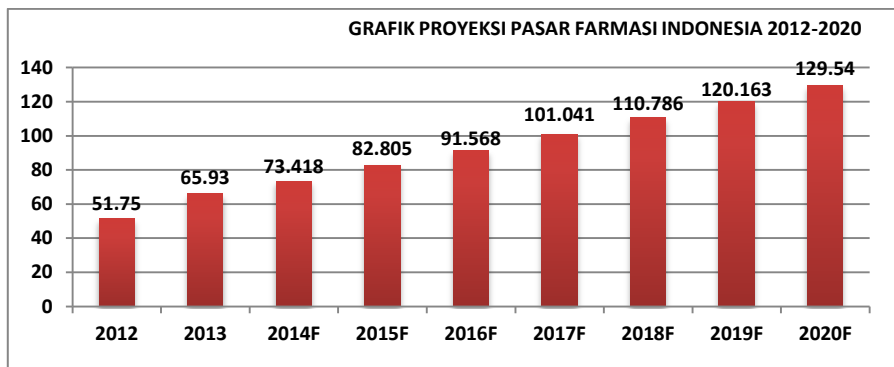


Sumber: Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Gambar 30. Sebaran Izin Pada Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus Tahun 2013

4. Pasar Farmasi

Pasar farmasi nasional dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil analisa pelaporan PBF tahun 2012-2013, pasar farmasi nasional pada tahun 2012 adalah Rp. 51,75 T dan pada tahun 2013 adalah Rp. 65,93 T, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar Rp. 14,18 T dari tahun 2012 dengan persentase 12,05%. Estimasi peredaran obat di Indonesia pada tahun 2014 sebesar Rp. 73,418 T dan pada tahun 2020 diperkirakan akan mencapai Rp.129,54 T. Perkiraan pasar farmasi nasional tahun 2012-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber: E-Report PBF, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Gambar 31. Grafik Proyeksi Pasar Farmasi Indonesia 2012-2020

Peningkatan pasar farmasi ini dapat disebabkan oleh pola hidup dan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kesehatan yang secara umum semakin membaik, dukungan program kesehatan pemerintah yang makin mempermudah akses kesehatan masyarakat dan dukungan sektor farmasi secara menyeluruh.

Sepuluh nama obat terbanyak berdasarkan data yang diperoleh dari transaksi tahun 2012 adalah Dextamin, Cesfan, NaCl 0,9%, Larutan Infus Glukosa, Oralit, Biogesic, Asering, Sopime, Pimacolin, dan Ringer Glukosa Larutan Infuse, sedangkan pada tahun 2013 adalah Dextromethorphan,

Glibenklamid, Ofloxacin, Actifed, RG Choline, Molagit, Asam Mefenamat, Ciprofloxacin, Intrizin dan Wida D5.

No.	Nama Obat Tahun 2012	Nama Obat Tahun 2013
1	DEXTAMINE	DEXTROMETHORPHAN
2	CEFSPAN	GLIBENKLAMIDA
3	NATRIUM Klorida 0.9%	OFLOXACIN
4	GLUKOSA LARUTAN INFUS 5 %	ACTIFED
5	GARAM ORALIT	RG CHOLINE
6	BIOGESIC BOTOL	MOLAGIT
7	ASERING BOTOL 500 ML	ASAM MEFENAMAT
8	SOPIME VIAL	CIPROFLOXACIN
9	PIMACOLIN SYRUP	INTRIZIN
10	DUPHASTON DOS 20 TABLET 10 MG	WIDA D5

Sumber: Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Tabel 12. Sepuluh Obat Terbanyak Dalam Pasar Farmasi Nasional

Pada tahun 2012 transaksi tertinggi dari total pasar farmasi nasional terdapat pada Provinsi Jawa Timur dengan transaksi mencapai Rp. 8,176 T (15,80%). Pada tahun 2013 transaksi tertinggi dari total pasar farmasi nasional terdapat pada Provinsi DKI Jakarta dengan transaksi mencapai 14,648 T (22,27%). Transaksi pasar farmasi pada tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No.	Nama Provinsi	Persentase Tahun 2012	Persentase Tahun 2013
1	Nanggroe Aceh Darussalam	0.94%	0.63%
2	Sumatera Utara	4.28%	7.98%
3	Sumatera Barat	2.33%	1.93%
4	Riau	1.33%	1.63%
5	Jambi	7.19%	0.97%
6	Sumatera Selatan	2.98%	2.44%
7	Bengkulu	0.28%	0.43%
8	Lampung	8.32%	1.64%
9	Kepulauan Bangka-Belitung	0.25%	0.20%
10	Kepulauan Riau	7.46%	1.15%
11	DKI Jakarta	13.37%	22.27%
12	Jawa Barat	11.79%	14.13%
13	Jawa Tengah	4.47%	6.81%

No.	Nama Provinsi	Persentase Tahun 2012	Persentase Tahun 2013
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	2.66%	4.21%
15	Jawa Timur	15.80%	14.90%
16	Banten	3.55%	5.00%
17	Bali	0.85%	2.81%
18	Nusa Tenggara Barat	4.14%	0.40%
19	Nusa Tenggara Timur	0.24%	0.27%
20	Kalimantan Barat	1.33%	1.45%
21	Kalimantan Tengah	0.00%	0.00%
22	Kalimantan Selatan	2.64%	1.88%
23	Kalimantan Timur	1.68%	2.44%
24	Sulawesi Utara	0.66%	0.73%
25	Sulawesi Tengah	0.16%	0.29%
26	Sulawesi Selatan	0.71%	2.44%
27	Sulawesi Tenggara	0.12%	0.14%
28	Gorontalo	0.03%	0.04%
29	Sulawesi Barat	0.00%	0.00%
30	Maluku	0.03%	0.03%
32	Papua (Irian Jaya)	0.40%	0.21%
33	Papua Barat	0.01%	0.09%

Sumber: Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Tabel 13. Pasar Farmasi Nasional Berdasarkan Provinsi

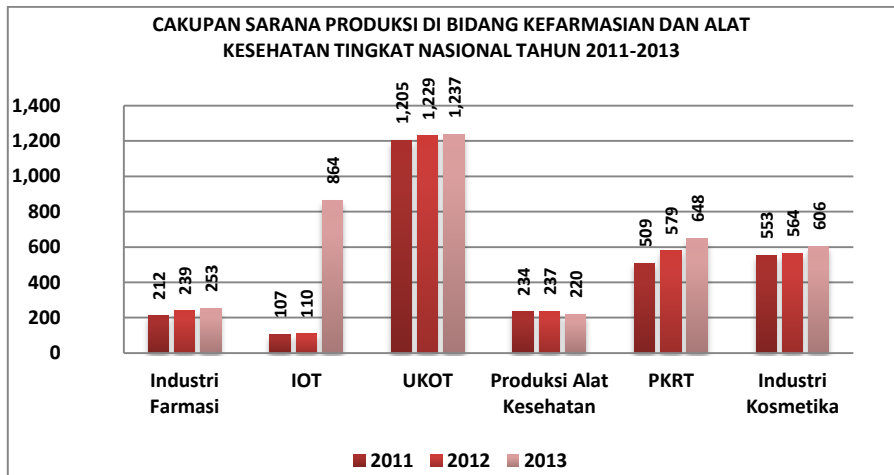
F. Cakupan Sumber Daya Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Indonesia

Salah satu indikator penting untuk menggambarkan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan adalah jumlah sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan.

1. Cakupan Sarana Produksi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Cakupan sarana produksi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan menggambarkan tingkat ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang melakukan upaya produksi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. Yang termasuk sarana produksi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan antara lain Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Industri Kosmetika, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Produksi Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT). Keadaan cakupan sarana

produksi yang dibahas dalam profil ini secara keseluruhan diukur terhadap 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2011 hingga 2013. Khusus pada tahun 2013, dapat dilihat persentase ketersediaan sarana produksi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan pada Gambar 32., dimana terlihat sarana Usaha Kecil dan Usaha Mikro Obat Tradisional memiliki jumlah paling banyak dibandingkan dengan sarana produksi lainnya diikuti oleh Industri Obat Tradisional dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pangsa pasar Obat Tradisional cukup diminati oleh dunia usaha dalam negeri. Hal ini dapat disebabkan oleh kemudahan dalam proses perizinan dan ketersediaan sumber daya hayati yang besar dapat meningkatkan pertumbuhan industri obat tradisional.

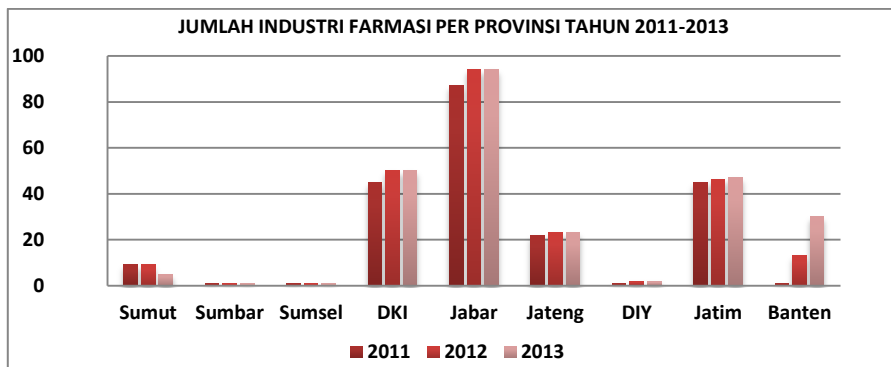


Sumber: Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2012-2014, Ditjen Binfar dan Alkes
 Gambar 32. Grafik Cakupan Sarana Produksi di Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tingkat Nasional Tahun 2011-2013

a) Industri Farmasi

Perkembangan jumlah dan jenis produk yang diproduksi oleh industri farmasi dalam negeri serta kebijakan Pemerintah yang kondusif telah mendorong sarana industri farmasi Indonesia hingga menjadi salah satu industri yang berkembang cukup pesat dengan jumlah konsumen yang terus bertambah. Tercatat bahwa di Indonesia terdapat 24 provinsi yang

belum memiliki sarana industri farmasi antara lain Provinsi Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua. Sementara jumlah industri farmasi di Indonesia pada tahun 2011-2013 yang hanya tersebar di 9 provinsi dapat dilihat pada Gambar 33. Dan Tabel 14., dimana Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah industri farmasi terbanyak diikuti oleh Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur.



Sumber: Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2012-2014, Ditjen Binfar dan Alkes
Gambar 33. Grafik Jumlah Industri Farmasi per Provinsi Tahun 2011 – 2013

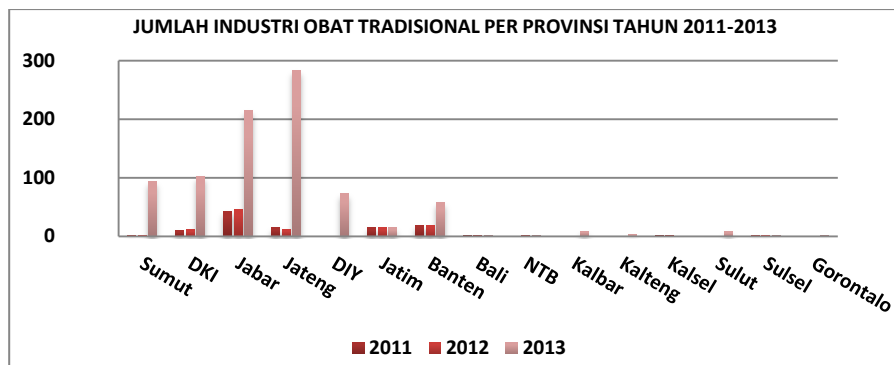
No	Provinsi	Industri Farmasi		
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1	Sumatera Utara	9	9	5
2	Sumatera Barat	1	1	1
3	Sumatera Selatan	1	1	1
4	DKI Jakarta	45	50	50
5	Jawa Barat	87	94	94
6	Jawa Tengah	22	23	23
7	DI Yogyakarta	1	2	2
8	Jawa Timur	45	46	47
9	Banten	1	13	30
Total		212	239	253

Sumber: Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2012-2014, Ditjen Binfar dan Alkes
Tabel 14. Jumlah Industri Farmasi per Provinsi Tahun 2011-2013

Kenyataan bahwa jumlah industri farmasi di wilayah Indonesia bagian barat lebih besar dibanding wilayah Indonesia bagian timur, ini dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan industri farmasi di Indonesia bagian timur dalam rangka pemerataan sarana tersebut di seluruh Indonesia. Keberadaan industri farmasi yang banyak tersebar di wilayah Indonesia bagian barat ini juga salah satu sebab dari mahalannya harga obat di bagian timur akibat tingginya biaya distribusi. Faktor keamanan, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan keadaan ekonomi masyarakat di wilayah timur Indonesia juga harus ditingkatkan untuk mendukung upaya tersebut. Hal ini penting untuk membuka akses masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan khususnya bidang kefarmasian dan alat kesehatan.

b) Industri Obat Tradisional (IOT)

Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan seperti industri obat tradisional sudah banyak berkembang dan mayoritas masyarakat kian banyak yang berpaling pada obat tradisional terkait slogan *back to nature* atau hidup sehat dengan herbal. Penyebaran industri obat tradisional pada tingkat provinsi/kab/kota belum banyak berkembang pada wilayah Indonesia bagian Barat maupun Indonesia bagian timur. Hal ini terlihat dari Gambar 34. Dan Tabel 15., yang menunjukkan grafik dan Tabel Jumlah Industri Obat Tradisional per Provinsi tahun 2011-2013. Terdapat 19 provinsi di Indonesia yang belum memiliki sarana tersebut, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua.



Sumber: Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2012-2014, Ditjen Binfar dan Alkes
 Gambar 34. Grafik Jumlah Industri Obat Tradisional per Provinsi Tahun 2011-2013

No	Provinsi	Industri Obat Tradisional (IOT)		
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1	Sumatera Utara	2	2	94
2	DKI Jakarta	10	11	102
3	Jawa Barat	42	46	215
4	Jawa Tengah	15	12	283
5	DI Yogyakarta	0	0	73
6	Jawa Timur	15	15	15
7	Banten	19	19	58
8	Bali	1	1	1
9	Nusa Tenggara Barat	0	1	1
10	Kalimantan Barat	0	0	9
11	Kalimantan Tengah	0	0	3
12	Kalimantan Selatan	1	1	0
13	Sulawesi Utara	0	0	8
14	Sulawesi Selatan	2	2	1
15	Gorontalo	0	0	1
Total		107	110	864

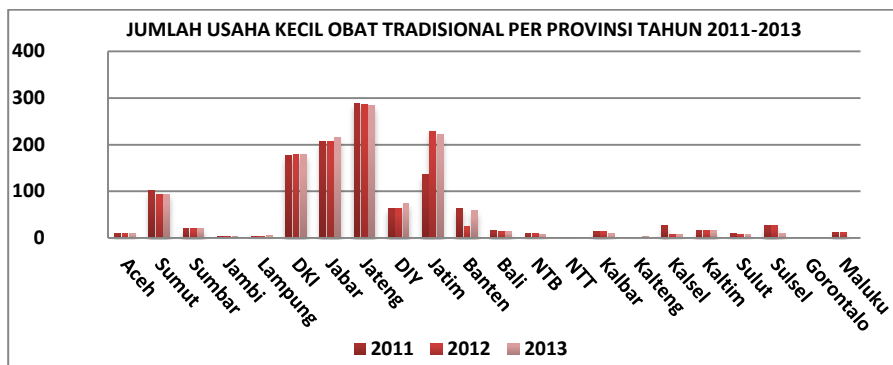
Sumber: Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2012-2014, Ditjen Binfar dan Alkes
 Tabel 15. Jumlah Industri Obat Tradisional per Provinsi Tahun 2011-2013

Keberadaan industri obat tradisional paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah, diikuti oleh Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Kenaikan jumlah dari tahun 2011 hingga 2013 yang cukup signifikan terlihat pada Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh prospek yang baik dan cukup menjanjikan dalam

mengembangkan usaha di bidang obat tradisional, kemudahan dalam proses perizinan dan dalam memperoleh bahan baku, meningkatnya jumlah penelitian di bidang obat tradisional yang didukung oleh kebijakan pemerintah untuk mengedepankan produk herbal asli Indonesia, jamu dan lain sebagainya.

c) Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)

Berdasarkan ketersediaannya, jumlah sarana usaha kecil obat tradisional (UKOT) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mengalami pertumbuhan. Berdasarkan hasil pemutakhiran data kefarmasian tahun 2014, usaha kecil obat tradisional di Indonesia hanya tersebar di 22 provinsi, sementara 11 provinsi yang belum memiliki sarana UKOT antara lain Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. Jumlah sarana usaha kecil obat tradisional tahun 2011-2013 yang tersebar hanya di 22 provinsi tersebut dapat dilihat pada Gambar 35. dan Tabel 16.



Sumber: Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2012-2014, Ditjen Binfar dan Alkes
Gambar 35. Grafik Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional per Provinsi Tahun 2011-2013

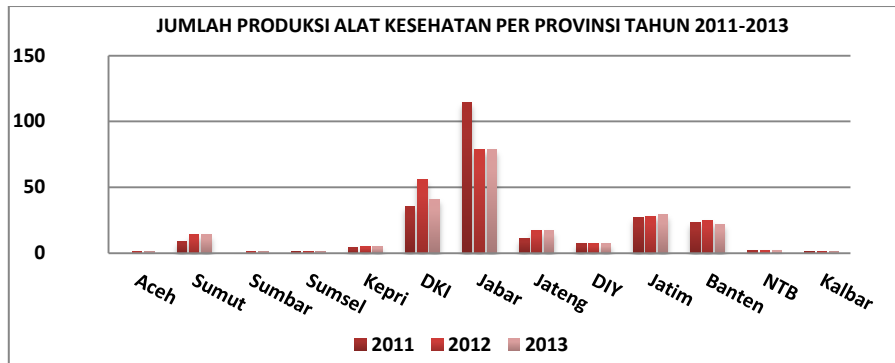
No	Provinsi	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)		
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1	Aceh	10	10	9
2	Sumatera Utara	102	94	94
3	Sumatera Barat	21	21	21
4	Jambi	3	3	3
5	Lampung	4	4	5
6	DKI Jakarta	176	179	179
7	Jawa Barat	207	206	215
8	Jawa Tengah	289	285	283
9	DI Yogyakarta	64	64	73
10	Jawa Timur	136	229	221
11	Banten	64	25	58
12	Bali	16	14	14
13	Nusa Tenggara Barat	9	9	8
14	Nusa Tenggara Timur	1	1	1
15	Kalimantan Barat	13	14	9
16	Kalimantan Tengah	2	2	3
17	Kalimantan Selatan	26	7	7
18	Kalimantan Timur	15	15	15
19	Sulawesi Utara	9	8	8
20	Sulawesi Selatan	26	26	9
21	Gorontalo	0	1	1
22	Maluku	12	12	1
Total		1205	1229	1237

Sumber: Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2012-2014, Ditjen Binfar dan Alkes
Tabel 16. Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional per Provinsi Tahun 2011-2013

d) Produksi Alat Kesehatan

Berdasarkan data cakupan sarana kesehatan bidang kefarmasian dan alat kesehatan pada tahun 2011-2013 terdapat 20 provinsi yang belum memiliki sarana produksi alat kesehatan, yaitu Provinsi Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Sarana produksi alat kesehatan sebagian besar berada di wilayah Indonesia bagian barat. Terdapat peningkatan jumlah sarana produksi alat kesehatan dari tahun ke tahun dan jenis alat kesehatan yang diproduksi juga lebih beragam, sebaran

sarana produksi alat kesehatan di tiap provinsi tahun 2011-2013 dapat dilihat pada Gambar 36. dan Tabel 17.



Sumber: Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2012-2014, Ditjen Binfar dan Alkes
Gambar 36. Grafik Jumlah Sarana Produksi Alat Kesehatan per Provinsi Tahun 2011-2013

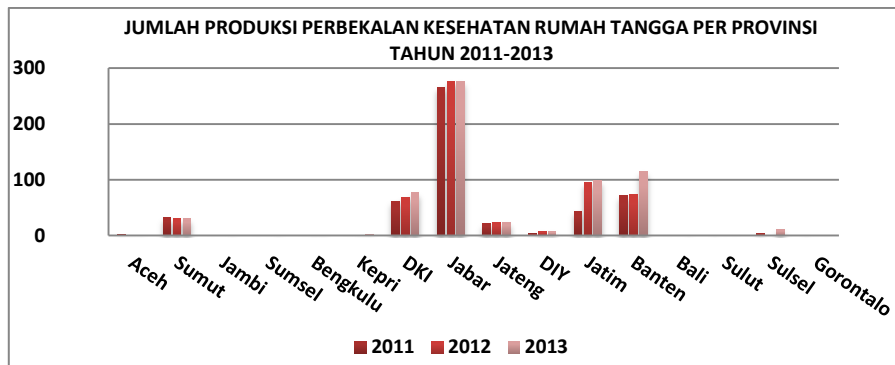
No	Provinsi	Produksi Alat Kesehatan		
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1	Aceh	0	1	1
2	Sumatera Utara	9	14	14
3	Sumatera Barat	0	1	1
4	Sumatera Selatan	1	1	1
5	Kepulauan Riau	4	5	5
6	DKI Jakarta	35	56	41
7	Jawa Barat	114	79	79
8	Jawa Tengah	11	17	17
9	DI Yogyakarta	7	7	7
10	Jawa Timur	27	28	29
11	Banten	23	25	22
12	Nusa Tenggara Barat	2	2	2
13	Kalimantan Barat	1	1	1
Total		234	237	220

Sumber: Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2012-2014, Ditjen Binfar dan Alkes
Tabel 17. Jumlah Sarana Produksi Alat Kesehatan per Provinsi Tahun 2011-2013

e) Produksi Perbekalan Kesehatan dan Rumah Tangga (PKRT)

Berdasarkan data cakupan sarana Produksi Perbekalan Kesehatan dan Rumah Tangga (PKRT) di Indonesia pada tahun 2011-2013 terdapat 19 provinsi yang belum memiliki sarana produksi PKRT, yaitu Provinsi

Sumatera Barat, Riau, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Jumlah sarana produksi PKRT yang tersebar di 14 provinsi di Indonesia pada tahun 2011-2013 dapat dilihat pada Gambar 37. dan Tabel 18.



Sumber: Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2012-2014, Ditjen Binfar dan Alkes
 Gambar 37. Grafik Jumlah Sarana Produksi Perbekalan Kesehatan dan Rumah Tangga per Provinsi Tahun 2011-2013

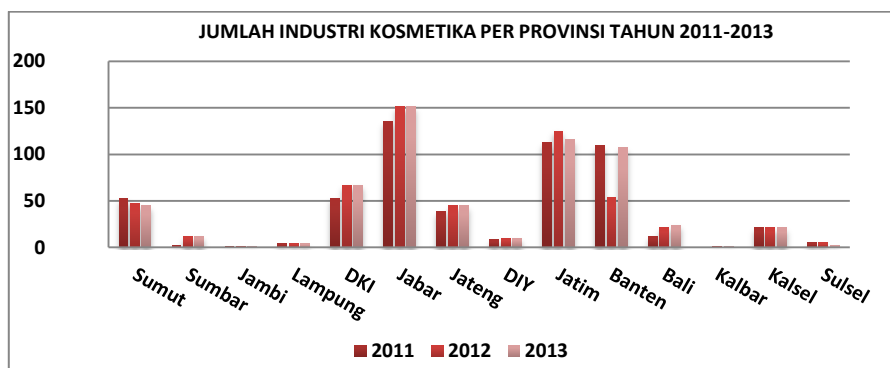
No	Provinsi	Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)		
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1	Aceh	2	1	1
2	Sumatera Utara	33	31	31
3	Jambi	0	0	1
4	Sumatera Selatan	0	0	1
5	Bengkulu	0	1	1
6	Kepulauan Riau	0	1	2
7	DKI Jakarta	62	68	77
8	Jawa Barat	266	277	277
9	Jawa Tengah	22	24	24
10	DI Yogyakarta	3	8	8
11	Jawa Timur	44	95	99
12	Banten	71	73	114
13	Bali	0	0	1
14	Sulawesi Utara	1	0	0
15	Sulawesi Selatan	4	0	11

No	Provinsi	Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)		
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
16	Gorontalo	1	0	0
Total		509	579	648

Sumber: Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2012-2014, Ditjen Binfar dan Alkes
Tabel 18. Jumlah Sarana Produksi Perbekalan Kesehatan dan Rumah Tangga per Provinsi Tahun 2011-2013

f) Industri Kosmetika

Berdasarkan data cakupan sarana industri kosmetika di Indonesia pada tahun 2011-2013, terdapat 19 provinsi yang belum memiliki sarana tersebut yaitu Provinsi Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua. Gambar 38. dan Tabel 19. menunjukkan cakupan jumlah sarana industri kosmetika yang tersebar di 14 provinsi di Indonesia tahun 2011-2013.



Sumber: Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2012-2014, Ditjen Binfar dan Alkes
Gambar 38. Grafik Jumlah Industri Kosmetika per Provinsi Tahun 2011-2013

No	Provinsi	INDUSTRI KOSMETIKA		
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1	Sumatera Utara	52	47	45
2	Sumatera Barat	2	12	12
3	Jambi	1	1	1
4	Lampung	4	4	4

No	Provinsi	INDUSTRI KOSMETIKA		
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
5	DKI Jakarta	53	67	67
6	Jawa Barat	135	151	151
7	Jawa Tengah	38	45	45
8	DI Yogyakarta	8	10	10
9	Jawa Timur	113	125	116
10	Banten	109	54	107
11	Bali	12	21	24
12	Kalimantan Barat	0	1	1
13	Kalimantan Selatan	21	21	21
14	Sulawesi Selatan	5	5	2
Total		553	564	606

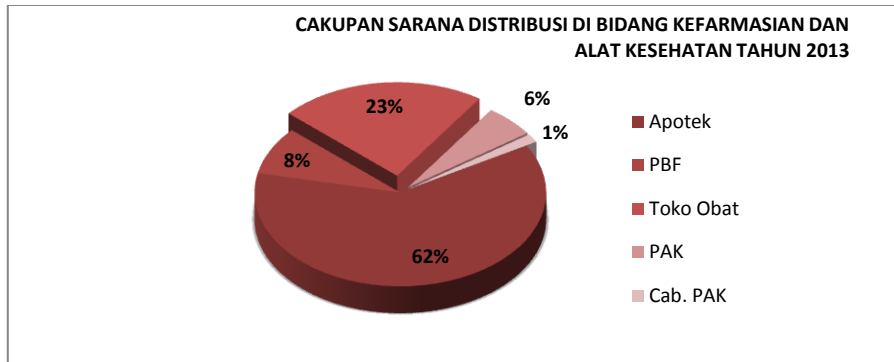
Sumber: Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2012-2014, Ditjen Binfar dan Alkes
Tabel 19. Jumlah Industri Kosmetika per Provinsi Tahun 2011-2013

2. Cakupan Sarana Distribusi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan cakupan sarana pelayanan kesehatan terutama terkait ketersediaan sarana distribusi bidang kefarmasian dan alat kesehatan terdapat beberapa cara salah satunya dengan melihat jumlah sarana distribusi bidang kefarmasian dan alat kesehatan. Sarana distribusi tersebut mencakup Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Toko Obat, Penyalur Alat Kesehatan (PAK) dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Cab. PAK) yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia pada periode tahun 2011-2013. Pada Gambar 39., dapat dilihat persentase jumlah masing-masing sarana distribusi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan yang diuraikan sebagai berikut: 1) sarana distribusi paling dominan adalah apotek sebagai *retailer* yang menguasai 62% dari total sarana, diikuti oleh toko obat yakni sebesar 23%; 2) sarana Pedagang Besar Farmasi sebagai distributor besar/*wholesaler* memegang 8% dari pasar nasional; dan 3) sarana Penyalur Alat Kesehatan sebesar 6%, diikuti oleh Cabang Penyalur Alat Kesehatan merupakan sarana yang sebarannya memiliki jumlah terkecil yakni sebesar 1%.

Hal ini menunjukkan bahwa perspektif dunia usaha masih dominan memilih apotek sebagai jenis sarana distribusi utama yang dikembangkan. Kenyataan ini didukung oleh beberapa grup perusahaan besar yang

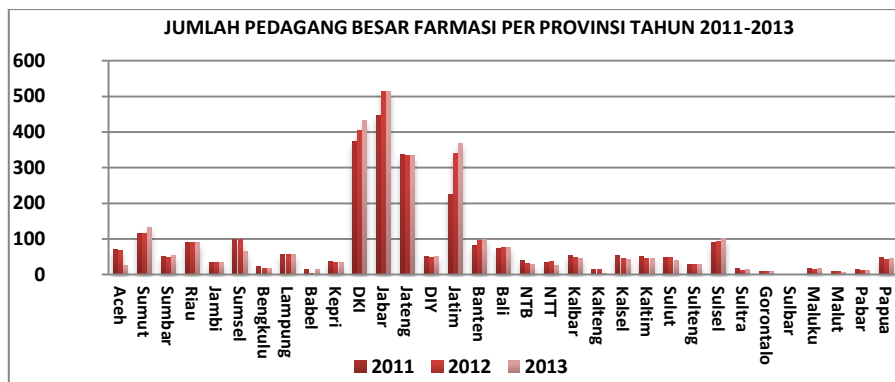
bergerak di bidang farmasi mulai banyak mendirikan apotek sebagai mitra usaha dengan sistem konsinyasi/waralaba yang lebih dikenal dengan sistem *franchise* yang mulai banyak mengakuisisi Apotek Konvensional.



Sumber: Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2014, Ditjen Binfar dan Alkes
Gambar 39. Grafik Cakupan Sarana Distribusi di Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2013

a) Pedagang Besar Farmasi (PBF)

Cakupan sarana di bidang distribusi seperti pedagang besar farmasi yang mempunyai peran sebagai distributor sudah banyak berkembang di Indonesia. Pedagang besar farmasi memegang peranan penting dalam upaya menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan bahan obat untuk pelayanan kesehatan dan melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan obat atau bahan obat yang tidak tepat dan/atau tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan. Perkembangan jumlah sarana PBF di Indonesia pada tahun 2011-2013 dapat dilihat pada Gambar 40. dan Tabel 20. yang menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah PBF yang paling banyak terutama bila dibandingkan dengan daerah lain di Pulau Jawa (DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta). Hal ini dimungkinkan oleh karena Provinsi Jawa Barat merupakan pangsa pasar obat yang sangat baik dan menjanjikan.



Sumber: Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2012-2014, Ditjen Binfar dan Alkes
 Gambar 40. Grafik Jumlah Pedagang Besar Farmasi per Provinsi Tahun 2011-2013

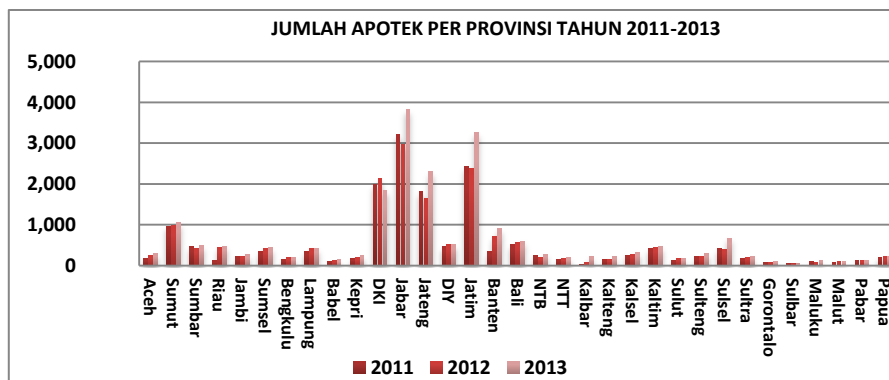
No	Provinsi	PEDAGANG BESAR FARMASI		
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1	Aceh	70	67	26
2	Sumatera Utara	115	116	133
3	Sumatera Barat	51	49	53
4	Riau	91	89	89
5	Jambi	34	35	34
6	Sumatera Selatan	98	98	65
7	Bengkulu	22	18	18
8	Lampung	56	55	55
9	Kepulauan Bangka Belitung	15	3	15
10	Kepulauan Riau	37	34	34
11	DKI Jakarta	372	404	432
12	Jawa Barat	446	513	513
13	Jawa Tengah	337	333	333
14	DI Yogyakarta	51	48	50
15	Jawa Timur	224	341	367
16	Banten	82	96	97
17	Bali	74	77	75
18	Nusa Tenggara Barat	40	30	29
19	Nusa Tenggara Timur	33	37	24
20	Kalimantan Barat	54	48	46
21	Kalimantan Tengah	15	14	4
22	Kalimantan Selatan	53	46	41
23	Kalimantan Timur	51	45	44
24	Sulawesi Utara	47	47	39
25	Sulawesi Tengah	27	28	27
26	Sulawesi Selatan	90	94	102

No	Provinsi	PEDAGANG BESAR FARMASI		
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
27	Sulawesi Tenggara	16	12	14
28	Gorontalo	8	7	7
29	Sulawesi Barat	0	1	1
30	Maluku	16	15	17
31	Maluku Utara	9	7	6
32	Papua Barat	14	10	10
33	Papua	47	43	46
Total		2.695	2.860	2.846

Sumber: Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2012-2014, Ditjen Binfar dan Alkes
Tabel 20. Jumlah Pedagang Besar Farmasi per Provinsi Tahun 2011-2013

b) Apotek

Apotek merupakan sarana distribusi yang dalam menjalankan fungsinya bersifat dwifungsi yaitu fungsi ekonomi dan sosial. Fungsi ekonomi menuntut agar apotek memperoleh laba untuk menjaga kelangsungan usaha sedangkan fungsi sosial adalah untuk pemerataan distribusi dan sebagai salah satu tempat pelayanan informasi obat kepada masyarakat. Orientasi pelayanan kefarmasian di apotek saat ini telah bergeser, semula hanya berorientasi pada pelayanan produk (*product-oriented*) menjadi pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient-oriented*). Jumlah apotek di Indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Gambar 41. dan Tabel 21.



Sumber: Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2012-2014, Ditjen Binfar dan Alkes
Gambar 41. Grafik Jumlah Apotek per Provinsi Tahun 2011-2013

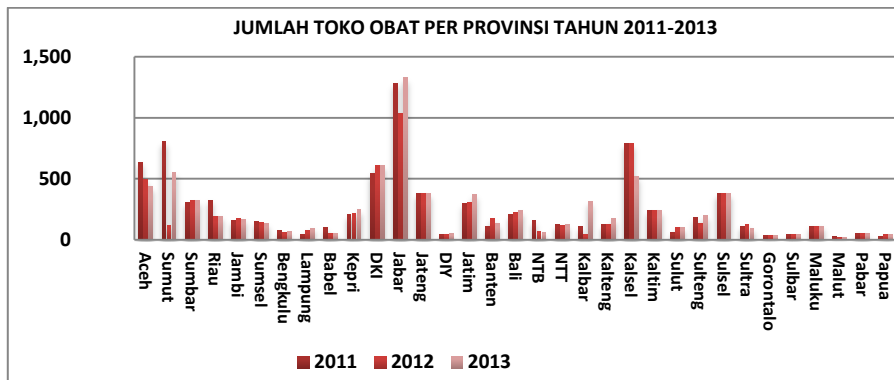
No	Provinsi	APOTEK		
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1	Aceh	168	250	298
2	Sumatera Utara	971	977	1.056
3	Sumatera Barat	464	422	486
4	Riau	117	442	480
5	Jambi	218	231	266
6	Sumatera Selatan	355	410	439
7	Bengkulu	155	190	209
8	Lampung	350	412	429
9	Kepulauan Bangka Belitung	105	124	140
10	Kepulauan Riau	182	190	243
11	DKI Jakarta	1.987	2.143	1.843
12	Jawa Barat	3.207	2.959	3.821
13	Jawa Tengah	1.819	1.657	2.302
14	DI Yogyakarta	471	523	528
15	Jawa Timur	2.422	2.380	3.259
16	Banten	349	719	900
17	Bali	525	571	603
18	Nusa Tenggara Barat	253	208	281
19	Nusa Tenggara Timur	154	178	189
20	Kalimantan Barat	28	74	218
21	Kalimantan Tengah	162	160	217
22	Kalimantan Selatan	260	272	317
23	Kalimantan Timur	425	450	460
24	Sulawesi Utara	123	185	184
25	Sulawesi Tengah	217	215	289
26	Sulawesi Selatan	411	404	674
27	Sulawesi Tenggara	175	209	231
28	Gorontalo	78	89	109
29	Sulawesi Barat	60	46	46
30	Maluku	106	80	127
31	Maluku Utara	86	97	103
32	Papua Barat	122	122	122
33	Papua	210	224	234
Total		16.735	17.613	21.103

Sumber: Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2012-2014, Ditjen Binfar dan Alkes
Tabel 21. Jumlah Apotek per Provinsi Tahun 2011-2013

c) Toko Obat

Toko obat juga mengalami perkembangan yang cukup pesat, walaupun banyak yang sudah mulai beralih izin menjadi apotek. Sebagai bagian dari

sistem distribusi obat, toko obat memiliki fungsi yang strategis dalam upaya pemerataan ketersediaan obat agar obat mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat sesuai dengan salah satu kebijakan nasional dibidang obat. Pembinaan dan pengawasan mutlak dilakukan dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan dan kesalahan dalam penggunaan obat. Jumlah sarana toko obat di Indonesia tahun 2011-2013 dapat dilihat pada Gambar 42. dan Tabel 22. Dari grafik tersebut diketahui pada tahun 2013 Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah toko obat terbanyak. Sementara di Pulau Sumatera, toko obat paling banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara diikuti dengan Provinsi Aceh dan Sumatera Barat. Untuk wilayah Indonesia bagian timur terlihat bahwa sebaran toko obat terbanyak terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga disimpulkan bahwa secara keseluruhan peluang untuk meningkatkan jumlah sarana distribusi berupa toko obat ini masih sangat luas.



Sumber: Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2012-2014, Ditjen Binfar dan Alkes
Gambar 42. Grafik Jumlah Toko Obat per Provinsi Tahun 2011-2013

No	Provinsi	TOKO OBAT		
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1	Aceh	637	495	433
2	Sumatera Utara	805	114	551
3	Sumatera Barat	305	319	319
4	Riau	325	187	193
5	Jambi	161	176	170
6	Sumatera Selatan	147	140	134

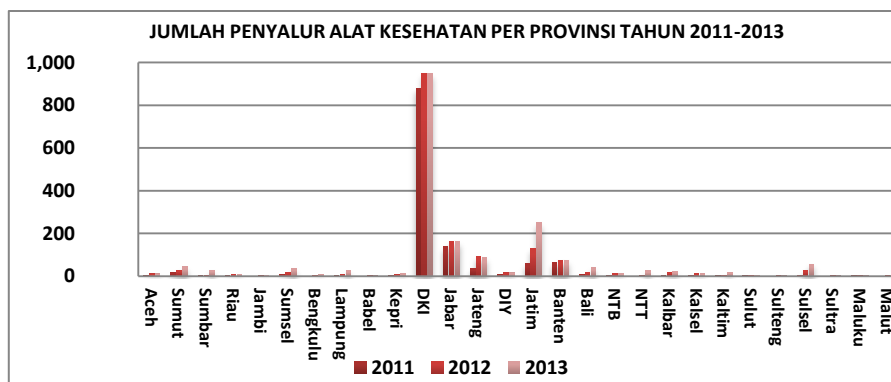
No	Provinsi	TOKO OBAT		
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
7	Bengkulu	78	58	65
8	Lampung	46	77	96
9	Kepulauan Bangka Belitung	98	53	54
10	Kepulauan Riau	207	218	247
11	DKI Jakarta	544	605	605
12	Jawa Barat	1.281	1.038	1.326
13	Jawa Tengah	381	381	381
14	DI Yogyakarta	47	46	48
15	Jawa Timur	297	307	372
16	Banten	111	175	130
17	Bali	206	226	239
18	Nusa Tenggara Barat	158	67	61
19	Nusa Tenggara Timur	125	121	122
20	Kalimantan Barat	111	41	316
21	Kalimantan Tengah	127	127	174
22	Kalimantan Selatan	790	790	517
23	Kalimantan Timur	237	236	238
24	Sulawesi Utara	57	102	100
25	Sulawesi Tengah	181	134	197
26	Sulawesi Selatan	377	377	377
27	Sulawesi Tenggara	113	127	91
28	Gorontalo	37	36	35
29	Sulawesi Barat	45	45	45
30	Maluku	112	112	112
31	Maluku Utara	23	18	21
32	Papua Barat	52	52	52
33	Papua	26	40	40
Total		8.247	7.040	7.861

Sumber: Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2012-2014, Ditjen Binfar dan Alkes
Tabel 22. Jumlah Toko Obat per Provinsi Tahun 2011-2013

d) Penyalur Alat Kesehatan dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan

Kegiatan penyaluran alat kesehatan di atur di dalam Permenkes RI No. 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan yang merupakan perubahan atas Permenkes RI No. 1184/Menkes/Per/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan PKRT. Perubahan mendasar dengan keluarnya Permenkes RI No. 1191/Menkes/Per/VIII/2010 adalah dihapusnya Subpenyalur Alat Kesehatan, sehingga sarana penyalur alat

kesehatan hanya Penyalur Alat Kesehatan (PAK), Cabang PAK, dan Toko Alat Kesehatan. Selama masa peralihan, semua SubPAK harus menyesuaikan dengan peraturan baru hingga paling lambat 3 (tiga) tahun sejak peraturan tersebut diundangkan.



Sumber: Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2012-2014, Ditjen Binfar dan Alkes
Gambar 43. Grafik Jumlah Sarana Penyalur Alat Kesehatan per Provinsi Tahun 2011-2013

No	Provinsi	PENYALUR ALAT KESEHATAN		
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1	Aceh	3	11	11
2	Sumatera Utara	16	29	44
3	Sumatera Barat	1	4	28
4	Riau	3	9	9
5	Jambi	0	1	5
6	Sumatera Selatan	9	16	37
7	Bengkulu	0	4	8
8	Lampung	2	8	26
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	2	1
10	Kepulauan Riau	2	8	13
11	DKI Jakarta	880	950	950
12	Jawa Barat	141	163	163
13	Jawa Tengah	38	93	87
14	DI Yogyakarta	8	15	15
15	Jawa Timur	59	131	250
16	Banten	62	75	75
17	Bali	10	17	40
18	Nusa Tenggara Barat	2	13	13
19	Nusa Tenggara Timur	0	3	25

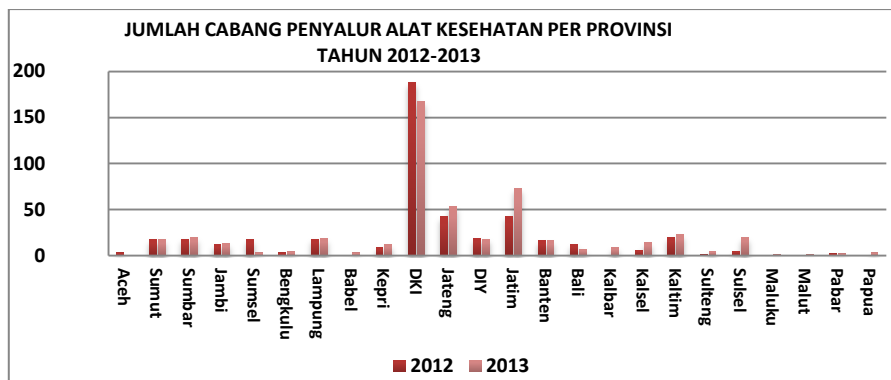
No	Provinsi	PENYALUR ALAT KESEHATAN		
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
20	Kalimantan Barat	2	18	22
21	Kalimantan Selatan	3	12	12
22	Kalimantan Timur	2	5	17
23	Sulawesi Utara	1	4	4
24	Sulawesi Tengah	0	1	1
25	Sulawesi Selatan	4	27	57
26	Sulawesi Tenggara	0	1	2
27	Maluku	1	1	3
28	Maluku Utara	0	3	3
Total		1.249	1.624	1.921

Sumber: Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2012-2014, Ditjen Binfar dan Alkes
Tabel 23. Jumlah Sarana Penyalur Alat Kesehatan per Provinsi Tahun 2011-2013

Dari grafik diatas terlihat bahwa pada saat ini sarana PAK masih terpusat di Pulau Jawa, khususnya Provinsi DKI Jakarta, karena pada awalnya PAK merupakan agen tunggal dari produsen alat kesehatan sehingga ada kecenderungan untuk memilih lokasi usaha di Provinsi DKI Jakarta yang akan mempermudah aktivitas usahanya. Dengan adanya Permenkes No. 1191/Menkes/Per/VIII/2010 maka PAK bisa merupakan agen tunggal maupun subdistributor dari PAK lain.

Hingga tahun 2013, terdapat 5 provinsi yang belum memiliki sarana PAK yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Papua, dan Papua Barat. Kegiatan distribusi alat kesehatan di wilayah provinsi yang belum memiliki PAK dilakukan oleh cabang PAK dan toko alat kesehatan.

Sebagaimana terlihat pada Gambar 44. dan Tabel 24., dimana Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah memiliki sarana cabang PAK yang paling tinggi diantara provinsi yang lain.



Sumber: Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2013-2014, Ditjen Binfar dan Alkes
Gambar 44. Grafik Jumlah Sarana Cabang Penyalur Alat Kesehatan per Provinsi Tahun 2012-2013

No	Provinsi	PENYALUR ALAT KESEHATAN	
		Tahun 2012	Tahun 2013
1	Aceh	11	11
2	Sumatera Utara	29	44
3	Sumatera Barat	4	28
4	Jambi	1	5
5	Sumatera Selatan	16	37
6	Bengkulu	4	8
7	Lampung	8	26
8	Kepulauan Bangka Belitung	2	1
9	Kepulauan Riau	8	13
10	DKI Jakarta	950	950
11	Jawa Tengah	93	87
12	DI Yogyakarta	15	15
13	Jawa Timur	131	250
14	Banten	75	75
15	Bali	17	40
16	Kalimantan Barat	18	22
17	Kalimantan Selatan	12	12
18	Kalimantan Timur	5	17
19	Sulawesi Tengah	1	1
20	Sulawesi Selatan	27	57
21	Maluku	1	3
22	Maluku Utara	3	3
23	Papua Barat		
24	Papua		
Total		1.624	1.921

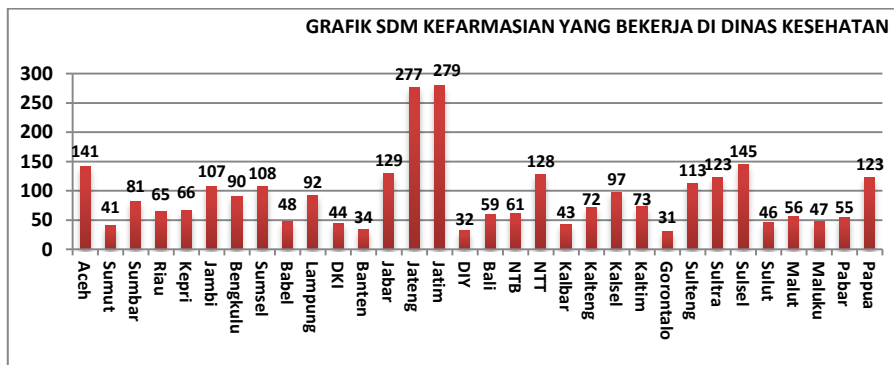
Sumber: Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2013-2014, Ditjen Binfar dan Alkes
Tabel 24. Jumlah Sarana Cabang Penyalur Alat Kesehatan per Provinsi Tahun 2012-2013

3. Cakupan Sumber Daya Manusia Kefarmasian

Peranan Sumber Daya Manusia Kefarmasian sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kesehatan yang komprehensif, namun harus diakui bahwa hingga saat ini masih dihadapi berbagai permasalahan dalam manajemen sumber daya manusia di bidang kefarmasian. Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan belum terpenuhinya jumlah kebutuhan tenaga kefarmasian, kurang meratanya distribusi tenaga kefarmasian terutama di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) serta masih kurangnya dukungan regulasi dalam penyelenggaraan dan pemberdayaan SDM kefarmasian.

Dari hasil Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2014 dapat dilihat sebaran tenaga kefarmasian di 32 provinsi di Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas dengan melihat instansi tempat bekerja.

a. Data Tenaga Kefarmasian di Dinas Kesehatan



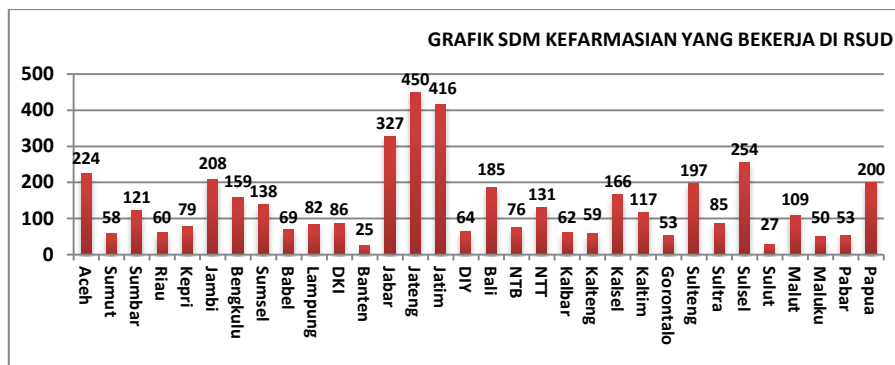
Sumber: Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2014, Ditjen Binfar dan Alkes
Gambar 45. Grafik SDM Kefarmasian yang Bekerja di Dinas Kesehatan

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa sebaran tenaga kefarmasian di Dinas Kesehatan untuk Pulau Jawa paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah tenaga kefarmasian yang bekerja di Dinas Kesehatan sebanyak 279 tenaga farmasi. Untuk Pulau Sumatera, tenaga kefarmasian yang paling banyak bekerja di Dinas Kesehatan terdapat di Provinsi Aceh dengan jumlah tenaga kefarmasian yang bekerja di Dinas Kesehatan

sebanyak 141 tenaga farmasi. Di Pulau Kalimantan dan Sulawesi tenaga kefarmasian dengan jumlah paling banyak terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah tenaga kefarmasian yang bekerja di Dinas Kesehatan sebanyak 97 tenaga farmasi dan Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 145 tenaga farmasi. Sedangkan untuk provinsi Papua dan Papua Barat jumlah tenaga kefarmasian yang bekerja di Dinas Kesehatan berturut-turut sebanyak 123 dan 55 tenaga farmasi. Jumlah tenaga kefarmasian yang bekerja di Dinas Kesehatan yang bersumber dari 32 Provinsi adalah 2906 tenaga farmasi.

b. Data Tenaga Kefarmasian di RSUD

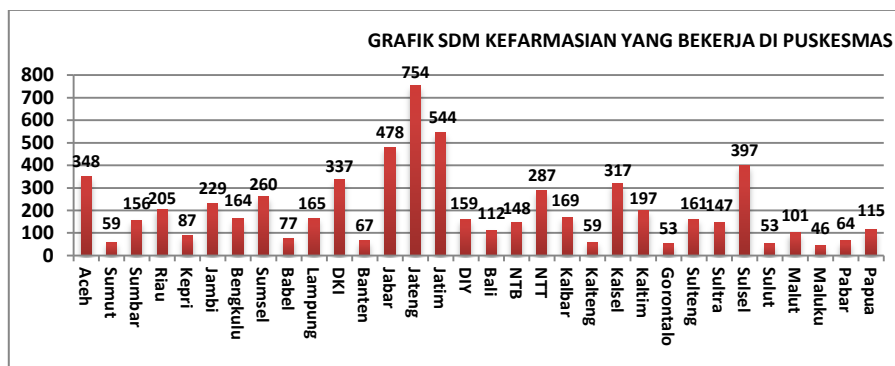
Sebaran tenaga kefarmasian di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk Pulau Jawa paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah tenaga kefarmasian yang bekerja di RSUD sebanyak 450 tenaga farmasi dan Provinsi Jawa Timur sebanyak 416 tenaga farmasi. Untuk Pulau Sumatera, tenaga kefarmasian yang paling banyak bekerja di RSUD terdapat di Provinsi Aceh dengan jumlah tenaga kefarmasian yang bekerja di RSUD sebanyak 224 tenaga farmasi. Di Pulau Kalimantan dan Sulawesi tenaga kefarmasian dengan jumlah paling banyak terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah tenaga kefarmasian yang bekerja di dinas kesehatan sebanyak 166 tenaga farmasi dan Sulawesi Selatan sebanyak 254 tenaga farmasi. Sedangkan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat jumlah tenaga kefarmasian yang bekerja di RSUD berturut-turut sebanyak 200 dan 53 tenaga farmasi. Jumlah tenaga kefarmasian yang bekerja di RSUD yang bersumber dari 32 provinsi adalah 4390 tenaga farmasi.



Sumber: Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2014, Ditjen Binfar dan Alkes
Gambar 46. Grafik SDM Kefarmasian yang Bekerja di RSUD

c. Data Tenaga Kefarmasian di Puskesmas

Puskesmas merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan masyarakat, kinerjanya sangat dipengaruhi ketersediaan sumber daya manusia kesehatan yang dimiliki salah satunya adalah sumber daya manusia di bidang kefarmasiannya. Dari hasil pemutakhiran data tahun 2014 dengan bersumber data dari 32 provinsi, jumlah sumber daya kefarmasian di puskesmas adalah 6583 tenaga farmasi. Jumlah tenaga farmasi yang bekerja di Puskesmas paling banyak berada di Provinsi Jawa tengah dengan jumlah 754 orang dan Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 544 orang. Perbandingan jumlah tenaga farmasi di tiap-tiap provinsi dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber: Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2014, Ditjen Binfar dan Alkes
Gambar 47. Grafik SDM Kefarmasian yang Bekerja di Puskesmas

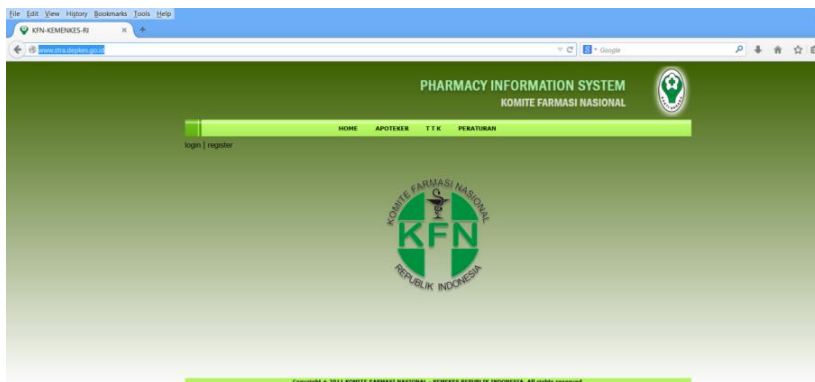
G. Sistem Pelaporan dan Perizinan Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan

1. STRA Online

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian dikeluarkan yang kemudian diturunkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/PER/MENKES/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, mewajibkan Setiap tenaga kefarmasian yang menjalankan pekerjaan kefarmasian baik itu Apoteker maupun Tenaga Teknis Kefarmasian memiliki surat tanda registrasi.

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Kesehatan, membentuk Komite Farmasi Nasional (KFN) yang merupakan unit Non struktural yang bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Dalam upaya memberikan kemudahan dalam membuat Surat Tanda Registrasi Apoteker, Komite Farmasi Nasional (KFN) membuat satu aplikasi berbasis Web (online system) untuk para Apoteker mengajukan permohonan dalam membuat Surat tanda Registrasi tersebut dengan alamat **<http://www.stra.depkes.go.id>**. Melalui aplikasi ini diharapkan para Apoteker yang ingin mengajukan permohonan Surat tanda registrasi dapat melakukan permohonan secara online kapanpun dan dimanapun secara cepat dan mudah.



Gambar 48. Aplikasi STRA Online

2. Aplikasi Pemetaan Sarana Kefarmasian

Pada tahun 2013 Setditjen Binfar dan Alkes merilis suatu Aplikasi yang menyajikan data-data Sumber daya Kefarmasian yang tersebar di Indonesia berupa data yang dipetakan menjadi 14 Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian serta data Instalasi Farmasi sampai dengan Kab/Kota dengan alamat <http://apif.binfar.depkes.go.id>.

Data Sarana Produksi Kefarmasian yang disajikan dalam aplikasi antara lain Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Kosmetika, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Produksi Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT). Sedangkan data Sarana Distribusi Kefarmasian mencakup Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Penyalur Alat Kesehatan dan Sub Penyalur Alat Kesehatan yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia.

Pada Aplikasi ini juga menyajikan data-data terkait dengan keadaan Instalasi farmasi daerah baik itu di Propinsi maupun Kabupaten/kota seperti Luas bangunan, data sarana sampai dengan jumlah SDM di Instalasi Farmasi.

Data – data yang disajikan dalam Aplikasi Pemetaan Sarana Kefarmasian merupakan data-data individu dari masing-masing sarana kefarmasian



Gambar 49. Aplikasi Pemetaan Sarana Kefarmasian

BAB IV

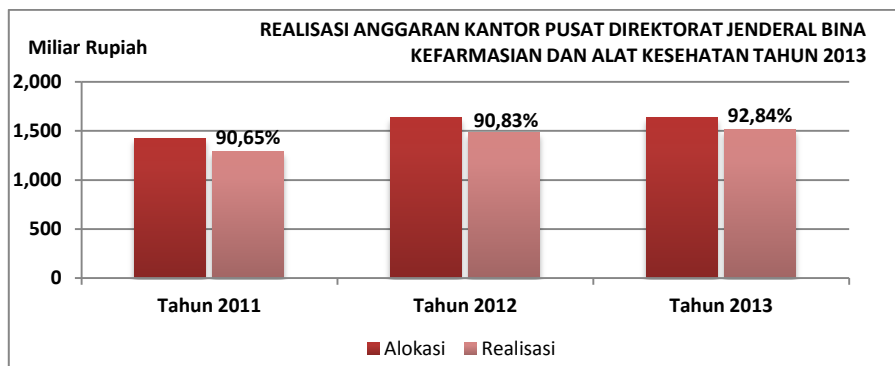
PENUNJANG PROGRAM

A. Pembiayaan

Pagu alokasi APBN Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan terus mengalami peningkatan, ini menunjukkan bahwa pengelolaan kegiatan dalam upaya pencapaian sasaran program kefarmasian dinilai baik. Peningkatan program tidak hanya melalui peningkatan program yang dilakukan di tingkat pusat tapi juga program di daerah.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan kesehatan, pemerintah pusat dan daerah memiliki tugas bersama dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas serta memenuhi akses obat dengan jumlah dan jenis yang cukup. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah berupaya dengan menyelenggarakan serangkaian reformasi melalui sejumlah program pembiayaan kesehatan langsung ke daerah melalui Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

1. Kantor Pusat



Tahun	Alokasi	Realisasi	Persentase
2011	1.424.578.873.000	1.291.379.966.563	90,65
2012	1.635.989.411.000	1.485.916.196.517	90,83
2013	1.633.970.185.000	1.511.040.872.449	92,48

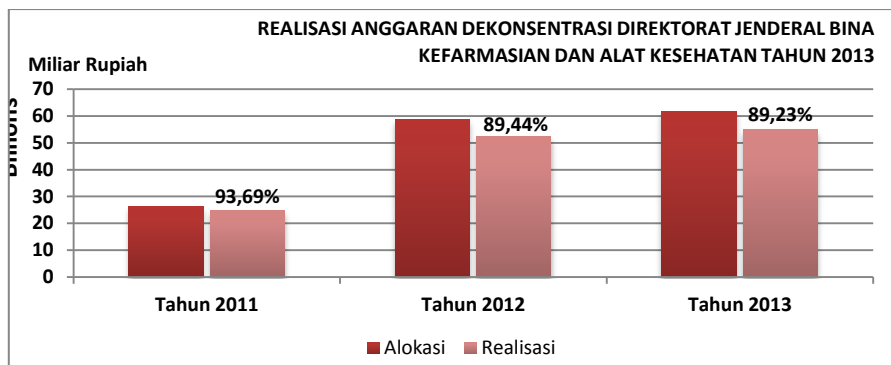
Sumber: Bagian Keuangan, Setditjen Binfar dan Alkes

Gambar 50. Laporan Realisasi Anggaran Kantor Pusat Ditjen Binfar dan Alkes Tahun 2011-2013

Alokasi APBN Ditjen Binfar dan Alkes pada tahun 2013 mengalami penurunan sekitar 0,124% atau senilai Rp. 2.019.226.000,- dibandingkan dengan alokasi tahun 2012. Realisasi anggaran pada tahun 2013 dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 mengalami peningkatan sekitar 1,65%. Hal ini bukan merupakan tidak terserapnya anggaran secara maksimal tetapi lebih kepada proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Ditjen Binfar dan Alkes dilakukan secara efisien terutama untuk pengadaan Obat dan Vaksin.

2. Dana Dekonsentrasi

Untuk mendukung penyelenggaraan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan hingga ke daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengalokasikan dana dekonsentrasi dengan tujuan 1) mengintegrasikan sasaran Program Obat dan Perbekalan Kesehatan ke dalam target sasaran kegiatan Dekonsentrasi; 2) melaksanakan perencanaan kegiatan dan penganggaran yang terpadu antara pusat dan daerah sehingga terbentuk kesamaan visi dan pemahaman terhadap masalah di bidang pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan khususnya serta masalah kesehatan umumnya sekaligusantisipasi terhadap masalah baru di masa yang akan datang; 3) meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan dana Program Obat dan Perbekalan Kesehatan di daerah. Adapun perbandingan jumlah alokasi dan realisasi dana dekonsentrasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada periode tahun 2011 s.d. 2013 dapat dilihat dalam Gambar 53. Sementara distribusi alokasi dana dekonsentrasi per Provinsi dapat dilihat pada LAMPIRAN 10.



Tahun	Alokasi	Realisasi	Persentase
2011	26.400.000.000	24.734.791.627	93,69
2012	58.537.805.000	52.356.283.423	89,44
2013	61.763.014.000	55.112.944.209	89,23

Sumber: Bagian Keuangan – Setditjen Binfar dan Alkes

Gambar 51. Laporan Realisasi Anggaran Dekonsentrasi Ditjen Binfar dan Alkes Tahun 2011-2013

B. Peraturan Perundang-undangan, Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan, Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat juga telah memberikan kebijakan yang tertuang dalam produk hukum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kefarmasian dan alat kesehatan.

Sejak tahun 2002, Bagian hukum, organisasi dan hubungan masyarakat telah berupaya turut serta menyusun regulasi dengan berkoordinasi dengan unit kerja baik di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan maupun dengan unit teknis lainnya.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2010-2014, salah satu indikator kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah jumlah rancangan regulasi yang disusun. Target jumlah

rancangan regulasi yang disusun pada tahun 2013 yaitu 16 rancangan regulasi dengan realisasi 22 rancangan regulasi.

Rancangan regulasi tersebut berupa rancangan Peraturan Menteri Kesehatan dan rancangan Keputusan Menteri Kesehatan yang terdiri dari:

1. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi
2. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi
3. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat dengan Prosedur *e-purchasing* berdasarkan *e-catalogue*
4. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Peta Jalan untuk Pengembangan Industri Alat Kesehatan
5. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Peta Jalan Pengembangan Bahan Baku Obat
6. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rencana Induk Pengembangan Bahan Baku Obat Tradisional
7. Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Formularium Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
8. Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Harga Vaksin dan Serum Program Imunisasi Tahun 2013
9. Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukkan PT. Kimia Farmasi (Persero) Tbk Untuk dan Atas Nama Pemerintah Melaksanakan Paten Terhadap Obat Antiviral dan Antiretroviral
10. Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 094/Menkes/SK/II/2012 tentang Harga Obat Untuk Pengadaan Pemerintah Tahun 2013
11. Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Daftar Obat Esensial Nasional

12. Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Formularium Nasional
13. Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Generik
14. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pengobatan Dasar di Puskesmas
15. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
16. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Promosi dan Iklan Alat Kesehatan
17. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rencana Kebutuhan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
18. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi
19. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika
20. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB)
21. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Praktik Apoteker
22. Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberlakuan Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia Edisi I

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan dan rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tersebut disampaikan ke Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan untuk menindaklanjuti penyusunan finalisasi rancangan sampai dengan penetapannya menjadi Peraturan Menteri Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan oleh Menteri Kesehatan. Dalam tahun 2013 dari 22 rancangan sebanyak 13 rancangan telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Peraturan Perundang-undangan Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang diterbitkan tahun 2013 yaitu:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi
Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Impor Narkotika hanya dapat dilakukan oleh satu perusahaan PBF milik negara yang telah memiliki izin khusus sebagai importir dari Menteri. Impor Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, PBF dan Lembaga Ilmu Pengetahuan. Ekspor Narkotika hanya dapat dilakukan oleh satu perusahaan PBF milik negara yang telah memiliki izin khusus sebagai eksportir dari Menteri. Ekspor Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi dan PBF.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi
Industri farmasi masih banyak yang belum melakukan pembaharuan izin sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/Menkes/Per/ XII/2010 tentang Industri Farmasi, maka untuk memacu percepatan pembaharuan izin industri farmasi ditetapkan perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat dengan Prosedur *e-purchasing* berdasarkan *e-catalogue*
Untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan obat pada Kementerian/Lembaga, Dinas, atau Instansi, telah tersedia Katalog obat yang dapat diakses di Portal Pengadaan Nasional melalui *Website*

www.inaproc.lkpp.go.id. Pengadaan obat yang tersedia dalam daftar katalog Portal Pengadaan Nasional harus dilakukan dengan prosedur *e-purchasing*.

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2013 tentang Peta Jalan untuk Pengembangan Industri Alat Kesehatan
Sebagai salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan maka ketersediaan alat kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat merupakan salah satu bagian penting dalam mencapai pelayanan kesehatan yang prima. Peta Jalan Pengembangan Industri Alat Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan industri alat kesehatan dalam negeri yang mampu menghasilkan alat kesehatan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat serta terjangkau oleh masyarakat.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 87 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengembangan Bahan Baku Obat
Kebijakan di bidang pengembangan bahan baku obat secara nasional diambil untuk mengantisipasi berbagai perubahan dan tantangan strategis, baik internal maupun eksternal dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan untuk memproduksi bahan baku obat agar dapat memenuhi kebutuhan akan bahan baku obat dalam negeri, yang dijamin bermutu tinggi, memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah. Peta Jalan Pengembangan Bahan Baku Obat bertujuan untuk meningkatkan pengembangan dan produksi bahan baku obat dalam negeri dan mengurangi angka impor, yang dijamin bermutu tinggi.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Bahan Baku Obat Tradisional
Rencana Induk Pengembangan Bahan Baku Obat Tradisional bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan kemampuan untuk memproduksi bahan baku obat tradisional yang ditujukan agar dapat memenuhi kebutuhan akan bahan baku obat

tradisional dalam negeri, yang dijamin bermutu tinggi, memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 89/Menkes/SK/II/2013 tentang Formularium Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat diselenggarakan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin. Peningkatan mutu program jaminan kesehatan masyarakat didukung ketersediaan obat yang aman, bermanfaat dan bermutu dengan harga yang terjangkau. Formularium Program Jaminan Kesehatan Masyarakat merupakan daftar obat terpilih yang paling dibutuhkan dan harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan Program Jamkesmas dan mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, fasilitas pelayanan kesehatan, serta pihak lain yang terkait dalam penyediaan dan penggunaan obat dalam pelaksanaan Program Jamkesmas.

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 109/Menkes/SK/III/2013 tentang Penunjukan PT. Kimia Farmasi (Persero) Tbk Untuk dan Atas Nama Pemerintah Melaksanakan Paten Terhadap Obat Antiviral dan Antiretroviral

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak dalam upaya penanggulangan penyakit HIV/AIDS dan Hepatitis B diperlukan obat Antiviral dan Antiretroviral yang saat ini dilindungi paten. Setelah dilakukan penilaian ke beberapa industri farmasi milik Pemerintah, PT. Kimia Farma (Persero) Tbk dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pelaksana paten oleh Pemerintah untuk memproduksi dan menyalurkan obat Antiviral dan Antiretroviral yang mengandung zat aktif Efavirenz, Abacavir, Didanosin, Tenofovir, kombinasi Lopinavir dan

Ritonavir, kombinasi Tenofovir dan Emtrisitabin serta kombinasi Tenofovir, Emtrisitabin dan Efavirenz.

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 112/Menkes/SK/III/2013 tentang Harga Vaksin dan Serum Program Imunisasi Tahun 2013
Dalam Menteri Kesehatan Nomor 112/Menkes/SK/III/2013 tentang Harga Vaksin dan Serum Program Imunisasi Tahun 2013 tercantum daftar harga vaksin dan serum program imunisasi tahun 2013. Harga vaksin dan serum yang dimaksud merupakan harga per satuan kemasan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan merupakan harga untuk pengadaan di tingkat pusat dengan franko gudang Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 247/Menkes/SK/VII/2013 tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 094/Menkes/SK/II/2012 tentang Harga Obat Untuk Pengadaan Pemerintah Tahun 2013
Pengadaan obat pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, prinsip keadilan, transparansi, profesional dan akuntabel untuk mendapatkan produk yang berkualitas dengan harga yang wajar. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menetapkan katalog elektronik (e-catalogue) obat untuk memenuhi kebutuhan pengadaan pemerintah dalam rangka pelayanan kesehatan sehingga dilakukan pencabutan atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 094/Menkes/SK/II/2012 tentang Harga Obat Untuk Pengadaan Pemerintah Tahun 2013.
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 312/Menkes/SK/IX/2013 tentang Daftar Obat Esensial Nasional
Obat esensial adalah obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi dan rehabilitasi, yang diupayakan tersedia di fasilitas

kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya.

Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) merupakan daftar yang berisikan obat terpilih yang paling dibutuhkan dan diupayakan tersedia di unit pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya. Penerapan DOEN dimaksudkan untuk meningkatkan ketepatan, keamanan, kerasionalan penggunaan dan pengelolaan obat yang sekaligus meningkatkan daya guna dan hasil guna biaya yang tersedia sebagai salah satu langkah untuk memperluas, pemeratakan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328/Menkes/SK/IX/2013 tentang Formularium Nasional

Formularium Nasional disusun dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, menjamin aksesibilitas obat yang aman, berkhasiat, bermutu dan terjangkau dalam jumlah dan jenis yang cukup, dan mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Formularium Nasional merupakan daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam hal obat yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Formularium Nasional, dapat digunakan obat lain secara terbatas berdasarkan persetujuan komite medik dan Kepala/Direktur Rumah Sakit setempat.

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436/Menkes/SK/XI/2013 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Generik

Dalam rangka menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman disusun informasi mengenai Harga Eceran Tertinggi obat generik yang lengkap dan objektif. Harga Eceran Tertinggi adalah harga jual tertinggi obat generik di apotek, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang berlaku untuk seluruh Indonesia.

Kiprah yang dilakukan oleh Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat dalam memberikan dukungan terhadap peran Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan bukan hanya dibidang peraturan perundang-undangan tetapi juga dilakukan Subbagian Organisasi, yang dimulai dengan perbaikan sistem manajemen pemerintahan melalui penguatan birokrasi yang merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme, meningkatkan kapasitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Ada delapan program yang dilaksanakan yaitu: 1) manajemen perubahan; 2) penataan peraturan perundang-undangan; 3) penataan dan penguatan organisasi; 4) penataan tatalaksana; 5) penataan sistem manajemen SDM aparatur; 6) penguatan pengawasan; 7) penguatan akuntabilitas kinerja; dan 8) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk mendukung ini, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menetapkan *assessor* dan *agent of change* untuk mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja agar terbangun kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaan program kegiatan reformasi birokrasi. Selain itu dilaksanakan penyusunan informasi jabatan, penyusunan standar operasional prosedur, *e-government*, evaluasi jabatan untuk menentukan peringkat jabatan dan harga jabatan yang digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja serta perbaikan kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai laporan kinerja tahunan tepat pada waktu yang ditetapkan dan selanjutnya untuk mengetahui pelaksanaan kinerja dan mendorong adanya

peningkatan kinerja maka dilakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pada tahun 2013, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012 telah memberi nilai positif dan mengangkat nama Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Pemberian nilai oleh Inspektorat Jenderal pada evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan memperoleh nilai sebesar 97,94 dengan kategori AA.

Sementara untuk kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) untuk menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya perbaikan yang perlu dilakukan. Untuk penilaian difokuskan terhadap langkah yang telah dilakukan dikaitkan dengan hasil yang diharapkan dan indikator kinerja utama dalam pencapaian sasaran dan indikator keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi.

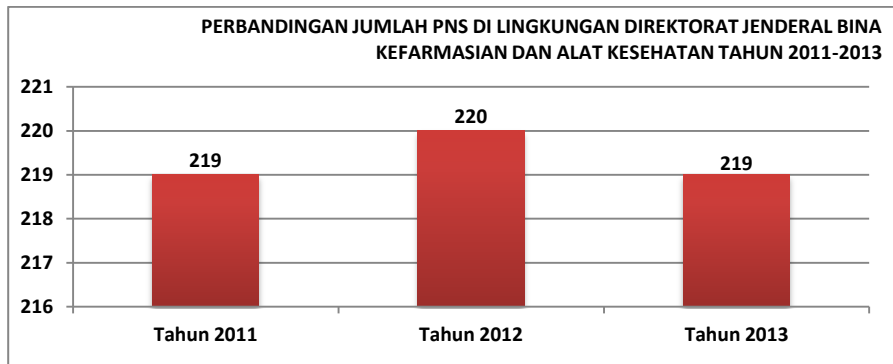
Subbagian Hubungan Masyarakat dalam memberikan informasi program kefarmasian dan alat kesehatan, turut serta memberi dukungan melalui media baik secara IT maupun buletin Infarkes yang telah ada sejak tahun 2003. Melalui buletin Infarkes telah banyak memberikan informasi tentang kegiatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan baik kepada masyarakat umum maupun internal Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang didalamnya memuat tulisan ilmiah dan sosialisasi forum ilmiah terkait kefarmasian dan alat kesehatan.

Pencapaian yang diberikan oleh Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat tidak terlepas dari adanya koordinasi yang baik diantara satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang secara terus menerus tetap terbina.

C. Ketenagaan

Ketenagaan atau Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor penting yang menggerakkan suatu organisasi. Manajemen Sumber Daya

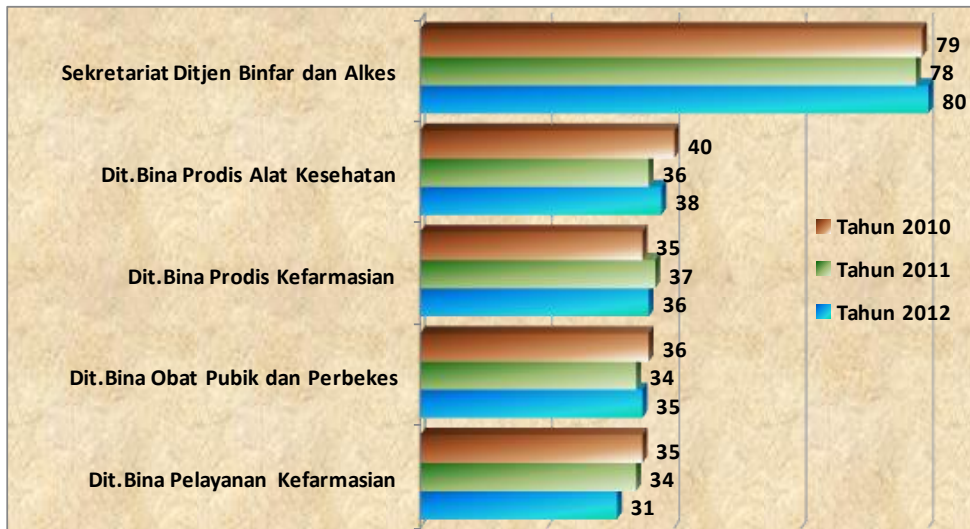
Manusia (SDM) berkaitan erat dengan upaya berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat diperlukan oleh suatu organisasi. Manajemen SDM melakukan tugas dan fungsinya baik melalui peningkatan kualitas maupun kuantitas dari tiap personelnnya. Berdasarkan Permenkes No. 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, kegiatan terkait manajemen SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dilakukan oleh Subbagian Kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai, mutasi pegawai, dan pengisian jabatan.



Gambar 52. Grafik Perbandingan Jumlah PNS di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2011-2013

Perbandingan jumlah PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada tahun 2011 hingga 2013 dapat dilihat pada Gambar 54. Grafik tersebut menunjukkan penurunan jumlah PNS pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012. Pembahasan cakupan ketenagaan dalam profil ini meliputi distribusi PNS di lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes berdasarkan Jabatan, Golongan, Jenjang dan Jenis Pendidikan serta Kategori Usia.

1. Distribusi PNS di Lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes



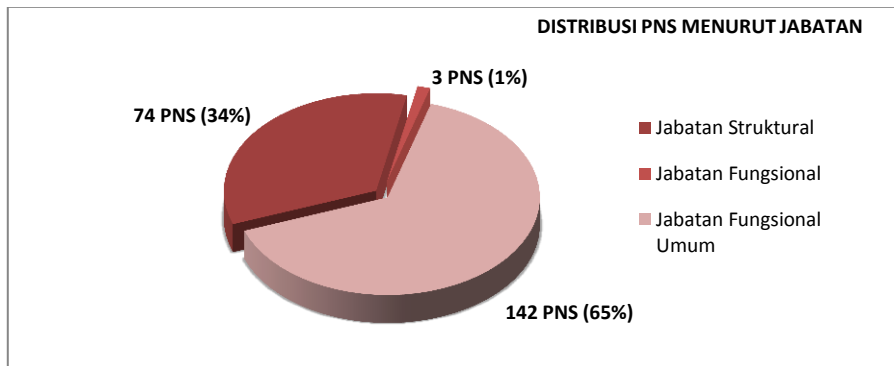
Gambar 53. Grafik Perbandingan Distribusi Jumlah PNS Berdasarkan Unit Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2011-2013

Dari Gambar 55. dapat dilihat bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada tahun 2013 memiliki jumlah PNS terbanyak bila dibandingkan dengan Unit Eselon II lainnya, yakni sebesar **37%** dari seluruh PNS di lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes. Hal ini berkaitan dengan tugas Sekretariat Direktorat Jenderal yang melakukan kegiatan dukungan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal. Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi antara lain:

- koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- pengelolaan data dan informasi;
- penyiapan urusan hukum, penataan organisasi, jabatan fungsional dan hubungan masyarakat;
- pengelolaan urusan keuangan;
- pelaksanaan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan perlengkapan; dan
- evaluasi dan penyusunan laporan.

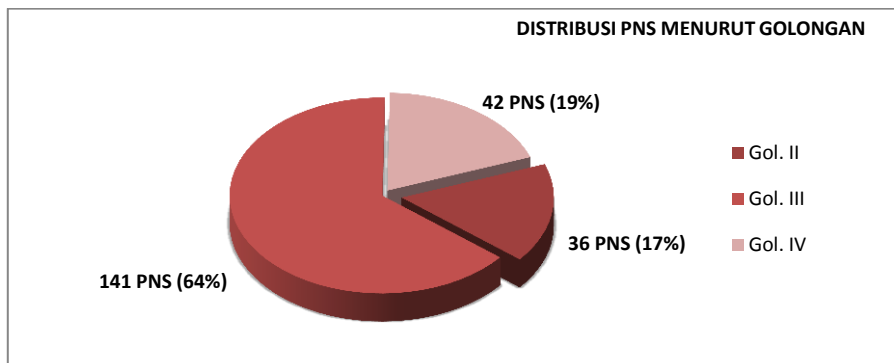
2. Distribusi PNS Menurut Jabatan

Gambar 56. memperlihatkan grafik distribusi jumlah PNS menurut jabatannya yang menggambarkan bahwa sebaran PNS pada jabatan sebagai Jabatan Fungsional Umum (JFU) adalah yang terbesar yakni sebanyak 65% dari total PNS yang ada di lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes. Sementara JFU memiliki jumlah hampir dua kali lebih banyak terhadap posisi jabatan struktural. Jika diambil nilai rata-rata untuk satu jenis jabatan struktural bila dibandingkan dengan jumlah JFU, berarti tiap jenis jabatan struktural minimal memiliki dua orang JFU dibawah kepemimpinannya.



Gambar 54. Grafik Distribusi Jumlah PNS menurut Jabatan di Lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes Tahun 2013

3. Distribusi PNS Menurut Golongan

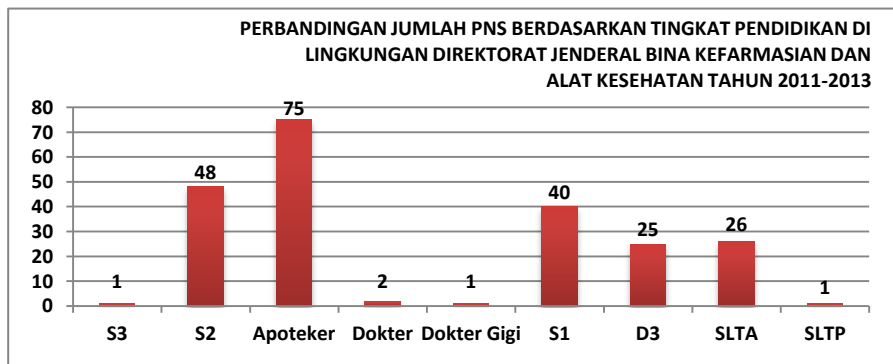


Gambar 55. Grafik Distribusi Jumlah PNS menurut Golongan di Lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes Tahun 2013

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa jumlah PNS golongan III memiliki sebaran terbesar yakni sekitar 64% dari total PNS, sebaliknya golongan II memiliki sebaran terkecil. Hal ini menunjukkan disparitas yang signifikan antar golongan karena kenaikan pangkat dan golongan berkaitan erat dengan jenjang pendidikan dan lamanya masa bakti dari seorang PNS. Sementara untuk naik ke jenjang golongan IV berkaitan erat dengan jenis jabatan struktural yang telah ditempuh oleh PNS. Ketentuan mengenai kenaikan pangkat diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

4. Distribusi PNS berdasarkan Jenjang dan Jenis Pendidikan

Jenjang dan jenis pendidikan yang ditempuh oleh seorang PNS sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya dapat membantu meningkatkan kinerja suatu organisasi. Upaya PNS dalam meningkatkan kapasitas ilmu di bidangnya juga difasilitasi oleh Ditjen Binfar dan Alkes dengan memberikan dukungan moril dan materil seperti beasiswa, tugas belajar, dan izin belajar terutama ke jenjang Magister/Strata 2. Hal ini dapat dilihat dari Gambar 58. yang menunjukkan bahwa 20,91% dari jumlah PNS di lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes telah menempuh pendidikan di tingkat Strata 2/S2. Sementara jumlah PNS dengan jenjang pendidikan Strata 1 (satu) yang menempuh program profesi adalah jumlah terbanyak yakni sebesar 36,36% atau setara dengan 80 orang yang terbagi sesuai tabel distribusi dibawah ini.



No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	S3	1
2	S2	48
3	Apoteker	75
4	Dokter	2
5	Dokter Gigi	1
6	Sarjana Farmasi	5
7	Sarjana Ekonomi	9
8	Sarjana Hukum	5
9	Sarjana Komputer	5
10	Sarjana Lainnya	16
11	D3 Farmasi	21
12	D3 Komputer	2
13	D3 Akuntansi	1
14	D3 AAK	1
15	SLTA	26
16	SLTP	1
Total PNS		219

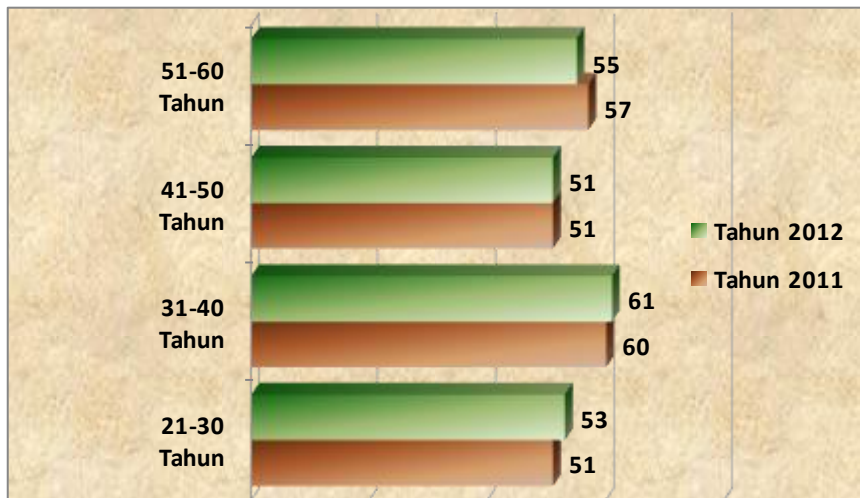
Gambar 56. Grafik Perbandingan Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes Tahun 2013

5. Distribusi PNS berdasarkan Kategori Usia

Perbandingan distribusi jumlah PNS berdasarkan kategori usia di lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes tahun 2013 digambarkan oleh grafik batang dibawah ini, dimana terlihat bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna antar populasi kategori usia.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan batas usia pensiun adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian menurut Pasal 4 (empat) ayat 1 (satu) disebutkan bahwa Batas Usia Pensiun tersebut dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau ditentukan lain bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang Jabatan tertentu.

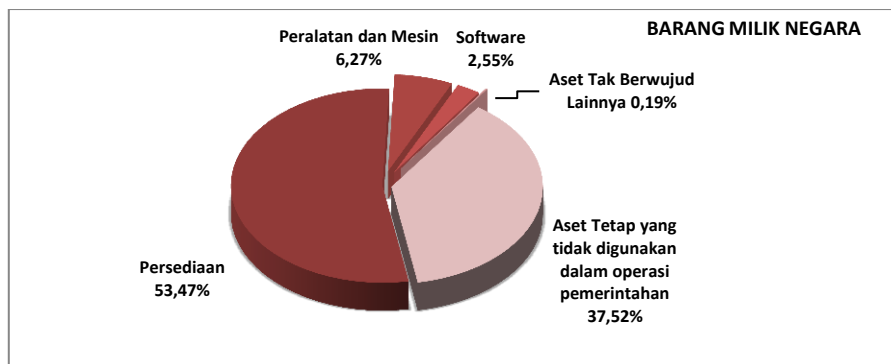
Data yang digunakan diperoleh dari Subbagian Kepegawaian, Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana gambar berikut:



Gambar 57. Grafik Perbandingan Distribusi Jumlah PNS berdasarkan Kategori Usia di Lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012–2013

D. Inventaris

Berdasarkan laporan neraca SIMAK-BMN, pada tahun 2013 aset terbesar yang dimiliki Unit Eselon I Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah Persediaan yakni sebesar 53,47% dari keseluruhan total aset. Kemudian, Pengelolaan Persediaan mengalami kenaikan sebesar 20,24% berdasarkan data pada tahun 2012 yakni sebesar Rp. 64.392.812.319,- menjadi Rp. 77.423.320.999,- pada tahun 2013. Nilai BMN Peralatan dan Mesin mengalami akumulasi penyusutan pada tahun 2013 sebesar 41,31% sehingga mendapatkan nilai netto sebesar Rp. 9.073.950.307,-. Begitu pula dengan nilai BMN Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan mengalami akumulasi penyusutan sebesar 75,53% sehingga didapatkan nilai netto sebesar Rp. 54.322.891.372,-. Untuk *Software* dan Aset Tak Berwujud Lainnya juga mengalami kenaikan pada tahun 2013 yakni masing-masing sebesar 64,82% dan 482,11%.



Gambar 58. Grafik Aset BMN di Lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes Tahun 2013

Data Aset Barang Milik Negara (BMN)

Jika dilihat dari tabel dibawah ini yang menggambarkan perbandingan kekayaan aset BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan antara tahun 2011 dan 2012 terlihat dimana jumlah kekayaan aset tersebut mengalami kenaikan, yakni sebesar 77,28% namun mengalami penurunan pada tahun 2012 hingga tahun 2013 sebesar 5.60%.

ASET	TAHUN		
	2011	2012	2013
Persediaan	27.242.289.307	64.392.812.319	77.423.320.999
Peralatan dan Mesin	17.999.493.258	19.150.257.098	21.964.886.494
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	(12.890.936.187)
Software	1.809.803.850	2.239.013.850	3.690.383.850
Aset Tak Berwujud Lainnya	47.500.000	47.500.000	276.500.000
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	39.410.712.774	67.537.824.756	71.927.576.426
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-	-	(17.604.685.054)
JUMLAH	86.509.799.189	153.367.408.023	144.787.046.528

Tabel 25. Perbandingan BMN di Lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes 2011-2013

BAB V

PENUTUP

Berbagai upaya kesehatan di bidang kefarmasian dilakukan untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui berbagai kebijakan dan reformasi program-program pembangunan di bidang kefarmasian sehingga tercapai visi dan misi serta tujuan dari pembangunan kesehatan.

Profil Kefarmasian dan Alat Kesehatan merupakan hasil dari upaya yang telah dilakukan dan pencapaian yang telah diraih oleh Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Hal ini juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan sehingga dapat diketahui baik oleh pelaksana di bidang kesehatan khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya.

Patut disadari bahwa sistem informasi yang ada saat ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi secara optimal sehingga data dan informasi yang ditampilkan dalam profil ini masih terasa kurang lengkap.

Meskipun demikian diharapkan agar Profil Kefarmasian dan Alat Kesehatan ini dapat menjadi salah satu referensi dan informasi yang dapat memberikan gambaran tentang program kefarmasian dan dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan serta bahan untuk evaluasi bagi pimpinan.

LAMPIRAN 1

ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN 2011-2013

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Alokasi		
		2011	2012	2013
I	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Rp 29,329,000,000	Rp 32,529,180,000	Rp 40,900,030,000
1	Kab. Aceh Barat	Rp 892,300,000	Rp 1,046,360,000	Rp 1,942,280,000
2	Kab. Aceh Besar	Rp 1,808,400,000	Rp 1,954,340,000	Rp 5,326,250,000
3	Kab. Aceh Selatan	Rp 1,433,700,000	Rp 1,649,610,000	Rp 1,654,330,000
4	Kab. Aceh Singkil	Rp 1,360,300,000	Rp 1,373,570,000	Rp 1,319,700,000
5	Kab. Aceh Tengah	Rp 957,400,000	Rp 1,217,910,000	Rp 1,514,460,000
6	Kab. Aceh Tenggara	Rp 2,962,500,000	Rp 1,971,050,000	Rp 2,340,750,000
7	Kab. Aceh Timur	Rp 1,658,100,000	Rp 2,545,190,000	Rp 2,171,810,000
8	Kab. Aceh Utara	Rp -	Rp -	Rp -
9	Kab. Bireuen	Rp 2,229,500,000	Rp 3,015,430,000	Rp 1,796,290,000
10	Kab. Pidie	Rp 2,041,600,000	Rp 2,256,660,000	Rp 2,186,830,000
11	Kab. Simeulue	Rp 1,316,900,000	Rp 1,300,480,000	Rp 2,732,860,000
12	Kota Banda Aceh	Rp 1,071,200,000	Rp 1,254,710,000	Rp 2,204,300,000
13	Kota Sabang	Rp 821,700,000	Rp 716,860,000	Rp 1,124,750,000
14	Kota Langsa	Rp 904,100,000	Rp 1,404,190,000	Rp 1,196,630,000
15	Kota Lhokseumawe	Rp 1,293,900,000	Rp 977,740,000	Rp 1,759,310,000
16	Kab. Nagan Raya	Rp 840,300,000	Rp 1,380,910,000	Rp 1,507,490,000
17	Kab. Aceh Jaya	Rp 885,600,000	Rp 862,720,000	Rp 1,060,440,000
18	Kab. Aceh Barat Daya	Rp 966,500,000	Rp 1,172,860,000	Rp 1,414,380,000
19	Kab. Gayo Lues	Rp 1,267,400,000	Rp 1,095,990,000	Rp 1,140,360,000
20	Kab. Aceh Tamiang	Rp 1,264,500,000	Rp 1,492,990,000	Rp 1,922,250,000
21	Kab. Bener Meriah	Rp 1,012,300,000	Rp 1,097,520,000	Rp 1,461,170,000
22	Kab. Pidie Jaya	Rp 1,173,600,000	Rp 1,501,420,000	Rp 1,332,760,000
23	Kota Subulussalam	Rp 1,167,200,000	Rp 1,240,670,000	Rp 1,790,630,000
II	Provinsi Sumatera Utara	Rp 73,265,000,000	Rp 72,450,220,000	Rp 69,154,430,000
24	Kab. Asahan	Rp 2,796,000,000	Rp 2,896,200,000	Rp 2,035,100,000
25	Kab. Dairi	Rp 1,505,900,000	Rp 1,528,230,000	Rp 1,988,610,000
26	Kab. Deli Serdang	Rp 7,636,000,000	Rp 8,692,450,000	Rp 3,171,620,000
27	Kab. Tanah Karo	Rp 1,613,200,000	Rp 1,103,240,000	Rp 2,299,580,000
28	Kab. Labuhan Batu	Rp 1,476,500,000	Rp 1,378,400,000	Rp 1,325,610,000
29	Kab. Langkat	Rp 4,427,000,000	Rp 3,837,130,000	Rp 3,043,870,000
30	Kab. Mandailing Natal	Rp 1,380,500,000	Rp 2,253,030,000	Rp 2,407,280,000
31	Kab. Nias	Rp 2,508,700,000	Rp 2,232,760,000	Rp 1,540,520,000
32	Kab. Simalungun	Rp 2,685,300,000	Rp 3,289,300,000	Rp 2,361,670,000
33	Kab. Tapanuli Selatan	Rp 1,699,800,000	Rp 1,737,040,000	Rp 1,744,360,000
34	Kab. Tapanuli Tengah	Rp 1,818,500,000	Rp 1,772,580,000	Rp 2,617,080,000
35	Kab. Tapanuli Utara	Rp 1,638,500,000	Rp 1,532,850,000	Rp 1,837,280,000

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Alokasi		
		2011	2012	2013
36	Kab. Toba Samosir	Rp 1,189,500,000	Rp 1,410,930,000	Rp 2,571,180,000
37	Kota Binjai	Rp 1,568,600,000	Rp 1,645,700,000	Rp 1,097,230,000
38	Kota Medan	Rp 7,928,800,000	Rp 8,164,160,000	Rp 3,240,600,000
39	Kota Pematang Siantar	Rp 1,184,500,000	Rp 1,285,420,000	Rp 1,359,420,000
40	Kota Sibolga	Rp 744,600,000	Rp 594,880,000	Rp 1,014,040,000
41	Kota Tanjung Balai	Rp 691,100,000	Rp 615,370,000	Rp 1,208,220,000
42	Kota Tebing Tinggi	Rp 814,900,000	Rp 873,920,000	Rp 1,432,490,000
43	Kota Padang Sidempuan	Rp 1,323,300,000	Rp 1,242,410,000	Rp 1,635,180,000
44	Kab. Pakpak Bharat	Rp 692,200,000	Rp 717,660,000	Rp 2,391,270,000
45	Kab. Nias Selatan	Rp 2,234,600,000	Rp 2,170,980,000	Rp 4,698,580,000
46	Kab. Humbang Hasundutan	Rp 881,300,000	Rp 869,210,000	Rp 1,637,850,000
47	Kab. Serdang Bedagai	Rp 2,508,800,000	Rp 1,830,260,000	Rp 1,952,870,000
48	Kab. Samosir	Rp 828,100,000	Rp 960,740,000	Rp 1,516,040,000
49	Kab. Batu Bara	Rp 1,823,500,000	Rp 2,648,660,000	Rp 2,417,250,000
50	Kab. Padang Lawas	Rp 2,280,600,000	Rp 2,297,090,000	Rp 1,790,840,000
51	Kab. Padang Lawas Utara	Rp 2,625,700,000	Rp 1,058,200,000	Rp 1,000,100,000
52	Kab. Labuhan Batu Selatan	Rp 1,303,500,000	Rp 1,867,310,000	Rp 3,398,030,000
53	Kab. Labuhan Batu Utara	Rp 2,904,700,000	Rp 2,060,370,000	Rp 1,194,160,000
54	Kab. Nias Utara	Rp 2,770,100,000	Rp 1,546,540,000	Rp 1,643,980,000
55	Kab. Nias Barat	Rp 2,735,200,000	Rp 3,121,050,000	Rp 1,479,270,000
56	Kota Gunung Sitoli	Rp 3,045,500,000	Rp 3,216,150,000	Rp 4,103,250,000
III	Provinsi Sumatera Barat	Rp 24,771,200,000	Rp 24,362,550,000	Rp 33,811,180,000
57	Kab. Lima puluh Kota	Rp 1,455,800,000	Rp 1,107,420,000	Rp 1,211,550,000
58	Kab. Agam	Rp 1,872,900,000	Rp 1,405,770,000	Rp 1,520,340,000
59	Kab. Kepulauan Mentawai	Rp 1,075,600,000	Rp 1,179,090,000	Rp 4,868,760,000
60	Kab. Padang Pariaman	Rp 2,095,300,000	Rp 2,181,900,000	Rp 2,979,340,000
61	Kab. Pasaman	Rp 1,408,700,000	Rp 1,755,770,000	Rp 1,512,110,000
62	Kab. Pesisir Selatan	Rp 2,802,000,000	Rp 2,441,750,000	Rp 3,074,810,000
63	Kab. Sijunjung	Rp 512,300,000	Rp 1,236,090,000	Rp 1,074,640,000
64	Kab. Solok	Rp 1,421,600,000	Rp 1,484,790,000	Rp 1,408,690,000
65	Kab. Tanah Datar	Rp 1,790,900,000	Rp 985,420,000	Rp 2,751,750,000
66	Kota Bukit Tinggi	Rp 570,600,000	Rp 551,170,000	Rp 811,120,000
67	Kota Padang Panjang	Rp 737,100,000	Rp 600,870,000	Rp 710,370,000
68	Kota Padang	Rp 3,050,000,000	Rp 3,161,230,000	Rp 4,215,460,000
69	Kota Payakumbuh	Rp 746,100,000	Rp 779,640,000	Rp 1,023,550,000
70	Kota Sawahlunto	Rp 824,800,000	Rp 742,470,000	Rp 854,000,000
71	Kota Solok	Rp 535,800,000	Rp 483,800,000	Rp 834,990,000
72	Kota Pariaman	Rp 647,600,000	Rp 535,370,000	Rp 888,420,000
73	Kab. Pasaman Barat	Rp 1,756,700,000	Rp 1,646,150,000	Rp 1,963,440,000
74	Kab. Dharmasraya	Rp 854,200,000	Rp 1,121,700,000	Rp 1,013,950,000
75	Kab. Solok Selatan	Rp 613,200,000	Rp 962,150,000	Rp 1,093,890,000
IV	Provinsi Riau	Rp 2,536,800,000	-	Rp 3,854,250,000
76	Kab. Bengkalis	Rp -	Rp -	Rp -

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Alokasi		
		2011	2012	2013
77	Kab. Indragiri Hilir	Rp -	Rp -	Rp -
78	Kab. Indragiri Hulu	Rp -	Rp -	Rp -
79	Kab. Kampar	Rp -	Rp -	Rp -
80	Kab. Kuantan Singingi	Rp -	Rp -	Rp -
81	Kab. Pelalawan	Rp -	Rp -	Rp -
82	Kab. Rokan Hilir	Rp -	Rp -	Rp -
83	Kab. Rokan Hulu	Rp -	Rp -	Rp -
84	Kab. Siak	Rp -	Rp -	Rp 3,854,250,000
85	Kota Dumai	Rp -	Rp -	Rp -
86	Kota Pekanbaru	Rp -	Rp -	Rp -
87	Kab. Meranti	Rp 2,536,800,000	Rp -	Rp -
V	Provinsi Kepulauan Riau	Rp 6,774,700,000	Rp 8,337,420,000	Rp 7,446,480,000
88	Kab. Bintan	Rp -	Rp -	Rp -
89	Kab. Natuna	Rp 771,900,000	Rp 806,030,000	Rp 1,164,530,000
90	Kab. Karimun	Rp -	Rp -	Rp -
91	Kota Batam	Rp 4,416,500,000	Rp 5,956,850,000	Rp 2,972,420,000
92	Kota Tanjung Pinang	Rp -	Rp -	Rp -
93	Kab. Lingga	Rp -	Rp -	Rp -
94	Kab. Anambas	Rp 1,586,300,000	Rp 1,574,540,000	Rp 3,309,530,000
VI	Provinsi Jambi	Rp 14,726,000,000	Rp 14,481,020,000	Rp 14,572,710,000
95	Kab. Batanghari	Rp 1,185,700,000	Rp 1,014,100,000	Rp 1,162,820,000
96	Kab. Bungo	Rp 1,256,300,000	Rp 1,612,950,000	Rp 1,415,790,000
97	Kab. Kerinci	Rp 1,372,500,000	Rp 885,280,000	Rp 1,305,180,000
98	Kab. Merangin	Rp 1,465,100,000	Rp 1,823,290,000	Rp 1,710,560,000
99	Kab. Muaro Jambi	Rp 1,748,800,000	Rp 2,195,920,000	Rp 1,652,150,000
100	Kab. Sarolangun	Rp 1,513,600,000	Rp 1,790,800,000	Rp 1,986,470,000
101	Kab. Tanjung Jabung Barat	Rp -	Rp -	Rp -
102	Kab. Tanjung Jabung Timur	Rp -	Rp -	Rp -
103	Kab. Tebo	Rp 2,161,400,000	Rp 1,745,630,000	Rp 1,869,510,000
104	Kota Jambi	Rp 1,226,900,000	Rp 2,258,370,000	Rp 2,750,780,000
105	Kota Sungai Penuh	Rp 2,795,700,000	Rp 1,154,680,000	Rp 719,450,000
VII	Provinsi Sumatera Selatan	Rp 26,148,000,000	Rp 25,292,620,000	Rp 30,515,690,000
106	Kab. Lahat	Rp 1,608,600,000	Rp 1,719,660,000	Rp 1,052,920,000
107	Kab. Musi Banyuasin	Rp -	Rp -	Rp -
108	Kab. Musi Rawas	Rp 2,291,500,000	Rp 2,740,920,000	Rp 1,550,690,000
109	Kab. Muara Enim	Rp -	Rp -	Rp 3,311,470,000
110	Kab. Ogan Komering Ilir	Rp 3,398,600,000	Rp 4,336,800,000	Rp 2,380,570,000
111	Kab. Ogan Komering Ulu	Rp -	Rp -	Rp -
112	Kota Palembang	Rp 4,727,700,000	Rp 3,067,960,000	Rp 6,882,790,000
113	Kota Pagar Alam	Rp 1,231,900,000	Rp 643,960,000	Rp 1,105,820,000
114	Kota Lubuk Linggau	Rp 1,468,000,000	Rp 623,380,000	Rp 1,090,540,000
115	Kota Prabumulih	Rp 980,700,000	Rp 879,400,000	Rp 843,250,000
116	Kab. Banyuasin	Rp 3,568,000,000	Rp 3,659,490,000	Rp 4,384,520,000

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Alokasi		
		2011	2012	2013
117	Kab. Ogan Ilir	Rp 1,286,500,000	Rp 1,437,170,000	Rp 2,098,910,000
118	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Rp 2,017,400,000	Rp 2,142,970,000	Rp 2,068,380,000
119	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Rp 2,148,400,000	Rp 1,802,310,000	Rp 1,496,960,000
120	Kab. Empat Lawang	Rp 1,420,700,000	Rp 2,238,600,000	Rp 2,248,870,000
VIII	Provinsi Bangka Belitung	Rp 6,522,500,000	Rp 8,051,320,000	Rp 8,801,080,000
121	Kab. Bangka	Rp 875,300,000	Rp 1,728,910,000	Rp 1,287,480,000
122	Kab. Belitung	Rp 974,400,000	Rp 701,350,000	Rp 1,394,250,000
123	Kota Pangkal Pinang	Rp 1,168,100,000	Rp 1,532,040,000	Rp 1,527,280,000
124	Kab. Bangka Selatan	Rp 998,900,000	Rp 1,193,440,000	Rp 1,033,190,000
125	Kab. Bangka Tengah	Rp 1,225,500,000	Rp 1,355,220,000	Rp 969,330,000
126	Kab. Bangka Barat	Rp 582,400,000	Rp 908,550,000	Rp 854,690,000
127	Kab. Belitung Timur	Rp 697,900,000	Rp 631,810,000	Rp 1,734,860,000
IX	Provinsi Bengkulu	Rp 14,368,400,000	Rp 11,712,010,000	Rp 13,550,510,000
128	Kab. Bengkulu Selatan	Rp 1,588,500,000	Rp 1,536,860,000	Rp 1,431,740,000
129	Kab. Bengkulu Utara	Rp 1,742,700,000	Rp 1,376,060,000	Rp 1,762,590,000
130	Kab. Rejang Lebong	Rp 1,666,800,000	Rp 1,416,990,000	Rp 1,185,960,000
131	Kota Bengkulu	Rp 1,406,300,000	Rp 785,580,000	Rp 1,448,390,000
132	Kab. Kaur	Rp 1,089,100,000	Rp 1,221,370,000	Rp 1,505,650,000
133	Kab. Seluma	Rp 1,367,300,000	Rp 1,539,080,000	Rp 1,555,910,000
134	Kab. Mukomuko	Rp 838,400,000	Rp 858,520,000	Rp 1,389,800,000
135	Kab. Lebong	Rp 810,900,000	Rp 845,980,000	Rp 1,059,920,000
136	Kab. Kepahiang	Rp 1,134,400,000	Rp 760,700,000	Rp 1,206,070,000
137	Kab. Bengkulu Tengah	Rp 2,724,000,000	Rp 1,370,870,000	Rp 1,004,480,000
X	Provinsi Lampung	Rp 41,331,600,000	Rp 43,512,560,000	Rp 39,212,160,000
138	Kab. Lampung Barat	Rp 2,675,900,000	Rp 2,904,280,000	Rp 3,104,990,000
139	Kab. Lampung Selatan	Rp 3,437,800,000	Rp 3,522,130,000	Rp 4,795,030,000
140	Kab. Lampung Tengah	Rp 4,670,400,000	Rp 5,596,270,000	Rp 5,915,510,000
141	Kab. Lampung Utara	Rp 3,147,200,000	Rp 3,012,560,000	Rp 4,514,720,000
142	Kab. Lampung Timur	Rp 5,070,200,000	Rp 4,160,910,000	Rp -
143	Kab. Tanggamus	Rp 2,616,200,000	Rp 2,644,630,000	Rp 2,089,690,000
144	Kab. Tulang Bawang	Rp 2,179,900,000	Rp 2,207,850,000	Rp 1,966,120,000
145	Kab. Way Kanan	Rp 1,496,100,000	Rp 2,010,570,000	Rp 2,956,020,000
146	Kota Bandar Lampung	Rp 3,637,400,000	Rp 3,819,910,000	Rp 2,690,110,000
147	Kota Metro	Rp 1,070,000,000	Rp 736,600,000	Rp 2,077,430,000
148	Kab. Pesawaran	Rp 3,538,100,000	Rp 3,218,680,000	Rp 2,946,860,000
149	Kab. Pringsewu	Rp 2,852,400,000	Rp 4,152,910,000	Rp 1,535,490,000
150	Kab. Mesuji	Rp 2,001,000,000	Rp 2,569,230,000	Rp 1,170,230,000
151	Kab. Tulang Bawang Barat	Rp 2,939,000,000	Rp 2,956,030,000	Rp 3,449,960,000
XI	Provinsi DKI Jakarta	Rp -	Rp -	Rp -
XII	Provinsi Jawa Barat	Rp 147,868,900,000	Rp 169,329,430,000	Rp 132,957,520,000
152	Kab. Bandung	Rp 10,939,700,000	Rp 14,856,590,000	Rp 7,348,820,000
153	Kab. Bekasi	Rp 13,019,700,000	Rp 13,145,410,000	Rp 4,167,120,000
154	Kab. Bogor	Rp 18,607,400,000	Rp 16,464,340,000	Rp 14,810,500,000

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Alokasi		
		2011	2012	2013
155	Kab. Ciamis	Rp 6,882,300,000	Rp 6,956,080,000	Rp 3,395,530,000
156	Kab. Cianjur	Rp 6,004,600,000	Rp 10,371,460,000	Rp 4,542,890,000
157	Kab. Cirebon	Rp 7,062,500,000	Rp 7,734,930,000	Rp 11,339,780,000
158	Kab. Garut	Rp 9,531,500,000	Rp 9,085,480,000	Rp 9,732,750,000
159	Kab. Indramayu	Rp 6,807,000,000	Rp 7,331,810,000	Rp 2,785,990,000
160	Kab. Karawang	Rp 7,535,600,000	Rp 7,341,840,000	Rp 9,934,290,000
161	Kab. Kuningan	Rp 4,143,600,000	Rp 4,925,820,000	Rp 4,008,050,000
162	Kab. Majalengka	Rp 4,594,500,000	Rp 3,722,980,000	Rp 5,941,420,000
163	Kab. Purwakarta	Rp 3,985,200,000	Rp 3,447,480,000	Rp 1,667,450,000
164	Kab. Subang	Rp 3,667,900,000	Rp 6,322,270,000	Rp 2,918,430,000
165	Kab. Sukabumi	Rp 3,482,500,000	Rp 10,322,530,000	Rp 5,360,910,000
166	Kab. Sumedang	Rp 4,758,200,000	Rp 4,998,910,000	Rp 6,430,640,000
167	Kab. Tasikmalaya	Rp 4,363,800,000	Rp 6,942,200,000	Rp 6,222,840,000
168	Kota Bandung	Rp 3,217,300,000	Rp -	Rp 3,958,080,000
169	Kota Bekasi	Rp 10,723,300,000	Rp 9,932,110,000	Rp 5,157,400,000
170	Kota Bogor	Rp -	Rp 3,647,730,000	Rp 3,861,090,000
171	Kota Cirebon	Rp -	Rp 1,482,660,000	Rp 2,616,050,000
172	Kota Depok	Rp 6,296,900,000	Rp 7,678,150,000	Rp 4,957,230,000
173	Kota Sukabumi	Rp 524,200,000	Rp 1,200,520,000	Rp 2,722,440,000
174	Kota Cimahi	Rp -	Rp 1,878,980,000	Rp 2,047,910,000
175	Kota Tasikmalaya	Rp 2,609,900,000	Rp 2,973,460,000	Rp 1,321,890,000
176	Kota Banjar	Rp 679,700,000	Rp 1,006,340,000	Rp 993,180,000
177	Kab. Bandung Barat	Rp 8,431,600,000	Rp 5,559,350,000	Rp 4,714,840,000
XIII	Provinsi Banten	Rp 35,665,800,000	Rp 43,082,230,000	Rp 22,763,850,000
178	Kab. Lebak	Rp 2,788,000,000	Rp 2,966,590,000	Rp 3,046,240,000
179	Kab. Pandeglang	Rp 4,265,900,000	Rp 5,169,790,000	Rp 4,436,360,000
180	Kab. Serang	Rp 3,350,800,000	Rp 3,758,950,000	Rp 2,990,110,000
181	Kab. Tangerang	Rp 8,895,400,000	Rp 12,793,690,000	Rp 10,371,640,000
182	Kota Cilegon	Rp -	Rp -	Rp -
183	Kota Tangerang	Rp 4,706,700,000	Rp 6,031,770,000	Rp -
184	Kota Serang	Rp 4,131,100,000	Rp 4,176,850,000	Rp 1,919,500,000
185	Kota Tangerang Selatan	Rp 7,527,900,000	Rp 8,184,590,000	Rp -
XIV	Provinsi Jawa Tengah	Rp 149,392,200,000	Rp 117,766,590,000	Rp 104,595,290,000
186	Kab. Banjarnegara	Rp 4,074,100,000	Rp 2,691,310,000	Rp 2,781,150,000
187	Kab. Banyumas	Rp 7,304,100,000	Rp 4,428,740,000	Rp 5,276,890,000
188	Kab. Batang	Rp 2,748,900,000	Rp 2,841,810,000	Rp 2,070,550,000
189	Kab. Blora	Rp 4,645,900,000	Rp 3,240,190,000	Rp 2,131,790,000
190	Kab. Boyolali	Rp 3,203,900,000	Rp 3,914,940,000	Rp 1,738,060,000
191	Kab. Brebes	Rp 8,071,900,000	Rp 7,052,630,000	Rp 4,714,620,000
192	Kab. Cilacap	Rp 7,141,600,000	Rp 6,835,170,000	Rp 4,092,320,000
193	Kab. Demak	Rp 3,132,700,000	Rp 4,912,680,000	Rp 4,928,880,000
194	Kab. Grobogan	Rp 6,713,500,000	Rp 5,382,480,000	Rp 4,144,140,000
195	Kab. Jepara	Rp 3,816,000,000	Rp 2,930,140,000	Rp 3,446,790,000

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Alokasi		
		2011	2012	2013
196	Kab. Karanganyar	Rp 3,028,400,000	Rp 1,566,010,000	Rp 2,756,720,000
197	Kab. Kebumen	Rp 5,038,600,000	Rp 4,960,600,000	Rp 4,382,170,000
198	Kab. Kendal	Rp 4,877,600,000	Rp 3,793,410,000	Rp 4,760,930,000
199	Kab. Klaten	Rp 5,669,600,000	Rp 4,117,150,000	Rp 2,322,700,000
200	Kab. Kudus	Rp 4,115,900,000	Rp 2,977,950,000	Rp 3,997,550,000
201	Kab. Magelang	Rp 5,935,200,000	Rp 2,972,420,000	Rp 2,822,300,000
202	Kab. Pati	Rp 5,878,200,000	Rp 4,064,870,000	Rp 906,910,000
203	Kab. Pekalongan	Rp 4,156,400,000	Rp 3,587,540,000	Rp 2,885,750,000
204	Kab. Pemalang	Rp 6,027,100,000	Rp 4,326,090,000	Rp 3,945,490,000
205	Kab. Purbalingga	Rp 3,973,000,000	Rp 3,522,510,000	Rp 3,079,750,000
206	Kab. Purworejo	Rp 3,658,100,000	Rp 2,696,620,000	Rp 1,683,060,000
207	Kab. Rembang	Rp 2,988,700,000	Rp 1,379,760,000	Rp 2,394,070,000
208	Kab. Semarang	Rp 5,193,300,000	Rp 3,925,160,000	Rp 7,781,910,000
209	Kab. Sragen	Rp 2,654,400,000	Rp 2,597,030,000	Rp 2,099,250,000
210	Kab. Sukoharjo	Rp 3,984,200,000	Rp 2,423,700,000	Rp 2,937,180,000
211	Kab. Tegal	Rp 4,443,000,000	Rp 4,498,560,000	Rp 4,408,770,000
212	Kab. Temanggung	Rp 3,708,400,000	Rp 3,057,180,000	Rp 1,953,060,000
213	Kab. Wonogiri	Rp 4,915,100,000	Rp 3,760,860,000	Rp 2,609,330,000
214	Kab. Wonosobo	Rp 3,959,400,000	Rp 2,115,670,000	Rp 2,433,450,000
215	Kota Magelang	Rp 877,300,000	Rp 462,540,000	Rp 813,770,000
216	Kota Pekalongan	Rp 1,543,300,000	Rp 781,090,000	Rp 1,136,770,000
217	Kota Salatiga	Rp 714,700,000	Rp 571,230,000	Rp 1,016,640,000
218	Kota Semarang	Rp 6,875,200,000	Rp 5,927,930,000	Rp 4,027,890,000
219	Kota Surakarta	Rp 2,543,200,000	Rp 2,355,560,000	Rp 1,125,690,000
220	Kota Tegal	Rp 1,781,300,000	Rp 1,095,060,000	Rp 988,990,000
XV	Provinsi DI Yogyakarta	Rp 10,249,600,000	Rp 7,811,460,000	Rp 10,894,720,000
221	Kab. Bantul	Rp 2,505,300,000	Rp 3,671,280,000	Rp 2,940,000,000
222	Kab. Gunung Kidul	Rp 1,857,400,000	Rp 1,650,130,000	Rp 3,902,800,000
223	Kab. Kulon Progo	Rp 1,279,500,000	Rp 1,597,170,000	Rp 1,914,130,000
224	Kab. Sleman	Rp 4,607,400,000	Rp 892,880,000	Rp 2,137,790,000
225	Kota Yogyakarta	Rp -	Rp -	Rp -
XVI	Provinsi Jawa Timur	Rp 145,463,500,000	Rp 140,261,750,000	Rp 118,352,710,000
226	Kab. Bangkalan	Rp 3,857,000,000	Rp 3,302,460,000	Rp 2,888,940,000
227	Kab. Banyuwangi	Rp 6,399,900,000	Rp 5,894,990,000	Rp 4,358,860,000
228	Kab. Blitar	Rp 4,231,300,000	Rp 4,541,200,000	Rp 3,080,430,000
229	Kab. Bojonegoro	Rp 3,146,700,000	Rp 4,790,090,000	Rp 3,338,800,000
230	Kab. Bondowoso	Rp 2,569,700,000	Rp 3,207,330,000	Rp 2,791,390,000
231	Kab. Gresik	Rp 4,093,200,000	Rp 5,494,100,000	Rp 3,863,750,000
232	Kab. Jember	Rp 8,959,500,000	Rp 9,186,440,000	Rp 4,275,050,000
233	Kab. Jombang	Rp 3,488,400,000	Rp 5,856,450,000	Rp 2,011,710,000
234	Kab. Kediri	Rp 6,195,300,000	Rp 6,335,130,000	Rp 3,773,630,000
235	Kab. Lamongan	Rp 4,135,300,000	Rp 4,535,760,000	Rp 4,609,710,000
236	Kab. Lumajang	Rp 2,795,600,000	Rp 4,247,520,000	Rp 3,899,880,000

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Alokasi		
		2011	2012	2013
237	Kab. Madiun	Rp 2,852,100,000	Rp 1,934,260,000	Rp 1,951,280,000
238	Kab. Magetan	Rp 3,437,100,000	Rp 2,935,010,000	Rp 2,363,950,000
239	Kab. Malang	Rp 9,788,300,000	Rp -	Rp 3,663,710,000
240	Kab. Mojokerto	Rp 3,907,200,000	Rp 3,394,080,000	Rp 1,930,420,000
241	Kab. Nganjuk	Rp 2,930,300,000	Rp 3,615,690,000	Rp 3,788,870,000
242	Kab. Ngawi	Rp 2,541,200,000	Rp 2,634,020,000	Rp 2,464,590,000
243	Kab. Pacitan	Rp 2,889,500,000	Rp 3,049,390,000	Rp 1,692,420,000
244	Kab. Pamekasan	Rp 3,738,000,000	Rp 3,718,890,000	Rp 3,712,040,000
245	Kab. Pasuruan	Rp 3,905,000,000	Rp 2,895,960,000	Rp 3,551,920,000
246	Kab. Ponorogo	Rp 3,492,200,000	Rp 3,930,900,000	Rp 3,030,810,000
247	Kab. Probolinggo	Rp 3,091,800,000	Rp 4,523,530,000	Rp 2,662,340,000
248	Kab. Sampang	Rp 4,300,000,000	Rp 4,460,130,000	Rp 3,298,600,000
249	Kab. Sidoarjo	Rp 8,771,800,000	Rp 8,460,800,000	Rp 5,373,380,000
250	Kab. Situbondo	Rp 2,801,500,000	Rp 3,386,980,000	Rp 2,961,680,000
251	Kab. Sumenep	Rp 5,248,500,000	Rp 5,115,350,000	Rp 2,897,260,000
252	Kab. Trenggalek	Rp 3,498,800,000	Rp 2,786,870,000	Rp 2,027,030,000
253	Kab. Tuban	Rp 3,721,200,000	Rp 4,180,060,000	Rp 2,274,570,000
254	Kab. Tulungagung	Rp 4,717,400,000	Rp 3,153,520,000	Rp 2,296,450,000
255	Kota Blitar	Rp 898,000,000	Rp 523,760,000	Rp 997,640,000
256	Kota Kediri	Rp -	Rp -	Rp 1,972,080,000
257	Kota Madiun	Rp 752,600,000	Rp 967,170,000	Rp 1,680,430,000
258	Kota Malang	Rp 2,892,000,000	Rp 3,160,270,000	Rp 5,688,460,000
259	Kota Mojokerto	Rp 786,600,000	Rp 789,500,000	Rp 852,060,000
260	Kota Pasuruan	Rp 571,700,000	Rp 515,770,000	Rp 769,990,000
261	Kota Probolinggo	Rp 1,083,700,000	Rp 862,850,000	Rp 1,636,930,000
262	Kota Surabaya	Rp 11,439,000,000	Rp 10,621,880,000	Rp 12,914,790,000
263	Kota Batu	Rp 1,536,100,000	Rp 1,253,640,000	Rp 1,006,860,000
XVII	Provinsi Kalimantan Barat	Rp 25,882,000,000	Rp 28,433,890,000	Rp 30,843,200,000
264	Kab. Bengkayang	Rp 1,077,800,000	Rp 1,194,050,000	Rp 1,312,150,000
265	Kab. Landak	Rp 1,569,800,000	Rp 2,083,810,000	Rp 4,742,610,000
266	Kab. Kapuas Hulu	Rp 1,422,400,000	Rp 1,953,750,000	Rp 1,758,030,000
267	Kab. Ketapang	Rp 1,395,700,000	Rp 1,191,000,000	Rp 2,870,500,000
268	Kab. Pontianak	Rp 3,173,200,000	Rp 1,940,980,000	Rp 1,645,710,000
269	Kab. Sambas	Rp 2,329,900,000	Rp 3,522,800,000	Rp 2,379,850,000
270	Kab. Sanggau	Rp 2,645,400,000	Rp 2,422,740,000	Rp 1,568,920,000
271	Kab. Sintang	Rp 1,985,500,000	Rp 3,200,410,000	Rp 3,761,030,000
272	Kota Pontianak	Rp 1,071,600,000	Rp 2,503,330,000	Rp -
273	Kota Singkawang	Rp 1,170,800,000	Rp 895,280,000	Rp 4,531,600,000
274	Kab. Sekadau	Rp 1,409,300,000	Rp 1,557,320,000	Rp 1,446,740,000
275	Kab. Melawi	Rp 1,359,800,000	Rp 774,100,000	Rp 1,475,960,000
276	Kab. Kayong Utara	Rp 1,399,600,000	Rp 1,079,130,000	Rp 1,258,180,000
277	Kab. Kubu Raya	Rp 3,871,200,000	Rp 4,115,190,000	Rp 2,091,920,000
XVIII	Provinsi Kalimantan Tengah	Rp 10,217,600,000	Rp 9,090,120,000	Rp 12,391,510,000

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Alokasi		
		2011	2012	2013
278	Kab. Barito Selatan	Rp 761,300,000	Rp 626,130,000	Rp 940,890,000
279	Kab. Barito Utara	Rp 1,023,600,000	Rp 873,220,000	Rp 1,470,010,000
280	Kab. Kapuas	Rp -	Rp 1,881,760,000	Rp 1,378,110,000
281	Kab. Kotawaringin Barat	Rp -	Rp -	Rp -
282	Kab. Kotawaringin Timur	Rp -	Rp -	Rp -
283	Kota Palangkaraya	Rp 801,100,000	Rp 789,190,000	Rp 1,613,730,000
284	Kab. Barito Timur	Rp 1,328,100,000	Rp 580,550,000	Rp 1,174,810,000
285	Kab. Murung Raya	Rp -	Rp -	Rp -
286	Kab. Pulang Pisau	Rp 1,037,900,000	Rp 820,030,000	Rp 1,530,950,000
287	Kab. Gunung Mas	Rp 1,108,400,000	Rp 731,700,000	Rp 1,178,270,000
288	Kab. Lamandau	Rp 998,800,000	Rp 718,130,000	Rp 769,720,000
289	Kab. Sukamara	Rp 1,698,300,000	Rp 545,190,000	Rp 1,080,120,000
290	Kab. Katingan	Rp -	Rp -	Rp -
291	Kab. Seruyan	Rp 1,460,100,000	Rp 1,524,220,000	Rp 1,254,900,000
XIX	Provinsi Kalimantan Selatan	Rp 5,369,300,000	Rp 11,232,800,000	Rp 9,767,350,000
292	Kab. Banjar	Rp -	Rp 2,852,560,000	Rp -
293	Kab. Barito Kuala	Rp 942,400,000	Rp 1,241,140,000	Rp 1,676,120,000
294	Kab. Hulu Sungai Selatan	Rp 636,800,000	Rp 652,840,000	Rp 1,032,170,000
295	Kab. Hulu Sungai Tengah	Rp 718,500,000	Rp 765,660,000	Rp 1,004,930,000
296	Kab. Hulu Sungai Utara	Rp 1,424,800,000	Rp 1,793,270,000	Rp 1,295,220,000
297	Kab. Kotabaru	Rp -	Rp -	Rp -
298	Kab. Tabalong	Rp -	Rp -	Rp -
299	Kab. Tanah Laut	Rp -	Rp -	Rp -
300	Kab. Tapin	Rp 848,900,000	Rp 970,900,000	Rp 794,670,000
301	Kota Banjar Baru	Rp 797,900,000	Rp 931,680,000	Rp 1,376,760,000
302	Kota Banjarmasin	Rp -	Rp 2,024,750,000	Rp 2,587,480,000
303	Kab. Balangan	Rp -	Rp -	Rp -
304	Kab. Tanah Bumbu	Rp -	Rp -	Rp -
XX	Provinsi Kalimantan Timur	Rp 5,895,300,000	Rp 5,726,940,000	Rp 4,106,530,000
305	Kab. Berau	Rp -	Rp -	Rp -
306	Kab. Bulungan	Rp -	Rp -	Rp -
307	Kab. Kutai Kartanegara	Rp -	Rp -	Rp -
308	Kab. Kutai Barat	Rp 895,900,000	Rp 747,220,000	Rp 1,610,600,000
309	Kab. Kutai Timur	Rp -	Rp -	Rp -
310	Kab. Malinau	Rp 528,300,000	Rp 572,240,000	Rp 1,138,720,000
311	Kab. Nunukan	Rp 889,400,000	Rp 1,113,710,000	Rp 1,357,210,000
312	Kab. Paser	Rp -	Rp -	Rp -
313	Kota Balikpapan	Rp 3,581,700,000	Rp -	Rp -
314	Kota Bontang	Rp -	Rp -	Rp -
315	Kota Samarinda	Rp -	Rp 3,293,770,000	Rp -
316	Kota Tarakan	Rp -	Rp -	Rp -
317	Kab. Penajam Paser Utara	Rp -	Rp -	Rp -
318	Kab. Tana Tidung	Rp -	Rp -	Rp -

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Alokasi		
		2011	2012	2013
XXI	Provinsi Sulawesi Utara	Rp 26,568,100,000	Rp 24,069,890,000	Rp 23,347,370,000
319	Kab. Bolaang Mongondow	Rp 1,741,100,000	Rp 1,897,450,000	Rp 1,603,460,000
320	Kab. Minahasa	Rp 2,239,300,000	Rp 2,274,770,000	Rp 1,450,640,000
321	Kab. Sangihe	Rp 1,737,100,000	Rp 2,293,480,000	Rp 3,886,170,000
322	Kota Bitung	Rp 1,229,600,000	Rp 1,221,300,000	Rp 1,562,110,000
323	Kota Manado	Rp 2,779,700,000	Rp 2,895,340,000	Rp 1,325,300,000
324	Kab. Kepulauan Talaud	Rp 1,436,100,000	Rp 1,571,070,000	Rp 2,898,090,000
325	Kab. Minahasa Selatan	Rp 1,474,900,000	Rp 1,205,190,000	Rp 1,710,010,000
326	Kota Tomohon	Rp 615,700,000	Rp 578,150,000	Rp 1,209,110,000
327	Kab. Minahasa Utara	Rp 1,318,600,000	Rp 1,609,780,000	Rp 1,457,100,000
328	Kota Kotamobagu	Rp 1,527,800,000	Rp 1,314,350,000	Rp 1,111,870,000
329	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Rp 1,534,000,000	Rp 1,196,750,000	Rp 946,750,000
330	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	Rp 1,679,100,000	Rp 1,649,520,000	Rp 1,544,230,000
331	Kab. Minahasa Tenggara	Rp 1,656,600,000	Rp 1,349,700,000	Rp 985,140,000
332	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Rp 2,719,800,000	Rp 1,207,680,000	Rp 762,940,000
333	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Rp 2,878,700,000	Rp 1,805,360,000	Rp 894,450,000
XXII	Provinsi Gorontalo	Rp 7,311,400,000	Rp 7,869,930,000	Rp 11,971,500,000
334	Kab. Boalemo	Rp 1,108,200,000	Rp 1,264,200,000	Rp 1,474,860,000
335	Kab. Gorontalo	Rp 2,137,200,000	Rp 2,434,810,000	Rp 1,933,080,000
336	Kota Gorontalo	Rp 1,005,900,000	Rp 795,720,000	Rp 2,201,950,000
337	Kab. Pohuwato	Rp 1,047,400,000	Rp 1,234,260,000	Rp 1,468,720,000
338	Kab. Bone Bolango	Rp 821,700,000	Rp 884,110,000	Rp 1,331,550,000
339	Kab. Gorontalo Utara	Rp 1,191,000,000	Rp 1,256,830,000	Rp 3,561,340,000
XXIII	Provinsi Sulawesi Tengah	Rp 15,978,900,000	Rp 15,934,160,000	Rp 16,847,570,000
340	Kab. Banggai	Rp 1,041,600,000	Rp 1,519,280,000	Rp 1,227,790,000
341	Kab. Banggai Kepulauan	Rp 1,133,000,000	Rp 1,199,070,000	Rp 1,340,340,000
342	Kab. Buol	Rp 1,292,500,000	Rp 1,043,210,000	Rp 1,130,370,000
343	Kab. Toli-Toli	Rp 1,601,500,000	Rp 1,347,030,000	Rp 1,756,510,000
344	Kab. Donggala	Rp 1,843,100,000	Rp 2,125,630,000	Rp 1,690,040,000
345	Kab. Morowali	Rp 1,445,800,000	Rp 897,620,000	Rp 2,439,650,000
346	Kab. Poso	Rp 1,752,500,000	Rp 1,112,580,000	Rp 1,158,020,000
347	Kota Palu	Rp 1,277,600,000	Rp 1,125,900,000	Rp 2,163,110,000
348	Kab. Parigi Moutong	Rp 1,961,900,000	Rp 1,829,180,000	Rp 1,238,160,000
349	Kab. Tojo Una Una	Rp 910,200,000	Rp 1,322,310,000	Rp 1,596,800,000
350	Kab. Sigi	Rp 1,719,200,000	Rp 2,412,350,000	Rp 1,106,780,000
XXIV	Provinsi Sulawesi Selatan	Rp 41,224,100,000	Rp 40,848,150,000	Rp 46,452,960,000
351	Kab. Bantaeng	Rp 1,048,900,000	Rp 1,207,130,000	Rp 1,294,080,000
352	Kab. Barru	Rp 1,078,700,000	Rp 952,910,000	Rp 1,028,810,000
353	Kab. Bone	Rp 2,649,300,000	Rp 3,777,710,000	Rp 3,697,980,000
354	Kab. Bulukumba	Rp 2,834,700,000	Rp 986,520,000	Rp 2,075,220,000
355	Kab. Enrekang	Rp 920,000,000	Rp 979,540,000	Rp 1,571,210,000
356	Kab. Gowa	Rp 3,100,700,000	Rp 3,204,730,000	Rp 2,318,470,000
357	Kab. Jeneponto	Rp 1,466,900,000	Rp 2,093,500,000	Rp 2,776,290,000

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Alokasi		
		2011	2012	2013
358	Kab. Luwu	Rp 1,781,300,000	Rp 2,055,000,000	Rp 1,718,900,000
359	Kab. Luwu Utara	Rp 1,276,900,000	Rp 1,344,980,000	Rp 1,197,650,000
360	Kab. Maros	Rp 1,506,300,000	Rp 888,700,000	Rp 1,576,170,000
361	Kab. Pangkajene Kepulauan	Rp 1,630,900,000	Rp 1,703,960,000	Rp 2,005,010,000
362	Kab. Pinrang	Rp 1,977,500,000	Rp 801,300,000	Rp 1,676,360,000
363	Kab. Kepulauan Selayar	Rp 1,320,200,000	Rp 1,368,910,000	Rp 2,813,250,000
364	Kab. Sidenreng Rappang	Rp 1,592,600,000	Rp 1,692,450,000	Rp 1,363,000,000
365	Kab. Sinjai	Rp 988,900,000	Rp 1,071,930,000	Rp 1,951,910,000
366	Kab. Soppeng	Rp 725,800,000	Rp 785,760,000	Rp 954,670,000
367	Kab. Takalar	Rp 1,605,800,000	Rp 1,556,950,000	Rp 1,816,110,000
368	Kab. Tana Toraja	Rp 1,835,900,000	Rp 1,811,110,000	Rp 2,027,860,000
369	Kab. Wajo	Rp 2,084,800,000	Rp 2,319,390,000	Rp 1,390,440,000
370	Kota Pare-pare	Rp 737,500,000	Rp 700,610,000	Rp 1,626,900,000
371	Kota Makassar	Rp 4,501,000,000	Rp 5,065,990,000	Rp 4,880,120,000
372	Kota Palopo	Rp 1,292,600,000	Rp 1,129,470,000	Rp 1,152,320,000
373	Kab. Luwu Timur	Rp 736,300,000	Rp 667,350,000	Rp 1,572,390,000
374	Kab. Toraja Utara	Rp 2,530,600,000	Rp 2,682,250,000	Rp 1,967,840,000
XXV	Provinsi Sulawesi Barat	Rp 8,031,100,000	Rp 10,369,320,000	Rp 9,947,670,000
375	Kab. Majene	Rp 1,293,500,000	Rp 1,432,440,000	Rp 1,702,620,000
376	Kab. Mamuju	Rp 1,815,700,000	Rp 2,386,890,000	Rp 1,514,180,000
377	Kab. Polewali Mandar	Rp 2,296,100,000	Rp 3,023,120,000	Rp 1,738,940,000
378	Kab. Mamasa	Rp 1,172,100,000	Rp 1,568,490,000	Rp 1,973,080,000
379	Kab. Mamuju Utara	Rp 1,453,700,000	Rp 1,958,380,000	Rp 3,018,850,000
XXVI	Provinsi Sulawesi Tenggara	Rp 16,098,800,000	Rp 18,718,740,000	Rp 20,253,310,000
380	Kab. Buton	Rp 1,677,800,000	Rp 1,765,640,000	Rp 2,102,800,000
381	Kab. Konawe	Rp 1,590,300,000	Rp 1,845,850,000	Rp 2,074,580,000
382	Kab. Kolaka	Rp -	Rp 1,324,340,000	Rp 1,299,320,000
383	Kab. Muna	Rp 1,786,200,000	Rp 2,249,450,000	Rp 2,357,150,000
384	Kota Kendari	Rp 1,828,600,000	Rp 946,360,000	Rp 2,106,210,000
385	Kota Bau-bau	Rp 1,125,200,000	Rp 970,860,000	Rp 1,255,330,000
386	Kab. Konawe Selatan	Rp 1,881,400,000	Rp 1,917,090,000	Rp 2,118,360,000
387	Kab. Bombana	Rp 1,160,100,000	Rp 1,338,130,000	Rp 1,433,520,000
388	Kab. Wakatobi	Rp 1,236,800,000	Rp 1,550,510,000	Rp 1,570,670,000
389	Kab. Kolaka Utara	Rp 1,102,000,000	Rp 1,675,720,000	Rp 1,471,990,000
390	Kab. Konawe Utara	Rp 1,367,800,000	Rp 1,572,270,000	Rp 1,224,260,000
391	Kab. Buton Utara	Rp 1,342,600,000	Rp 1,562,520,000	Rp 1,239,120,000
XXVII	Provinsi Bali	Rp 15,616,100,000	Rp 19,622,980,000	Rp 12,411,020,000
392	Kab. Badung	Rp -	Rp -	Rp -
393	Kab. Bangli	Rp 1,456,300,000	Rp 1,727,870,000	Rp 1,351,820,000
394	Kab. Buleleng	Rp 2,183,700,000	Rp 3,223,700,000	Rp 3,698,680,000
395	Kab. Gianyar	Rp 2,013,600,000	Rp 2,446,500,000	Rp 1,489,480,000
396	Kab. Jembrana	Rp 1,842,400,000	Rp 1,805,240,000	Rp 1,048,750,000
397	Kab. Karangasem	Rp 2,076,700,000	Rp 2,247,430,000	Rp 1,621,930,000

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Alokasi		
		2011	2012	2013
398	Kab. Klungkung	Rp 1,011,700,000	Rp 1,377,960,000	Rp 1,825,970,000
399	Kab. Tabanan	Rp 1,952,700,000	Rp 2,817,440,000	Rp 1,374,390,000
400	Kota Denpasar	Rp 3,079,000,000	Rp 3,976,840,000	Rp -
XXVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Rp 19,616,400,000	Rp 21,025,710,000	Rp 18,937,800,000
401	Kab. Bima	Rp 1,755,500,000	Rp 2,415,540,000	Rp 1,961,650,000
402	Kab. Dompu	Rp 1,462,900,000	Rp 1,731,900,000	Rp 1,695,050,000
403	Kab. Lombok Barat	Rp 2,583,400,000	Rp 2,358,090,000	Rp 2,242,590,000
404	Kab. Lombok Tengah	Rp 3,388,600,000	Rp 4,206,030,000	Rp 3,153,510,000
405	Kab. Lombok Timur	Rp 3,590,400,000	Rp 4,904,660,000	Rp 3,104,710,000
406	Kab. Sumbawa	Rp 1,342,400,000	Rp 1,398,180,000	Rp 1,540,140,000
407	Kota Mataram	Rp 1,499,900,000	Rp 730,220,000	Rp 1,988,870,000
408	Kota Bima	Rp 1,064,900,000	Rp 1,146,240,000	Rp 1,281,550,000
409	Kab. Sumbawa Barat	Rp 905,500,000	Rp 689,460,000	Rp 766,260,000
410	Kab. Lombok Utara	Rp 2,022,900,000	Rp 1,445,390,000	Rp 1,203,470,000
XXIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rp 37,019,600,000	Rp 38,251,920,000	Rp 41,843,520,000
411	Kab. Alor	Rp 1,527,800,000	Rp 2,312,500,000	Rp 2,036,960,000
412	Kab. Belu	Rp 2,398,800,000	Rp 2,301,540,000	Rp 2,061,040,000
413	Kab. Ende	Rp 1,948,300,000	Rp 1,998,220,000	Rp 1,817,530,000
414	Kab. Flores Timur	Rp 2,157,400,000	Rp 1,727,050,000	Rp 1,774,370,000
415	Kab. Kupang	Rp 2,127,200,000	Rp 1,995,190,000	Rp 2,513,060,000
416	Kab. Lembata	Rp 1,098,900,000	Rp 1,161,170,000	Rp 1,407,440,000
417	Kab. Manggarai	Rp 2,756,500,000	Rp 2,200,980,000	Rp 2,069,730,000
418	Kab. Ngada	Rp 1,431,200,000	Rp 1,237,960,000	Rp 1,282,000,000
419	Kab. Sikka	Rp 1,539,400,000	Rp 1,595,380,000	Rp 2,219,450,000
420	Kab. Sumba Barat	Rp 2,196,900,000	Rp 2,141,800,000	Rp 1,239,170,000
421	Kab. Sumba Timur	Rp 1,713,000,000	Rp 1,331,960,000	Rp 1,864,450,000
422	Kab. Timor Tengah Selatan	Rp 2,655,600,000	Rp 2,794,850,000	Rp 2,873,640,000
423	Kab. Timor Tengah Utara	Rp 1,937,700,000	Rp 1,638,140,000	Rp 2,475,750,000
424	Kota Kupang	Rp 1,087,900,000	Rp 1,437,150,000	Rp 2,761,920,000
425	Kab. Rote Ndao	Rp 1,275,100,000	Rp 1,756,600,000	Rp 3,432,130,000
426	Kab. Manggarai Barat	Rp 1,372,300,000	Rp 1,370,000,000	Rp 1,859,390,000
427	Kab. Nagekeo	Rp 1,483,600,000	Rp 1,350,940,000	Rp 1,397,840,000
428	Kab. Sumba Barat Daya	Rp 1,339,500,000	Rp 1,379,890,000	Rp 2,209,240,000
429	Kab. Sumba Tengah	Rp 1,417,800,000	Rp 1,585,170,000	Rp 1,023,780,000
430	Kab. Manggarai Timur	Rp 2,129,400,000	Rp 2,076,750,000	Rp 2,199,940,000
431	Kab. Sabu Raijua	Rp 1,425,300,000	Rp 2,858,680,000	Rp 1,324,690,000
XXX	Provinsi Maluku	Rp 20,433,300,000	Rp 18,914,260,000	Rp 24,601,280,000
432	Kab. Maluku Tenggara Barat	Rp 1,645,100,000	Rp 1,429,650,000	Rp 2,069,360,000
433	Kab. Maluku Tengah	Rp 2,236,100,000	Rp 2,934,430,000	Rp 2,898,140,000
434	Kab. Maluku Tenggara	Rp 1,648,100,000	Rp 1,710,630,000	Rp 2,463,660,000
435	Kab. Buru	Rp 1,600,300,000	Rp 1,419,640,000	Rp 1,074,960,000
436	Kota Ambon	Rp 1,954,500,000	Rp 2,232,130,000	Rp 2,730,630,000
437	Kab. Seram Bagian Barat	Rp 1,368,300,000	Rp 1,538,690,000	Rp 1,638,220,000

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Alokasi		
		2011	2012	2013
438	Kab. Seram Bagian Timur	Rp 1,287,700,000	Rp 1,743,010,000	Rp 2,358,910,000
439	Kab. Kepulauan Aru	Rp 985,700,000	Rp 1,361,130,000	Rp 1,409,950,000
440	Kota Tual	Rp 3,115,700,000	Rp 1,206,240,000	Rp 1,476,780,000
441	Kab. Maluku Barat Daya	Rp 2,393,100,000	Rp 1,776,390,000	Rp 3,486,690,000
442	Kab. Buru Selatan	Rp 2,198,700,000	Rp 1,562,320,000	Rp 2,993,980,000
XXXI	Provinsi Maluku Utara	Rp 11,304,100,000	Rp 12,721,430,000	Rp 17,838,720,000
443	Kab. Halmahera Tengah	Rp 910,100,000	Rp 947,010,000	Rp 2,325,390,000
444	Kab. Halmahera Barat	Rp 1,461,700,000	Rp 1,729,980,000	Rp 2,049,780,000
445	Kota Ternate	Rp 888,500,000	Rp 1,694,860,000	Rp 1,843,240,000
446	Kab. Halmahera Timur	Rp 1,031,800,000	Rp 892,370,000	Rp 3,204,070,000
447	Kota Tidore Kepulauan	Rp 1,339,900,000	Rp 1,126,060,000	Rp 1,716,140,000
448	Kab. Kepulauan Sula	Rp 1,208,300,000	Rp 1,737,680,000	Rp 2,051,590,000
449	Kab. Halmahera Selatan	Rp 982,900,000	Rp 1,016,060,000	Rp 1,392,860,000
450	Kab. Halmahera Utara	Rp 1,309,000,000	Rp 1,486,250,000	Rp 1,837,420,000
451	Kab. Pulau Morotai	Rp 2,171,900,000	Rp 2,091,160,000	Rp 1,418,230,000
XXXII	Provinsi Papua	Rp 89,758,200,000	Rp 81,867,190,000	Rp 121,635,310,000
452	Kab. Biak Numfor	Rp 2,393,700,000	Rp 1,892,100,000	Rp 2,059,840,000
453	Kab. Jayapura	Rp 1,370,000,000	Rp 1,313,970,000	Rp 1,342,690,000
454	Kab. Jayawijaya	Rp 6,524,900,000	Rp 4,473,550,000	Rp 3,221,540,000
455	Kab. Merauke	Rp 3,186,600,000	Rp 2,058,600,000	Rp 4,731,790,000
456	Kab. Mimika	Rp 2,884,000,000	Rp 1,768,910,000	Rp 2,875,200,000
457	Kab. Nabire	Rp 1,792,600,000	Rp 1,858,090,000	Rp 1,664,400,000
458	Kab. Paniai	Rp 3,272,500,000	Rp 3,703,340,000	Rp 3,356,810,000
459	Kab. Puncak Jaya	Rp 3,405,800,000	Rp 3,507,260,000	Rp 4,549,190,000
460	Kab. Kepulauan Yapen	Rp 1,621,100,000	Rp 1,378,600,000	Rp 1,710,200,000
461	Kota Jayapura	Rp 3,225,100,000	Rp 1,751,930,000	Rp 2,624,920,000
462	Kab. Sarmi	Rp 1,312,400,000	Rp 1,670,480,000	Rp 1,889,040,000
463	Kab. Keerom	Rp 1,231,400,000	Rp 1,352,210,000	Rp 1,936,880,000
464	Kab. Yahukimo	Rp 2,263,400,000	Rp 2,409,690,000	Rp 4,279,270,000
465	Kab. Pegunungan Bintang	Rp 3,277,600,000	Rp 2,708,770,000	Rp 5,202,330,000
466	Kab. Tolikara	Rp 2,419,000,000	Rp 2,353,860,000	Rp 6,867,320,000
467	Kab. Boven Digoel	Rp 1,329,500,000	Rp 1,451,760,000	Rp 1,556,250,000
468	Kab. Mappi	Rp 1,801,300,000	Rp 2,024,850,000	Rp 2,700,550,000
469	Kab. Asmat	Rp 2,518,700,000	Rp 1,949,440,000	Rp 5,112,280,000
470	Kab. Waropen	Rp 1,596,300,000	Rp 2,073,300,000	Rp 2,028,860,000
471	Kab. Supiori	Rp 1,110,300,000	Rp 1,121,710,000	Rp 4,021,970,000
472	Kab. Mamberamo Raya	Rp 2,534,000,000	Rp 1,696,490,000	Rp 5,150,060,000
473	Kab. Mamberamo Tengah	Rp 3,979,400,000	Rp 2,609,460,000	Rp 3,417,080,000
474	Kab. Yalimo	Rp 4,573,500,000	Rp 2,758,150,000	Rp 5,107,280,000
475	Kab. Lanny Jaya	Rp 6,516,300,000	Rp 6,206,350,000	Rp 9,840,100,000
476	Kab. Nduga	Rp 6,744,100,000	Rp 6,681,230,000	Rp 5,308,210,000
477	Kab. Puncak	Rp 5,052,400,000	Rp 5,388,760,000	Rp 13,087,600,000
478	Kab. Dogiyai	Rp 2,604,200,000	Rp 2,761,300,000	Rp 2,678,530,000

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Alokasi		
		2011	2012	2013
479	Kab. Intan Jaya	Rp 5,276,600,000	Rp 5,554,550,000	Rp 5,413,090,000
480	Kab. Deiyai	Rp 3,941,500,000	Rp 5,388,480,000	Rp 7,902,030,000
XXXIII	Provinsi Papua Barat	Rp 15,947,500,000	Rp 17,007,210,000	Rp 26,105,770,000
481	Kab. Sorong	Rp 1,288,800,000	Rp 1,292,980,000	Rp 2,047,700,000
482	Kab. Manokwari	Rp 1,783,800,000	Rp 1,802,700,000	Rp 1,903,340,000
483	Kab. Fak Fak	Rp 1,069,400,000	Rp 1,122,730,000	Rp 2,834,690,000
484	Kota Sorong	Rp 1,159,300,000	Rp 1,205,120,000	Rp 2,120,860,000
485	Kab. Sorong Selatan	Rp 1,385,600,000	Rp 1,418,460,000	Rp 1,837,680,000
486	Kab. Raja Ampat	Rp 1,457,200,000	Rp 1,634,780,000	Rp 2,388,220,000
487	Kab. Teluk Bintuni	Rp 929,000,000	Rp 1,110,460,000	Rp 1,662,360,000
488	Kab. Teluk Wondama	Rp 1,014,900,000	Rp 1,238,930,000	Rp 2,773,830,000
489	Kab. Kaimana	Rp 946,800,000	Rp 1,002,550,000	Rp 2,543,340,000
490	Kab. Maybrat	Rp 2,738,000,000	Rp 2,286,090,000	Rp 1,915,530,000
491	Kab. Tambrau	Rp 2,174,700,000	Rp 2,892,410,000	Rp 4,078,220,000
TOTAL		Rp 1,100,685,000,000	Rp 1,100,685,000,000	Rp 1,100,685,000,000

LAMPIRAN 2

DATA STRUKTUR ORGANISASI INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Struktur Organisasi			
		Sie. Farmasi	UPTD	Lain-lain	n.a.
1. NANGGROE ACEH DARUSSALAM					
1	Kota Banda Aceh	0	1	0	0
2	Kota Sabang	1	0	0	0
3	Kota Lhokseumawe	1	0	0	0
4	Kota Langsa	1	0	0	0
5	Kab. Aceh Utara	1	0	0	0
6	Kab. Aceh Barat	1	0	0	0
7	Kab. Aceh Selatan	1	0	0	0
8	Kab. Aceh Timur	1	0	0	0
9	Kab. Aceh Tengah	0	1	0	0
10	Kab. Aceh Tenggara	1	0	0	0
11	Kab. Aceh Besar	0	1	0	0
12	Kab. Aceh Singkil	0	1	0	0
13	Kab. Pidie	1	0	0	0
14	Kab. Pidie Jaya	1	0	0	0
15	Kab. Siemeuleu	1	0	0	0
16	Kab. Bireuen	0	1	0	0
17	Kab. Gayo Lues	1	0	0	0
18	Kab. Aceh Barat Daya	1	0	0	0
19	Kab. Aceh Tamiang	1	0	0	0
20	Kota Subulussalam	1	0	0	0
21	Kab. Nagan Raya	1	0	0	0
22	Kab. Aceh Jaya	1	0	0	0
23	Kab. Bener Meriah	1	0	0	0
2. SUMATERA UTARA					
1	Kota Medan	0	1	0	0
2	Kota Binjai	1	0	0	0
3	Kota Tebing Tinggi	0	1	0	0
4	Kota Pematang Siantar	0	1	0	0
5	Kota Tanjung Balai	0	1	0	0
6	Kota Sibolga	1	0	0	0
7	Kota Padang Sidempuan	0	1	0	0
8	Kota Gunung Sitoli	0	0	1	0
9	Kab. Deli Serdang	0	1	0	0
10	Kab. Langkat	0	1	0	0
11	Kab. Karo	1	0	0	0
12	Kab. Simalungun	0	1	0	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Struktur Organisasi			
		Sie. Farmasi	UPTD	Lain-lain	n.a.
13	Kab. Dairi	0	1	0	0
14	Kab. Asahan	0	1	0	0
15	Kab. Batubara	0	1	0	0
16	Kab. Labuhan Batu	1	0	0	0
17	Kab. Tapanuli Utara	1	0	0	0
18	Kab. Tapanuli Tengah	1	0	0	0
19	Kab. Tapanuli Selatan	0	1	0	0
20	Kab. Padang Lawas	1	0	0	0
21	Kab. Padang Lawas Utara	0	1	0	0
22	Kab. Nias	0	1	0	0
23	Kab. Toba Samosir	1	0	0	0
24	Kab. Mandailing Natal	0	0	1	0
25	Kab. Humbang Hasudutan	1	0	0	0
26	Kab. Pakpak Barat	1	0	0	0
27	Kab. Nias Selatan	1	0	0	0
28	Kab. Samosir	1	0	0	0
29	Kab. Serdang Begadai	0	1	0	0
30	Kab. Nias Barat	1	0	0	0
31	Kab. Nias Utara	1	0	0	0
32	Kab. Labuhan Batu Utara	1	0	0	0
33	Kab. Labuhan Batu Selatan	1	0	0	0
3. SUMATERA BARAT					
1	Kota Padang	0	1	0	0
2	Kota Solok	0	1	0	0
3	Kota Sawah Lunto	1	0	0	0
4	Kota Padang Panjang	0	1	0	0
5	Kota Bukittinggi	0	1	0	0
6	Kota Payakumbuh	0	1	0	0
7	Kota Pariaman	0	1	0	0
8	Kab. Pesisir Selatan	1	0	0	0
9	Kab. Solok	0	1	0	0
10	Kab. Sawah Lunto	0	1	0	0
11	Kab. Tanah Datar	1	0	0	0
12	Kab. Padang Pariaman	0	1	0	0
13	Kab. Agam	1	0	0	0
14	Kab. 50 Kota	0	1	0	0
15	Kab. Pasaman	0	1	0	0
16	Kab. Kep. Mentawai	0	1	0	0
17	Kab. Solok Selatan	0	1	0	0
18	Kab. Dharmas Raya	0	1	0	0
19	Kab. Pasaman Barat	0	1	0	0
20	Kab. Sijunjung	0	1	0	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Struktur Organisasi			
		Sie. Farmasi	UPTD	Lain-lain	n.a.
4. RIAU					
1	Kota Pekanbaru	0	1	0	0
2	Kota Dumai	1	0	0	0
3	Kab. Indragiri Hulu	0	1	0	0
4	Kab. Indragiri Hilir	0	1	0	0
5	Kab. Kampar	0	1	0	0
6	Kab. Bengkalis	1	0	0	0
7	Kab.Kep. Meranti	1	0	0	0
8	Kab. Pelalawan	0	1	0	0
9	Kab. Rokan Hulu	0	1	0	0
10	Kab. Rokan Hilir	1	0	0	0
11	Kab. Siak	1	0	0	0
12	Kab. Kuantan Singingi	1	0	0	0
5. KEPULAUAN RIAU					
1	Kota Batam	0	1	0	0
2	Kota Tanjung Pinang	0	1	0	0
3	Kab. Bintan (Kab. Kep. Riau)	0	1	0	0
4	Kab. Karimun	0	1	0	0
5	Kab. Natuna	1	0	0	0
6	Kab. Kep. Anambas	1	0	0	0
7	Kab. Lingga	1	0	0	0
6. JAMBI					
1	Kota Jambi	0	1	0	0
2	Kab. Kerinci	0	1	0	0
3	Kab. Merangin	1	0	0	0
4	Kab. Batang Hari	0	1	0	0
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	0	0	0
6	Kab. Bungo	0	1	0	0
7	Kab. Sarolangun	1	0	0	0
8	Kab. Tebo	1	0	0	0
9	Kab. Muaro Jambi	0	1	0	0
10	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	0	0	0
11	Kota Sungai Penuh	0	1	0	0
7. SUMATERA SELATAN					
1	Kota Palembang	0	1	0	0
2	Kota Prabumulih	0	1	0	0
3	Kota Lubuk Linggau	0	0	0	0
4	Kota Pagar Alam	1	0	0	0
5	Kab. OKU	0	1	0	0
6	Kab. OKI	0	1	0	0
7	Kab. Muara Enim	0	1	0	0
8	Kab. Lahat	1	0	0	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Struktur Organisasi			
		Sie. Farmasi	UPTD	Lain-lain	n.a.
9	Kab. Empat Lawang	0	0	1	0
10	Kab. Musi Rawas	0	1	0	0
11	Kab. Musi Banyuasin	1	0	0	0
12	Kab. Banyuasin	0	1	0	0
13	Kab. Ogan Ilir	1	0	0	0
14	Kab. OKU Timur	0	1	0	0
15	Kab. OKU Selatan	1	0	0	0
8. BANGKA BELITUNG					
1	Kota Pangkal Pinang	0	1	0	0
2	Kab. Bangka	0	1	0	0
3	Kab. Belitung	0	1	0	0
4	Kab. Bangka Barat	1	0	0	0
5	Kab. Bangka Tengah	1	0	0	0
6	Kab. Bangka Selatan	1	0	0	0
7	Kab. Belitung Timur	1	0	0	0
9. BENGKULU					
1	Kota Bengkulu	0	1	0	1
2	Kab. Bengkulu Utara	1	0	0	0
3	Kab. Bengkulu Selatan	0	1	0	1
4	Kab. Rejang Lebong	1	0	0	0
5	Kab. Lebong	1	0	0	1
6	Kab. Seluma	0	1	0	0
7	Kab. Kaur	1	0	0	1
8	Kab. Muko-Muko	1	0	0	1
9	Kab. Kepahyang	0	1	0	1
10	Kab. Bengkulu Tengah	1	0	0	0
10. LAMPUNG					
1	Kota Bandar Lampung	0	1	0	0
2	Kota Metro	1	0	0	0
3	Kab. Lampung Utara	0	1	0	0
4	Kab. Lampung Barat	1	0	0	0
5	Kab. Lampung Selatan	0	1	0	0
6	Kab. Pesawaran	1	0	0	0
7	Kab. Lampung Timur	1	0	0	0
8	Kab. Lampung Tengah	1	0	0	0
9	Kab. Tanggamus	1	0	0	0
10	Kab. Pringsewu*	1	0	0	0
11	Kab. Tulang Bawang	0	0	1	0
12	Kab. Tulang Bawang Barat*	1	0	0	0
13	Kab. Mesuji*	1	0	0	0
14	Kab. Way Kanan	0	1	0	0
11. DKI JAKARTA					

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Struktur Organisasi			
		Sie. Farmasi	UPTD	Lain-lain	n.a.
1	Adm. Jakarta Utara	0	0	1	0
2	Adm. Jakarta Barat	0	0	1	0
3	Adm. Jakarta Selatan	1	0	0	0
4	Adm. Jakarta Timur	1	0	0	0
5	Adm. Jakarta Pusat	0	0	1	0
6	Kab. Kep. Seribu	0	0	1	0
12. JAWA BARAT					
1	Kota Bandung	1	0	0	0
2	Kota Bogor	0	0	1	0
3	Kota Cirebon	0	1	0	0
4	Kota Sukabumi	0	0	1	0
5	Kota Bekasi	0	1	0	0
6	Kota Tasikmalaya	0	1	0	0
7	Kota Cimahi	1	0	0	0
8	Kota Depok	0	0	1	0
9	Kota Banjar	1	0	0	0
10	Kab. Bogor	1	0	0	0
11	Kab. Sukabumi	0	1	0	0
12	Kab. Cianjur	1	0	0	0
13	Kab. Bandung	0	1	0	0
14	Kab. Bandung Barat	0	1	0	0
15	Kab. Garut	0	1	0	0
16	Kab. Tasikmalaya	0	1	0	0
17	Kab. Ciamis	0	1	0	0
18	Kab. Kuningan	0	1	0	0
19	Kab. Cirebon	1	0	0	0
20	Kab. Majalengka	1	0	0	0
21	Kab. Sumedang	0	1	0	0
22	Kab. Indramayu	0	1	0	0
23	Kab. Subang	0	1	0	0
24	Kab. Purwakarta	0	1	0	0
25	Kab. Karawang	1	0	0	0
26	Kab. Bekasi	0	0	1	0
13. BANTEN					
1	Kota Tangerang	0	1	0	0
2	Kota Cilegon	1	0	0	0
3	Kab. Serang	0	1	0	0
4	Kota Serang	0	1	0	0
5	Kab. Lebak	1	0	0	0
6	Kab. Pandeglang	0	1	0	0
7	Kab. Tangerang	0	1	0	0
8	Kota Tangerang Selatan	0	1	0	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Struktur Organisasi			
		Sie. Farmasi	UPTD	Lain-lain	n.a.
14. JAWA TENGAH					
1	Kota Semarang	0	1	0	0
2	Kota Magelang	0	1	0	0
3	Kota Surakarta	0	1	0	0
4	Kota Salatiga	0	1	0	0
5	Kota Pekalongan	0	1	0	0
6	Kota Tegal	0	1	0	0
7	Kab. Cilacap	0	1	0	0
8	Kab. Banyumas	0	1	0	0
9	Kab. Purbalingga	1	0	0	0
10	Kab. Bk. Negara	0	1	0	0
11	Kab. Kebumen	1	0	0	0
12	Kab. Purworejo	0	1	0	0
13	Kab. Wonosobo	0	1	0	0
14	Kab. Magelang	0	1	0	0
15	Kab. Boyolali	0	1	0	0
16	Kab. Klaten	0	1	0	0
17	Kab. Sukoharjo	0	1	0	0
18	Kab. Wonogiri	0	1	0	0
19	Kab. Karanganyar	0	1	0	0
20	Kab. Sragen	0	1	0	0
21	Kab. Grobogan	0	1	0	0
22	Kab. Blora	0	1	0	0
23	Kab. Rembang	1	0	0	0
24	Kab. Pati	0	1	0	0
25	Kab. Kudus	1	0	0	0
26	Kab. Jepara	0	1	0	0
27	Kab. Demak	1	0	0	0
28	Kab. Semarang	1	0	0	0
29	Kab. Temanggung	0	1	0	0
30	Kab. Kendal	0	1	0	0
31	Kab. Batang	0	1	0	0
32	Kab. Pekalongan	0	1	0	0
33	Kab. Pemalang	1	0	0	0
34	Kab. Tegal	0	1	0	0
35	Kab. Brebes	1	0	0	0
15. DI. YOGYAKARTA					
1	Kota Yogyakarta	0	0	1	0
2	Kab. Kulon Progo	1	0	0	0
3	Kab. Bantul	1	0	0	0
4	Kab. Gunung Kidul	1	0	0	0
5	Kab. Sleman	0	1	0	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Struktur Organisasi			
		Sie. Farmasi	UPTD	Lain-lain	n.a.
16. JAWA TIMUR					
1	Kota Surabaya	1	0	0	0
2	Kota Kediri	1	0	0	0
3	Kota Blitar	1	0	0	0
4	Kota Malang	1	0	0	0
5	Kota Probolinggo	1	0	0	0
6	Kota Pasuruan	0	1	0	0
7	Kota Mojokerto	0	1	0	0
8	Kota Madiun	0	1	0	0
9	Kota Batu	1	0	0	0
10	Kab. Pacitan	0	1	0	0
11	Kab. Ponorogo	0	1	0	0
12	Kab. Trenggalek	1	0	0	0
13	Kab. Tulungagung	0	1	0	0
14	Kab. Blitar	0	1	0	0
15	Kab. Kediri	1	0	0	0
16	Kab. Malang	1	0	0	0
17	Kab. Lumajang	0	1	0	0
18	Kab. Jember	0	1	0	0
19	Kab. Banyuwangi	0	0	1	0
20	Kab. Bondowoso	1	0	0	0
21	Kab. Situbondo	1	0	0	0
22	Kab. Probolinggo	0	1	0	0
23	Kab. Pasuruan	0	1	0	0
24	Kab. Sidoarjo	0	1	0	0
25	Kab. Mojokerto	0	1	0	0
26	Kab. Jombang	1	0	0	0
27	Kab. Nganjuk	0	1	0	0
28	Kab. Madiun	0	1	0	0
29	Kab. Magetan	0	1	0	0
30	Kab. Ngawi	0	1	0	0
31	Kab. Lamongan	1	0	0	0
32	Kab. Gresik	0	1	0	0
33	Kab. Bangkalan	1	0	0	0
34	Kab. Sampang	0	1	0	0
35	Kab. Pamekasan	0	1	0	0
36	Kab. Sumenep	1	0	0	0
37	Kab. Bojonegoro	0	0	0	0
38	Kab. Tuban	0	1	0	0
17. BALI					
1	Kota Denpasar	0	1	0	0
2	Kab. Jemberana	1	0	0	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Struktur Organisasi			
		Sie. Farmasi	UPTD	Lain-lain	n.a.
3	Kab. Tabanan	1	0	0	0
4	Kab. Badung	0	1	0	0
5	Kab. Gianyar	0	1	0	0
6	Kab. Klungkung	0	1	0	0
7	Kab. Bangli	0	1	0	0
8	Kab. Karangasem	1	0	0	0
9	Kab. Buleleng	0	1	0	0
18. NUSA TENGGARA BARAT					
1	Kota Mataram	0	0	0	0
2	Kota Bima	0	0	0	0
3	Kab. Lombok Barat	0	0	0	0
4	Kab. Lombok Tengah	0	0	0	0
5	Kab. Lombok Timur	0	0	0	0
6	Kab. Sumbawa	0	0	0	0
7	Kab. Dompu	0	0	0	0
8	Kab. Bima	0	0	0	0
9	Kab. Sumbawa Barat	0	0	0	0
10	Kab. Lombok Utara	0	0	0	0
19. NUSA TENGGARA TIMUR					
1	Kota Kupang	0	1	0	0
2	Kab. Sumba Barat	1	0	0	0
3	Kab. Sumba Barat Daya	1	0	0	0
4	Kab. Sumba Tengah	1	0	0	0
5	Kab. Sumba Timur	1	0	0	0
6	Kab. Kupang	0	1	0	0
7	Kab. Sabu Raijua	1	0	0	0
8	Kab. Timur Tengah Selatan	1	0	0	0
9	Kab. Timur Tengah Utara	0	1	0	0
10	Kab. Lembata	1	0	0	0
11	Kab. Belu	1	0	0	0
12	Kab. Alor	1	0	0	0
13	Kab. Flores Timur	0	0	1	0
14	Kab. Sikka	1	0	0	0
15	Kab. Ende	0	1	0	0
16	Kab. Ngada	1	0	0	0
17	Kab. Nagekeo	1	0	0	0
18	Kab. Manggarai	0	1	0	0
19	Kab. Manggarai Timur	1	0	0	0
20	Kab. Rote Ndao	1	0	0	0
21	Kab. Manggarai Barat	0	1	0	0
20. KALIMANTAN BARAT					
1	Kota Pontianak	1	0	0	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Struktur Organisasi			
		Sie. Farmasi	UPTD	Lain-lain	n.a.
2	Kota Singkawang	0	1	0	0
3	Kab. Sambas	0	1	0	0
4	Kab. Pontianak	0	1	0	0
5	Kab. Kubu Raya	0	1	0	0
6	Kab. Sanggau	0	1	0	0
7	Kab. Sekadau	1	0	0	0
8	Kab. Ketapang	0	1	0	0
9	Kab. Kayong Utara	1	0	0	0
10	Kab. Sintang	1	0	0	0
11	Kab. Melawi	0	1	0	0
12	Kab. Kapuas Hulu	1	0	0	0
13	Kab. Bengkayang	0	1	0	0
14	Kab. Landak	1	0	0	0
21. KALIMANTAN TENGAH					
1	Kota Palangkaraya	1	0	0	0
2	Kab. Kotawaringin Barat	0	1	0	0
3	Kab. Kotawaringin Timur	1	0	0	0
4	Kab. Kapuas	1	1	0	0
5	Kab. Barito Selatan	1	0	0	0
6	Kab. Barito Utara	0	1	0	0
7	Kab. Murung Raya	1	1	0	0
8	Kab. Barito Timur	1	0	0	0
9	Kab. Gunung Mas	1	0	0	0
10	Kab. Pulang Pisau	1	0	0	0
11	Kab. Katingan	0	1	0	0
12	Kab. Seruyan	1	0	0	0
13	Kab. Sukamara	1	0	0	0
14	Kab. Lamandau	1	0	0	0
22. KALIMANTAN SELATAN					
1	Kota Banjarmasin	0	1	0	0
2	Kota Banjar Baru	0	1	0	0
3	Kab. Tanah Laut	0	1	0	0
4	Kab. Kota Baru	0	1	0	0
5	Kab. Banjar	0	1	0	0
6	Kab. Barito Kuala	0	1	0	0
7	Kab. Tapin	0	1	0	0
8	Kab. Hulu Sungai Selatan	0	1	0	0
9	Kab. Hulu Sungai Tengah	0	1	0	0
10	Kab. Hulu Sungai Utara	0	1	0	0
11	Kab. Tabalong	0	1	0	0
12	Kab. Balangan	0	1	0	0
13	Kab. Tanah Bumbu	0	1	0	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Struktur Organisasi			
		Sie. Farmasi	UPTD	Lain-lain	n.a.
23. KALIMANTAN TIMUR					
1	Kota Samarinda	0	1	0	0
2	Kota Balikpapan	0	1	0	0
3	Kota Tarakan	0	1	0	0
4	Kota Bontang	1	0	0	0
5	Kab. Pasir	0	1	0	0
6	Kab. Kutai Kertanegara	0	1	0	0
7	Kab. Berau	0	1	0	0
8	Kab. Bulungan	0	1	0	0
9	Kab. Tana Tidung	1	0	0	0
10	Kab. Malinau	0	1	0	0
11	Kab. Nunukan	0	1	0	0
12	Kab. Kutai Barat	1	0	0	0
13	Kab. Kutai Timur	1	0	0	0
14	Kab. Penajam Pasir Utara	1	0	0	0
24. SULAWESI UTARA					
1	Kota Manado	0	1	0	0
2	Kota Bitung	0	1	0	0
3	Kota Tomohon	0	1	0	0
4	Kab. Sangihe	0	1	0	0
5	Kab. Kep. Sitaro	1	0	0	0
6	Kab. Talaud	1	0	0	0
7	Kab. Minahasa	0	1	0	0
8	Kab. Minahasa Utara	1	0	0	0
9	Kab. Bolaang Mongondow	0	1	0	0
10	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0	1	0	0
11	Kota Kotamobagu	0	1	0	0
12	Kab. Minahasa Selatan	0	1	0	0
13	Kab. Minahasa Tenggara	1	0	0	0
14	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1	0	0	0
15	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1	0	0	0
25. GORONTALO					
1	Kota Gorontalo	0	1	0	0
2	Kab. Gorontalo	0	1	0	0
3	Kab. Gorontalo Utara	0	0	1	0
4	Kab. Boalemo	0	1	0	0
5	Kab. Bone Bolango	0	1	0	0
6	Kab. Pohuwato	1	0	0	0
26. SULAWESI TENGAH					
1	Kota Palu	0	1	0	0
2	Kab. Banggai	1	0	0	0
3	Kab. Poso	0	1	0	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Struktur Organisasi			
		Sie. Farmasi	UPTD	Lain-lain	n.a.
4	Kab. Tojo Unauna	1	0	0	0
5	Kab. Donggala	1	0	0	0
6	Kab. Sigi	1	0	0	0
7	Kab. Toli-toli	0	1	0	0
8	Kab. Buol	1	0	0	0
9	Kab. Morowali	1	0	0	0
10	Kab. Banggai Kepulauan	1	0	0	0
11	Kab. Parigi Moutong	1	0	0	0
27. SULAWESI SELATAN					
1	Kota Makassar	0	1	0	0
2	Kota Pare Pare	1	0	0	0
3	Kota Palopo	1	0	0	0
4	Kab. Bulukumba	0	1	0	0
5	Kab. Bantaeng	1	0	0	0
6	Kab. Jeneponto	1	0	0	0
7	Kab. Takalar	1	0	0	0
8	Kab. Gowa	0	1	0	0
9	Kab. Sinjai	0	1	0	0
10	Kab. Bone	1	0	0	0
11	Kab. Maros	0	1	0	0
12	Kab. Pangkep	0	1	0	0
13	Kab. Barru	1	0	0	0
14	Kab. Soppeng	1	0	0	0
15	Kab. Wajo	1	0	0	0
16	Kab. Sidrap	1	0	0	0
17	Kab. Pinrang	1	0	0	0
18	Kab. Enrekang	1	0	0	0
19	Kab. Luwu	0	1	0	0
20	Kab. Luwu Timur	1	0	0	0
21	Kab. Luwu Utara	1	0	0	0
22	Kab. Tana Toraja	1	0	0	0
23	Kab. Toraja Utara	0	1	0	0
24	Kab. Selayar	0	1	0	0
28. SULAWESI BARAT					
1	Kab. Polewali Mandar	0	1	0	0
2	Kab. Majene	0	1	0	0
3	Kab. Mamuju	0	1	0	0
4	Kab. Mamuju Utara	0	1	0	0
5	Kab. Mamasa	1	0	0	0
29. SULAWESI TENGGARA					
1	Kota Kendari	0	1	0	0
2	Kota Bau-Bau	1	0	0	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Struktur Organisasi			
		Sie. Farmasi	UPTD	Lain-lain	n.a.
3	Kab. Buton	0	1	0	0
4	Kab. Buton Utara	1	0	0	0
5	Kab. Muna	0	1	0	0
6	Kab. Kolaka	0	1	0	0
7	Kab. Konawe	0	1	0	0
8	Kab. Konawe Selatan	1	0	0	0
9	Kab. Konawe Utara	1	0	0	0
10	Kab. Bombana	0	1	0	0
11	Kab. Wakatobi	1	0	0	0
12	Kab. Kolaka Utara	0	1	0	0
30. MALUKU					
1	Kota Ambon	0	1	0	0
2	Kab. Maluku Tengah	1	0	0	0
3	Kab. Pulau Buru	1	0	0	0
4	Kab Buru Selatan	1	0	0	0
5	Kab. Maluku Tenggara	1	0	0	0
6	Kota Tual	0	1	0	0
7	Kab. Maluku Tenggara Barat	1	0	0	0
8	Kab. Seram Bagian Barat	1	0	0	0
9	Kab. Seram Bagian Timur	1	0	0	0
10	Kab. Kep. Aru	1	0	0	0
11	Kab. Maluku Barat Daya	1	0	0	0
31. MALUKU UTARA					
1	Kota Ternate	0	1	0	0
2	Kota Tidore	2	0	0	0
3	Kab. Halmahera Tengah	1	0	0	0
4	Kab. Halmahera Barat	0	1	0	0
5	Kab. Halmahera Utara	1	0	0	0
6	Kab Pulau Morotai	1	0	0	0
7	Kab. Halmahera Selatan	0	1	0	0
8	Kab. Halmahera Timur	1	0	0	0
9	Kab. Kep. Sula	1	0	0	0
32. PAPUA					
1	Kota Jayapura	1	0	0	0
2	Kab. Jayapura	1	0	0	0
3	Kab. Sarmi	1	0	0	0
4	Kab. Mamberamo Raya	1	0	0	0
5	Kab. Kerom	1	0	0	0
6	Kab. Jayawijaya	1	0	0	0
7	Kab. Lanny Jaya	1	0	0	0
8	Kab. Mamberamo Tengah	1	0	0	0
9	Kab. Nduga	1	0	0	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Struktur Organisasi			
		Sie. Farmasi	UPTD	Lain-lain	n.a.
10	Kab. Yalimo	1	0	0	0
11	Kab. Pegunungan Bintang	1	0	0	0
12	Kab. Yahukimo	1	0	0	0
13	Kab. Tolikara	0	0	1	0
14	Kab. Puncak Jaya	1	0	0	0
15	Kab. Puncak	1	0	0	0
16	Kab. Merauke	0	1	0	0
17	Kab. Bovendigoel	0	1	0	0
18	Kab. Asmat	1	0	0	0
19	Kab. Mappi	1	0	0	0
20	Kab. Kep. Yapen	1	0	0	0
21	Kab. Waropen	0	1	0	0
22	Kab. Biak Numfor	1	0	0	0
23	Kab. Supiori	1	0	0	0
24	Kab. Nabire	0	1	0	0
25	Kab. Dogiyai	1	0	0	0
26	Kab. Paniai	0	0	1	0
27	Kab. Intan Jaya	1	0	0	0
28	Kab. Deiyai	1	0	0	0
29	Kab. Mimika	1	0	0	0
33. PAPUA BARAT					
1	Kota Sorong	1	0	0	0
2	Kab. Sorong	0	1	0	0
3	Kab. Tambora	1	0	0	0
4	Kab. Sorong Selatan	1	0	0	0
5	Kab. Maybrat	1	0	0	0
6	Kab. Raja Ampat	0	1	0	0
7	Kab. Manokwari	0	1	0	0
8	Kab. Teluk Bintuni	1	0	0	0
9	Kab. Teluk Wondama	0	1	0	0
10	Kab. Fak Fak	0	1	0	0
11	Kab. Kaimana	0	1	0	0

LAMPIRAN 3

DATA RIWAYAT BANGUNAN INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Luas Tanah			Luas Bangunan	
		100-499 m ²	500-1.000 m ²	> 1.000 m ²	≤ 300 m ²	> 300 m ²
1. NANGGROE ACEH DARUSSALAM						
1	Kota Banda Aceh	1	0	0	1	0
2	Kota Sabang	0	0	1	0	1
3	Kota Lhokseumawe	1	0	0	1	0
4	Kota Langsa	0	0	1	0	1
5	Kota Subulussalam	0	1	0	0	1
6	Kab. Aceh Utara	1	0	0	0	1
7	Kab. Aceh Barat	0	1	0	0	1
8	Kab. Aceh Selatan	1	0	0	0	1
9	Kab. Aceh Timur	0	1	0	1	0
10	Kab. Aceh Tengah	0	1	0	1	0
11	Kab. Aceh Tenggara	0	0	1	0	1
12	Kab. Aceh Besar	1	0	0	1	0
13	Kab. Aceh Singkil	0	0	1	0	1
14	Kab. Pidie	1	0	0	1	0
15	Kab. Pidie Jaya	0	0	1	0	1
16	Kab. Siemeuleu	1	0	0	1	0
17	Kab. Bireuen*	0	1	0	1	0
18	Kab. Gayo Lues	0	0	1	0	1
19	Kab. Aceh Barat Daya	1	0	0	1	0
20	Kab. Aceh Tamiang	0	0	1	0	1
21	Kab. Nagan Raya	1	0	0	1	0
22	Kab. Aceh Jaya	0	0	1	0	1
23	Kab. Bener Meriah	0	0	1	0	1
2. SUMATERA UTARA						
1	Kota Medan	0	1	0	0	1
2	Kota Binjai	1	0	0	0	1
3	Kota Tebing Tinggi*	0	1	0	0	1
4	Kota Pematang Siantar	0	0	1	0	1
5	Kota Tanjung Balai	0	1	0	1	0
6	Kota Sibolga	0	1	0	0	1
7	Kota Padang Sidempuan	0	1	0	0	1
8	Kota Gunung Sitoli	1	0	0	1	0
9	Kab. Deli Serdang	0	1	0	0	1
10	Kab. Langkat	0	0	1	0	1
11	Kab. Karo	1	0	0	1	0
12	Kab. Simalungun	0	0	1	0	1
13	Kab. Dairi	0	1	0	1	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Luas Tanah			Luas Bangunan	
		100-499 m ²	500-1.000 m ²	> 1.000 m ²	≤ 300 m ²	> 300 m ²
14	Kab. Asahan	0		1	0	1
15	Kab. Batubara	0	0	1	0	1
16	Kab. Labuhan Batu	1	0	0	0	1
17	Kab. Tapanuli Utara	1	0	0	1	0
18	Kab. Tapanuli Tengah	0	0	1	1	0
19	Kab. Tapanuli Selatan	0	1	0	0	1
20	Kab. Padang Lawas	0	1	0	1	0
21	Kab. Padang Lawas Utara*	0	1	0	0	1
22	Kab. Nias	1	0	0	1	0
23	Kab. Toba Samosir	1	0	0	1	0
24	Kab. Mandailing Natal	1	0	0	0	1
25	Kab. Humbang Hasudutan	1	0	0	1	0
26	Kab. Pakpak Barat	1	0	0	1	0
27	Kab. Nias Selatan	1	0	0	1	0
28	Kab. Samosir*	1	0	0	1	0
29	Kab. Serdang Begadai	1	0	0	1	0
30	Kab. Nias Barat	0	1	0	0	1
31	Kab. Nias Utara	1	0	0	1	0
32	Kab. Labuhan Batu Utara	1	0	0	1	0
33	Kab. Labuhan Batu Selatan	1	0	0	1	0
3. SUMATERA BARAT						
1	Kota Padang	0	1	0	1	0
2	Kota Solok	0	1	0	1	0
3	Kota Sawah Lunto	0	0	1	0	1
4	Kota Padang Panjang	0	1	0	1	0
5	Kota Bukittinggi	0	1	0	0	1
6	Kota Payakumbuh	0	0	1	1	0
7	Kota Pariaman	1	0	0	0	1
8	Kab. Pesisir Selatan	1	0	0	1	0
9	Kab. Solok	0	1	0	0	1
10	Kab. Sawah Lunto	0	1	0	1	0
11	Kab. Tanah Datar	0	1	0	0	1
12	Kab. Padang Pariaman	0	0	1	0	1
13	Kab. Agam	0	1	0	1	0
14	Kab. 50 Kota*	0	1	0	1	0
15	Kab. Pasaman	1	0	0	1	0
16	Kab. Kep. Mentawai	1	0	0	1	0
17	Kab. Solok Selatan	1	0	0	1	0
18	Kab. Dharmas Raya	1	0	0	1	0
19	Kab. Pasaman Barat	0	1	0	1	0
20	Kab. Sijunjung	1	0	0	1	0
4. RIAU						
1	Kota Pekanbaru	0	0	1	1	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Luas Tanah			Luas Bangunan	
		100-499 m ²	500-1.000 m ²	> 1.000 m ²	≤ 300 m ²	> 300 m ²
2	Kota Dumai	1	0	0	0	1
3	Kab. Indragiri Hulu	0	0	1	0	1
4	Kab. Indragiri Hilir	0	1	0	0	1
5	Kab. Kampar	0	1	0	0	1
6	Kab. Bangkalis	0	1	0	1	0
7	Kab. Kep. Meranti	1	0	0	1	0
8	Kab. Pelalawan	0	0	1	0	1
9	Kab. Rokan Hulu	1	0	0	0	1
10	Kab. Rokan Hilir	1	0	0	1	0
11	Kab. Siak	0	1	0	1	0
12	Kab. Kuantan Singingi	0	1	0	1	0
5. KEPULAUAN RIAU						
1	Kota Batam	0	1	0	0	1
2	Kota Tanjung Pinang	1	0	0	1	0
3	Kab. Bintan	0	1	0	1	0
4	Kab. Karimun	1	0	0	0	1
5	Kab. Natuna*	1	0	0	1	0
6	Kab. Kep. Anambas*	1	0	0	1	0
7	Kab. Lingga	1	0	0	1	0
6. JAMBI						
1	Kota Jambi	0	1	0	0	1
2	Kota Sungai Penuh	1	0	0	0	0
3	Kab. Kerinci	0	0	0	0	1
4	Kab. Merangin	1	0	0	0	1
5	Kab. Batang Hari	0	0	1	0	1
6	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	0	0	1	0
7	Kab. Bungo	0	1	0	0	1
8	Kab. Sarolangun	0	1	0	0	1
9	Kab. Tebo	1	0	0	0	1
10	Kab. Muaro Jambi	1	0	0	1	0
11	Kab. Tanjung Jabung Timur	0	1	0	1	0
7. SUMATERA SELATAN						
1	Kota Palembang*	0	1	0	0	1
2	Kota Prabumulih	1	0	0	1	0
3	Kota Lubuk Linggau*	1	0	0	1	0
4	Kota Pagar Alam	0	1	0	1	0
5	Kab. Ogan Komering Ulu	0	0	1	0	1
6	Kab. Ogan Komering Ilir*	1	0	0	1	0
7	Kab. Muara Enim	0	0	1	0	1
8	Kab. Lahat	0	0	1	0	1
9	Kab. Empat Lawang*	1	0	0	1	0
10	Kab. Musi Rawas	0	0	1	1	0
11	Kab. Musi Banyuasin	0	0	1	1	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Luas Tanah			Luas Bangunan	
		100-499 m ²	500-1.000 m ²	> 1.000 m ²	≤ 300 m ²	> 300 m ²
12	Kab. Banyuasin	0	1	0	0	1
13	Kab. Ogan Ilir*	1	0	0	1	0
14	Kab. OKU Timur	0	1	0	1	0
15	Kab. OKU Selatan	1	0	0	1	0
8. BANGKA BELITUNG						
1	Kota Pangkal Pinang*	0	0	1	1	0
2	Kab. Bangka	0	1	0	0	1
3	Kab. Belitung	1	0	0	0	1
4	Kab. Bangka Barat	0	1	0	1	0
5	Kab. Bangka Tengah	1	0	0	1	0
6	Kab. Bangka Selatan	0	0	1	0	1
7	Kab. Belitung Timur*	1	0	0	1	0
9. BENGKULU						
1	Kota Bengkulu	1	0	0	1	0
2	Kab. Bengkulu Utara	0	1	0	0	1
3	Kab. Bengkulu Selatan	1	0	1	0	1
4	Kab. Rejang Lebong	0	0	1	1	0
5	Kab. Lebong	0	0	1	1	0
6	Kab. Seluma	0	0	1	1	0
7	Kab. Kaur*	0	0	1	1	0
8	Kab. Muko-Muko	0	0	1	1	0
9	Kab. Kepahyang	0	0	1	1	0
10	Kab. Bengkulu Tengah	0	0	1	0	1
10. LAMPUNG						
1	Kota Bandar Lampung	1	0	0	0	1
2	Kota Metro	0	1	0	0	1
3	Kab. Lampung Utara	1	0	0	0	1
4	Kab. Lampung Barat	1	0	0	0	1
5	Kab. Lampung Selatan	1	0	0	0	1
6	Kab. Pesawaran	1	0	0	1	0
7	Kab. Lampung Timur*	1	0	0	1	0
8	Kab. Lampung Tengah	0	1	0	0	1
9	Kab. Tanggamus*	0	1	0	0	1
10	Kab. Pringsewu	1	0	0	1	0
11	Kab. Tulang Bawang	0	1	0	0	1
12	Kab. Tulang Bawang Barat	0	1	0	0	1
13	Kab. Mesuji	1	0	0	1	0
14	Kab. Way Kanan	0	1	0	0	1
11. DKI JAKARTA						
1	Kota Adm. Jakarta Utara	0	1	0	0	1
2	Kota Adm. Jakarta Barat	0	1	0	0	1
3	Kota Adm. Jakarta Selatan	0	0	1	0	1
4	Kota Adm. Jakarta Timur	0	0	1	0	1

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Luas Tanah			Luas Bangunan	
		100-499 m ²	500-1.000 m ²	> 1.000 m ²	≤ 300 m ²	> 300 m ²
5	Kota Adm. Jakarta Pusat	1	0	0	1	0
6	Kab. Kep. Seribu*	1	0	0	1	0
12. JAWA BARAT						
1	Kota Bandung	0	1	0	0	1
2	Kota Bogor	1	0	0	1	0
3	Kota Cirebon	0	0	1	0	1
4	Kota Sukabumi	1	0	0	1	0
5	Kota Bekasi	0	0	1	0	1
6	Kota Tasikmalaya	0	1	0	0	1
7	Kota Cimahi	0	1	0	0	1
8	Kota Depok	1	0	0	1	0
9	Kota Banjar	0	1	0	0	1
10	Kab. Bogor	0	1	0	0	1
11	Kab. Sukabumi	0	0	1	0	1
12	Kab. Cianjur	0	0	1	0	1
13	Kab. Bandung	0	0	1	0	1
14	Kab. Bandung Barat	0	1	0	0	1
15	Kab. Garut	0	0	1	0	1
16	Kab. Tasikmalaya	1	0	0	1	0
17	Kab. Ciamis	0	1	0	0	1
18	Kab. Kuningan	1	0	0	0	1
19	Kab. Cirebon	0	0	1	0	1
20	Kab. Majalengka	1	0	0	1	0
21	Kab. Sumedang	0	0	1	0	1
22	Kab. Indramayu	1	0	0	1	0
23	Kab. Subang	0	0	1	0	1
24	Kab. Purwakarta	1	0	0	1	0
25	Kab. Karawang	0	1	0	0	1
26	Kab. Bekasi	1	0	0	1	0
13. BANTEN						
1	Kota Tangerang*	0	1	0	0	1
2	Kota Cilegon*	1	0	0	0	1
3	Kota Serang	1	0	0	1	0
4	Kota Tangerang Selatan*	0	1	0	0	1
5	Kab. Serang*	0	1	0	0	1
6	Kab. Lebak	0	0	1	0	1
7	Kab. Pandeglang	0	1	0	0	1
8	Kab. Tangerang	0	1	0	0	1
14. JAWA TENGAH						
1	Kota Semarang		1	0	0	1
2	Kota Magelang	0	0	1	0	1
3	Kota Surakarta	0	1	0	1	0
4	Kota Salatiga	0	1	0	0	1

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Luas Tanah			Luas Bangunan	
		100-499 m ²	500-1.000 m ²	> 1.000 m ²	≤ 300 m ²	> 300 m ²
5	Kota Pekalongan	0	0	1	0	1
6	Kota Tegal	0	0	1	1	0
7	Kab. Cilacap	0	0	1	0	1
8	Kab. Banyumas*	0	0	1	0	1
9	Kab. Purbalingga	0	1	0	0	1
10	Kab. Banjar Negara	0	1	0	0	1
11	Kab. Kebumen	0	1	0	0	1
12	Kab. Purworejo*	0	0	1	0	1
13	Kab. Wonosobo	0	1	0	0	1
14	Kab. Magelang	0	1	0	0	1
15	Kab. Boyolali	0	1	0	0	1
16	Kab. Klaten	0	0	1	0	1
17	Kab. Sukoharjo	0	1	0	0	1
18	Kab. Wonogiri	0	1	0	1	0
19	Kab. Karanganyar*	0	1	0	1	0
20	Kab. Sragen	0	1	0	0	1
21	Kab. Grobogan	0	0	1	0	1
22	Kab. Blora	0	0	1	1	0
23	Kab. Rembang	0	1	0	0	1
24	Kab. Pati	0	1	0	0	1
25	Kab. Kudus	0	1	0	0	1
26	Kab. Jepara	0	0	1	0	1
27	Kab. Demak	0	0	1	0	1
28	Kab. Semarang	0	0	1	0	1
29	Kab. Temanggung*	0	0	1	0	1
30	Kab. Kendal	0	1	0	0	1
31	Kab. Batang	0	1	0	0	1
32	Kab. Pekalongan	0	1	0	0	1
33	Kab. Pemalang	0	1	0	0	1
34	Kab. Tegal	0	0	1	0	1
35	Kab. Brebes	0	1	0	0	1
15. DI. YOGYAKARTA						
1	Kota Yogyakarta	0	0	1	0	1
2	Kab. Kulon Progo	0	1	0	0	1
3	Kab. Bantul	0	0	1	1	0
4	Kab. Gunung Kidul	0	1	0	0	1
5	Kab. Sleman	0	1	0	1	0
16. JAWA TIMUR						
1	Kota Surabaya	0	0	0	0	1
2	Kota Kediri	0	0	0	1	0
3	Kota Blitar	0	0	0	1	0
4	Kota Malang	0	0	0	1	0
5	Kota Probolinggo	0	1	0	0	1

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Luas Tanah			Luas Bangunan	
		100-499 m ²	500-1.000 m ²	> 1.000 m ²	≤ 300 m ²	> 300 m ²
6	Kota Pasuruan	0	1	0	1	0
7	Kota Mojokerto	0	0	1	1	0
8	Kota Madiun	0	0	0	1	0
9	Kota Batu	0	0	0	1	0
10	Kab. Pacitan*	0	0	1	1	0
11	Kab. Ponorogo	0	0	0	0	1
12	Kab. Trenggalek	0	0	0	0	1
13	Kab. Tulungagung*	0	1	0	1	0
14	Kab. Blitar	0	0	0	0	1
15	Kab. Kediri	0	0	0	1	0
16	Kab. Malang	0	0	0	0	1
17	Kab. Lumajang	0	0	1	0	1
18	Kab. Jember	0	0	0	0	1
19	Kab. Banyuwangi	0	0	1	1	0
20	Kab. Bondowoso	0	0	0	1	0
21	Kab. Situbondo	0	0	1	1	0
22	Kab. Probolinggo	0	1	0	0	1
23	Kab. Pasuruan	0	0	0	0	1
24	Kab. Sidoarjo	0	0	0	0	1
25	Kab. Mojokerto	0	0	0	0	1
26	Kab. Jombang	0	1	0	0	1
27	Kab. Nganjuk	0	1	0	1	0
28	Kab. Madiun	0	0	0	1	0
29	Kab. Magetan	0	1	0	1	0
30	Kab. Ngawi	0	0	0	1	0
31	Kab. Lamongan	0	1	0	0	1
32	Kab. Gresik	0	1	0	1	0
33	Kab. Bangkalan	0	0	1	0	1
34	Kab. Sampang	0	0	0	0	1
35	Kab. Pamekasan	0	0	1	0	1
36	Kab. Sumenep	0	0	0	0	1
37	Kab. Bojonegoro	0	1	0	0	1
38	Kab. Tuban	0	1	0	0	1
17. BALI						
1	Kota Denpasar	0	1	0	0	1
2	Kab. Jemberana	0	1	0	1	0
3	Kab. Tabanan	0	1	0	0	1
4	Kab. Badung	0	1	0	1	0
5	Kab. Gianyar	0	0	1	0	1
6	Kab. Klungkung*	0	0	1	0	1
7	Kab. Bangli	0	1	0	1	0
8	Kab. Karangasem	1	0	0	1	0
9	Kab. Buleleng	0	0	1	1	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Luas Tanah			Luas Bangunan	
		100-499 m ²	500-1.000 m ²	> 1.000 m ²	≤ 300 m ²	> 300 m ²
18. NUSA TENGGARA BARAT						
1	Kota Mataram*	1	0	0	1	0
2	Kota Bima	1	0	0	0	1
3	Kab. Lombok Barat*	0	0	1	0	1
4	Kab. Lombok Tengah	0	1	0	0	1
5	Kab. Lombok Timur	0	0	1	0	1
6	Kab. Sumbawa	0	1	0	0	1
7	Kab. Dompu	1	0	0	1	0
8	Kab. Bima	1	0	0	1	0
9	Kab. Sumbawa Barat	0	1	0	1	0
10	Kab. Lombok Utara	1	0	0	0	1
19. NUSA TENGGARA TIMUR						
1	Kota Kupang	1	0	0	1	0
2	Kab. Sumba Barat	0	0	1	1	0
3	Kab. Sumba Barat Daya	1	0	0	1	0
4	Kab. Sumba Tengah	1	0	0	1	0
5	Kab. Sumba Timur	1	0	0	1	0
6	Kab. Kupang	0	0	1	1	0
7	Kab. Sabu Raijua	0	1	0	0	1
8	Kab. Timur Tengah Selatan	0	0	1	0	1
9	Kab. Timur Tengah Utara	0	0	1	1	0
10	Kab. Lembata	1	0	0	1	0
11	Kab. Belu	0	1	0	1	0
12	Kab. Alor	1	0	0	0	1
13	Kab. Flores Timur	1	0	0	1	0
14	Kab. Sikka	1	0	0	1	0
15	Kab. Ende	0	1	0	1	0
16	Kab. Ngada	1	0	0	0	1
17	Kab. Nagekeo	1	0	0	1	0
18	Kab. Manggarai	0	1	0	0	1
19	Kab. Manggarai Timur	0	1	0	1	0
20	Kab. Rote Ndao	1	0	0	1	0
21	Kab. Manggarai Barat	0	0	1	0	1
20. KALIMANTAN BARAT						
1	Kota Pontianak	0	0	1	0	1
2	Kota Singkawang	0	1	0	1	0
3	Kab. Sambas	0	1	0	1	0
4	Kab. Pontianak*	0	1	0	0	1
5	Kab. Kubu Raya*	0	0	1	1	0
6	Kab. Sanggau	0	0	1	1	0
7	Kab. Sekadau*	0	1	0	1	0
8	Kab. Ketapang*	0	0	1	0	1
9	Kab. Kayong Utara*	0	1	0	1	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Luas Tanah			Luas Bangunan	
		100-499 m ²	500-1.000 m ²	> 1.000 m ²	≤ 300 m ²	> 300 m ²
10	Kab. Sintang*	1	0	0	0	1
11	Kab. Melawi*	0	0	1	1	0
12	Kab. Kapuas Hulu*	0	0	1	0	1
13	Kab. Bengkayang*	0	0	1	0	1
14	Kab. Landak	0	0	1	0	1
21. KALIMANTAN TENGAH						
1	Kota Palangkaraya*	0	0	1	0	1
2	Kab. Kotawaringin Barat*	1	0	0	1	0
3	Kab. Kotawaringin Timur*	1	0	0	1	0
4	Kab. Kapuas*	0	1	0	0	1
5	Kab. Barito Selatan	0	1	0	0	1
6	Kab. Barito Utara*	0	1	0	1	0
7	Kab. Murung Raya	1	0	0	1	0
8	Kab. Barito Timur*	1	0	0	0	1
9	Kab. Gunung Mas*	1	0	0	1	0
10	Kab. Pulang Pisau*	1	0	0	0	1
11	Kab. Katingan	0	1	0	1	0
12	Kab. Seruyan	0	1	0	0	1
13	Kab. Sukamara*	0	0	1	1	0
14	Kab. Lamandau	1	0	0	1	0
22. KALIMANTAN SELATAN						
1	Kota Banjarmasin	1	0	0	0	1
2	Kota Banjar Baru	1	0	0	1	0
3	Kab. Tanah Laut	1	0	0	1	0
4	Kab. Kota Baru*	0	0	1	1	0
5	Kab. Banjar	0	0	1	0	1
6	Kab. Barito Kuala*	0	0	1	0	1
7	Kab. Tapin	0	0	1	1	0
8	Kab. Hulu Sungai Selatan	0	0	1	1	0
9	Kab. Hulu Sungai Tengah*	1	0	0	0	1
10	Kab. Hulu Sungai Utara	1	0	0	1	0
11	Kab. Tabalong	0	1	0	1	0
12	Kab. Balangan	0	1	0	1	0
13	Kab. Tanah Bumbu	0	1	0	1	0
23. KALIMANTAN TIMUR						
1	Kota Samarinda	0	1	0	0	1
2	Kota Balikpapan	0	0	1	0	1
3	Kota Tarakan*	0	0	1	0	1
4	Kota Bontang	0	0	1	1	0
5	Kab. Pasir	0	1	0	0	1
6	Kab. Kutai Kertanegara	0	1	0	0	1
7	Kab. Berau	0	0	1	0	1
8	Kab. Bulungan*	0	0	1	0	1

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Luas Tanah			Luas Bangunan	
		100-499 m ²	500-1.000 m ²	> 1.000 m ²	≤ 300 m ²	> 300 m ²
9	Kab. Tana Tidung*	0	0	0	1	0
10	Kab. Malinau*	0	1	0	1	0
11	Kab. Nunukan*	0	0	1	1	0
12	Kab. Kutai Barat	0	0	0	1	0
13	Kab. Kutai Timur	0	1	0	1	0
14	Kab. Penajam Pasir Utara	0	1	0	1	0
24. SULAWESI UTARA						
1	Kota Manado	1	0	0	1	0
2	Kota Bitung*	1	0	0	1	0
3	Kota Tomohon*	0	0	1	1	0
4	Kota Kotamobagu	1	0	0	1	0
5	Kab. Sangihe	0	1	0	1	0
6	Kab. Kep. Sitaro*	0	1	0	1	0
7	Kab. Talaud	0	1	0	0	1
8	Kab. Minahasa*	1	0	0	0	1
9	Kab. Minahasa Utara*	0	0	1	0	1
10	Kab. Bolaang Mongondow	0	1	0	0	1
11	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1	0	0	1	0
12	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0	1	0	1	0
13	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0	0	1	0	1
14	Kab. Minahasa Selatan	1	0	0	1	0
15	Kab. Minahasa Tenggara	0	1	0	0	1
25. GORONTALO						
1	Kota Gorontalo	0	0	1	0	1
2	Kab. Gorontalo	0	1	0	0	1
3	Kab. Gorontalo Utara	0	0	0	1	0
4	Kab. Boalemo	0	1	0	1	0
5	Kab. Bone Bolango	0	1	0	1	0
6	Kab. Pohuwato	0	1	0	1	0
26. SULAWESI TENGAH						
1	Kota Palu	0	0	1	0	1
2	Kab. Banggai*	0	0	1	0	1
3	Kab. Poso	0	0	1	0	1
4	Kab. Tojo Una-Una	1	0	0	1	0
5	Kab. Donggala*	0	0	1	0	1
6	Kab. Sigi*	0	1	0	0	1
7	Kab. Toli-Toli	0	0	1	0	1
8	Kab. Buol	0	0	1	1	0
9	Kab. Morowali	0	0	1	1	0
10	Kab. Banggai Kepulauan*	1	0	0	1	0
11	Kab. Parigi Moutong	0	0	1	0	1
27. SULAWESI SELATAN						
1	Kota Makassar*	1	0	0	0	1

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Luas Tanah			Luas Bangunan	
		100-499 m ²	500-1.000 m ²	> 1.000 m ²	≤ 300 m ²	> 300 m ²
2	Kota Pare Pare*	0	1	0	0	1
3	Kota Palopo*	1	0	0	0	1
4	Kab. Bulukumba	0	1	0	0	1
5	Kab. Bantaeng	1	0	0	1	0
6	Kab. Jeneponto	1	0	0	0	1
7	Kab. Takalar*	0	1	0	0	1
8	Kab. Gowa	1	0	0	1	0
9	Kab. Sinjai*	0	0	1	1	0
10	Kab. Bone	0	1	0	0	1
11	Kab. Maros	0	1	0	1	0
12	Kab. Pangkep*	1	0	0	0	1
13	Kab. Barru*	1	0	0	1	0
14	Kab. Soppeng*	1	0	0	0	1
15	Kab. Wajo*	0	0	1	1	0
16	Kab. Sidrap*	0	1	0	1	0
17	Kab. Pinrang	1	0	0	0	1
18	Kab. Enrekang	1	0	0	1	0
19	Kab. Luwu	0	1	0	0	1
20	Kab. Luwu Timur	0	0	1	0	1
21	Kab. Luwu Utara	0	1	0	0	1
22	Kab. Tana Toraja*	0	1	0	1	0
23	Kab. Toraja Utara*	0	1	0	1	0
24	Kab. Selayar	0	0	1	1	0
28. SULAWESI BARAT						
1	Kab. Polewali	0	0	1	0	1
2	Kab. Majene	1	0	0	0	1
3	Kab. Mamuju*	0	1	0	0	1
4	Kab. Mamuju Utara	0	0	1	1	0
5	Kab. Mamasa	1	0	0	1	0
29. SULAWESI TENGGARA						
1	Kota Kendari	0	0	1	0	1
2	Kota Bau-Bau	1	0	0	0	1
3	Kab. Buton	0	0	1	1	0
4	Kab. Buton Utara	0	1	0	1	0
5	Kab. Muna	0	0	1	0	1
6	Kab. Kolaka	0	1	0	0	1
7	Kab. Konawe	0	0	1	1	0
8	Kab. Konawe Selatan	0	0	1	0	1
9	Kab. Konawe Utara	1	0	0	1	0
10	Kab. Bombana	1	0	0	1	0
11	Kab. Wakatobi	1	0	0	1	0
12	Kab. Kolaka Utara	1	0	0	0	1
30. MALUKU						

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Luas Tanah			Luas Bangunan	
		100-499 m ²	500-1.000 m ²	> 1.000 m ²	≤ 300 m ²	> 300 m ²
1	Kota Ambon	0	0	1	0	1
2	Kota Tual	0	1	0	1	0
3	Kab. Maluku Tengah	0	1	0	1	0
4	Kab. Pulau Buru	1	0	0	1	0
5	Kab. Buru Selatan	0	1	0	0	1
6	Kab. Maluku Tenggara	0	1	0	1	0
7	Kab. Maluku Tenggara Barat	1	0	0	0	1
8	Kab. Seram Bagian Barat	0	0	1	1	0
9	Kab. Seram Bagian Timur*	0	1	0	1	0
10	Kab. Kep. Aru	0	1	0	1	0
11	Kab. Maluku Barat Daya	0	1	0	0	1
31. MALUKU UTARA						
1	Kota Ternate*	0	1	0	1	0
2	Kota Tidore	1	0	0	1	0
3	Kab. Halmahera Tengah	0	1	0	1	0
4	Kab. Halmahera Barat	0	1	0	1	0
5	Kab. Halmahera Utara	0	1	0	0	1
6	Kab. Pulau Morotai	0	1	0	0	1
7	Kab. Halmahera Selatan	0	0	1	0	1
8	Kab. Halmahera Timur	0	0	1	1	0
9	Kab. Kep. Sula	0	1	0	1	0
32. PAPUA						
1	Kota Jayapura	1	0	0	1	0
2	Kab. Jayapura	0	1	0	0	1
3	Kab. Sarmi	1	0	0	0	1
4	Kab. Mamberamo Raya*	0	1	0	1	0
5	Kab. Kerom	1	0	0	1	0
6	Kab. Jayawijaya	1	0	0	0	1
7	Kab. Lanny Jaya*	1	0	0	1	0
8	Kab. Mamberamo Tengah	1	0	0	1	0
9	Kab. Nduga*	0	1	0	1	0
10	Kab. Yalimo	0	1	0	0	1
11	Kab. Pegunungan Bintang	0	0	1	0	1
12	Kab. Yahukimo	0	0	1	0	1
13	Kab. Tolikara*	1	0	0	1	0
14	Kab. Puncak Jaya	1	0	0	1	0
15	Kab. Puncak*	1	0	0	1	0
16	Kab. Merauke	0	0	1	1	0
17	Kab. Bovendigoel	1	0	0	1	0
18	Kab. Asmat	0	0	1	1	0
19	Kab. Mappi	0	1	0	0	1
20	Kab. Kep. Yapen	1	0	0	1	0
21	Kab. Waropen	0	0	1	0	1

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Luas Tanah			Luas Bangunan	
		100-499 m ²	500-1.000 m ²	> 1.000 m ²	≤ 300 m ²	> 300 m ²
22	Kab. Biak Numfor	0	1	0	0	1
23	Kab. Supiori*	1	0	0	1	0
24	Kab. Nabire*	0	0	1	0	1
25	Kab. Dogiyai*	0	0	0	1	0
26	Kab. Paniai	1	0	0	1	0
27	Kab. Intan Jaya	0	0	1	1	0
28	Kab. Deiyai*	1	0	0	1	0
29	Kab. Mimika	0	0	1	0	1
33. PAPUA BARAT						
1	Kota Sorong	0	0	0	1	0
2	Kab. Sorong	0	0	1	1	0
3	Kab. Tambora	0	1	0	1	0
4	Kab. Sorong Selatan	1	0	0	1	0
5	Kab. Maybrat	0	1	0	1	0
6	Kab. Raja Ampat	1	0	0	1	0
7	Kab. Manokwari	0	1	0	1	0
8	Kab. Teluk Bintuni	0	1	0	1	0
9	Kab. Teluk Wondama	0	1	0	1	0
10	Kab. Fak Fak	0	0	1	0	1
11	Kab. Kaimana	0	1	0	1	0

LAMPIRAN 4

PERBANDINGAN SDM DI INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Penanggung Jawab Instalasi Farmasi					
		Apoteker	S-1 Farmasi	D-3 Farmasi	AA/SMF	Tenaga Kes. Lain	Lain-lain
1. NANGGROE ACEH DARUSSALAM							
1	Kota Banda Aceh	0	0	1	0	0	0
2	Kota Sabang	1	0	0	0	0	0
3	Kota Lhokseumawe	1	0	0	0	0	0
4	Kota Langsa	0	0	0	0	1	0
5	Kota Subulussalam	0	0	0	1	0	0
6	Kab. Aceh Utara	1	0	0	0	0	0
7	Kab. Aceh Barat	0	0	0	0	1	0
8	Kab. Aceh Selatan	1	0	0	0	0	0
9	Kab. Aceh Timur	0	0	0	1	0	0
10	Kab. Aceh Tengah	0	0	0	0	1	0
11	Kab. Aceh Tenggara	0	0	0	1	0	0
12	Kab. Aceh Besar	1	0	0	0	0	0
13	Kab. Aceh Singkil	1	0	0	0	0	0
14	Kab. Pidie	0	0	0	0	1	0
15	Kab. Pidie Jaya	0	0	0	1	0	0
16	Kab. Siemeuleu	1	0	0	0	0	0
17	Kab. Bireuen	0	0	0	0	1	0
18	Kab. Gayo Lues	1	0	0	0	0	0
19	Kab. Aceh Barat Daya	1	0	0	0	0	0
20	Kab. Aceh Tamiang	1	0	0	0	0	0
21	Kab. Nagan Raya	1	0	0	0	0	0
22	Kab. Aceh Jaya	0	0	0	0	0	1
23	Kab. Bener Meriah	1	0	0	0	0	0
2. SUMATERA UTARA							
1	Kota Medan	1	0	0	0	0	0
2	Kota Binjai	1	0	0	0	0	0
3	Kota Tebing Tinggi	1	0	0	0	0	0
4	Kota Pematang Siantar	0	0	0	1	0	0
5	Kota Tanjung Balai	1	0	0	0	0	0
6	Kota Sibolga	1	0	0	0	0	0
7	Kota Padang Sidempuan	0	0	0	1	0	0
8	Kota Gunung Sitoli	1	0	0	0	0	0
9	Kab. Deli Serdang	1	0	0	0	0	0
10	Kab. Langkat	1	0	0	0	0	0
11	Kab. Karo	1	0	0	0	0	0
12	Kab. Simalungun	1	0	0	0	0	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Penanggung Jawab Instalasi Farmasi					
		Apoteker	S-1 Farmasi	D-3 Farmasi	AA/SMF	Tenaga Kes. Lain	Lain-lain
13	Kab. Dairi	0	0	0	1	0	0
14	Kab. Asahan	0	0	0	0	0	1
15	Kab. Batubara	0	0	0	0	1	0
16	Kab. Labuhan Batu	1	0	0	0	0	0
17	Kab. Tapanuli Utara	0	0	0	0	1	0
18	Kab. Tapanuli Tengah	0	0	0	1	0	0
19	Kab. Tapanuli Selatan	1	0	0	0	0	0
20	Kab. Padang Lawas	1	0	0	0	0	0
21	Kab. Padang Lawas Utara	0	0	0	1	0	0
22	Kab. Nias	0	0	0	0	1	0
23	Kab. Toba Samosir	0	0	0	0	1	0
24	Kab. Mandailing Natal	1	0	0	0	0	0
25	Kab. Humbang Hasudutan	1	0	0	0	0	0
26	Kab. Pakpak Barat	1	0	0	0	0	0
27	Kab. Nias Selatan	0	0	0	0	1	0
28	Kab. Samosir	1	0	0	0	0	0
29	Kab. Serdang Begadai	1	0	0	0	0	0
30	Kab. Nias Barat	1	0	0	0	0	0
31	Kab. Nias Utara	0	0	0	0	1	0
32	Kab. Labuhan Batu Utara	0	0	1	0	0	0
33	Kab. Labuhan Batu Selatan	1	0	0	0	0	0
3. SUMATERA BARAT							
1	Kota Padang	1	0	0	0	0	0
2	Kota Solok	1	0	0	0	0	0
3	Kota Sawah Lunto	1	0	0	0	0	0
4	Kota Padang Panjang	0	0	0	0	1	0
5	Kota Bukittinggi	1	0	0	0	0	0
6	Kota Payakumbuh	0	0	0	1	0	0
7	Kota Pariaman	1	0	0	0	0	0
8	Kab. Pesisir Selatan	1	0	0	0	0	0
9	Kab. Solok	1	0	0	0	0	0
10	Kab. Sawah Lunto	0	0	0	1	0	0
11	Kab. Tanah Datar	1	0	0	0	0	0
12	Kab. Padang Pariaman	1	0	0	0	0	0
13	Kab. Agam	1	0	0	0	0	0
14	Kab. 50 Kota	1	0	0	0	0	0
15	Kab. Pasaman	1	0	0	0	0	0
16	Kab. Kep. Mentawai	1	0	0	0	0	0
17	Kab. Solok Selatan	0	0	0	0	1	0
18	Kab. Dharmas Raya	1	0	0	0	0	0
19	Kab. Pasaman Barat	1	0	0	0	0	0
20	Kab. Sijunjung	0	0	0	1	0	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Penanggung Jawab Instalasi Farmasi					
		Apoteker	S-1 Farmasi	D-3 Farmasi	AA/SMF	Tenaga Kes. Lain	Lain-lain
4. RIAU							
1	Kota Pekanbaru	1	0	0	0	0	0
2	Kota Dumai	1	0	0	0	0	0
3	Kab. Indragiri Hulu	1	0	0	0	0	0
4	Kab. Indragiri Hilir	0	0	0	0	0	1
5	Kab. Kampar	0	0	0	0	1	0
6	Kab. Bangkalis	1	0	0	0	0	0
7	Kab. Kep. Meranti	1	0	0	0	0	0
8	Kab. Pelalawan	1	0	0	0	0	0
9	Kab. Rokan Hulu	1	0	0	0	0	0
10	Kab. Rokan Hilir	1	0	0	0	0	0
11	Kab. Siak	1	0	0	0	0	0
12	Kab. Kuantan Singingi	0	0	0	0	0	1
5. KEPULAUAN RIAU							
1	Kota Batam	1	0	0	0	0	0
2	Kota Tanjung Pinang	1	0	0	0	0	0
3	Kab. Bintan (Kab. Kep. Riau)	0	0	0	0	0	1
4	Kab. Karimun	1	0	0	0	0	0
5	Kab. Natuna	1	0	0	0	0	0
6	Kab. Kep. Anambas	1	0	0	0	0	0
7	Kab. Lingga	1	0	0	0	0	0
6. JAMBI							
1	Kota Jambi	1	0	0	0	0	1
2	Kota Sungai Penuh	0	0	1	0	0	0
3	Kab. Kerinci	1	0	0	0	0	1
4	Kab. Merangin	1	0	0	0	0	0
5	Kab. Batang Hari	1	0	0	0	0	0
6	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	0	0	0	0	0
7	Kab. Bungo	1	0	0	0	0	0
8	Kab. Sarolangun	1	0	0	0	0	0
9	Kab. Tebo	1	0	0	0	0	0
10	Kab. Muaro Jambi	1	0	0	0	0	0
11	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	0	0	0	0	0
7. SUMATERA SELATAN							
1	Kota Palembang	1	0	0	0	0	0
2	Kota Prabumulih	0	1	0	0	0	0
3	Kota Lubuk Linggau	1	0	0	0	0	0
4	Kota Pagar Alam	0	0	0	1	0	0
5	Kab. Ogan Komering Ulu	1	0	0	0	0	0
6	Kab. Ogan Komering Ilir	1	0	0	0	0	0
7	Kab. Muara Enim	1	0	0	0	0	0
8	Kab. Lahat	1	0	0	0	0	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Penanggung Jawab Instalasi Farmasi					
		Apoteker	S-1 Farmasi	D-3 Farmasi	AA/SMF	Tenaga Kes. Lain	Lain-lain
9	Kab. Empat Lawang	0	0	0	0	1	0
10	Kab. Musi Rawas	0	0	0	0	0	1
11	Kab. Musi Banyuasin	1	0	0	0	0	0
12	Kab. Banyuasin	0	0	0	0	0	1
13	Kab. Ogan Ilir	0	0	0	0	1	0
14	Kab. OKU Timur	1	0	0	0	0	0
15	Kab. OKU Selatan	0	0	0	0	1	0
8. BANGKA BELITUNG							
1	Kota Pangkal Pinang	1	0	0	0	0	0
2	Kab. Bangka	1	0	0	0	0	0
3	Kab. Belitung	0	0	0	1	0	0
4	Kab. Bangka Barat	1	0	0	0	0	0
5	Kab. Bangka Tengah	1	0	0	0	0	0
6	Kab. Bangka Selatan	1	0	0	0	0	0
7	Kab. Belitung Timur	1	0	0	0	0	0
9. BENGKULU							
1	Kota Bengkulu	1	0	0	0	0	0
2	Kab. Bengkulu Utara	0	0	0	1	0	0
3	Kab. Bengkulu Selatan	1	0	0	0	0	0
4	Kab. Rejang Lebong	0	0	0	0	1	0
5	Kab. Lebong	1	0	0	0	0	0
6	Kab. Seluma	1	0	0	0	0	0
7	Kab. Kaur	1	0	0	0	0	0
8	Kab. Muko-Muko	1	0	0	0	0	0
9	Kab. Kepahyang	0	0	0	1	0	1
10	Kab. Bengkulu Tengah	0	0	0	1	0	1
10. LAMPUNG							
1	Kota Bandar Lampung	1	0	0	0	0	0
2	Kota Metro	0	0	0	1	0	0
3	Kab. Lampung Utara	1	0	0	0	0	0
4	Kab. Lampung Barat	1	0	0	0	0	0
5	Kab. Lampung Selatan	0	1	0	0	0	0
6	Kab. Pesawaran	1	0	0	0	0	0
7	Kab. Lampung Timur	0	0	0	0	1	0
8	Kab. Lampung Tengah	0	0	0	0	1	0
9	Kab. Tanggamus	1	0	0	0	0	0
10	Kab. Pringsewu	0	0	0	0	1	0
11	Kab. Tulang Bawang	1	0	0	0	0	0
12	Kab. Tulang Bawang Barat	1	0	0	0	0	0
13	Kab. Mesuji	0	0	0	0	1	0
14	Kab. Way Kanan	0	0	0	0	0	1
11. DKI JAKARTA							

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Penanggung Jawab Instalasi Farmasi					
		Apoteker	S-1 Farmasi	D-3 Farmasi	AA/SMF	Tenaga Kes. Lain	Lain-lain
1	Kota Adm. Jakarta Utara	1	0	0	0	0	0
2	Kota Adm. Jakarta Barat	1	0	0	0	0	0
3	Kota Adm. Jakarta Selatan	1	0	0	0	0	0
4	Kota Adm. Jakarta Timur	0	0	0	1	0	0
5	Kota Adm. Jakarta Pusat	1	0	0	0	0	0
6	Kab. Kep. Seribu	0	0	0	1	0	0
12. JAWA BARAT							
1	Kota Bandung	1	0	0	0	0	0
2	Kota Bogor	1	0	0	0	0	0
3	Kota Cirebon	1	0	0	0	0	0
4	Kota Sukabumi	1	0	0	0	0	0
5	Kota Bekasi	1	0	0	0	0	0
6	Kota Tasikmalaya	1	0	0	0	0	0
7	Kota Cimahi	1	0	0	0	0	0
8	Kota Depok	1	0	0	0	0	0
9	Kota Banjar	1	0	0	0	0	0
10	Kab. Bogor	1	0	0	0	0	0
11	Kab. Sukabumi	1	0	0	0	0	0
12	Kab. Cianjur	0	0	0	1	0	0
13	Kab. Bandung	1	0	0	0	0	0
14	Kab. Bandung Barat	0	0	0	0	1	0
15	Kab. Garut	1	0	0	0	0	0
16	Kab. Tasikmalaya	1	0	0	0	0	0
17	Kab. Ciamis	1	0	0	0	0	0
18	Kab. Kuningan	1	0	0	0	0	0
19	Kab. Cirebon	1	0	0	0	0	0
20	Kab. Majalengka	1	0	0	0	0	0
21	Kab. Sumedang	0	0	0	1	0	0
22	Kab. Indramayu	1	0	0	0	0	0
23	Kab. Subang	0	0	0	0	0	1
24	Kab. Purwakarta	1	0	0	0	0	0
25	Kab. Karawang	1	0	0	0	0	0
26	Kab. Bekasi	0	0	0	0	1	0
13. BANTEN							
1	Kota Tangerang*	1	0	0	0	0	0
2	Kota Cilegon	1	0	0	0	0	0
3	Kota Serang	0	0	0	0	1	0
4	Kota Tangerang Selatan*	1	0	0	0	0	0
5	Kab. Serang*	0	0	0	1	0	0
6	Kab. Lebak	1	0	0	0	0	0
7	Kab. Pandeglang	1	0	0	0	0	0
8	Kab. Tangerang	0	0	0	0	1	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Penanggung Jawab Instalasi Farmasi					
		Apoteker	S-1 Farmasi	D-3 Farmasi	AA/SMF	Tenaga Kes. Lain	Lain-lain
14. JAWA TENGAH							
1	Kota Semarang	1	0	0	0	0	0
2	Kota Magelang	1	0	0	0	0	0
3	Kota Surakarta	0	0	1	0	0	0
4	Kota Salatiga	1	0	0	0	0	0
5	Kota Pekalongan	0	0	0	1	0	0
6	Kota Tegal	1	0	0	0	0	0
7	Kab. Cilacap	1	0	0	0	0	0
8	Kab. Banyumas	1	0	0	0	0	0
9	Kab. Purbalingga	0	0	0	0	1	0
10	Kab. Bk. Negara	1	0	0	0	0	0
11	Kab. Kebumen	1	0	0	0	0	0
12	Kab. Purworejo	1	0	0	0	0	0
13	Kab. Wonosobo	1	0	0	0	0	0
14	Kab. Magelang	0	0	0	0	1	0
15	Kab. Boyolali	0	0	0	0	1	0
16	Kab. Klaten	1	0	0	0	0	0
17	Kab. Sukoharjo	1	0	0	0	0	0
18	Kab. Wonogiri	1	0	0	0	0	0
19	Kab. Karanganyar*	1	0	0	0	0	0
20	Kab. Sragen	1	0	0	0	0	0
21	Kab. Grobogan	1	0	0	0	0	0
22	Kab. Blora	1	0	0	0	0	0
23	Kab. Rembang	1	0	0	0	0	0
24	Kab. Pati	1	0	0	0	0	0
25	Kab. Kudus	1	0	0	0	0	0
26	Kab. Jepara	1	0	0	0	0	0
27	Kab. Demak	1	0	0	0	0	0
28	Kab. Semarang	1	0	0	0	0	0
29	Kab. Temanggung	1	0	0	0	0	0
30	Kab. Kendal	0	0	0	0	1	0
31	Kab. Batang	1	0	0	0	0	0
32	Kab. Pekalongan	1	0	0	0	0	0
33	Kab. Pemalang	1	0	0	0	0	0
34	Kab. Tegal	1	0	0	0	0	0
35	Kab. Brebes	1	0	0	0	0	0
15. DI. YOGYAKARTA							
1	Kota Yogyakarta	1	0	0	0	0	0
2	Kab. Kulon Progo	1	0	0	0	0	0
3	Kab. Bantul	1	0	0	0	0	0
4	Kab. Gunung Kidul	1	0	0	0	0	0
5	Kab. Sleman	1	0	0	0	0	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Penanggung Jawab Instalasi Farmasi					
		Apoteker	S-1 Farmasi	D-3 Farmasi	AA/SMF	Tenaga Kes. Lain	Lain-lain
16. JAWA TIMUR							
1	Kota Surabaya	1	0	0	0	0	0
2	Kota Kediri	1	0	0	0	0	0
3	Kota Blitar	0	0	0	0	1	0
4	Kota Malang	0	0	0	0	1	0
5	Kota Probolinggo	0	0	0	0	0	1
6	Kota Pasuruan	1	0	0	0	0	0
7	Kota Mojokerto	1	0	0	0	0	0
8	Kota Madiun	0	0	0	1	0	0
9	Kota Batu	0	0	0	0	0	1
10	Kab. Pacitan	1	0	0	0	0	0
11	Kab. Ponorogo	1	0	0	0	0	0
12	Kab. Trenggalek	0	0	0	1	0	0
13	Kab. Tulungagung	1	0	0	0	0	0
14	Kab. Blitar	1	0	0	0	0	0
15	Kab. Kediri	1	0	0	0	0	0
16	Kab. Malang	1	0	0	0	0	0
17	Kab. Lumajang	1	0	0	0	0	0
18	Kab. Jember	1	0	0	0	0	0
19	Kab. Banyuwangi	1	0	0	0	0	0
20	Kab. Bondowoso	0	0	0	0	1	0
21	Kab. Situbondo	1	0	0	0	0	0
22	Kab. Probolinggo	1	0	0	0	0	0
23	Kab. Pasuruan	1	0	0	0	0	0
24	Kab. Sidoarjo	1	0	0	0	0	0
25	Kab. Mojokerto	1	0	0	0	0	0
26	Kab. Jombang	1	0	0	0	0	0
27	Kab. Nganjuk	0	0	0	1	0	0
28	Kab. Madiun	1	0	0	0	0	0
29	Kab. Magetan	0	0	0	1	0	0
30	Kab. Ngawi	1	0	0	1	0	0
31	Kab. Lamongan	0	0	0	1	0	0
32	Kab. Gresik	1	0	0	0	0	0
33	Kab. Bangkalan	1	0	0	0	0	0
34	Kab. Sampang	0	0	0	0	0	1
35	Kab. Pamekasan	0	0	0	0	0	1
36	Kab. Sumenep	0	0	0	1	0	0
37	Kab. Bojonegoro	1	0	0	0	0	0
38	Kab. Tuban	1	0	0	0	0	0
17. BALI							
1	Kota Denpasar	0	0	0	1	0	0
2	Kab. Jemberana	1	0	0	0	0	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Penanggung Jawab Instalasi Farmasi					
		Apoteker	S-1 Farmasi	D-3 Farmasi	AA/SMF	Tenaga Kes. Lain	Lain-lain
3	Kab. Tabanan	1	0	0	0	0	0
4	Kab. Badung	0	0	0	0	0	1
5	Kab. Gianyar	1	0	0	0	0	0
6	Kab. Klungkung	1	0	0	0	0	0
7	Kab. Bangli	1	0	0	0	0	0
8	Kab. Karangasem	0	0	0	0	1	1
9	Kab. Buleleng	1	0	0	0	0	0
18. NUSA TENGGARA BARAT							
1	Kota Mataram	1	0	0	0	0	0
2	Kota Bima	1	0	0	0	0	0
3	Kab. Lombok Barat	1	0	0	0	0	0
4	Kab. Lombok Tengah	1	0	0	0	0	0
5	Kab. Lombok Timur	1	0	0	0	0	0
6	Kab. Sumbawa	0	0	0	0	1	0
7	Kab. Dompu	1	0	0	0	0	0
8	Kab. Bima	0	0	0	0	1	0
9	Kab. Sumbawa Barat	0	0	0	0	1	0
10	Kab. Lombok Utara	0	0	0	0	1	0
19. NUSA TENGGARA TIMUR							
1	Kota Kupang	0	0	1	0	0	0
2	Kab. Sumba Barat*	1	0	0	0	0	0
3	Kab. Sumba Barat Daya*	0	0	0	0	1	0
4	Kab. Sumba Tengah	0	1	0	0	0	0
5	Kab. Sumba Timur	1	0	0	0	0	0
6	Kab. Kupang	0	0	0	0	1	0
7	Kab. Sabu Raijua*	0	0	0	1	0	0
8	Kab. Timur Tengah Selatan*	1	0	0	0	0	0
9	Kab. Timur Tengah Utara	1	0	0	0	0	0
10	Kab. Lembata*	0	0	0	0	1	0
11	Kab. Belu*	1	0	0	0	0	0
12	Kab. Alor*	1	0	0	0	0	0
13	Kab. Flores Timur*	1	0	0	0	0	0
14	Kab. Sikka*	1	0	0	0	0	0
15	Kab. Ende	1	0	0	0	0	0
16	Kab. Ngada	1	0	0	0	0	0
17	Kab. Nagekeo	1	0	0	0	0	0
18	Kab. Manggarai	1	0	0	0	0	0
19	Kab. Manggarai Timur	0	0	0	0	1	0
20	Kab. Rote Ndao*	1	0	0	0	0	0
21	Kab. Manggarai Barat	1	0	0	0	0	0
20. KALIMANTAN BARAT							
1	Kota Pontianak	1	0	0	0	0	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Penanggung Jawab Instalasi Farmasi					
		Apoteker	S-1 Farmasi	D-3 Farmasi	AA/SMF	Tenaga Kes. Lain	Lain-lain
2	Kota Singkawang	1	0	0	0	0	0
3	Kab. Sambas	1	0	0	0	0	0
4	Kab. Pontianak	1	0	0	0	0	0
5	Kab. Kubu Raya	1	0	0	0	0	0
6	Kab. Sanggau	1	0	0	0	0	0
7	Kab. Sekadau	1	0	0	0	0	0
8	Kab. Ketapang	1	0	0	0	0	0
9	Kab. Kayong Utara	1	0	0	0	0	0
10	Kab. Sintang	0	0	0	0	0	1
11	Kab. Melawi*	1	0	0	0	0	0
12	Kab. Kapuas Hulu	1	0	0	0	0	0
13	Kab. Bengkayang	1	0	0	0	0	0
14	Kab. Landak	1	0	0	0	0	0
21. KALIMANTAN TENGAH							
1	Kota Palangkaraya	1	0	0	0	0	0
2	Kab. Kotawaringin Barat	0	0	0	1	0	0
3	Kab. Kotawaringin Timur	0	0	1	0	0	0
4	Kab. Kapuas	1	0	0	0	0	0
5	Kab. Barito Selatan	1	0	0	0	0	0
6	Kab. Barito Utara	1	0	0	0	0	0
7	Kab. Murung Raya	1	0	0	0	0	0
8	Kab. Barito Timur	1	0	0	0	0	0
9	Kab. Gunung Mas	1	0	0	0	0	0
10	Kab. Pulang Pisau	1	0	0	0	0	0
11	Kab. Katingan	1	0	0	0	0	0
12	Kab. Seruyan	1	0	0	0	0	0
13	Kab. Sukamara	1	0	0	0	0	0
14	Kab. Lamandau	1	0	0	0	0	0
22. KALIMANTAN SELATAN							
1	Kota Banjarmasin	1	0	0	0	0	0
2	Kota Banjar Baru	0	0	0	0	1	0
3	Kab. Tanah Laut	1	0	0	0	0	0
4	Kab. Kota Baru	1	0	0	0	0	0
5	Kab. Banjar	0	0	0	0	1	0
6	Kab. Barito Kuala	1	0	0	0	0	0
7	Kab. Tapin	1	0	0	0	0	0
8	Kab. Hulu Sungai Selatan	1	0	0	0	0	0
9	Kab. Hulu Sungai Tengah	0	0	0	1	0	0
10	Kab. Hulu Sungai Utara	1	0	0	0	0	0
11	Kab. Tabalong	0	0	0	0	1	0
12	Kab. Balangan	1	0	0	0	0	0
13	Kab. Tanah Bumbu	1	0	0	0	0	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Penanggung Jawab Instalasi Farmasi					
		Apoteker	S-1 Farmasi	D-3 Farmasi	AA/SMF	Tenaga Kes. Lain	Lain-lain
23. KALIMANTAN TIMUR							
1	Kota Samarinda	0	0	0	1	0	0
2	Kota Balikpapan	1	0	0	0	0	0
3	Kota Tarakan	0	0	0	0	1	0
4	Kota Bontang	0	0	0	0	1	0
5	Kab. Pasir	1	0	0	0	0	0
6	Kab. Kutai Kertanegara	1	0	0	0	0	0
7	Kab. Berau	0	0	0	0	0	1
8	Kab. Bulungan	1	0	0	0	0	0
9	Kab. Tana Tidung	0	1	0	0	0	0
10	Kab. Malinau	1	0	0	0	0	0
11	Kab. Nunukan	1	0	0	0	0	0
12	Kab. Kutai Barat	1	0	0	0	0	0
13	Kab. Kutai Timur	1	0	0	0	0	0
14	Kab. Penajam Pasir Utara	0	0	0	0	0	1
24. SULAWESI UTARA							
1	Kota Manado	0	0	0	1	0	0
2	Kota Bitung	1	0	0	0	0	0
3	Kota Tomohon	0	0	0	1	0	0
4	Kota Kotamobagu	1	0	0	0	0	0
5	Kab. Sangihe	0	0	0	0	1	0
6	Kab. Kep. Sitaro*	1	0	0	0	0	0
7	Kab. Talaud	1	0	0	0	0	0
8	Kab. Minahasa	0	0	0	0	0	1
9	Kab. Minahasa Utara	0	0	0	0	0	1
10	Kab. Bolaang Mongondow	0	0	0	0	1	0
11	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1	0	0	0	0	0
12	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0	1	0	0	0	0
13	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1	0	0	0	0	0
14	Kab. Minahasa Selatan	1	0	0	0	0	0
15	Kab. Minahasa Tenggara*	0	0	0	1	0	0
25. GORONTALO							
1	Kota Gorontalo	1	0	0	0	0	0
2	Kab. Gorontalo	1	0	0	0	0	0
3	Kab. Gorontalo Utara	1	0	0	0	0	0
4	Kab. Boalemo	1	0	0	0	0	0
5	Kab. Bone Bolango	1	0	0	0	0	0
6	Kab. Pohuwato	1	0	0	0	0	0
26. SULAWESI TENGAH							
1	Kota Palu	1	0	0	0	0	0
2	Kab. Banggai	1	0	0	0	0	0
3	Kab. Poso	1	0	0	0	0	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Penanggung Jawab Instalasi Farmasi					
		Apoteker	S-1 Farmasi	D-3 Farmasi	AA/SMF	Tenaga Kes. Lain	Lain-lain
4	Kab. Tojo Una-Una	1	0	0	0	0	0
5	Kab. Donggala	1	0	0	0	0	0
6	Kab. Sigi	1	0	0	0	0	0
7	Kab. Toli-Toli	1	0	0	0	0	0
8	Kab. Buol	1	0	0	0	0	0
9	Kab. Morowali	0	0	0	0	1	0
10	Kab. Banggai Kepulauan	1	0	0	0	0	0
11	Kab. Parigi Moutong	1	0	0	0	0	0
27. SULAWESI SELATAN							
1	Kota Makassar	1	0	0	0	0	0
2	Kota Pare Pare	1	0	0	0	0	0
3	Kota Palopo	1	0	0	0	0	0
4	Kab. Bulukumba	1	0	0	0	0	0
5	Kab. Bantaeng	1	0	0	0	0	0
6	Kab. Jeneponto	1	0	0	0	0	0
7	Kab. Takalar	0	0	0	0	1	0
8	Kab. Gowa	1	0	0	0	0	0
9	Kab. Sinjai	1	0	0	0	0	0
10	Kab. Bone	1	0	0	0	0	0
11	Kab. Maros	1	0	0	0	0	0
12	Kab. Pangkep	1	0	0	0	0	0
13	Kab. Barru	1	0	0	0	0	0
14	Kab. Soppeng	1	0	0	0	0	0
15	Kab. Wajo	1	0	0	0	0	0
16	Kab. Sidrap	1	0	0	0	0	0
17	Kab. Pinrang	1	0	0	0	0	0
18	Kab. Enrekang	1	0	0	0	0	0
19	Kab. Luwu	1	0	0	0	0	0
20	Kab. Luwu Timur	1	0	0	0	0	0
21	Kab. Luwu Utara	1	0	0	0	0	0
22	Kab. Tana Toraja	1	0	0	0	0	0
23	Kab. Toraja Utara	0	0	0	0	1	0
24	Kab. Selayar	1	0	0	0	0	0
28. SULAWESI BARAT							
1	Kab. Polewali	0	1	0	0	0	0
2	Kab. Majene	0	1	0	0	0	0
3	Kab. Mamuju	0	1	0	0	0	0
4	Kab. Mamuju Utara	1	0	0	0	0	0
5	Kab. Mamasa	1	0	0	0	0	0
29. SULAWESI TENGGARA							
1	Kota Kendari	1	0	0	0	0	0
2	Kota Bau-Bau	0	0	0	1	0	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Penanggung Jawab Instalasi Farmasi					
		Apoteker	S-1 Farmasi	D-3 Farmasi	AA/SMF	Tenaga Kes. Lain	Lain-lain
3	Kab. Buton	0	0	0	0	1	0
4	Kab. Buton Utara	0	1	0	0	0	0
5	Kab. Muna	1	0	0	0	0	0
6	Kab. Kolaka	1	0	0	0	0	0
7	Kab. Konawe	1	0	0	0	0	0
8	Kab. Konawe Selatan	1	0	0	0	0	0
9	Kab. Konawe Utara	0	1	0	0	0	0
10	Kab. Bombana	1	0	0	0	0	0
11	Kab. Wakatobi	1	0	0	0	0	0
12	Kab. Kolaka Utara	1	0	0	0	0	0
30. MALUKU							
1	Kota Ambon	1	0	0	0	0	0
2	Kota Tual	1	0	0	0	0	0
3	Kab. Maluku Tengah	0	0	0	0	1	0
4	Kab. Pulau Buru	0	1	0	0	0	0
5	Kab. Buru Selatan	0	1	0	0	0	0
6	Kab. Maluku Tenggara	1	0	0	0	0	0
7	Kab. Maluku Tenggara Barat	1	0	0	0	0	0
8	Kab. Seram Bagian Barat	1	0	0	0	0	0
9	Kab. Seram Bagian Timur	1	0	0	0	0	0
10	Kab. Kep. Aru	0	0	0	1	0	0
11	Kab. Maluku Barat Daya	1	0	0	0	0	0
31. MALUKU UTARA							
1	Kota Ternate	1	0	0	0	0	0
2	Kota Tidore	1	0	0	0	0	0
3	Kab. Halmahera Tengah	1	0	0	0	0	0
4	Kab. Halmahera Barat	1	0	0	0	0	0
5	Kab. Halmahera Utara	1	0	0	0	0	0
6	Kab. Pulau Morotai	1	0	0	0	0	0
7	Kab. Halmahera Selatan	1	0	0	0	0	0
8	Kab. Halmahera Timur	1	0	0	0	0	0
9	Kab. Kep. Sula	1	0	0	0	0	0
32. PAPUA							
1	Kota Jayapura	1	0	0	0	0	0
2	Kab. Jayapura	1	0	0	0	0	0
3	Kab. Sarmi	1	0	0	0	0	0
4	Kab. Mamberamo Raya	0	0	0	0	1	0
5	Kab. Kerom	1	0	0	0	0	0
6	Kab. Jayawijaya	0	0	0	1	0	0
7	Kab. Lanny Jaya	1	0	0	0	0	0
8	Kab. Mamberamo Tengah	1	0	0	0	0	0
9	Kab. Nduga	1	0	0	0	0	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Penanggung Jawab Instalasi Farmasi					
		Apoteker	S-1 Farmasi	D-3 Farmasi	AA/SMF	Tenaga Kes. Lain	Lain-lain
10	Kab. Yalimo	0	0	0	0	1	0
11	Kab. Pegunungan Bintang	0	0	0	0	1	0
12	Kab. Yahukimo	1	0	0	0	0	0
13	Kab. Tolikara	0	1	0	0	0	0
14	Kab. Puncak Jaya	0	0	0	0	1	0
15	Kab. Puncak	0	0	0	0	1	0
16	Kab. Merauke	1	0	0	0	0	0
17	Kab. Bovendigoel	1	0	0	0	0	0
18	Kab. Asmat	1	0	0	0	0	0
19	Kab. Mappi	1	0	0	0	0	0
20	Kab. Kep. Yapen	0	1	0	0	0	0
21	Kab. Waropen	0	1	0	0	0	0
22	Kab. Biak Numfor	1	0	0	0	0	0
23	Kab. Supiori	1	0	0	0	0	0
24	Kab. Nabire	1	0	0	0	0	0
25	Kab. Dogiyai	0	0	0	0	1	0
26	Kab. Paniai	0	0	0	0	1	0
27	Kab. Intan Jaya	0	0	0	0	1	0
28	Kab. Deiyai	0	0	0	0	1	0
29	Kab. Mimika	1	0	0	0	0	0
33. PAPUA BARAT							
1	Kota Sorong	0	0	0	1	0	0
2	Kab. Sorong	1	0	0	0	0	0
3	Kab. Tambora	0	0	0	0	1	0
4	Kab. Sorong Selatan	1	0	0	0	0	0
5	Kab. Maybrat	0	0	0	0	1	0
6	Kab. Raja Ampat	1	0	0	0	0	0
7	Kab. Manokwari	0	0	0	1	0	0
8	Kab. Teluk Bintuni	1	0	0	0	0	0
9	Kab. Teluk Wondama	1	0	0	0	0	0
10	Kab. Fak Fak	0	0	0	1	0	0
11	Kab. Kaimana	0	0	0	0	1	0

LAMPIRAN 5

**DATA SARANA PENYIMPANAN INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA
SELURUH INDONESIA**

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Penyimpanan					
		Rak	Pallet	Lemari Obat	Lemari Narkotika	Lemari Vaksin	Lemari Es
1. NANGGROE ACEH DARUSSALAM							
1	Kota Banda Aceh	1	1	1	1	1	1
2	Kota Sabang	1	1	1	1	1	1
3	Kota Lhokseumawe	1	1	0	0	0	1
4	Kota Langsa	1	1	1	1	1	1
5	Kota Subulussalam	1	1	1	1	0	1
6	Kab. Aceh Utara	1	1	1	1	0	1
7	Kab. Aceh Barat	1	1	1	1	0	1
8	Kab. Aceh Selatan	1	1	1	1	0	1
9	Kab. Aceh Timur	1	1	1	1	0	1
10	Kab. Aceh Tengah	1	1	1	0	0	1
11	Kab. Aceh Tenggara	1	1	1	1	1	1
12	Kab. Aceh Besar	1	1	0	0	0	1
13	Kab. Aceh Singkil	1	1	1	0	0	1
14	Kab. Pidie	0	1	0	1	0	1
15	Kab. Pidie Jaya	1	1	1	0	0	1
16	Kab. Siemeuleu	1	1	1	1	0	1
17	Kab. Bireuen	0	1	1	1	0	1
18	Kab. Gayo Lues	1	1	1	1	1	1
19	Kab. Aceh Barat Daya	1	1	1	1	0	1
20	Kab. Aceh Tamiang	1	1	1	1	0	1
21	Kab. Nagan Raya	1	1	1	1	0	1
22	Kab. Aceh Jaya	1	1	1	1	0	0
23	Kab. Bener Meriah	1	0	0	1	0	0
2. SUMATERA UTARA							
1	Kota Medan	1	1	1	1	0	1
2	Kota Binjai	1	1	1	1	0	1
3	Kota Tebing Tinggi	1	0	0	0	0	1
4	Kota Pematang Siantar	1	1	1	0	0	1
5	Kota Tanjung Balai	1	1	1	1	0	1
6	Kota Sibolga	1	1	1	1	1	1
7	Kota Padang Sidempuan	1	1	1	1	1	1
8	Kota Gunung Sitoli	0	0	0	0	0	0
9	Kab. Deli Serdang	1	1	0	0	1	1
10	Kab. Langkat	1	1	0	1	1	1
11	Kab. Karo	1	1	0	1	0	1
12	Kab. Simalungun	1	1	1	1	1	1

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Penyimpanan					
		Rak	Pallet	Lemari Obat	Lemari Narkotika	Lemari Vaksin	Lemari Es
13	Kab. Dairi	1	1	1	1	0	1
14	Kab. Asahan	1	1	1	0	0	1
15	Kab. Batubara	1	0	1	0	0	1
16	Kab. Labuhan Batu	1	1	1	1	1	1
17	Kab. Tapanuli Utara	1	0	0	0	0	1
18	Kab. Tapanuli Tengah	1	0	1	1	0	1
19	Kab. Tapanuli Selatan	1	1	1	1	0	0
20	Kab. Padang Lawas	1	0	1	0	0	1
21	Kab. Padang Lawas Utara	1	0	0	0	0	0
22	Kab. Nias	0	0	1	0	0	0
23	Kab. Toba Samosir	1	0	0	0	1	0
24	Kab. Mandailing Natal	1	1	0	1	1	1
25	Kab. Humbang Hasudutan	1	1	1	0	1	1
26	Kab. Pakpak Barat	1	1	1	1	1	1
27	Kab. Nias Selatan	0	0	0	0	1	0
28	Kab. Samosir	1	1	1	1	0	1
29	Kab. Serdang Begadai	1	1	1	1	1	1
30	Kab. Nias Barat	0	0	0	0	1	0
31	Kab. Nias Utara	1	0	0	0	0	0
32	Kab. Labuhan Batu Utara	0	0	0	0	0	0
33	Kab. Labuhan Batu Selatan	0	0	0	0	0	0
3. SUMATERA BARAT							
1	Kota Padang	1	1	1	1	0	1
2	Kota Solok	1	1	1	1	1	1
3	Kota Sawah Lunto	1	1	1	1	0	1
4	Kota Padang Panjang	1	1	1	1	0	1
5	Kota Bukittinggi	1	1	1	1	0	1
6	Kota Payakumbuh	1	1	1	1	1	1
7	Kota Pariaman	1	1	1	1	0	1
8	Kab. Pesisir Selatan	1	1	1	1	0	1
9	Kab. Solok	1	1	1	1	0	0
10	Kab. Sawah Lunto	1	1	1	1	1	0
11	Kab. Tanah Datar	1	1	0	1	1	1
12	Kab. Padang Pariaman	1	1	1	0	0	1
13	Kab. Agam	1	1	1	1	1	1
14	Kab. 50 Kota	1	1	1	1	1	1
15	Kab. Pasaman	1	1	0	1	1	1
16	Kab. Kep. Mentawai	1	1	0	1	0	1
17	Kab. Solok Selatan	1	1	1	1	1	1
18	Kab. Dharmas Raya	1	1	0	1	1	1
19	Kab. Pasaman Barat	1	1	1	1	1	1
20	Kab. Sijunjung	1	1	0	0	1	1

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Penyimpanan					
		Rak	Pallet	Lemari Obat	Lemari Narkotika	Lemari Vaksin	Lemari Es
4. RIAU							
1	Kota Pekanbaru	1	1	0	1	0	1
2	Kota Dumai	1	1	1	1	0	1
3	Kab. Indragiri Hulu	1	1	0	1	1	1
4	Kab. Indragiri Hilir	1	1	0	1	0	1
5	Kab. Kampar	1	1	1	1	1	1
6	Kab. Bangkalis	1	1	0	1	0	1
7	Kab. Kep. Meranti	1	0	1	1	0	1
8	Kab. Pelalawan	1	1	1	1	1	1
9	Kab. Rokan Hulu	1	1	0	1	0	0
10	Kab. Rokan Hilir	1	0	1	1	1	0
11	Kab. Siak	1	1	0	1	1	0
12	Kab. Kuantan Singingi	1	1	1	1	1	1
5. KEPULAUAN RIAU							
1	Kota Batam	1	0	0	0	0	1
2	Kota Tanjung Pinang	1	1	0	1	0	1
3	Kab. Bintan (Kab. Kep. Riau)	1	1	1	1	0	1
4	Kab. Karimun	1	1	0	1	1	1
5	Kab. Natuna	1	1	0	1	1	1
6	Kab. Kep. Anambas	1	0	0	1	0	1
7	Kab. Lingga	1	1	1	1	0	1
6. JAMBI							
1	Kota Jambi	1	1	1	1	1	1
2	Kota Sungai Penuh	1	1	1	1	1	1
3	Kab. Kerinci	1	1	1	0	1	1
4	Kab. Merangin	0	1	1	0	1	1
5	Kab. Batang Hari	1	1	1	1	1	1
6	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	1	1	1	1	1
7	Kab. Bungo	1	0	1	0	1	1
8	Kab. Sarolangun	0	1	1	0	1	1
9	Kab. Tebo	1	1	1	0	1	1
10	Kab. Muaro Jambi	1	1	1	1	1	1
11	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	1	1	0	1	1
7. SUMATERA SELATAN							
1	Kota Palembang	1	1	0	0	0	1
2	Kota Prabumulih	1	1	0	1	0	1
3	Kota Lubuk Linggau	1	1	0	0	0	1
4	Kota Pagar Alam	1	1	0	1	0	1
5	Kab. Ogan Komering Ulu	1	1	0	1	0	1
6	Kab. Ogan Komering Ilir	1	1	0	1	0	1
7	Kab. Muara Enim	1	1	0	1	0	1
8	Kab. Lahat	1	1	0	1	0	1

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Penyimpanan					
		Rak	Pallet	Lemari Obat	Lemari Narkotika	Lemari Vaksin	Lemari Es
9	Kab. Empat Lawang	1	1	0	0	0	0
10	Kab. Musi Rawas	1	1	0	1	1	1
11	Kab. Musi Banyuasin	1	1	0	0	1	0
12	Kab. Banyuasin	1	1	0	1	1	1
13	Kab. Ogan Ilir	1	1	0	0	0	1
14	Kab. OKU Timur	1	1	0	0	0	1
15	Kab. OKU Selatan	0	0	0	0	1	1
8. BANGKA BELITUNG							
1	Kota Pangkal Pinang	1	1	1	0	0	1
2	Kab. Bangka	1	1	1	0	1	1
3	Kab. Belitung	1	1	1	0	1	1
4	Kab. Bangka Barat	1	1	1	1	0	1
5	Kab. Bangka Tengah	1	1	1	1	0	1
6	Kab. Bangka Selatan	1	1	1	0	1	1
7	Kab. Belitung Timur	1	1	1	0	0	1
9. BENGKULU							
1	Kota Bengkulu	1	1	1	0	1	0
2	Kab. Bengkulu Utara	1	1	1	1	1	1
3	Kab. Bengkulu Selatan	1	1	1	1	0	0
4	Kab. Rejang Lebong	1	1	1	1	1	1
5	Kab. Lebong	1	0	0	1	1	1
6	Kab. Seluma	1	0	0	0	1	1
7	Kab. Kaur	1	1	1	0	1	1
8	Kab. Muko-Muko	1	1	1	1	0	1
9	Kab. Kepahyang	1	1	1	1	1	0
10	Kab. Bengkulu Tengah	1	0	0	0	1	0
10. LAMPUNG							
1	Kota Bandar Lampung	1	1	1	1	1	1
2	Kota Metro	1	1	1	1	1	0
3	Kab. Lampung Utara	1	1	1	1	0	1
4	Kab. Lampung Barat	1	1	1	1	1	1
5	Kab. Lampung Selatan	1	1	1	0	1	0
6	Kab. Pesawaran	0	1	0	0	0	0
7	Kab. Lampung Timur	1	1	1	1	1	1
8	Kab. Lampung Tengah	1	1	0	1	1	1
9	Kab. Tanggamus	1	1	1	1	1	1
10	Kab. Pringsewu	1	1	1	1	1	1
11	Kab. Tulang Bawang	1	1	0	1	1	1
12	Kab. Tulang Bawang Barat	1	1	1	1	1	1
13	Kab. Mesuji	1	1	1	1	1	1
14	Kab. Way Kanan	1	1	0	1	1	1
11. DKI JAKARTA							

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Penyimpanan					
		Rak	Pallet	Lemari Obat	Lemari Narkotika	Lemari Vaksin	Lemari Es
1	Kota Adm. Jakarta Utara	1	1	0	0	1	0
2	Kota Adm. Jakarta Barat	1	1	1	0	0	0
3	Kota Adm. Jakarta Selatan	1	1	0	1	1	1
4	Kota Adm. Jakarta Timur	1	1	1	0	0	0
5	Kota Adm. Jakarta Pusat	1	1	1	0	1	0
6	Kab. Kep. Seribu	0	1	0	0	0	0
12. JAWA BARAT							
1	Kota Bandung	0	1	1	0	1	1
2	Kota Bogor	1	1	1	1	0	1
3	Kota Cirebon	1	1	1	1	0	1
4	Kota Sukabumi	1	1	1	1	1	1
5	Kota Bekasi	0	1	1	0	1	1
6	Kota Tasikmalaya	0	1	0	1	1	0
7	Kota Cimahi	1	1	1	1	1	1
8	Kota Depok	1	1	1	1	1	1
9	Kota Banjar	0	1	1	0	1	1
10	Kab. Bogor	1	1	1	1	1	1
11	Kab. Sukabumi	1	1	1	1	1	1
12	Kab. Cianjur	1	1	1	0	0	2
13	Kab. Bandung	1	1	0	1	1	1
14	Kab. Bandung Barat	1	1	0	0	0	1
15	Kab. Garut	1	1	1	1	1	1
16	Kab. Tasikmalaya	1	1	1	1	0	3
17	Kab. Ciamis	0	1	0	1	0	3
18	Kab. Kuningan	0	0	0	0	1	1
19	Kab. Cirebon	0	1	1	1	0	2
20	Kab. Majalengka	1	1	1	1	0	1
21	Kab. Sumedang	0	1	1	1	1	1
22	Kab. Indramayu	1	0	0	0	0	0
23	Kab. Subang	1	1	1	1	1	1
24	Kab. Purwakarta	1	1	0	0	1	1
25	Kab. Karawang	1	1	1	1	1	1
26	Kab. Bekasi	1	1	0	1	1	1
13. BANTEN							
1	Kota Tangerang*	1	1	1	1	1	1
2	Kota Cilegon	1	1	1	1	0	1
3	Kota Serang	1	1	1	1	0	1
4	Kota Tangerang Selatan*	1	1	1	1	0	1
5	Kab. Serang*	1	1	1	1	0	1
6	Kab. Lebak	1	1	0	0	0	1
7	Kab. Pandeglang	1	1	1	1	0	1
8	Kab. Tangerang	1	1	1	1	1	1

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Penyimpanan					
		Rak	Pallet	Lemari Obat	Lemari Narkotika	Lemari Vaksin	Lemari Es
14. JAWA TENGAH							
1	Kota Semarang	1	1	1	1	1	1
2	Kota Magelang	1	1	1	1	0	1
3	Kota Surakarta	1	1	1	1	0	1
4	Kota Salatiga	1	1	1	1	0	1
5	Kota Pekalongan	1	1	1	1	0	1
6	Kota Tegal	1	1	0	1	0	1
7	Kab. Cilacap	1	1	1	1	1	1
8	Kab. Banyumas	1	1	0	1	0	1
9	Kab. Purbalingga	1	1	1	1	1	1
10	Kab. Bk. Negara	1	1	1	1	1	1
11	Kab. Kebumen	1	1	1	1	1	1
12	Kab. Purworejo	1	1	1	1	0	1
13	Kab. Wonosobo	1	1	1	1	1	1
14	Kab. Magelang	1	1	1	1	0	1
15	Kab. Boyolali	1	1	1	1	1	1
16	Kab. Klaten	1	1	1	0	0	1
17	Kab. Sukoharjo	1	1	1	1	0	1
18	Kab. Wonogiri	1	1	1	1	0	1
19	Kab. Karanganyar*	1	1	1	0	0	1
20	Kab. Sragen	1	1	1	0	0	1
21	Kab. Grobogan	1	1	1	1	0	1
22	Kab. Blora	1	1	1	1	0	1
23	Kab. Rembang	1	1	1	1	0	1
24	Kab. Pati	1	1	1	1	0	1
25	Kab. Kudus	1	1	1	1	1	1
26	Kab. Jepara	1	1	1	1	0	1
27	Kab. Demak	1	1	1	0	0	1
28	Kab. Semarang	1	1	1	0	0	1
29	Kab. Temanggung	1	1	0	1	0	1
30	Kab. Kendal	1	1	0	0	1	1
31	Kab. Batang	1	1	1	1	0	1
32	Kab. Pekalongan	1	1	1	0	0	1
33	Kab. Pemalang	1	1	0	1	1	1
34	Kab. Tegal	1	1	1	0	0	1
35	Kab. Brebes	1	1	1	1	1	1
15. DI. YOGYAKARTA							
1	Kota Yogyakarta	1	1	1	1	1	1
2	Kab. Kulon Progo	1	1	1	1	1	1
3	Kab. Bantul	1	1	1	1	0	1
4	Kab. Gunung Kidul	1	1	1	1	0	1
5	Kab. Sleman	1	1	1	1	1	1

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Penyimpanan					
		Rak	Pallet	Lemari Obat	Lemari Narkotika	Lemari Vaksin	Lemari Es
16. JAWA TIMUR							
1	Kota Surabaya	1	0	0	0	0	0
2	Kota Kediri	0	0	0	1	1	1
3	Kota Blitar	1	1	0	1	0	1
4	Kota Malang	1	1	0	0	0	0
5	Kota Probolinggo	1	1	0	1	1	0
6	Kota Pasuruan	1	1	0	1	0	1
7	Kota Mojokerto	1	1	0	0	0	0
8	Kota Madiun	1	1	0	1	0	1
9	Kota Batu	1	1	1	1	1	1
10	Kab. Pacitan	1	1	0	1	1	1
11	Kab. Ponorogo	1	1	0	1	0	1
12	Kab. Trenggalek	1	1	0	1	1	0
13	Kab. Tulungagung	1	1	0	1	0	1
14	Kab. Blitar	1	1	1	1	0	1
15	Kab. Kediri	1	1	1	1	0	1
16	Kab. Malang	1	1	0	1	0	1
17	Kab. Lumajang	1	1	0	0	0	0
18	Kab. Jember	1	1	0	0	0	0
19	Kab. Banyuwangi	1	1	0	0	0	1
20	Kab. Bondowoso	1	1	0	1	0	1
21	Kab. Situbondo	1	1	0	1	0	1
22	Kab. Probolinggo	1	1	1	1	1	1
23	Kab. Pasuruan	1	1	0	1	0	1
24	Kab. Sidoarjo	1	1	0	0	0	1
25	Kab. Mojokerto	1	1	0	1	1	1
26	Kab. Jombang	1	1	0	1	0	2
27	Kab. Nganjuk	1	1	1	1	1	0
28	Kab. Madiun	1	1	1	1	0	1
29	Kab. Magetan	1	1	0	0	1	1
30	Kab. Ngawi	1	1	0	1	1	1
31	Kab. Lamongan	1	1	0	1	0	1
32	Kab. Gresik	0	1	0	1	1	1
33	Kab. Bangkalan	1	1	0	0	0	0
34	Kab. Sampang	0	1	0	0	0	0
35	Kab. Pamekasan	1	1	0	0	0	1
36	Kab. Sumenep	1	1	0	0	0	0
37	Kab. Bojonegoro	1	1	1	1	0	1
38	Kab. Tuban	1	1	0	1	1	1
17. BALI							
1	Kota Denpasar	1	1	1	1	0	1
2	Kab. Jemberana	1	1	1	1	1	1

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Penyimpanan					
		Rak	Pallet	Lemari Obat	Lemari Narkotika	Lemari Vaksin	Lemari Es
3	Kab. Tabanan	1	1	1	1	0	1
4	Kab. Badung	1	1	0	0	0	1
5	Kab. Gianyar	1	1	0	1	0	1
6	Kab. Klungkung	1	1	0	1	0	1
7	Kab. Bangli	1	1	0	1	1	1
8	Kab. Karangasem	1	1	1	1	0	1
9	Kab. Buleleng	1	1	1	0	0	1
18. NUSA TENGGARA BARAT							
1	Kota Mataram	1	1	1	1	0	1
2	Kota Bima	1	1	1	1	0	1
3	Kab. Lombok Barat	1	1	1	0	1	1
4	Kab. Lombok Tengah	1	1	1	1	1	1
5	Kab. Lombok Timur	1	1	0	1	0	1
6	Kab. Sumbawa	1	1	1	1	1	1
7	Kab. Dompu	1	0	1	1	1	1
8	Kab. Bima	1	1	1	1	0	1
9	Kab. Sumbawa Barat	1	1	0	1	1	1
10	Kab. Lombok Utara	1	1	0	0	1	1
19. NUSA TENGGARA TIMUR							
1	Kota Kupang	1	1	1	1	1	1
2	Kab. Sumba Barat*	1	1	0	1	0	1
3	Kab. Sumba Barat Daya*	1	1	1	1	1	1
4	Kab. Sumba Tengah	1	1	0	0	0	0
5	Kab. Sumba Timur	0	0	0	0	0	0
6	Kab. Kupang	1	1	6	1	1	1
7	Kab. Sabu Raijua*	0	0	0	0	0	0
8	Kab. Timur Tengah Selatan*	1	1	1	1	0	1
9	Kab. Timur Tengah Utara	1	0	1	1	1	1
10	Kab. Lembata*	1	1	1	1	1	1
11	Kab. Belu*	1	1	1	1	0	1
12	Kab. Alor*	1	1	0	1	1	1
13	Kab. Flores Timur*	1	1	1	1	1	1
14	Kab. Sikka*	0	0	0	0	0	0
15	Kab. Ende	1	1	1	1	0	1
16	Kab. Ngada	1	1	0	1	1	1
17	Kab. Nagekeo	1	1	0	0	1	1
18	Kab. Manggarai	1	1	0	0	1	1
19	Kab. Manggarai Timur	1	0	1	1	1	0
20	Kab. Rote Ndao*	0	0	0	0	0	0
21	Kab. Manggarai Barat	1	1	1	1	1	1
20. KALIMANTAN BARAT							
1	Kota Pontianak	1	1	1	1	0	1

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Penyimpanan					
		Rak	Pallet	Lemari Obat	Lemari Narkotika	Lemari Vaksin	Lemari Es
2	Kota Singkawang	1	1	0	1	1	1
3	Kab. Sambas	1	1	0	1	0	1
4	Kab. Pontianak	1	1	1	1	0	1
5	Kab. Kubu Raya	1	1	0	0	0	1
6	Kab. Sanggau	1	1	0	1	0	1
7	Kab. Sekadau	1	1	0	0	0	0
8	Kab. Ketapang	1	1	0	1	0	1
9	Kab. Kayong Utara	1	1	1	1	0	1
10	Kab. Sintang	1	1	1	1	0	0
11	Kab. Melawi*	1	1	0	1	0	1
12	Kab. Kapuas Hulu	1	1	1	1	0	1
13	Kab. Bengkayang	1	0	0	1	0	0
14	Kab. Landak	1	1	1	1	0	1
21. KALIMANTAN TENGAH							
1	Kota Palangkaraya	1	1	1	1	0	1
2	Kab. Kotawaringin Barat	1	1	1	0	0	0
3	Kab. Kotawaringin Timur	1	1	1	0	0	1
4	Kab. Kapuas	1	1	1	1	0	1
5	Kab. Barito Selatan	1	1	1	0	0	1
6	Kab. Barito Utara	1	1	1	1	0	1
7	Kab. Murung Raya	1	1	0	0	1	0
8	Kab. Barito Timur	1	1	0	1	1	0
9	Kab. Gunung Mas	1	1	1	0	0	1
10	Kab. Pulang Pisau	1	1	1	1	0	1
11	Kab. Katingan	0	1	1	1	1	1
12	Kab. Seruyan	1	1	1	0	0	1
13	Kab. Sukamara	1	1	1	1	1	1
14	Kab. Lamandau	1	1	1	1	1	1
22. KALIMANTAN SELATAN							
1	Kota Banjarmasin	1	1	1	1	1	1
2	Kota Banjar Baru	1	1	1	0	0	1
3	Kab. Tanah Laut	1	1	1	1	1	0
4	Kab. Kota Baru	1	1	1	1	1	1
5	Kab. Banjar	1	1	1	1	1	0
6	Kab. Barito Kuala	1	1	1	1	1	1
7	Kab. Tapin	1	1	1	0	1	1
8	Kab. Hulu Sungai Selatan	1	1	1	1	1	1
9	Kab. Hulu Sungai Tengah	1	1	0	1	1	1
10	Kab. Hulu Sungai Utara	1	1	0	1	1	1
11	Kab. Tabalong	1	1	1	1	0	1
12	Kab. Balangan	1	1	0	1	1	1
13	Kab. Tanah Bumbu	1	1	1	1	0	1

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Penyimpanan					
		Rak	Pallet	Lemari Obat	Lemari Narkotika	Lemari Vaksin	Lemari Es
23. KALIMANTAN TIMUR							
1	Kota Samarinda	1	1	1	1	0	0
2	Kota Balikpapan	1	1	1	1	1	1
3	Kota Tarakan	1	1	1	1	1	1
4	Kota Bontang	1	1	1	0	1	1
5	Kab. Pasir	1	1	0	1	0	1
6	Kab. Kutai Kertanegara	1	1	0	1	1	1
7	Kab. Berau	1	1	1	1	0	1
8	Kab. Bulungan	1	1	0	0	0	1
9	Kab. Tana Tidung	1	0	1	1	1	0
10	Kab. Malinau	1	1	0	1	0	1
11	Kab. Nunukan	1	1	1	1	1	1
12	Kab. Kutai Barat	1	1	1	0	1	1
13	Kab. Kutai Timur	1	1	1	1	1	0
14	Kab. Penajam Pasir Utara	1	1	1	1	0	1
24. SULAWESI UTARA							
1	Kota Manado	0	1	1	0	0	1
2	Kota Bitung	1	1	1	1	0	1
3	Kota Tomohon	1	1	1	0	0	1
4	Kota Kotamobagu	1	1	0	0	0	0
5	Kab. Sangihe	1	1	0	0	0	1
6	Kab. Kep. Sitaro*	1	0	0	0	0	1
7	Kab. Talaud	1	1	1	1	0	1
8	Kab. Minahasa	1	1	1	1	1	0
9	Kab. Minahasa Utara	1	1	1	1	1	1
10	Kab. Bolaang Mongondow	1	0	1	1	0	0
11	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0	0	0	0	0	1
12	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0	0	0	0	0	0
13	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1	1	1	1	1	1
14	Kab. Minahasa Selatan	1	1	1	1	0	1
15	Kab. Minahasa Tenggara*	0	1	0	0	0	0
25. GORONTALO							
1	Kota Gorontalo	1	1	1	1	0	1
2	Kab. Gorontalo	1	1	1	1	0	1
3	Kab. Gorontalo Utara	1	1	1	1	0	0
4	Kab. Boalemo	1	1	1	1	0	1
5	Kab. Bone Bolango	1	1	1	1	1	1
6	Kab. Pohuwato	1	1	0	1	1	1
26. SULAWESI TENGAH							
1	Kota Palu	1	1	1	1	0	1
2	Kab. Banggai	1	1	1	0	1	0
3	Kab. Poso	1	0	1	1	1	1

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Penyimpanan					
		Rak	Pallet	Lemari Obat	Lemari Narkotika	Lemari Vaksin	Lemari Es
4	Kab. Tojo Una-Una	1	1	1	1	1	1
5	Kab. Donggala	1	1	1	1	1	1
6	Kab. Sigi	1	1	0	1	0	1
7	Kab. Toli-Toli	1	1	1	1	0	0
8	Kab. Buol	1	1	1	1	0	1
9	Kab. Morowali	1	1	1	1	1	1
10	Kab. Banggai Kepulauan	1	0	0	0	0	0
11	Kab. Parigi Moutong	1	1	0	1	1	0
27. SULAWESI SELATAN							
1	Kota Makassar	1	0	1	1	0	1
2	Kota Pare Pare	1	1	1	0	0	1
3	Kota Palopo	1	1	1	0	1	1
4	Kab. Bulukumba	1	1	1	1	1	1
5	Kab. Bantaeng	1	1	1	0	1	1
6	Kab. Jeneponto	1	0	1	1	0	1
7	Kab. Takalar	1	1	1	1	1	1
8	Kab. Gowa	1	1	1	1	1	0
9	Kab. Sinjai	1	1	1	1	0	1
10	Kab. Bone	1	1	1	0	0	1
11	Kab. Maros	1	1	1	1	0	0
12	Kab. Pangkep	1	1	0	0	0	1
13	Kab. Barru	1	1	0	0	0	1
14	Kab. Soppeng	1	1	1	1	0	1
15	Kab. Wajo	1	1	1	1	0	1
16	Kab. Sidrap	1	1	0	0	0	1
17	Kab. Pinrang	1	1	1	1	1	1
18	Kab. Enrekang	1	1	1	1	1	1
19	Kab. Luwu	1	1	0	0	1	1
20	Kab. Luwu Timur	1	1	1	1	0	1
21	Kab. Luwu Utara	1	1	0	0	1	1
22	Kab. Tana Toraja	1	1	1	1	0	1
23	Kab. Toraja Utara	1	1	0	1	0	1
24	Kab. Selayar	1	0	0	0	0	1
28. SULAWESI BARAT							
1	Kab. Polewali	1	1	0	0	0	1
2	Kab. Majene	1	1	1	1	0	1
3	Kab. Mamuju	1	0	0	0	1	0
4	Kab. Mamuju Utara	1	1	0	0	0	0
5	Kab. Mamasa	1	1	0	1	0	0
29. SULAWESI TENGGARA							
1	Kota Kendari	1	1	1	1	0	1
2	Kota Bau-Bau	1	1	1	1	1	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Penyimpanan					
		Rak	Pallet	Lemari Obat	Lemari Narkotika	Lemari Vaksin	Lemari Es
3	Kab. Buton	1	1	1	0	0	1
4	Kab. Buton Utara	0	0	0	0	0	1
5	Kab. Muna	1	1	1	1	1	0
6	Kab. Kolaka	1	1	1	1	0	1
7	Kab. Konawe	1	1	1	0	0	1
8	Kab. Konawe Selatan	1	1	1	0	0	1
9	Kab. Konawe Utara	0	0	0	0	0	1
10	Kab. Bombana	1	1	1	1	1	1
11	Kab. Wakatobi	1	1	1	1	1	1
12	Kab. Kolaka Utara	1	1	1	1	1	1
30. MALUKU							
1	Kota Ambon	1	1	1	1	0	1
2	Kota Tual	1	1	1	1	0	1
3	Kab. Maluku Tengah	1	1	0	0	0	1
4	Kab. Pulau Buru	1	1	0	0	1	0
5	Kab. Buru Selatan	1	1	1	1	0	1
6	Kab. Maluku Tenggara	1	1	1	1	0	1
7	Kab. Maluku Tenggara Barat	0	1	0	0	0	0
8	Kab. Seram Bagian Barat	1	1	1	1	1	1
9	Kab. Seram Bagian Timur	0	0	0	0	0	0
10	Kab. Kep. Aru	1	1	0	1	0	1
11	Kab. Maluku Barat Daya	1	1	0	0	0	0
31. MALUKU UTARA							
1	Kota Ternate	1	1	1	1	1	1
2	Kota Tidore	1	1	1	0	0	1
3	Kab. Halmahera Tengah	1	1	0	0	0	1
4	Kab. Halmahera Barat	1	1	0	1	0	1
5	Kab. Halmahera Utara	1	1	0	0	1	1
6	Kab. Pulau Morotai	1	1	0	0	1	1
7	Kab. Halmahera Selatan	1	1	1	1	0	1
8	Kab. Halmahera Timur	1	1	1	0	0	0
9	Kab. Kep. Sula	1	1	1	1	0	1
32. PAPUA							
1	Kota Jayapura	0	1	0	1	1	1
2	Kab. Jayapura	1	1	1	1	0	1
3	Kab. Sarmi	1	1	0	0	0	0
4	Kab. Mamberamo Raya	1	1	0	0	0	0
5	Kab. Kerom	1	1	0	1	0	1
6	Kab. Jayawijaya	1	1	1	1	0	1
7	Kab. Lanny Jaya	1	0	1	0	0	0
8	Kab. Mamberamo Tengah	1	1	0	0	1	0
9	Kab. Nduga	1	0	0	0	0	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Penyimpanan					
		Rak	Pallet	Lemari Obat	Lemari Narkotika	Lemari Vaksin	Lemari Es
10	Kab. Yalimo	1	0	1	0	1	0
11	Kab. Pegunungan Bintang	1	1	0	1	0	1
12	Kab. Yahukimo	1	1	1	1	1	1
13	Kab. Tolikara	1	1	0	1	0	0
14	Kab. Puncak Jaya	1	0	1	0	1	0
15	Kab. Puncak	1	0	0	0	1	0
16	Kab. Merauke	1	1	1	1	0	1
17	Kab. Bovendigoel	1	1	0	1	1	1
18	Kab. Asmat	1	1	1	1	1	1
19	Kab. Mappi	1	1	1	0	1	1
20	Kab. Kep. Yapen	1	1	1	1	0	1
21	Kab. Waropen	1	1	0	0	1	1
22	Kab. Biak Numfor	1	1	0	0	0	1
23	Kab. Supiori	1	1	1	1	0	1
24	Kab. Nabire	1	1	1	0	0	1
25	Kab. Dogiyai	1	0	0	0	0	0
26	Kab. Paniai	1	1	1	0	0	0
27	Kab. Intan Jaya	1	0	0	0	1	0
28	Kab. Deiyai	1	0	0	0	0	0
29	Kab. Mimika	1	1	1	0	1	1
33. PAPUA BARAT							
1	Kota Sorong	1	1	1	1	0	1
2	Kab. Sorong	1	1	1	1	0	1
3	Kab. Tambora	0	0	1	0	0	0
4	Kab. Sorong Selatan	1	0	1	1	0	1
5	Kab. Maybrat	0	0	1	0	0	0
6	Kab. Raja Ampat	0	0	0	0	0	0
7	Kab. Manokwari	1	1	1	1	0	1
8	Kab. Teluk Bintuni	1	1	1	1	1	1
9	Kab. Teluk Wondama	1	1	1	1	0	0
10	Kab. Fak Fak	1	1	1	1	0	1
11	Kab. Kaimana	1	1	0	1	1	1

LAMPIRAN 6

DATA SARANA PENGAMANAN INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Pengamanan			
		Alarm	Teralis	Pagar	Alat Pemadam Kebakaran
1. NANGGROE ACEH DARUSSALAM					
1	Kota Banda Aceh	0	1	1	0
2	Kota Sabang	0	1	0	1
3	Kota Lhokseumawe	0	0	1	0
4	Kota Langsa	0	1	1	1
5	Kota Subulussalam	0	1	0	1
6	Kab. Aceh Utara	0	1	1	0
7	Kab. Aceh Barat	0	0	0	1
8	Kab. Aceh Selatan	0	1	0	1
9	Kab. Aceh Timur	0	1	1	0
10	Kab. Aceh Tengah	0	1	1	0
11	Kab. Aceh Tenggara	0	1	1	0
12	Kab. Aceh Besar	0	1	1	1
13	Kab. Aceh Singkil	0	1	1	1
14	Kab. Pidie	0	1	0	0
15	Kab. Pidie Jaya	1	1	1	1
16	Kab. Siemeuleu	0	1	1	1
17	Kab. Bireuen*	0	0	1	0
18	Kab. Gayo Lues	0	1	1	1
19	Kab. Aceh Barat Daya	0	1	1	0
20	Kab. Aceh Tamiang	0	1	0	0
21	Kab. Nagan Raya	0	1	1	0
22	Kab. Aceh Jaya	1	1	1	1
23	Kab. Bener Meriah	0	1	1	0
2. SUMATERA UTARA					
1	Kota Medan	0	1	1	0
2	Kota Binjai	1	1	0	1
3	Kota Tebing Tinggi*	0	1	1	1
4	Kota Pematang Siantar	1	1	1	0
5	Kota Tanjung Balai	0	1	1	1
6	Kota Sibolga	0	1	1	1
7	Kota Padang Sidempuan	1	1	1	1
8	Kota Gunung Sitoli	0	0	0	0
9	Kab. Deli Serdang	1	1	1	1
10	Kab. Langkat	0	1	1	0
11	Kab. Karo	0	1	1	1
12	Kab. Simalungun	1	1	1	1

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Pengamanan			
		Alarm	Teralis	Pagar	Alat Pemadam Kebakaran
13	Kab. Dairi	0	1	1	1
14	Kab. Asahan	0	1	1	1
15	Kab. Batubara	0	1	1	0
16	Kab. Labuhan Batu	1	0	0	0
17	Kab. Tapanuli Utara	0	1	0	1
18	Kab. Tapanuli Tengah	1	1	1	1
19	Kab. Tapanuli Selatan	0	1	1	1
20	Kab. Padang Lawas	0	1	0	0
21	Kab. Padang Lawas Utara	0	0	0	0
22	Kab. Nias	0	0	1	0
23	Kab. Toba Samosir	0	1	1	0
24	Kab. Mandailing Natal	0	1	0	1
25	Kab. Humbang Hasudutan	0	1	1	0
26	Kab. Pakpak Barat	0	0	0	0
27	Kab. Nias Selatan	1	1	0	0
28	Kab. Samosir	0	1	0	0
29	Kab. Serdang Begadai	0	1	1	0
30	Kab. Nias Barat	0	0	1	0
31	Kab. Nias Utara	0	1	1	0
32	Kab. Labuhan Batu Utara	0	0	0	0
33	Kab. Labuhan Batu Selatan	0	0	0	0
3. SUMATERA BARAT					
1	Kota Padang	0	1	1	0
2	Kota Solok	0	1	1	1
3	Kota Sawah Lunto	0	1	1	1
4	Kota Padang Panjang	0	1	1	1
5	Kota Bukittinggi	1	1	1	1
6	Kota Payakumbuh	0	1	1	1
7	Kota Pariaman	0	1	1	1
8	Kab. Pesisir Selatan	0	0	0	0
9	Kab. Solok	0	1	1	0
10	Kab. Sawah Lunto	0	1	1	1
11	Kab. Tanah Datar	1	1	1	1
12	Kab. Padang Pariaman	0	1	1	1
13	Kab. Agam	0	1	1	1
14	Kab. 50 Kota*	0	1	1	1
15	Kab. Pasaman	0	1	1	0
16	Kab. Kep. Mentawai	0	1	1	0
17	Kab. Solok Selatan	0	1	1	1
18	Kab. Dharmas Raya	0	1	0	1
19	Kab. Pasaman Barat	0	1	1	1
20	Kab. Sijunjung	0	0	0	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Pengamanan			
		Alarm	Teralis	Pagar	Alat Pemadam Kebakaran
4. RIAU					
1	Kota Pekanbaru	0	1	1	1
2	Kota Dumai	0	1	1	1
3	Kab. Indragiri Hulu	0	0	0	0
4	Kab. Indragiri Hilir	0	1	1	1
5	Kab. Kampar	0	1	1	1
6	Kab. Bangkalis	0	0	0	0
7	Kab. Kep. Meranti	0	0	0	0
8	Kab. Pelalawan	0	1	1	1
9	Kab. Rokan Hulu	0	1	0	0
10	Kab. Rokan Hilir	0	1	0	0
11	Kab. Siak	0	0	0	1
12	Kab. Kuantan Singingi	0	1	0	0
5. KEPULAUAN RIAU					
1	Kota Batam	0	0	0	1
2	Kota Tanjung Pinang	0	1	0	1
3	Kab. Bintan (Kab. Kep. Riau)	0	1	1	1
4	Kab. Karimun	0	1	0	1
5	Kab. Natuna*	0	1	0	1
6	Kab. Kep. Anambas*	0	0	0	0
7	Kab. Lingga	0	1	1	1
6. JAMBI					
1	Kota Jambi	1	1	1	1
2	Kota Sungai Penuh	0	0	0	1
3	Kab. Kerinci	1	1	1	1
4	Kab. Merangin	1	1	1	0
5	Kab. Batang Hari	1	1	1	1
6	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	1	1	1
7	Kab. Bungo	1	1	1	1
8	Kab. Sarolangun	1	1	1	0
9	Kab. Tebo	1	1	1	1
10	Kab. Muaro Jambi	1	1	0	1
11	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	0	1	1
7. SUMATERA SELATAN					
1	Kota Palembang	1	1	1	1
2	Kota Prabumulih	0	1	0	1
3	Kota Lubuk Linggau	0	0	0	0
4	Kota Pagar Alam	0	1	0	0
5	Kab. Ogan Komering Ulu	0	1	1	1
6	Kab. Ogan Komering Ilir	0	1	1	1
7	Kab. Muara Enim	0	1	1	1
8	Kab. Lahat	0	1	1	1

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Pengamanan			
		Alarm	Teralis	Pagar	Alat Pemadam Kebakaran
9	Kab. Empat Lawang	0	1	0	0
10	Kab. Musi Rawas	0	1	1	1
11	Kab. Musi Banyuasin	0	1	1	1
12	Kab. Banyuasin	0	1	1	1
13	Kab. Ogan Ilir*	0	1	0	1
14	Kab. OKU Timur	0	1	0	1
15	Kab. OKU Selatan	0	0	0	0
8. BANGKA BELITUNG					
1	Kota Pangkal Pinang	0	0	0	1
2	Kab. Bangka	0	1	0	0
3	Kab. Belitung	0	1	1	1
4	Kab. Bangka Barat	0	0	0	0
5	Kab. Bangka Tengah	0	0	0	1
6	Kab. Bangka Selatan	0	0	0	1
7	Kab. Belitung Timur	0	1	1	1
9. BENGKULU					
1	Kota Bengkulu	1	1	1	1
2	Kab. Bengkulu Utara	1	1	1	1
3	Kab. Bengkulu Selatan	1	1	1	1
4	Kab. Rejang Lebong	1	1	1	1
5	Kab. Lebong	1	1	1	1
6	Kab. Seluma	1	0	0	0
7	Kab. Kaur	1	1	0	0
8	Kab. Muko-Muko	0	0	0	1
9	Kab. Kepahyang	1	1	1	0
10	Kab. Bengkulu Tengah	0	0	0	0
10. LAMPUNG					
1	Kota Bandar Lampung	0	1	1	1
2	Kota Metro	0	1	1	1
3	Kab. Lampung Utara	0	1	1	0
4	Kab. Lampung Barat	0	1	1	1
5	Kab. Lampung Selatan	1	1	1	1
6	Kab. Pesawaran	0	1	1	0
7	Kab. Lampung Timur	0	0	0	1
8	Kab. Lampung Tengah	0	1	1	1
9	Kab. Tanggamus	1	1	0	1
10	Kab. Pringsewu	1	1	1	1
11	Kab. Tulang Bawang	0	1	1	0
12	Kab. Tulang Bawang Barat	0	1	0	0
13	Kab. Mesuji	1	1	1	0
14	Kab. Way Kanan	0	1	0	1
11. DKI JAKARTA					

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Pengamanan			
		Alarm	Teralis	Pagar	Alat Pemadam Kebakaran
1	Kota Adm. Jakarta Utara	0	1	1	1
2	Kota Adm. Jakarta Barat	1	1	1	1
3	Kota Adm. Jakarta Selatan	1	1	1	1
4	Kota Adm. Jakarta Timur	0	1	1	1
5	Kota Adm. Jakarta Pusat	0	1	1	1
6	Kab. Kep. Seribu	0	0	1	1
12. JAWA BARAT					
1	Kota Bandung	1	1	1	3
2	Kota Bogor	1	1	1	1
3	Kota Cirebon	1	1	1	1
4	Kota Sukabumi	1	0	1	1
5	Kota Bekasi	0	0	1	0
6	Kota Tasikmalaya	0	1	0	0
7	Kota Cimahi	0	1	1	1
8	Kota Depok	1	1	0	1
9	Kota Banjar	1	1	1	1
10	Kab. Bogor	1	1	1	1
11	Kab. Sukabumi	1	1	1	1
12	Kab. Cianjur	1	1	1	1
13	Kab. Bandung	0	0	0	1
14	Kab. Bandung Barat	0	1	0	0
15	Kab. Garut	1	0	1	1
16	Kab. Tasikmalaya	0	1	1	1
17	Kab. Ciamis	1	1	1	0
18	Kab. Kuningan	0	1	1	0
19	Kab. Cirebon	1	1	1	1
20	Kab. Majalengka	1	1	1	1
21	Kab. Sumedang	1	1	1	1
22	Kab. Indramayu	1	1	1	1
23	Kab. Subang	1	1	1	1
24	Kab. Purwakarta	1	1	1	1
25	Kab. Karawang	1	1	1	1
26	Kab. Bekasi	0	0	1	1
13. BANTEN					
1	Kota Tangerang*	1	1	1	1
2	Kota Cilegon*	1	1	1	1
3	Kota Serang	0	1	1	1
4	Kota Tangerang Selatan*	0	1	1	1
5	Kab. Serang*	0	1	1	1
6	Kab. Lebak	1	1	1	1
7	Kab. Pandeglang	1	1	1	1
8	Kab. Tangerang	0	1	1	1

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Pengamanan			
		Alarm	Teralis	Pagar	Alat Pemadam Kebakaran
14. JAWA TENGAH					
1	Kota Semarang	1	1	1	1
2	Kota Magelang	0	1	1	1
3	Kota Surakarta	1	1	1	1
4	Kota Salatiga	0	1	1	1
5	Kota Pekalongan	0	1	1	1
6	Kota Tegal	0	1	1	1
7	Kab. Cilacap	1	1	1	1
8	Kab. Banyumas*	1	1	1	1
9	Kab. Purbalingga	0	1	1	1
10	Kab. Bk. Negara	0	1	1	1
11	Kab. Kebumen	0	1	1	1
12	Kab. Purworejo	0	1	1	1
13	Kab. Wonosobo	1	0	1	0
14	Kab. Magelang	0	1	1	1
15	Kab. Boyolali	1	1	1	1
16	Kab. Klaten	1	1	1	1
17	Kab. Sukoharjo	0	1	1	1
18	Kab. Wonogiri	0	1	1	1
19	Kab. Karanganyar*	0	1	1	1
20	Kab. Sragen	0	1	1	1
21	Kab. Grobogan	1	1	1	1
22	Kab. Blora	0	0	1	1
23	Kab. Rembang	0	1	1	1
24	Kab. Pati	1	1	1	1
25	Kab. Kudus	0	1	1	1
26	Kab. Jepara	1	1	1	1
27	Kab. Demak	1	1	1	1
28	Kab. Semarang	1	1	1	1
29	Kab. Temanggung*	1	1	1	1
30	Kab. Kendal	1	1	1	1
31	Kab. Batang	0	1	1	1
32	Kab. Pekalongan	0	1	1	1
33	Kab. Pemalang	0	1	1	1
34	Kab. Tegal	0	1	1	1
35	Kab. Brebes	0	1	1	1
15. DI. YOGYAKARTA					
1	Kota Yogyakarta	0	1	1	1
2	Kab. Kulon Progo*	1	1	1	1
3	Kab. Bantul	1	1	1	1
4	Kab. Gunung Kidul	0	1	1	1
5	Kab. Sleman	0	0	1	1

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Pengamanan			
		Alarm	Teralis	Pagar	Alat Pemadam Kebakaran
16. JAWA TIMUR					
1	Kota Surabaya	0	1	1	1
2	Kota Kediri	0	1	1	1
3	Kota Blitar	0	1	0	1
4	Kota Malang	0	1	1	1
5	Kota Probolinggo	0	1	1	1
6	Kota Pasuruan	0	1	1	1
7	Kota Mojokerto	0	1	1	1
8	Kota Madiun	0	1	1	1
9	Kota Batu	0	1	1	1
10	Kab. Pacitan*	0	1	0	1
11	Kab. Ponorogo	0	1	0	1
12	Kab. Trenggalek	0	1	1	1
13	Kab. Tulungagung*	0	1	0	1
14	Kab. Blitar	0	1	1	1
15	Kab. Kediri	0	1	0	1
16	Kab. Malang	0	1	1	1
17	Kab. Lumajang	0	1	1	1
18	Kab. Jember	0	1	1	1
19	Kab. Banyuwangi	0	1	0	1
20	Kab. Bondowoso	0	1	1	1
21	Kab. Situbondo	0	1	1	1
22	Kab. Probolinggo	0	1	1	1
23	Kab. Pasuruan	0	1	1	1
24	Kab. Sidoarjo	0	1	1	1
25	Kab. Mojokerto	0	1	1	1
26	Kab. Jombang	0	1	1	1
27	Kab. Nganjuk	0	1	0	1
28	Kab. Madiun	0	1	1	1
29	Kab. Magetan	0	1	1	1
30	Kab. Ngawi	0	1	1	1
31	Kab. Lamongan	0	1	1	1
32	Kab. Gresik	0	1	1	1
33	Kab. Bangkalan	0	1	1	1
34	Kab. Sampang	0	1	1	1
35	Kab. Pamekasan*	0	1	1	1
36	Kab. Sumenep	0	1	1	1
37	Kab. Bojonegoro	1	1	1	1
38	Kab. Tuban	0	1	1	1
17. BALI					
1	Kota Denpasar	0	1	1	1
2	Kab. Jemberana	0	0	1	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Pengamanan			
		Alarm	Teralis	Pagar	Alat Pemadam Kebakaran
3	Kab. Tabanan	0	0	1	1
4	Kab. Badung	0	1	1	1
5	Kab. Gianyar	1	1	1	1
6	Kab. Klungkung*	0	1	1	0
7	Kab. Bangli	0	1	1	1
8	Kab. Karangasem	0	0	0	1
9	Kab. Buleleng	0	1	1	1
18. NUSA TENGGARA BARAT					
1	Kota Mataram*	0	1	1	1
2	Kota Bima	0	1	1	1
3	Kab. Lombok Barat*	1	1	1	1
4	Kab. Lombok Tengah	0	1	1	1
5	Kab. Lombok Timur	0	1	1	1
6	Kab. Sumbawa	0	1	1	1
7	Kab. Dompu	0	1	1	0
8	Kab. Bima	0	1	1	1
9	Kab. Sumbawa Barat	0	1	1	1
10	Kab. Lombok Utara	0	0	1	0
19. NUSA TENGGARA TIMUR					
1	Kota Kupang	0	1	0	1
2	Kab. Sumba Barat*	0	0	0	1
3	Kab. Sumba Barat Daya*	0	0	0	0
4	Kab. Sumba Tengah	0	0	0	0
5	Kab. Sumba Timur	0	0	0	0
6	Kab. Kupang	0	1	1	1
7	Kab. Sabu Raijua*	0	0	0	0
8	Kab. Timur Tengah Selatan*	0	1	1	1
9	Kab. Timur Tengah Utara	0	1	1	0
10	Kab. Lembata*	0	1	0	1
11	Kab. Belu*	0	1	0	0
12	Kab. Alor*	0	1	1	1
13	Kab. Flores Timur*	0	1	1	0
14	Kab. Sikka*	0	0	0	0
15	Kab. Ende	0	1	1	1
16	Kab. Ngada	0	0	1	0
17	Kab. Nagekeo	0	0	0	1
18	Kab. Manggarai	0	1	1	0
19	Kab. Manggarai Timur	0	0	0	0
20	Kab. Rote Ndao*	0	0	0	0
21	Kab. Manggarai Barat	0	1	1	0
20. KALIMANTAN BARAT					
1	Kota Pontianak	0	1	0	1

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Pengamanan			
		Alarm	Teralis	Pagar	Alat Pemadam Kebakaran
2	Kota Singkawang	0	1	0	1
3	Kab. Sambas	0	1	0	1
4	Kab. Pontianak	0	1	1	1
5	Kab. Kubu Raya	0	0	0	0
6	Kab. Sanggau	0	1	1	0
7	Kab. Sekadau	0	1	1	0
8	Kab. Ketapang	0	1	1	1
9	Kab. Kayong Utara	0	1	0	1
10	Kab. Sintang	0	1	0	1
11	Kab. Melawi*	0	0	0	1
12	Kab. Kapuas Hulu	0	1	1	1
13	Kab. Bengkayang	1	0	1	1
14	Kab. Landak	0	1	1	1
21. KALIMANTAN TENGAH					
1	Kota Palangkaraya	0	0	1	0
2	Kab. Kotawaringin Barat	0	0	0	0
3	Kab. Kotawaringin Timur	0	0	0	0
4	Kab. Kapuas	0	0	1	0
5	Kab. Barito Selatan	0	0	1	1
6	Kab. Barito Utara	0	1	1	1
7	Kab. Murung Raya	0	1	0	0
8	Kab. Barito Timur	0	0	0	0
9	Kab. Gunung Mas	0	0	1	1
10	Kab. Pulang Pisau	0	0	0	0
11	Kab. Katingan	0	0	0	1
12	Kab. Seruyan	0	0	0	0
13	Kab. Sukamara	0	0	1	0
14	Kab. Lamandau	0	0	1	1
22. KALIMANTAN SELATAN					
1	Kota Banjarmasin	0	1	1	0
2	Kota Banjar Baru	0	1	1	0
3	Kab. Tanah Laut	0	1	1	1
4	Kab. Kota Baru	0	1	1	0
5	Kab. Banjar	0	1	1	1
6	Kab. Barito Kuala	0	1	1	1
7	Kab. Tapin	0	1	1	1
8	Kab. Hulu Sungai Selatan	0	1	1	1
9	Kab. Hulu Sungai Tengah	0	1	1	0
10	Kab. Hulu Sungai Utara	0	1	1	0
11	Kab. Tabalong	0	1	1	1
12	Kab. Balangan	0	1	1	0
13	Kab. Tanah Bumbu	0	1	1	1

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Pengamanan			
		Alarm	Teralis	Pagar	Alat Pemadam Kebakaran
23. KALIMANTAN TIMUR					
1	Kota Samarinda	0	1	1	1
2	Kota Balikpapan	0	1	1	1
3	Kota Tarakan*	0	0	1	1
4	Kota Bontang	0	1	0	0
5	Kab. Pasir	0	1	1	1
6	Kab. Kutai Kertanegara	0	1	1	1
7	Kab. Berau	0	1	1	1
8	Kab. Bulungan*	0	1	1	1
9	Kab. Tana Tidung*	0	0	0	1
10	Kab. Malinau*	0	0	0	0
11	Kab. Nunukan*	0	1	1	1
12	Kab. Kutai Barat	0	1	0	1
13	Kab. Kutai Timur	0	1	1	0
14	Kab. Penajam Pasir Utara	0	1	0	1
24. SULAWESI UTARA					
1	Kota Manado	0	1	0	0
2	Kota Bitung	0	1	0	0
3	Kota Tomohon	0	1	0	0
4	Kota Kotamobagu	0	1	1	0
5	Kab. Sangihe	0	1	0	0
6	Kab. Kep. Sitaro*	0	1	0	0
7	Kab. Talaud	0	1	1	1
8	Kab. Minahasa	0	1	0	1
9	Kab. Minahasa Utara	0	1	1	1
10	Kab. Bolaang Mongondow	0	1	0	0
11	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0	1	0	0
12	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0	1	0	0
13	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0	1	0	0
14	Kab. Minahasa Selatan	0	1	1	0
15	Kab. Minahasa Tenggara*	0	1	0	0
25. GORONTALO					
1	Kota Gorontalo	0	1	1	1
2	Kab. Gorontalo	0	1	0	1
3	Kab. Gorontalo Utara	0	1	0	0
4	Kab. Boalemo	0	1	1	1
5	Kab. Bone Bolango	0	1	0	1
6	Kab. Pohuwato	0	1	1	1
26. SULAWESI TENGAH					
1	Kota Palu	0	1	1	1
2	Kab. Banggai	0	1	1	0
3	Kab. Poso	0	1	1	1

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Pengamanan			
		Alarm	Teralis	Pagar	Alat Pemadam Kebakaran
4	Kab. Tojo Una-Una	0	1	1	1
5	Kab. Donggala	0	1	0	1
6	Kab. Sigi	0	1	0	1
7	Kab. Toli-Toli	0	0	1	0
8	Kab. Buol	0	1	1	1
9	Kab. Morowali	0	1	1	0
10	Kab. Banggai Kepulauan	0	0	0	0
11	Kab. Parigi Moutong	0	1	1	1
27. SULAWESI SELATAN					
1	Kota Makassar*	0	0	1	1
2	Kota Pare Pare*	0	1	1	0
3	Kota Palopo*	0	1	1	1
4	Kab. Bulukumba	0	1	1	1
5	Kab. Bantaeng	0	1	0	1
6	Kab. Jeneponto	0	0	0	1
7	Kab. Takalar*	0	1	1	1
8	Kab. Gowa	0	1	1	1
9	Kab. Sinjai*	0	1	0	1
10	Kab. Bone	0	1	1	1
11	Kab. Maros	0	0	1	0
12	Kab. Pangkep	0	1	1	0
13	Kab. Barru	0	1	1	1
14	Kab. Soppeng*	0	1	1	1
15	Kab. Wajo*	0	1	0	1
16	Kab. Sidrap*	0	0	0	1
17	Kab. Pinrang	0	1	0	1
18	Kab. Enrekang	0	1	0	1
19	Kab. Luwu	0	0	0	1
20	Kab. Luwu Timur	0	0	0	1
21	Kab. Luwu Utara	0	1	0	0
22	Kab. Tana Toraja*	0	0	1	1
23	Kab. Toraja Utara*	1	1	0	1
24	Kab. Selayar	0	1	1	1
28. SULAWESI BARAT					
1	Kab. Polewali	0	1	1	1
2	Kab. Majene	0	1	1	1
3	Kab. Mamuju	0	1	0	1
4	Kab. Mamuju Utara	0	1	1	0
5	Kab. Mamasa	0	0	0	0
29. SULAWESI TENGGARA					
1	Kota Kendari	1	1	0	1
2	Kota Bau-Bau	0	0	0	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Pengamanan			
		Alarm	Teralis	Pagar	Alat Pemadam Kebakaran
3	Kab. Buton	0	1	1	1
4	Kab. Buton Utara	0	1	0	1
5	Kab. Muna	0	1	1	1
6	Kab. Kolaka	0	1	1	1
7	Kab. Konawe	0	1	1	1
8	Kab. Konawe Selatan	0	1	1	0
9	Kab. Konawe Utara	0	1	0	0
10	Kab. Bombana	0	1	1	1
11	Kab. Wakatobi	0	1	0	1
12	Kab. Kolaka Utara	0	1	0	1
30. MALUKU					
1	Kota Ambon	1	1	1	1
2	Kota Tual	0	1	0	1
3	Kab. Maluku Tengah	0	1	1	1
4	Kab. Pulau Buru	0	0	0	0
5	Kab. Buru Selatan	0	0	0	1
6	Kab. Maluku Tenggara	0	0	0	0
7	Kab. Maluku Tenggara Barat	0	0	0	0
8	Kab. Seram Bagian Barat	0	0	1	1
9	Kab. Seram Bagian Timur	0	1	1	1
10	Kab. Kep. Aru	0	1	1	1
11	Kab. Maluku Barat Daya	0	0	0	0
31. MALUKU UTARA					
1	Kota Ternate*	0	0	1	1
2	Kota Tidore	0	0	0	0
3	Kab. Halmahera Tengah	0	0	0	0
4	Kab. Halmahera Barat	0	0	1	0
5	Kab. Halmahera Utara	0	0	1	0
6	Kab. Pulau Morotai	0	0	1	0
7	Kab. Halmahera Selatan	0	1	1	0
8	Kab. Halmahera Timur	0	0	0	0
9	Kab. Kep. Sula	0	1	1	1
32. PAPUA					
1	Kota Jayapura	0	1	1	1
2	Kab. Jayapura	0	1	0	1
3	Kab. Sarmi	0	0	0	0
4	Kab. Mamberamo Raya	0	0	0	0
5	Kab. Kerom	0	1	0	1
6	Kab. Jayawijaya	1	1	1	1
7	Kab. Lanny Jaya	0	0	0	0
8	Kab. Mamberamo Tengah	0	1	0	0
9	Kab. Nduga	0	0	0	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Pengamanan			
		Alarm	Teralis	Pagar	Alat Pemadam Kebakaran
10	Kab. Yalimo	0	1	0	0
11	Kab. Pegunungan Bintang	0	1	0	1
12	Kab. Yahukimo	0	1	1	1
13	Kab. Tolikara*	0	0	0	0
14	Kab. Puncak Jaya	0	1	0	0
15	Kab. Puncak	0	0	0	0
16	Kab. Merauke	0	1	1	1
17	Kab. Bovendigoel	0	0	0	0
18	Kab. Asmat	0	0	0	1
19	Kab. Mappi	0	1	0	1
20	Kab. Kep. Yapen	0	1	1	0
21	Kab. Waropen	0	0	1	0
22	Kab. Biak Numfor	0	1	1	1
23	Kab. Supiori	0	1	0	1
24	Kab. Nabire *	0	1	1	1
25	Kab. Dogiyai	0	0	0	0
26	Kab. Paniai	0	1	1	0
27	Kab. Intan Jaya	0	1	1	0
28	Kab. Deiyai	0	0	0	0
29	Kab. Mimika	0	1	1	1
33. PAPUA BARAT					
1	Kota Sorong	0	1	1	0
2	Kab. Sorong	0	1	1	1
3	Kab. Tambora	0	0	0	0
4	Kab. Sorong Selatan	0	0	0	1
5	Kab. Maybrat	0	0	0	0
6	Kab. Raja Ampat	0	0	0	0
7	Kab. Manokwari	0	1	1	0
8	Kab. Teluk Bintuni	0	1	0	1
9	Kab. Teluk Wondama	0	1	0	1
10	Kab. Fak Fak	0	0	0	1
11	Kab. Kaimana	0	0	1	0

LAMPIRAN 7

DATA SARANA PENUNJANG INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Penunjang					
		Kereta Dorong	AC	Exhaust Fan	Kipas Angin	Generator	Pompa Air
1. NANGGROE ACEH DARUSSALAM							
1	Kota Banda Aceh	1	1	1	1	0	0
2	Kota Sabang	0	1	0	1	0	0
3	Kota Lhokseumawe	0	1	0	0	0	1
4	Kota Langsa	0	1	0	1	1	1
5	Kota Subulussalam	0	1	0	1	0	1
6	Kab. Aceh Utara	0	1	0	1	0	0
7	Kab. Aceh Barat	1	1	1	1	1	0
8	Kab. Aceh Selatan	1	1	1	1	1	1
9	Kab. Aceh Timur	1	1	0	1	1	1
10	Kab. Aceh Tengah	0	1	0	0	0	0
11	Kab. Aceh Tenggara	1	1	0	1	0	1
12	Kab. Aceh Besar	1	1	1	1	0	0
13	Kab. Aceh Singkil	0	1	0	1	1	1
14	Kab. Pidie	0	1	0	0	0	0
15	Kab. Pidie Jaya	1	1	1	1	1	0
16	Kab. Siemeuleu	1	1	0	1	1	1
17	Kab. Bireuen*	0	1	0	1	0	0
18	Kab. Gayo Lues	0	1	1	1	1	1
19	Kab. Aceh Barat Daya	1	1	0	1	1	1
20	Kab. Aceh Tamiang	1	1	1	0	0	1
21	Kab. Nagan Raya	1	0	0	1	1	1
22	Kab. Aceh Jaya	1	0	0	0	0	0
23	Kab. Bener Meriah	0	0	1	0	0	0
2. SUMATERA UTARA							
1	Kota Medan	0	1	0	0	1	1
2	Kota Binjai	1	1	1	0	0	0
3	Kota Tebing Tinggi*	0	1	0	1	1	0
4	Kota Pematang Siantar	1	0	0	1	0	0
5	Kota Tanjung Balai	0	1	0	1	0	0
6	Kota Sibolga	1	1	0	1	1	0
7	Kota Padang Sidempuan	0	1	0	0	1	1
8	Kota Gunung Sitoli	0	0	0	0	0	0
9	Kab. Deli Serdang	0	0	0	1	0	1
10	Kab. Langkat	1	1	0	1	0	0
11	Kab. Karo	1	1	0	0	1	0
12	Kab. Simalungun	1	1	0	1	1	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Penunjang					
		Kereta Dorong	AC	Exhaust Fan	Kipas Angin	Generator	Pompa Air
13	Kab. Dairi	1	0	0	0	0	0
14	Kab. Asahan	0	1	0	0	0	0
15	Kab. Batubara	0	1	0	0	0	1
16	Kab. Labuhan Batu	1	1	0	1	0	0
17	Kab. Tapanuli Utara	0	0	0	0	1	1
18	Kab. Tapanuli Tengah	1	1	0	0	0	0
19	Kab. Tapanuli Selatan	0	0	0	0	0	0
20	Kab. Padang Lawas	0	0	0	0	0	0
21	Kab. Padang Lawas Utara	0	0	0	0	0	0
22	Kab. Nias	0	0	0	0	0	0
23	Kab. Toba Samosir	0	0	0	0	0	0
24	Kab. Mandailing Natal	0	1	0	0	0	0
25	Kab. Humbang Hasudutan	1	0	1	0	0	0
26	Kab. Pakpak Barat	0	0	0	0	0	0
27	Kab. Nias Selatan	0	1	0	0	1	0
28	Kab. Samosir	0	0	0	0	0	0
29	Kab. Serdang Begadai	1	1	1	0	0	1
30	Kab. Nias Barat	0	0	0	0	1	1
31	Kab. Nias Utara	0	0	0	0	0	0
32	Kab. Labuhan Batu Utara	0	0	0	0	0	0
33	Kab. Labuhan Batu Selatan	0	0	0	1	0	1
3. SUMATERA BARAT							
1	Kota Padang	1	1	0	1	1	1
2	Kota Solok	0	1	1	1	1	1
3	Kota Sawah Lunto	1	1	1	1	0	0
4	Kota Padang Panjang	1	0	0	0	0	0
5	Kota Bukittinggi	1	1	1	0	1	0
6	Kota Payakumbuh	1	1	0	1	1	0
7	Kota Pariaman	1	1	0	1	0	1
8	Kab. Pesisir Selatan	0	1	0	0	0	0
9	Kab. Solok	1	1	0	1	0	0
10	Kab. Sawah Lunto	1	1	0	1	1	0
11	Kab. Tanah Datar	0	1	0	1	0	1
12	Kab. Padang Pariaman	0	1	0	1	1	0
13	Kab. Agam	1	1	1	0	0	0
14	Kab. 50 Kota*	1	1	0	1	1	0
15	Kab. Pasaman	0	0	0	0	0	0
16	Kab. Kep. Mentawai	0	0	0	1	1	0
17	Kab. Solok Selatan	1	1	1	1	1	0
18	Kab. Dharmas Raya	0	1	0	0	0	0
19	Kab. Pasaman Barat	0	1	0	0	0	1
20	Kab. Sijunjung	0	0	0	0	0	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Penunjang					
		Kereta Dorong	AC	Exhaust Fan	Kipas Angin	Generator	Pompa Air
4. RIAU							
1	Kota Pekanbaru	1	1	1	0	1	1
2	Kota Dumai	1	1	0	1	0	0
3	Kab. Indragiri Hulu	1	1	0	0	0	1
4	Kab. Indragiri Hilir	1	1	1	0	0	0
5	Kab. Kampar	0	1	1	1	0	1
6	Kab. Bangkalis	1	1	0	0	0	1
7	Kab. Kep. Meranti	0	1	0	0	0	0
8	Kab. Pelalawan	0	1	0	0	0	1
9	Kab. Rokan Hulu	1	1	0	0	0	0
10	Kab. Rokan Hilir	1	1	0	0	0	1
11	Kab. Siak	0	1	0	0	1	0
12	Kab. Kuantan Singingi	1	1	0	1	0	1
5. KEPULAUAN RIAU							
1	Kota Batam	1	1	1	0	0	0
2	Kota Tanjung Pinang	0	1	1	1	0	0
3	Kab. Bintan (Kab. Kep. Riau)	1	1	1	1	0	0
4	Kab. Karimun	1	1	0	1	1	0
5	Kab. Natuna*	1	0	1	1	0	0
6	Kab. Kep. Anambas*	0	0	0	1	0	0
7	Kab. Lingga	0	1	1	0	0	0
6. JAMBI							
1	Kota Jambi	1	0	1	0	0	1
2	Kota Sungai Penuh	0	0	1	0	0	1
3	Kab. Kerinci	1	1	0	0	0	1
4	Kab. Merangin	1	1	0	0	0	1
5	Kab. Batang Hari	1	1	0	0	0	0
6	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	0	0	1	0	1
7	Kab. Bungo	1	0	0	0	0	1
8	Kab. Sarolangun	1	0	1	0	0	1
9	Kab. Tebo	1	0	1	0	0	1
10	Kab. Muaro Jambi	0	1	0	0	0	0
11	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	0	0	1	1	1
7. SUMATERA SELATAN							
1	Kota Palembang	1	1	1	1	0	1
2	Kota Prabumulih	1	1	0	1	0	1
3	Kota Lubuk Linggau	0	1	0	0	1	0
4	Kota Pagar Alam	0	0	0	0	0	1
5	Kab. Ogan Komering Ulu	1	1	1	1	0	0
6	Kab. Ogan Komering Ilir	1	1	1	1	0	0
7	Kab. Muara Enim	1	1	1	1	0	0
8	Kab. Lahat	0	1	0	1	1	1

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Penunjang					
		Kereta Dorong	AC	Exhaust Fan	Kipas Angin	Generator	Pompa Air
9	Kab. Empat Lawang	0	0	0	0	0	0
10	Kab. Musi Rawas	1	1	0	0	0	0
11	Kab. Musi Banyuasin	1	1	1	1	0	1
12	Kab. Banyuasin	1	1	1	1	0	1
13	Kab. Ogan Ilir*	1	1	1	1	0	0
14	Kab. OKU Timur	1	1	0	0	0	0
15	Kab. OKU Selatan	0	0	0	0	0	0
8. BANGKA BELITUNG							
1	Kota Pangkal Pinang	0	1	0	0	0	1
2	Kab. Bangka	1	0	0	1	0	1
3	Kab. Belitung	0	1	0	1	0	1
4	Kab. Bangka Barat	1	1	0	1	0	0
5	Kab. Bangka Tengah	0	1	1	1	1	1
6	Kab. Bangka Selatan	0	1	1	1	1	1
7	Kab. Belitung Timur	1	1	0	0	0	0
9. BENGKULU							
1	Kota Bengkulu	1	0	0	0	0	1
2	Kab. Bengkulu Utara	1	1	1	0	0	1
3	Kab. Bengkulu Selatan	0	0	0	0	1	1
4	Kab. Rejang Lebong	0	0	0	1	0	1
5	Kab. Lebong	1	0	1	1	0	1
6	Kab. Seluma	1	0	0	0	0	1
7	Kab. Kaur	1	0	0	0	0	1
8	Kab. Muko-Muko	1	0	0	0	0	1
9	Kab. Kepahyang	1	0	1	1	0	1
10	Kab. Bengkulu Tengah	1	0	0	0	0	1
10. LAMPUNG							
1	Kota Bandar Lampung	1	1	0	0	1	1
2	Kota Metro	1	1	1	1	0	1
3	Kab. Lampung Utara	1	0	1	1	1	1
4	Kab. Lampung Barat	1	0	1	0	0	0
5	Kab. Lampung Selatan	0	0	1	1	1	0
6	Kab. Pesawaran	0	0	0	0	0	0
7	Kab. Lampung Timur	1	1	1	1	1	1
8	Kab. Lampung Tengah	1	1	0	1	0	0
9	Kab. Tanggamus	0	0	0	1	1	0
10	Kab. Pringsewu	0	1	0	1	1	1
11	Kab. Tulang Bawang	1	1	1	1	0	0
12	Kab. Tulang Bawang Barat	0	0	0	1	1	0
13	Kab. Mesuji	0	1	0	1	1	1
14	Kab. Way Kanan	1	1	1	1	0	0
11. DKI JAKARTA							

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Penunjang					
		Kereta Dorong	AC	Exhaust Fan	Kipas Angin	Generator	Pompa Air
1	Kota Adm. Jakarta Utara	0	1	0	1	1	0
2	Kota Adm. Jakarta Barat	1	1	0	0	0	0
3	Kota Adm. Jakarta Selatan	0	1	0	1	0	1
4	Kota Adm. Jakarta Timur	1	1	0	1	0	0
5	Kota Adm. Jakarta Pusat	1	1	0	0	1	1
6	Kab. Kep. Seribu*	0	0	0	0	0	0
12. JAWA BARAT							
1	Kota Bandung	1	0	0	1	0	0
2	Kota Bogor	1	1	0	0	0	0
3	Kota Cirebon	0	1	0	0	0	0
4	Kota Sukabumi	1	0	1	0	0	1
5	Kota Bekasi	0	1	1	1	1	1
6	Kota Tasikmalaya	0	0	0	0	0	0
7	Kota Cimahi	0	1	0	0	0	1
8	Kota Depok	0	1	0	0	0	1
9	Kota Banjar	1	0	0	1	0	0
10	Kab. Bogor	1	1	0	0	1	1
11	Kab. Sukabumi*	1	0	0	0	1	1
12	Kab. Cianjur	0	1	1	0	0	0
13	Kab. Bandung	0	1	1	1	1	0
14	Kab. Bandung Barat	0	1	1	0	0	1
15	Kab. Garut	1	0	0	0	0	1
16	Kab. Tasikmalaya	0	0	1	0	0	1
17	Kab. Ciamis	1	0	0	0	0	0
18	Kab. Kuningan	0	0	0	0	0	1
19	Kab. Cirebon	1	1	0	1	0	0
20	Kab. Majalengka	0	0	0	1	0	1
21	Kab. Sumedang	1	1	1	1	1	0
22	Kab. Indramayu	0	0	0	1	1	1
23	Kab. Subang	1	1	1	1	1	1
24	Kab. Purwakarta	1	1	0	0	0	0
25	Kab. Karawang	0	1	1	0	0	0
26	Kab. Bekasi	0	1	0	0	1	1
13. BANTEN							
1	Kota Tangerang*	1	1	0	1	0	1
2	Kota Cilegon*	1	1	0	1	0	1
3	Kota Serang	1	0	0	1	0	1
4	Kota Tangerang Selatan*	1	1	0	1	0	1
5	Kab. Serang*	1	1	0	1	1	1
6	Kab. Lebak	0	1	0	1	1	1
7	Kab. Pandeglang	1	1	0	0	0	0
8	Kab. Tangerang	1	1	1	1	1	1

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Penunjang					
		Kereta Dorong	AC	Exhaust Fan	Kipas Angin	Generator	Pompa Air
14. JAWA TENGAH							
1	Kota Semarang	0	1	1	1	1	1
2	Kota Magelang	1	1	1	1	1	1
3	Kota Surakarta	1	1	1	1	0	0
4	Kota Salatiga	1	1	0	0	1	0
5	Kota Pekalongan	1	1	1	1	0	1
6	Kota Tegal	1	1	0	1	0	1
7	Kab. Cilacap	1	0	1	0	1	1
8	Kab. Banyumas*	1	1	1	1	1	1
9	Kab. Purbalingga	1	1	0	1	1	0
10	Kab. Bk. Negara	1	1	1	1	1	1
11	Kab. Kebumen	1	1	0	1	0	0
12	Kab. Purworejo	1	1	1	1	0	0
13	Kab. Wonosobo	1	1	1	0	1	0
14	Kab. Magelang	1	1	1	1	0	0
15	Kab. Boyolali	1	1	1	1	0	1
16	Kab. Klaten	1	1	1	0	0	0
17	Kab. Sukoharjo	1	1	0	1	0	1
18	Kab. Wonogiri	0	1	0	1	0	1
19	Kab. Karanganyar*	1	1	1	1	0	0
20	Kab. Sragen	1	1	0	1	0	0
21	Kab. Grobogan	1	1	0	1	1	0
22	Kab. Blora	1	1	0	1	1	1
23	Kab. Rembang	1	1	1	1	0	1
24	Kab. Pati	1	1	0	1	1	1
25	Kab. Kudus	1	1	0	1	0	1
26	Kab. Jepara	1	1	0	1	1	1
27	Kab. Demak	1	1	0	0	1	0
28	Kab. Semarang	1	1	0	0	0	0
29	Kab. Temanggung*	1	1	1	0	1	0
30	Kab. Kendal	1	1	0	1	0	0
31	Kab. Batang	1	1	1	1	0	1
32	Kab. Pekalongan	0	1	0	0	1	0
33	Kab. Pemalang	0	1	0	1	0	0
34	Kab. Tegal	1	1	1	1	1	0
35	Kab. Brebes	1	1	1	1	1	1
15. DI. YOGYAKARTA							
1	Kota Yogyakarta	1	1	1	1	1	1
2	Kab. Kulon Progo*	1	1	0	1	1	0
3	Kab. Bantul	0	1	0	1	1	1
4	Kab. Gunung Kidul	1	1	0	1	0	0
5	Kab. Sleman	1	1	0	1	1	1

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Penunjang					
		Kereta Dorong	AC	Exhaust Fan	Kipas Angin	Generator	Pompa Air
16. JAWA TIMUR							
1	Kota Surabaya	0	1	0	0	0	0
2	Kota Kediri	1	1	0	1	0	0
3	Kota Blitar	1	1	1	1	0	0
4	Kota Malang	0	0	0	0	0	0
5	Kota Probolinggo	1	0	0	1	0	0
6	Kota Pasuruan	1	1	0	1	0	0
7	Kota Mojokerto	0	0	0	0	0	0
8	Kota Madiun	1	1	0	1	0	0
9	Kota Batu	1	0	1	1	0	0
10	Kab. Pacitan*	1	1	0	1	0	0
11	Kab. Ponorogo	1	0	0	1	0	0
12	Kab. Trenggalek	1	1	0	1	1	0
13	Kab. Tulungagung*	1	0	0	1	0	0
14	Kab. Blitar	1	0	1	1	0	0
15	Kab. Kediri	1	1	0	1	0	0
16	Kab. Malang	1	1	0	1	1	1
17	Kab. Lumajang	0	1	0	0	0	0
18	Kab. Jember	0	1	0	0	0	0
19	Kab. Banyuwangi	1	0	1	1	0	0
20	Kab. Bondowoso	1	0	0	1	1	0
21	Kab. Situbondo	1	1	0	1	0	0
22	Kab. Probolinggo	1	1	0	1	0	0
23	Kab. Pasuruan	1	1	0	1	0	0
24	Kab. Sidoarjo	1	1	1	1	1	0
25	Kab. Mojokerto	1	1	0	1	0	0
26	Kab. Jombang	1	1	0	1	0	0
27	Kab. Nganjuk	1	1	0	1	0	0
28	Kab. Madiun	1	1	0	1	0	0
29	Kab. Magetan	1	0	0	1	0	0
30	Kab. Ngawi	1	1	0	1	0	0
31	Kab. Lamongan	1	1	0	1	0	0
32	Kab. Gresik	1	1	0	0	0	0
33	Kab. Bangkalan	1	1	0	0	0	0
34	Kab. Sampang	0	1	0	0	0	0
35	Kab. Pamekasan*	1	1	0	1	0	0
36	Kab. Sumenep	0	0	0	0	0	0
37	Kab. Bojonegoro	1	1	1	1	0	1
38	Kab. Tuban	1	0	0	1	0	0
17. BALI							
1	Kota Denpasar	0	0	0	1	0	0
2	Kab. Jemberana	1	1	0	0	0	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Penunjang					
		Kereta Dorong	AC	Exhaust Fan	Kipas Angin	Generator	Pompa Air
3	Kab. Tabanan	0	1	0	1	0	0
4	Kab. Badung	0	1	1	0	0	0
5	Kab. Gianyar	1	1	1	0	0	0
6	Kab. Klungkung*	1	0	0	1	0	0
7	Kab. Bangli	0	0	0	1	0	0
8	Kab. Karangasem	1	1	0	0	0	0
9	Kab. Buleleng	1	1	0	1	0	0
18. NUSA TENGGARA BARAT							
1	Kota Mataram*	1	1	0	1	1	1
2	Kota Bima	1	1	1	1	0	0
3	Kab. Lombok Barat*	1	1	1	0	0	0
4	Kab. Lombok Tengah	1	1	1	1	1	0
5	Kab. Lombok Timur	1	1	1	0	1	0
6	Kab. Sumbawa	1	1	0	1	1	0
7	Kab. Dompu	0	1	0	0	0	0
8	Kab. Bima	0	1	1	1	0	1
9	Kab. Sumbawa Barat	0	1	0	1	0	1
10	Kab. Lombok Utara	1	1	1	0	0	0
19. NUSA TENGGARA TIMUR							
1	Kota Kupang	1	1	1	0	1	1
2	Kab. Sumba Barat*	1	1	1	0	0	0
3	Kab. Sumba Barat Daya*	0	0	0	0	0	0
4	Kab. Sumba Tengah	0	0	0	0	0	0
5	Kab. Sumba Timur	0	0	0	0	0	0
6	Kab. Kupang	0	1	0	1	0	0
7	Kab. Sabu Raijua*	0	0	0	0	0	0
8	Kab. Timur Tengah Selatan*	1	1	1	0	1	0
9	Kab. Timur Tengah Utara	1	1	0	0	0	0
10	Kab. Lembata*	1	1	0	0	0	0
11	Kab. Belu*	1	1	1	1	0	0
12	Kab. Alor*	0	1	0	0	0	0
13	Kab. Flores Timur*	0	0	0	0	0	0
14	Kab. Sikka*	0	0	0	0	0	0
15	Kab. Ende	1	1	0	0	0	0
16	Kab. Ngada	1	1	0	0	1	0
17	Kab. Nagekeo	0	1	0	0	0	0
18	Kab. Manggarai	0	0	0	0	1	0
19	Kab. Manggarai Timur	0	0	0	0	0	0
20	Kab. Rote Ndao*	0	0	0	0	0	0
21	Kab. Manggarai Barat	0	0	0	0	1	0
20. KALIMANTAN BARAT							
1	Kota Pontianak	1	1	1	0	0	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Penunjang					
		Kereta Dorong	AC	Exhaust Fan	Kipas Angin	Generator	Pompa Air
2	Kota Singkawang	1	1	0	1	1	1
3	Kab. Sambas	1	1	1	0	1	1
4	Kab. Pontianak	1	1	1	1	0	0
5	Kab. Kubu Raya	0	0	0	0	0	0
6	Kab. Sanggau	1	1	0	1	0	0
7	Kab. Sekadau	0	1	0	0	0	0
8	Kab. Ketapang	1	1	1	1	0	0
9	Kab. Kayong Utara	1	1	0	1	1	0
10	Kab. Sintang	0	0	1	1	0	0
11	Kab. Melawi*	0	1	1	1	1	1
12	Kab. Kapuas Hulu	1	1	0	0	0	0
13	Kab. Bengkayang	0	0	0	0	0	0
14	Kab. Landak	1	0	0	0	0	0
21. KALIMANTAN TENGAH							
1	Kota Palangkaraya	1	1	1	1	0	1
2	Kab. Kotawaringin Barat	1	1	0	1	0	0
3	Kab. Kotawaringin Timur	1	1	0	1	0	0
4	Kab. Kapuas	1	1	1	1	0	1
5	Kab. Barito Selatan	1	1	0	1	0	1
6	Kab. Barito Utara	1	1	0	1	0	1
7	Kab. Murung Raya	1	1	0	1	0	0
8	Kab. Barito Timur	1	1	1	1	0	0
9	Kab. Gunung Mas	1	1	1	1	0	1
10	Kab. Pulang Pisau	1	1	0	1	0	0
11	Kab. Katingan	0	1	0	1	0	0
12	Kab. Seruyan	1	1	1	1	0	0
13	Kab. Sukamara	1	1	0	1	0	1
14	Kab. Lamandau	1	1	0	1	0	1
22. KALIMANTAN SELATAN							
1	Kota Banjarmasin	1	1	1	1	0	0
2	Kota Banjar Baru	1	1	1	1	1	0
3	Kab. Tanah Laut	0	1	1	1	1	1
4	Kab. Kota Baru	1	1	1	1	1	0
5	Kab. Banjar	1	0	0	1	1	0
6	Kab. Barito Kuala	0	1	1	1	1	0
7	Kab. Tapin	1	1	1	0	1	1
8	Kab. Hulu Sungai Selatan	1	1	0	1	0	0
9	Kab. Hulu Sungai Tengah	1	1	1	1	0	0
10	Kab. Hulu Sungai Utara	0	1	0	1	0	0
11	Kab. Tabalong	1	1	0	1	1	0
12	Kab. Balangan	1	1	0	1	1	1
13	Kab. Tanah Bumbu	0	1	0	1	1	1

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Penunjang					
		Kereta Dorong	AC	Exhaust Fan	Kipas Angin	Generator	Pompa Air
23. KALIMANTAN TIMUR							
1	Kota Samarinda	1	1	1	1	1	0
2	Kota Balikpapan	1	1	1	1	1	0
3	Kota Tarakan*	1	1	0	0	1	0
4	Kota Bontang	0	1	0	0	0	0
5	Kab. Pasir	1	1	1	1	0	0
6	Kab. Kutai Kertanegara	0	1	1	1	1	0
7	Kab. Berau	1	1	0	0	0	0
8	Kab. Bulungan*	1	1	0	0	0	0
9	Kab. Tana Tidung*	0	0	0	0	0	0
10	Kab. Malinau*	1	1	0	1	0	0
11	Kab. Nunukan*	0	1	0	1	0	0
12	Kab. Kutai Barat	1	0	0	1	0	0
13	Kab. Kutai Timur	1	1	1	0	0	0
14	Kab. Penajam Pasir Utara	1	1	0	0	0	0
24. SULAWESI UTARA							
1	Kota Manado	0	0	0	1	0	0
2	Kota Bitung	1	0	0	0	1	1
3	Kota Tomohon	1	0	0	0	0	0
4	Kota Kotamobagu	0	0	0	0	0	0
5	Kab. Sangihe	1	1	0	0	1	0
6	Kab. Kep. Sitaro*	0	0	0	0	0	0
7	Kab. Talaud	0	1	0	0	0	0
8	Kab. Minahasa	1	1	1	0	0	0
9	Kab. Minahasa Utara	0	0	0	0	1	0
10	Kab. Bolaang Mongondow	0	0	0	0	1	1
11	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0	0	0	0	0	0
12	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0	0	0	0	0	0
13	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1	0	0	0	0	0
14	Kab. Minahasa Selatan	0	1	0	1	0	0
15	Kab. Minahasa Tenggara*	0	0	0	0	0	0
25. GORONTALO							
1	Kota Gorontalo	1	1	0	0	1	0
2	Kab. Gorontalo	1	1	1	1	0	0
3	Kab. Gorontalo Utara	1	0	0	0	0	0
4	Kab. Boalemo	1	1	1	1	0	0
5	Kab. Bone Bolango	1	1	1	1	0	0
6	Kab. Pohuwato	1	1	0	0	1	0
26. SULAWESI TENGAH							
1	Kota Palu	1	1	0	0	1	1
2	Kab. Banggai	1	0	0	0	0	0
3	Kab. Poso	1	1	1	1	1	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Penunjang					
		Kereta Dorong	AC	Exhaust Fan	Kipas Angin	Generator	Pompa Air
4	Kab. Tojo Una-Una	1	0	0	1	1	0
5	Kab. Donggala	1	0	0	1	0	0
6	Kab. Sigi	0	1	0	0	0	0
7	Kab. Toli-Toli	0	0	0	0	1	0
8	Kab. Buol	0	0	0	0	1	0
9	Kab. Morowali	1	1	0	0	1	0
10	Kab. Banggai Kepulauan	0	0	0	0	0	0
11	Kab. Parigi Moutong	1	1	1	1	1	1
27. SULAWESI SELATAN							
1	Kota Makassar*	1	0	1	1	0	1
2	Kota Pare Pare*	1	1	0	1	0	1
3	Kota Palopo*	1	0	0	0	0	0
4	Kab. Bulukumba	0	1	0	0	0	0
5	Kab. Bantaeng	1	1	1	1	0	0
6	Kab. Jeneponto	0	1	0	1	0	0
7	Kab. Takalar*	1	0	0	1	1	0
8	Kab. Gowa	1	0	0	0	0	1
9	Kab. Sinjai*	1	1	0	0	0	0
10	Kab. Bone	0	1	0	1	0	0
11	Kab. Maros	1	0	0	1	0	0
12	Kab. Pangkep	0	1	0	0	0	1
13	Kab. Barru	1	1	0	0	0	0
14	Kab. Soppeng*	1	1	0	1	0	1
15	Kab. Wajo*	1	1	0	1	0	0
16	Kab. Sidrap*	1	1	0	0	0	1
17	Kab. Pinrang	1	1	0	1	0	0
18	Kab. Enrekang	1	1	0	1	0	0
19	Kab. Luwu	0	1	0	0	0	0
20	Kab. Luwu Timur	1	1	1	0	1	1
21	Kab. Luwu Utara	1	1	1	1	0	0
22	Kab. Tana Toraja*	1	1	0	0	0	0
23	Kab. Toraja Utara*	1	1	0	0	1	0
24	Kab. Selayar	1	1	0	1	0	0
28. SULAWESI BARAT							
1	Kab. Polewali	1	0	0	1	0	1
2	Kab. Majene	1	1	0	1	1	0
3	Kab. Mamuju	1	1	0	1	0	0
4	Kab. Mamuju Utara	1	1	1	1	1	1
5	Kab. Mamasa	1	0	0	0	0	0
29. SULAWESI TENGGARA							
1	Kota Kendari	1	1	1	0	0	0
2	Kota Bau-Bau	1	1	0	0	1	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Penunjang					
		Kereta Dorong	AC	Exhaust Fan	Kipas Angin	Generator	Pompa Air
3	Kab. Buton	0	1	0	0	0	0
4	Kab. Buton Utara	0	0	0	0	0	0
5	Kab. Muna	0	1	0	0	0	0
6	Kab. Kolaka	1	1	0	1	0	0
7	Kab. Konawe	1	1	0	1	0	0
8	Kab. Konawe Selatan	1	1	1	0	0	1
9	Kab. Konawe Utara	0	0	0	0	1	1
10	Kab. Bombana	0	1	0	1	0	0
11	Kab. Wakatobi	0	1	0	1	0	0
12	Kab. Kolaka Utara	0	1	0	0	0	0
30. MALUKU							
1	Kota Ambon	0	1	1	0	1	1
2	Kota Tual	0	1	1	0	0	0
3	Kab. Maluku Tengah	0	1	1	1	0	0
4	Kab. Pulau Buru	0	0	0	0	0	0
5	Kab. Buru Selatan	0	0	0	1	0	0
6	Kab. Maluku Tenggara	0	1	0	0	0	0
7	Kab. Maluku Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0
8	Kab. Seram Bagian Barat	1	0	0	1	1	0
9	Kab. Seram Bagian Timur	0	0	0	0	0	0
10	Kab. Kep. Aru	0	1	1	0	0	0
11	Kab. MalukuBarat Daya	0	0	0	0	0	0
31. MALUKU UTARA							
1	Kota Ternate*	0	1	0	0	1	0
2	Kota Tidore	0	1	0	0	0	0
3	Kab. Halmahera Tengah	0	0	0	0	1	0
4	Kab. Halmahera Barat	0	0	0	0	0	0
5	Kab. Halmahera Utara	1	1	0	0	1	0
6	Kab. Pulau Morotai	1	1	0	1	1	0
7	Kab. Halmahera Selatan	0	1	0	0	0	1
8	Kab. Halmahera Timur	0	0	1	0	0	0
9	Kab. Kep. Sula	1	1	0	1	1	0
32. PAPUA							
1	Kota Jayapura	1	1	1	0	0	0
2	Kab. Jayapura	1	1	0	1	0	0
3	Kab. Sarmi	1	1	0	0	0	0
4	Kab. Mamberamo Raya	0	0	0	0	0	0
5	Kab. Kerom	0	1	0	0	0	0
6	Kab. Jayawijaya	1	0	0	0	0	1
7	Kab. Lanny Jaya	0	0	0	0	1	0
8	Kab. Mamberamo Tengah	0	0	0	0	0	0
9	Kab. Nduga	1	0	0	0	0	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Penunjang					
		Kereta Dorong	AC	Exhaust Fan	Kipas Angin	Generator	Pompa Air
10	Kab. Yalimo	0	0	0	0	0	0
11	Kab. Pegunungan Bintang	1	0	0	0	0	0
12	Kab. Yahukimo	0	1	0	0	0	0
13	Kab. Tolikara*	0	0	0	0	0	0
14	Kab. Puncak Jaya	0	0	0	0	0	0
15	Kab. Puncak	0	0	0	0	0	0
16	Kab. Merauke	1	0	0	0	0	1
17	Kab. Bovendigoel	1	1	0	0	0	0
18	Kab. Asmat	0	0	0	0	1	0
19	Kab. Mappi	0	1	0	1	1	0
20	Kab. Kep. Yapen	1	1	0	0	0	0
21	Kab. Waropen	0	0	0	0	1	0
22	Kab. Biak Numfor	0	1	0	0	0	0
23	Kab. Supiori	0	1	0	1	1	1
24	Kab. Nabire *	0	1	0	0	0	0
25	Kab. Dogiyai	0	0	0	0	1	0
26	Kab. Paniai	0	0	0	0	0	0
27	Kab. Intan Jaya	0	0	0	0	1	0
28	Kab. Deiyai	0	0	0	0	0	0
29	Kab. Mimika	1	1	1	0	1	1
33. PAPUA BARAT							
1	Kota Sorong	0	0	0	1	0	1
2	Kab. Sorong	0	0	0	1	0	0
3	Kab. Tambora	0	0	0	0	0	0
4	Kab. Sorong Selatan	1	1	0	1	0	0
5	Kab. Maybrat	0	0	0	0	0	0
6	Kab. Raja Ampat	0	0	0	0	0	0
7	Kab. Manokwari	0	1	0	0	0	0
8	Kab. Teluk Bintuni	1	1	0	0	0	0
9	Kab. Teluk Wondama	1	0	0	1	0	0
10	Kab. Fak Fak	1	1	0	0	0	0
11	Kab. Kaimana	1	1	0	1	0	0

LAMPIRAN 8

DATA SARANA DISTRIBUSI INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA

0	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Distribusi	
		Kendaraan Roda 4	Kendaraan Roda 2
1. NANGGROE ACEH DARUSSALAM			
1	Kota Banda Aceh	0	1
2	Kota Sabang	1	1
3	Kota Lhokseumawe	0	1
4	Kota Langsa	1	1
5	Kota Subulussalam	0	1
6	Kab. Aceh Utara	1	0
7	Kab. Aceh Barat	0	1
8	Kab. Aceh Selatan	1	1
9	Kab. Aceh Timur	0	1
10	Kab. Aceh Tengah	1	1
11	Kab. Aceh Tenggara	0	1
12	Kab. Aceh Besar	1	1
13	Kab. Aceh Singkil	1	0
14	Kab. Pidie	0	1
15	Kab. Pidie Jaya	1	1
16	Kab. Siemeuleu	1	1
17	Kab. Bireuen*	0	0
18	Kab. Gayo Lues	1	0
19	Kab. Aceh Barat Daya	0	1
20	Kab. Aceh Tamiang	0	0
21	Kab. Nagan Raya	1	0
22	Kab. Aceh Jaya	0	0
23	Kab. Bener Meriah	1	1
2. SUMATERA UTARA			
1	Kota Medan	1	1
2	Kota Binjai	0	1
3	Kota Tebing Tinggi*	0	0
4	Kota Pematang Siantar	1	1
5	Kota Tanjung Balai	1	0
6	Kota Sibolga	1	1
7	Kota Padang Sidempuan	1	1
8	Kota Gunung Sitoli	0	0
9	Kab. Deli Serdang	1	0
10	Kab. Langkat	1	1
11	Kab. Karo	1	1
12	Kab. Simalungun	1	1
13	Kab. Dairi	1	1

0	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Distribusi	
		Kendaraan Roda 4	Kendaraan Roda 2
14	Kab. Asahan	0	1
15	Kab. Batubara	0	0
16	Kab. Labuhan Batu	0	1
17	Kab. Tapanuli Utara	1	0
18	Kab. Tapanuli Tengah	1	1
19	Kab. Tapanuli Selatan	1	1
20	Kab. Padang Lawas	0	0
21	Kab. Padang Lawas Utara	1	1
22	Kab. Nias	1	1
23	Kab. Toba Samosir	0	1
24	Kab. Mandailing Natal	0	0
25	Kab. Humbang Hasudutan	0	1
26	Kab. Pakpak Barat	0	0
27	Kab. Nias Selatan	1	0
28	Kab. Samosir	1	1
29	Kab. Serdang Begadai	1	0
30	Kab. Nias Barat	0	0
31	Kab. Nias Utara	0	1
32	Kab. Labuhan Batu Utara	0	0
33	Kab. Labuhan Batu Selatan	0	0
3. SUMATERA BARAT			
1	Kota Padang	1	1
2	Kota Solok	1	1
3	Kota Sawah Lunto	0	1
4	Kota Padang Panjang	1	1
5	Kota Bukittinggi	1	1
6	Kota Payakumbuh	1	1
7	Kota Pariaman	1	1
8	Kab. Pesisir Selatan	0	0
9	Kab. Solok	1	1
10	Kab. Sawah Lunto	1	1
11	Kab. Tanah Datar	1	1
12	Kab. Padang Pariaman	1	1
13	Kab. Agam	1	1
14	Kab. 50 Kota*	1	1
15	Kab. Pasaman	1	1
16	Kab. Kep. Mentawai	0	1
17	Kab. Solok Selatan	1	1
18	Kab. Dharmas Raya	0	1
19	Kab. Pasaman Barat	1	1
20	Kab. Sijunjung	1	0
4. RIAU			
1	Kota Pekanbaru	1	1

0	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Distribusi	
		Kendaraan Roda 4	Kendaraan Roda 2
2	Kota Dumai	0	0
3	Kab. Indragiri Hulu	0	0
4	Kab. Indragiri Hilir	0	1
5	Kab. Kampar	1	0
6	Kab. Bangkalis	1	0
7	Kab. Kep. Meranti	0	0
8	Kab. Pelalawan	1	0
9	Kab. Rokan Hulu	0	1
10	Kab. Rokan Hilir	0	0
11	Kab. Siak	1	1
12	Kab. Kuantan Singingi	0	0
5. KEPULAUAN RIAU			
1	Kota Batam	1	1
2	Kota Tanjung Pinang	1	1
3	Kab. Bintan (Kab. Kep. Riau)	1	0
4	Kab. Karimun	1	1
5	Kab. Natuna*	1	0
6	Kab. Kep. Anambas *	0	0
7	Kab. Lingga	0	0
6. JAMBI			
1	Kota Jambi	1	1
2	Kota Sungai Penuh	0	1
3	Kab. Kerinci	1	1
4	Kab. Merangin	1	1
5	Kab. Batang Hari	1	1
6	Kab. Tanjung Jabung Barat	0	1
7	Kab. Bungo	0	1
8	Kab. Sarolangun	0	1
9	Kab. Tebo	1	1
10	Kab. Muaro Jambi	1	0
11	Kab. Tanjung Jabung Timur	0	1
7. SUMATERA SELATAN			
1	Kota Palembang	1	1
2	Kota Prabumulih	1	1
3	Kota Lubuk Linggau	1	1
4	Kota Pagar Alam	0	1
5	Kab. Ogan Komering Ulu	1	1
6	Kab. Ogan Komering Ilir	0	0
7	Kab. Muara Enim	1	1
8	Kab. Lahat	1	1
9	Kab. Empat Lawang	0	0
10	Kab. Musi Rawas	0	1
11	Kab. Musi Banyuasin	0	0

0	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Distribusi	
		Kendaraan Roda 4	Kendaraan Roda 2
12	Kab. Banyuasin	0	0
13	Kab. Ogan Ilir*	1	0
14	Kab. OKU Timur	0	1
15	Kab. OKU Selatan	0	1
8. BANGKA BELITUNG			
1	Kota Pangkal Pinang	1	0
2	Kab. Bangka	1	0
3	Kab. Belitung	1	1
4	Kab. Bangka Barat	1	1
5	Kab. Bangka Tengah	1	1
6	Kab. Bangka Selatan	1	1
7	Kab. Belitung Timur	1	1
9. BENGKULU			
1	Kota Bengkulu	1	1
2	Kab. Bengkulu Utara	1	1
3	Kab. Bengkulu Selatan	1	1
4	Kab. Rejang Lebong	1	1
5	Kab. Lebong	1	0
6	Kab. Seluma	1	1
7	Kab. Kaur	0	1
8	Kab. Muko-Muko	1	1
9	Kab. Kepahyang	1	1
10	Kab. Bengkulu Tengah	0	1
10. LAMPUNG			
1	Kota Bandar Lampung	1	1
2	Kota Metro	1	1
3	Kab. Lampung Utara	1	1
4	Kab. Lampung Barat	1	1
5	Kab. Lampung Selatan	0	0
6	Kab. Pesawaran	1	0
7	Kab. Lampung Timur	0	1
8	Kab. Lampung Tengah	0	0
9	Kab. Tanggamus	1	0
10	Kab. Pringsewu	1	0
11	Kab. Tulang Bawang	0	0
12	Kab. Tulang Bawang Barat	1	0
13	Kab. Mesuji	1	0
14	Kab. Way Kanan	0	0
11. DKI JAKARTA			
1	Kota Adm. Jakarta Utara	0	0
2	Kota Adm. Jakarta Barat	0	0
3	Kota Adm. Jakarta Selatan	1	1
4	Kota Adm. Jakarta Timur	1	0

0	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Distribusi	
		Kendaraan Roda 4	Kendaraan Roda 2
5	Kota Adm. Jakarta Pusat	0	0
6	Kab. Kep. Seribu*	0	0
12. JAWA BARAT			
1	Kota Bandung	1	1
2	Kota Bogor	1	1
3	Kota Cirebon	1	1
4	Kota Sukabumi	1	1
5	Kota Bekasi	1	1
6	Kota Tasikmalaya	1	0
7	Kota Cimahi	1	1
8	Kota Depok	1	1
9	Kota Banjar	1	1
10	Kab. Bogor	1	1
11	Kab. Sukabumi*	1	1
12	Kab. Cianjur	1	1
13	Kab. Bandung	1	0
14	Kab. Bandung Barat	1	0
15	Kab. Garut	1	1
16	Kab. Tasikmalaya	1	1
17	Kab. Ciamis	1	1
18	Kab. Kuningan	1	1
19	Kab. Cirebon	0	1
20	Kab. Majalengka	1	0
21	Kab. Sumedang	1	1
22	Kab. Indramayu	1	0
23	Kab. Subang	1	1
24	Kab. Purwakarta	0	0
25	Kab. Karawang	1	1
26	Kab. Bekasi	1	0
13. BANTEN			
1	Kota Tangerang*	0	0
2	Kota Cilegon*	0	0
3	Kota Serang	0	0
4	Kota Tangerang Selatan*	1	0
5	Kab. Serang*	1	0
6	Kab. Lebak	0	0
7	Kab. Pandeglang	1	1
8	Kab. Tangerang	1	1
14. JAWA TENGAH			
1	Kota Semarang	1	1
2	Kota Magelang	1	1
3	Kota Surakarta	1	1
4	Kota Salatiga	1	1

0	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Distribusi	
		Kendaraan Roda 4	Kendaraan Roda 2
5	Kota Pekalongan	1	1
6	Kota Tegal	1	1
7	Kab. Cilacap	1	1
8	Kab. Banyumas*	1	1
9	Kab. Purbalingga	1	0
10	Kab. Bk. Negara	1	1
11	Kab. Kebumen	0	0
12	Kab. Purworejo	1	1
13	Kab. Wonosobo	1	1
14	Kab. Magelang	1	1
15	Kab. Boyolali	1	1
16	Kab. Klaten	1	1
17	Kab. Sukoharjo	1	1
18	Kab. Wonogiri	0	1
19	Kab. Karanganyar*	1	1
20	Kab. Sragen	1	0
21	Kab. Grobogan	1	1
22	Kab. Blora	1	1
23	Kab. Rembang	1	1
24	Kab. Pati	1	1
25	Kab. Kudus	1	1
26	Kab. Jepara	1	1
27	Kab. Demak	0	1
28	Kab. Semarang	1	1
29	Kab. Temanggung*	1	1
30	Kab. Kendal	1	1
31	Kab. Batang	1	1
32	Kab. Pekalongan	1	0
33	Kab. Pemalang	1	1
34	Kab. Tegal	1	1
35	Kab. Brebes	1	1
15. DI. YOGYAKARTA			
1	Kota Yogyakarta	1	1
2	Kab. Kulon Progo*	1	1
3	Kab. Bantul	1	0
4	Kab. Gunung Kidul	1	1
5	Kab. Sleman	1	1
16. JAWA TIMUR			
1	Kota Surabaya	1	0
2	Kota Kediri	0	0
3	Kota Blitar	1	1
4	Kota Malang	0	0
5	Kota Probolinggo	0	0

0	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Distribusi	
		Kendaraan Roda 4	Kendaraan Roda 2
6	Kota Pasuruan	1	1
7	Kota Mojokerto	0	0
8	Kota Madiun	1	1
9	Kota Batu	1	0
10	Kab. Pacitan*	0	1
11	Kab. Ponorogo	1	1
12	Kab. Trenggalek	1	0
13	Kab. Tulungagung*	1	1
14	Kab. Blitar	1	0
15	Kab. Kediri	1	0
16	Kab. Malang	1	1
17	Kab. Lumajang	1	0
18	Kab. Jember	1	0
19	Kab. Banyuwangi	0	0
20	Kab. Bondowoso	1	1
21	Kab. Situbondo	1	1
22	Kab. Probolinggo	1	1
23	Kab. Pasuruan	1	1
24	Kab. Sidoarjo	1	1
25	Kab. Mojokerto	1	1
26	Kab. Jombang	1	1
27	Kab. Nganjuk	0	0
28	Kab. Madiun	0	1
29	Kab. Magetan	1	1
30	Kab. Ngawi	1	1
31	Kab. Lamongan	0	1
32	Kab. Gresik	1	1
33	Kab. Bangkalan	1	0
34	Kab. Sampang	0	0
35	Kab. Pamekasan*	1	1
36	Kab. Sumenep	1	0
37	Kab. Bojonegoro	1	1
38	Kab. Tuban	1	1
17. BALI			
1	Kota Denpasar	1	1
2	Kab. Jemberana	1	1
3	Kab. Tabanan	1	1
4	Kab. Badung	1	1
5	Kab. Gianyar	1	1
6	Kab. Klungkung*	1	1
7	Kab. Bangli	1	1
8	Kab. Karangasem	1	1
9	Kab. Buleleng	1	1

0	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Distribusi	
		Kendaraan Roda 4	Kendaraan Roda 2
18. NUSA TENGGARA BARAT			
1	Kota Mataram*	0	1
2	Kota Bima	1	1
3	Kab. Lombok Barat*	0	1
4	Kab. Lombok Tengah	1	1
5	Kab. Lombok Timur	1	1
6	Kab. Sumbawa	1	1
7	Kab. Dompu	0	1
8	Kab. Bima	0	1
9	Kab. Sumbawa Barat	1	1
10	Kab. Lombok Utara	1	1
19. NUSA TENGGARA TIMUR			
1	Kota Kupang	1	1
2	Kab. Sumba Barat*	1	1
3	Kab. Sumba Barat Daya*	0	0
4	Kab. Sumba Tengah	1	0
5	Kab. Sumba Timur	0	1
6	Kab. Kupang	1	1
7	Kab. Sabu Raijua*	1	0
8	Kab. Timur Tengah Selatan*	1	1
9	Kab. Timur Tengah Utara	0	1
10	Kab. Lembata*	0	1
11	Kab. Belu*	1	1
12	Kab. Alor*	0	0
13	Kab. Flores Timur*	1	0
14	Kab. Sikka*	0	0
15	Kab. Ende	0	0
16	Kab. Ngada	0	1
17	Kab. Nagekeo	0	1
18	Kab. Manggarai	0	1
19	Kab. Manggarai Timur	0	0
20	Kab. Rote Ndao*	0	0
21	Kab. Manggarai Barat	0	0
20. KALIMANTAN BARAT			
1	Kota Pontianak	1	1
2	Kota Singkawang	1	1
3	Kab. Sambas	1	1
4	Kab. Pontianak	1	1
5	Kab. Kubu Raya	0	0
6	Kab. Sanggau	1	1
7	Kab. Sekadau	1	1
8	Kab. Ketapang	1	0
9	Kab. Kayong Utara	1	0

0	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Distribusi	
		Kendaraan Roda 4	Kendaraan Roda 2
10	Kab. Sintang	0	1
11	Kab. Melawi*	0	1
12	Kab. Kapuas Hulu	1	1
13	Kab. Bengkayang	1	1
14	Kab. Landak	1	0
21. KALIMANTAN TENGAH			
1	Kota Palangkaraya	1	0
2	Kab. Kotawaringin Barat	1	0
3	Kab. Kotawaringin Timur	1	0
4	Kab. Kapuas	1	1
5	Kab. Barito Selatan	1	0
6	Kab. Barito Utara	1	1
7	Kab. Murung Raya	1	0
8	Kab. Barito Timur	0	0
9	Kab. Gunung Mas	1	0
10	Kab. Pulang Pisau	0	0
11	Kab. Katingan	1	1
12	Kab. Seruyan	1	0
13	Kab. Sukamara	1	0
14	Kab. Lamandau	0	1
22. KALIMANTAN SELATAN			
1	Kota Banjarmasin	1	1
2	Kota Banjar Baru	1	1
3	Kab. Tanah Laut	1	1
4	Kab. Kota Baru	1	1
5	Kab. Banjar	1	1
6	Kab. Barito Kuala	1	1
7	Kab. Tapin	1	1
8	Kab. Hulu Sungai Selatan	1	1
9	Kab. Hulu Sungai Tengah	1	1
10	Kab. Hulu Sungai Utara	1	1
11	Kab. Tabalong	1	1
12	Kab. Balangan	1	1
13	Kab. Tanah Bumbu	1	1
23. KALIMANTAN TIMUR			
1	Kota Samarinda	1	1
2	Kota Balikpapan	1	1
3	Kota Tarakan*	1	1
4	Kota Bontang	0	0
5	Kab. Pasir	1	1
6	Kab. Kutai Kertanegara	0	1
7	Kab. Berau*	0	1
8	Kab. Bulungan*	0	0

0	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Distribusi	
		Kendaraan Roda 4	Kendaraan Roda 2
9	Kab. Tana Tidung*	1	1
10	Kab. Malinau*	1	1
11	Kab. Nunukan*	1	1
12	Kab. Kutai Barat	0	1
13	Kab. Kutai Timur	1	1
14	Kab. Penajam Pasir Utara	0	1
24. SULAWESI UTARA			
1	Kota Manado	0	1
2	Kota Bitung	0	0
3	Kota Tomohon	0	0
4	Kota Kotamobagu	0	0
5	Kab. Sangihe	0	0
6	Kab. Kep. Sitaro*	0	0
7	Kab. Talaud	0	1
8	Kab. Minahasa	0	0
9	Kab. Minahasa Utara	0	0
10	Kab. Bolaang Mongondow	1	0
11	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0	0
12	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0	0
13	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1	1
14	Kab. Minahasa Selatan	1	0
15	Kab. Minahasa Tenggara*	0	0
25. GORONTALO			
1	Kota Gorontalo	1	1
2	Kab. Gorontalo	1	1
3	Kab. Gorontalo Utara	1	1
4	Kab. Boalemo	1	1
5	Kab. Bone Bolango	1	1
6	Kab. Pohuwato	1	0
26. SULAWESI TENGAH			
1	Kota Palu	1	1
2	Kab. Banggai	1	0
3	Kab. Poso	1	1
4	Kab. Tojo Una-Una	1	1
5	Kab. Donggala	1	0
6	Kab. Sigi	0	0
7	Kab. Toli-Toli	1	1
8	Kab. Buol	1	0
9	Kab. Morowali	0	1
10	Kab. Banggai Kepulauan	1	1
11	Kab. Parigi Moutong	1	0
27. SULAWESI SELATAN			
1	Kota Makassar*	1	1

0	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Distribusi	
		Kendaraan Roda 4	Kendaraan Roda 2
2	Kota Pare Pare*	0	1
3	Kota Palopo*	1	0
4	Kab. Bulukumba	1	1
5	Kab. Bantaeng	1	1
6	Kab. Jeneponto	1	0
7	Kab. Takalar*	0	1
8	Kab. Gowa	1	1
9	Kab. Sinjai*	1	0
10	Kab. Bone	1	1
11	Kab. Maros	1	1
12	Kab. Pangkep	1	1
13	Kab. Barru	1	0
14	Kab. Soppeng*	1	0
15	Kab. Wajo*	0	0
16	Kab. Sidrap*	1	1
17	Kab. Pinrang	0	1
18	Kab. Enrekang	0	1
19	Kab. Luwu	1	1
20	Kab. Luwu Timur	0	1
21	Kab. Luwu Utara	1	1
22	Kab. Tana Toraja*	0	0
23	Kab. Toraja Utara*	0	0
24	Kab. Selayar	0	1
28. SULAWESI BARAT			
1	Kab. Polewali	1	1
2	Kab. Majene	1	1
3	Kab. Mamuju	1	0
4	Kab. Mamuju Utara	0	0
5	Kab. Mamasa	0	0
29. SULAWESI TENGGARA			
1	Kota Kendari	1	1
2	Kota Bau-Bau	1	1
3	Kab. Buton	1	1
4	Kab. Buton Utara	1	0
5	Kab. Muna	0	0
6	Kab. Kolaka	1	1
7	Kab. Konawe	0	1
8	Kab. Konawe Selatan	1	0
9	Kab. Konawe Utara	1	1
10	Kab. Bombana	0	1
11	Kab. Wakatobi	0	0
12	Kab. Kolaka Utara	0	1
30. MALUKU			

0	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Distribusi	
		Kendaraan Roda 4	Kendaraan Roda 2
1	Kota Ambon	1	1
2	Kota Tual	0	0
3	Kab. Maluku Tengah	1	1
4	Kab. Pulau Buru	1	0
5	Kab. Buru Selatan	0	0
6	Kab. Maluku Tenggara	1	1
7	Kab. Maluku Tenggara Barat	0	0
8	Kab. Seram Bagian Barat	0	1
9	Kab. Seram Bagian Timur	1	0
10	Kab. Kep. Aru	1	0
11	Kab. Maluku Barat Daya	0	0
31. MALUKU UTARA			
1	Kota Ternate*	1	1
2	Kota Tidore	1	0
3	Kab. Halmahera Tengah	0	1
4	Kab. Halmahera Barat	1	1
5	Kab. Halmahera Utara	1	0
6	Kab. Pulau Morotai	1	1
7	Kab. Halmahera Selatan	1	1
8	Kab. Halmahera Timur	0	0
9	Kab. Kep. Sula	0	1
32. PAPUA			
1	Kota Jayapura	1	1
2	Kab. Jayapura	1	1
3	Kab. Sarmi	0	1
4	Kab. Mamberamo Raya	1	0
5	Kab. Kerom	0	0
6	Kab. Jayawijaya	1	0
7	Kab. Lanny Jaya	0	0
8	Kab. Mamberamo Tengah	1	0
9	Kab. Nduga	0	0
10	Kab. Yalimo	1	1
11	Kab. Pegunungan Bintang	1	0
12	Kab. Yahukimo	1	1
13	Kab. Tolikara*	1	0
14	Kab. Puncak Jaya	0	0
15	Kab. Puncak	0	1
16	Kab. Merauke	1	0
17	Kab. Bovendigoel	1	1
18	Kab. Asmat	0	0
19	Kab. Mappi	1	1
20	Kab. Kep. Yapen	1	0
21	Kab. Waropen	1	1

0	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Distribusi	
		Kendaraan Roda 4	Kendaraan Roda 2
22	Kab. Biak Numfor	1	1
23	Kab. Supiori	1	1
24	Kab. Nabire*	1	0
25	Kab. Dogiyai	0	1
26	Kab. Paniai	0	1
27	Kab. Intan Jaya	1	1
28	Kab. Deiyai	0	0
29	Kab. Mimika	1	0
33. PAPUA BARAT			
1	Kota Sorong	0	0
2	Kab. Sorong	1	1
3	Kab. Tambora	0	0
4	Kab. Sorong Selatan	0	1
5	Kab. Maybrat	1	0
6	Kab. Raja Ampat	0	0
7	Kab. Manokwari	1	1
8	Kab. Teluk Bintuni	0	0
9	Kab. Teluk Wondama	1	1
10	Kab. Fak Fak	1	0
11	Kab. Kaimana	0	1

LAMPIRAN 9

**DATA SARANA ADMINISTRASI INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA
SELURUH INDONESIA**

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Administrasi					
		Komputer	Laptop	Software	Printer	Telp	Fax
1. NANGGROE ACEH DARUSSALAM							
1	Kota Banda Aceh	1	0	0	1	0	0
2	Kota Sabang	1	0	1	1	1	0
3	Kota Lhokseumawe	1	0	1	1	0	0
4	Kota Langsa	1	1	0	1	0	0
5	Kota Subulussalam	1	0	0	1	0	0
6	Kab. Aceh Utara	1	0	1	1	0	0
7	Kab. Aceh Barat	1	0	0	1	1	1
8	Kab. Aceh Selatan	1	0	1	1	1	1
9	Kab. Aceh Timur	0	0	0	1	1	0
10	Kab. Aceh Tengah	1	0	0	1	1	0
11	Kab. Aceh Tenggara	1	0	0	1	0	0
12	Kab. Aceh Besar	1	0	0	1	0	0
13	Kab. Aceh Singkil	0	0	1	1	0	0
14	Kab. Pidie	1	0	0	0	0	0
15	Kab. Pidie Jaya	1	0	0	1	0	0
16	Kab. Siemeuleu	1	1	1	1	1	1
17	Kab. Bireuen*	0	0	0	0	0	0
18	Kab. Gayo Lues	1	0	1	1	1	1
19	Kab. Aceh Barat Daya	1	0	0	1	0	0
20	Kab. Aceh Tamiang	0	0	0	0	0	0
21	Kab. Nagan Raya	1	1	0	0	0	0
22	Kab. Aceh Jaya	0	0	0	0	0	0
23	Kab. Bener Meriah	1	0	0	1	0	0
2. SUMATERA UTARA							
1	Kota Medan	1	0	0	1	1	0
2	Kota Binjai	1	0	1	1	0	0
3	Kota Tebing Tinggi*	1	0	1	1	1	0
4	Kota Pematang Siantar	1	0	0	1	1	0
5	Kota Tanjung Balai	1	0	0	1	1	0
6	Kota Sibolga	1	0	0	1	0	0
7	Kota Padang Sidempuan	1	0	0	1	0	0
8	Kota Gunung Sitoli	1	0	0	1	0	0
9	Kab. Deli Serdang	1	0	0	0	0	0
10	Kab. Langkat	1	0	1	1	0	0
11	Kab. Karo	0	0	0	1	1	0
12	Kab. Simalungun	1	0	1	1	1	1
13	Kab. Dairi	1	0	0	1	1	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Administrasi					
		Komputer	Laptop	Software	Printer	Telp	Fax
14	Kab. Asahan	1	0	0	1	1	0
15	Kab. Batubara	0	0	0	0	0	0
16	Kab. Labuhan Batu	1	0	0	1	0	0
17	Kab. Tapanuli Utara	1	0	0	0	1	1
18	Kab. Tapanuli Tengah	1	0	0	1	0	0
19	Kab. Tapanuli Selatan	1	0	1	1	1	0
20	Kab. Padang Lawas	1	0	0	1	0	0
21	Kab. Padang Lawas Utara	1	0	0	1	0	0
22	Kab. Nias	1	0	0	1	1	0
23	Kab. Toba Samosir	0	0	0	0	1	0
24	Kab. Mandailing Natal	1	0	0	1	0	0
25	Kab. Humbang Hasudutan	1	0	1	1	1	1
26	Kab. Pakpak Barat	1	0	1	1	0	0
27	Kab. Nias Selatan	1	0	0	1	0	0
28	Kab. Samosir	1	0	0	1	0	0
29	Kab. Serdang Begadai	1	0	0	1	0	0
30	Kab. Nias Barat	0	0	0	0	0	0
31	Kab. Nias Utara	1	0	0	0	0	0
32	Kab. Labuhan Batu Utara	1	0	0	1	1	1
33	Kab. Labuhan Batu Selatan	0	0	0	0	0	0
3. SUMATERA BARAT							
1	Kota Padang	1	1	0	1	1	0
2	Kota Solok	1	0	0	1	1	0
3	Kota Sawah Lunto	1	0	0	1	1	0
4	Kota Padang Panjang	1	0	0	1	1	0
5	Kota Bukittinggi	1	0	0	1	1	1
6	Kota Payakumbuh	1	1	1	1	1	0
7	Kota Pariaman	1	0	0	1	1	0
8	Kab. Pesisir Selatan	1	0	0	1	0	0
9	Kab. Solok	1	0	1	1	1	0
10	Kab. Sawah Lunto	1	1	1	1	1	0
11	Kab. Tanah Datar	1	0	0	1	1	1
12	Kab. Padang Pariaman	1	1	1	1	0	0
13	Kab. Agam	1	0	0	1	1	0
14	Kab. 50 Kota*	1	0	0	1	1	0
15	Kab. Pasaman	1	0	0	1	0	0
16	Kab. Kep. Mentawai	1	0	0	1	1	0
17	Kab. Solok Selatan	1	0	1	1	1	0
18	Kab. Dharmas Raya	1	0	0	1	1	1
19	Kab. Pasaman Barat	1	0	0	1	1	1
20	Kab. Sijunjung	1	0	0	1	1	0
4. RIAU							
1	Kota Pekanbaru	1	0	0	1	1	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Administrasi					
		Komputer	Laptop	Software	Printer	Telp	Fax
2	Kota Dumai	1	1	0	1	1	1
3	Kab. Indragiri Hulu	1	0	0	1	1	1
4	Kab. Indragiri Hilir	1	0	0	1	0	0
5	Kab. Kampar	1	0	1	1	1	1
6	Kab. Bangkalis	1	0	0	1	0	0
7	Kab. Kep. Meranti	1	0	0	0	0	0
8	Kab. Pelalawan	1	0	0	1	1	1
9	Kab. Rokan Hulu	1	0	0	1	0	0
10	Kab. Rokan Hilir	1	0	0	0	0	0
11	Kab. Siak	1	0	0	1	0	0
12	Kab. Kuantan Sengingi	1	0	0	1	0	0
5. KEPULAUAN RIAU							
1	Kota Batam	1	1	1	1	1	1
2	Kota Tanjung Pinang	1	0	0	1	0	0
3	Kab. Bintan (Kab. Kep. Riau)	1	0	0	1	1	1
4	Kab. Karimun	1	1	1	1	1	1
5	Kab. Natuna*	1	1	0	1	0	0
6	Kab. Kep. Anambas*	1	0	0	0	0	0
7	Kab. Lingga	1	0	0	1	0	0
6. JAMBI							
1	Kota Jambi	1	0	1	1	0	1
2	Kota Sungai Penuh	0	0	1	0	0	1
3	Kab. Kerinci	0	0	1	1	1	1
4	Kab. Merangin	0	0	1	0	0	1
5	Kab. Batang Hari	1	0	0	1	0	1
6	Kab. Tanjung Jabung Barat	0	1	1	0	0	1
7	Kab. Bungo	0	0	1	1	1	1
8	Kab. Sarolangun	0	0	1	0	0	1
9	Kab. Tebo	0	0	1	0	0	1
10	Kab. Muaro Jambi	1	0	1	1	0	1
11	Kab. Tanjung Jabung Timur	0	0	1	1	1	1
7. SUMATERA SELATAN							
1	Kota Palembang	1	0	0	1	1	0
2	Kota Prabumulih	1	1	0	1	0	0
3	Kota Lubuk Linggau	0	0	0	0	0	0
4	Kota Pagar Alam	1	0	0	1	1	1
5	Kab. Ogan Komering Ulu	1	0	0	1	1	1
6	Kab. Ogan Komering Ilir	1	0	0	0	0	0
7	Kab. Muara Enim	1	0	0	1	1	0
8	Kab. Lahat	1	0	0	1	1	0
9	Kab. Empat Lawang	0	0	0	0	0	0
10	Kab. Musi Rawas	1	0	0	0	1	0
11	Kab. Musi Banyuasin	1	0	1	1	0	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Administrasi					
		Komputer	Laptop	Software	Printer	Telp	Fax
12	Kab. Banyuasin	1	1	1	1	1	0
13	Kab. Ogan Ilir*	1	0	1	1	0	0
14	Kab. OKU Timur	1	0	0	1	0	0
15	Kab. OKU Selatan	0	0	0	0	0	0
8. BANGKA BELITUNG							
1	Kota Pangkal Pinang	1	0	1	1	1	0
2	Kab. Bangka	1	0	0	1	1	0
3	Kab. Belitung	1	0	0	0	1	0
4	Kab. Bangka Barat	1	1	0	1	0	0
5	Kab. Bangka Tengah	1	1	0	1	0	0
6	Kab. Bangka Selatan	0	1	0	1	1	1
7	Kab. Belitung Timur	1	1	0	0	0	0
9. BENGKULU							
1	Kota Bengkulu	0	1	1	1	0	1
2	Kab. Bengkulu Utara	1	1	1	0	0	1
3	Kab. Bengkulu Selatan	0	0	1	1	0	1
4	Kab. Rejang Lebong	1	1	1	1	1	1
5	Kab. Lebong	0	0	1	0	0	1
6	Kab. Seluma	0	0	1	0	0	0
7	Kab. Kaur	1	0	1	0	0	0
8	Kab. Muko-Muko	0	0	1	0	0	0
9	Kab. Kepahyang	0	0	1	0	0	1
10	Kab. Bengkulu Tengah	1	0	1	0	0	1
10. LAMPUNG							
1	Kota Bandar Lampung	1	0	1	0	1	0
2	Kota Metro	1	1	0	1	1	0
3	Kab. Lampung Utara	1	1	0	1	1	1
4	Kab. Lampung Barat	1	1	1	1	0	0
5	Kab. Lampung Selatan	1	0	0	1	0	0
6	Kab. Pesawaran	0	0	1	0	0	0
7	Kab. Lampung Timur	1	1	1	1	1	1
8	Kab. Lampung Tengah	1	0	0	1	0	0
9	Kab. Tanggamus	1	0	0	1	0	0
10	Kab. Pringsewu	1	0	0	1	0	0
11	Kab. Tulang Bawang	1	0	1	1	1	1
12	Kab. Tulang Bawang Barat	1	0	0	1	0	0
13	Kab. Mesuji	1	0	0	1	0	0
14	Kab. Way Kanan	1	0	1	1	1	1
11. DKI JAKARTA							
1	Kota Adm. Jakarta Utara	1	1	0	1	1	1
2	Kota Adm. Jakarta Barat	1	1	0	1	1	1
3	Kota Adm. Jakarta Selatan	1	1	0	1	1	1
4	Kota Adm. Jakarta Timur	1	1	0	1	1	1

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Administrasi					
		Komputer	Laptop	Software	Printer	Telp	Fax
5	Kota Adm. Jakarta Pusat	1	1	0	1	1	1
6	Kab. Kep. Seribu	1	1	0	1	1	1
12. JAWA BARAT							
1	Kota Bandung	1	0	1	1	1	1
2	Kota Bogor	1	0	0	1	1	0
3	Kota Cirebon	1	1	0	1	1	0
4	Kota Sukabumi	1	0	1	1	1	0
5	Kota Bekasi	1	0	0	0	1	0
6	Kota Tasikmalaya	1	0	0	1	0	0
7	Kota Cimahi	1	1	1	1	0	0
8	Kota Depok	1	0	0	1	1	0
9	Kota Banjar	1	0	1	1	1	1
10	Kab. Bogor	1	1	0	1	1	0
11	Kab. Sukabumi*	1	0	1	1	1	1
12	Kab. Cianjur	1	0	0	1	1	1
13	Kab. Bandung	0	1	1	1	0	0
14	Kab. Bandung Barat	1	0	0	1	1	1
15	Kab. Garut	1	0	1	1	1	1
16	Kab. Tasikmalaya	1	0	0	1	1	0
17	Kab. Ciamis	1	0	1	1	0	0
18	Kab. Kuningan	0	0	0	0	1	0
19	Kab. Cirebon	1	0	0	1	0	0
20	Kab. Majalengka	1	0	0	1	1	0
21	Kab. Sumedang	1	0	0	0	0	0
22	Kab. Indramayu	1	0	0	0	1	1
23	Kab. Subang	1	0	0	1	1	1
24	Kab. Purwakarta	1	0	1	1	0	0
25	Kab. Karawang	1	0	1	1	1	1
26	Kab. Bekasi	1	0	1	1	1	1
13. BANTEN							
1	Kota Tangerang*	1	0	0	1	1	1
2	Kota Cilegon*	1	0	0	1	1	1
3	Kota Serang	1	0	0	1	0	0
4	Kota Tangerang Selatan*	1	0	1	1	1	1
5	Kab. Serang*	1	1	0	1	1	1
6	Kab. Lebak	1	0	0	1	0	0
7	Kab. Pandeglang	1	0	1	1	0	0
8	Kab. Tangerang	1	0	1	1	1	1
14. JAWA TENGAH							
1	Kota Semarang	1	1	1	1	1	1
2	Kota Magelang	1	1	1	1	1	1
3	Kota Surakarta	1	1	1	1	1	1
4	Kota Salatiga	1	0	1	1	1	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Administrasi					
		Komputer	Laptop	Software	Printer	Telp	Fax
5	Kota Pekalongan	1	1	0	1	1	0
6	Kota Tegal	1	0	0	1	1	0
7	Kab. Cilacap	1	0	1	1	1	1
8	Kab. Banyumas*	1	1	1	1	1	1
9	Kab. Purbalingga	1	0	0	1	1	1
10	Kab. Bk. Negara	1	1	1	1	1	0
11	Kab. Kebumen	1	1	0	1	1	0
12	Kab. Purworejo	1	1	0	1	1	0
13	Kab. Wonosobo	1	1	0	1	1	0
14	Kab. Magelang	1	0	0	1	1	0
15	Kab. Boyolali	1	1	1	1	1	0
16	Kab. Klaten	1	1	1	1	1	0
17	Kab. Sukoharjo	1	0	1	1	1	0
18	Kab. Wonogiri	1	1	0	1	1	0
19	Kab. Karanganyar*	1	1	1	1	1	0
20	Kab. Sragen	1	0	0	1	1	0
21	Kab. Grobogan	1	1	0	1	1	0
22	Kab. Blora	1	1	0	1	1	0
23	Kab. Rembang	1	0	1	1	1	1
24	Kab. Pati	1	1	0	1	1	1
25	Kab. Kudus	1	1	0	1	0	0
26	Kab. Jepara	1	1	1	1	1	1
27	Kab. Demak	1	1	1	1	1	0
28	Kab. Semarang	1	0	1	0	1	0
29	Kab. Temanggung*	1	1	1	1	1	1
30	Kab. Kendal	1	0	0	1	1	0
31	Kab. Batang	0	1	1	1	1	0
32	Kab. Pekalongan	1	0	0	0	0	0
33	Kab. Pemalang	1	1	1	1	1	0
34	Kab. Tegal*	1	1	0	1	1	0
35	Kab. Brebes	1	1	0	1	1	0
15. DI. YOGYAKARTA							
1	Kota Yogyakarta	1	1	0	1	1	1
2	Kab. Kulon Progo*	1	0	1	1	1	1
3	Kab. Bantul	1	0	1	1	1	1
4	Kab. Gunung Kidul	1	1	0	1	1	1
5	Kab. Sleman	1	0	1	1	1	1
16. JAWA TIMUR							
1	Kota Surabaya	0	0	0	0	0	0
2	Kota Kediri	0	0	0	0	1	1
3	Kota Blitar	1	0	0	1	1	0
4	Kota Malang	0	0	0	0	0	0
5	Kota Probolinggo	1	0	0	0	1	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Administrasi					
		Komputer	Laptop	Software	Printer	Telp	Fax
6	Kota Pasuruan	1	0	0	1	1	1
7	Kota Mojokerto	0	0	0	0	0	0
8	Kota Madiun	1	0	0	1	1	1
9	Kota Batu	1	0	0	1	1	1
10	Kab. Pacitan*	1	0	0	1	1	0
11	Kab. Ponorogo	1	0	0	1	1	0
12	Kab. Trenggalek	1	0	0	1	1	0
13	Kab. Tulungagung*	1	0	0	1	1	0
14	Kab. Blitar	1	0	0	1	1	1
15	Kab. Kediri	1	0	0	0	1	1
16	Kab. Malang	1	0	0	1	1	1
17	Kab. Lumajang	0	0	0	0	0	0
18	Kab. Jember	0	0	0	0	0	0
19	Kab. Banyuwangi	0	0	0	0	1	1
20	Kab. Bondowoso	1	0	0	1	1	1
21	Kab. Situbondo	1	0	0	1	1	1
22	Kab. Probolinggo	1	0	0	1	1	1
23	Kab. Pasuruan	1	0	0	0	1	1
24	Kab. Sidoarjo	1	0	0	1	1	1
25	Kab. Mojokerto	1	0	0	1	1	0
26	Kab. Jombang	1	0	0	1	1	1
27	Kab. Nganjuk	1	0	0	1	1	1
28	Kab. Madiun	1	0	0	1	0	0
29	Kab. Magetan	1	0	0	1	1	1
30	Kab. Ngawi	1	0	0	1	1	1
31	Kab. Lamongan	1	0	0	1	1	1
32	Kab. Gresik	1	0	0	1	1	1
33	Kab. Bangkalan	1	0	1	1	0	0
34	Kab. Sampang	0	0	0	0	0	0
35	Kab. Pamekasan*	1	0	0	1	0	0
36	Kab. Sumenep	0	0	0	0	0	0
37	Kab. Bojonegoro	1	1	0	1	1	1
38	Kab. Tuban	1	0	0	1	0	0
17. BALI							
1	Kota Denpasar	0	0	0	0	0	0
2	Kab. Jemberana	0	0	0	0	0	0
3	Kab. Tabanan	1	0	0	1	0	0
4	Kab. Badung	1	0	0	1	0	0
5	Kab. Gianyar	0	0	0	0	0	0
6	Kab. Klungkung*	0	0	0	0	0	0
7	Kab. Bangli	0	0	0	0	0	0
8	Kab. Karangasem	0	0	0	0	0	0
9	Kab. Buleleng	0	0	0	0	0	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Administrasi					
		Komputer	Laptop	Software	Printer	Telp	Fax
18. NUSA TENGGARA BARAT							
1	Kota Mataram*	0	0	0	0	0	0
2	Kota Bima	0	0	0	0	0	0
3	Kab. Lombok Barat*	0	0	0	0	0	0
4	Kab. Lombok Tengah	0	0	0	0	0	0
5	Kab. Lombok Timur	0	0	0	0	0	0
6	Kab. Sumbawa	0	0	0	0	0	0
7	Kab. Dompu	0	0	0	0	0	0
8	Kab. Bima	0	0	0	0	0	0
9	Kab. Sumbawa Barat	0	0	0	0	0	0
10	Kab. Lombok Utara	0	1	0	1	0	0
19. NUSA TENGGARA TIMUR							
1	Kota Kupang	1	1	0	1	0	0
2	Kab. Sumba Barat*	1	1	0	1	1	0
3	Kab. Sumba Barat Daya*	0	0	0	1	0	0
4	Kab. Sumba Tengah	1	0	0	1	0	0
5	Kab. Sumba Timur	0	0	0	0	0	0
6	Kab. Kupang	1	1	0	1	0	0
7	Kab. Sabu Raijua*	0	0	0	0	0	0
8	Kab. Timur Tengah Selatan*	1	1	1	1	1	1
9	Kab. Timur Tengah Utara	1	1	0	1	0	0
10	Kab. Lembata*	1	1	1	1	1	1
11	Kab. Belu*	1	1	1	1	0	0
12	Kab. Alor*	1	0	0	0	1	1
13	Kab. Flores Timur*	1	0	0	1	0	0
14	Kab. Sikka*	0	0	0	0	0	0
15	Kab. Ende	1	1	0	1	0	0
16	Kab. Ngada	1	1	0	1	1	1
17	Kab. Nagekeo	1	0	0	1	0	0
18	Kab. Manggarai	1	0	0	1	1	0
19	Kab. Manggarai Timur	1	0	0	1	0	0
20	Kab. Rote Ndao*	0	0	0	0	0	0
21	Kab. Manggarai Barat	1	1	0	1	0	0
20. KALIMANTAN BARAT							
1	Kota Pontianak	1	0	0	1	1	0
2	Kota Singkawang	1	1	0	1	0	0
3	Kab. Sambas	1	0	0	0	0	0
4	Kab. Pontianak	1	0	1	1	1	1
5	Kab. Kubu Raya	1	0	1	1	0	0
6	Kab. Sanggau	1	0	0	1	1	1
7	Kab. Sekadau	1	0	0	1	0	0
8	Kab. Ketapang	1	0	1	1	1	0
9	Kab. Kayong Utara	0	1	0	1	0	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Administrasi					
		Komputer	Laptop	Software	Printer	Telp	Fax
10	Kab. Sintang	1	0	1	1	0	0
11	Kab. Melawi*	1	0	0	1	1	1
12	Kab. Kapuas Hulu	1	0	0	1	1	0
13	Kab. Bengkayang	1	0	0	1	1	0
14	Kab. Landak	1	0	0	0	0	0
21. KALIMANTAN TENGAH							
1	Kota Palangkaraya	1	1	1	1	1	1
2	Kab. Kotawaringin Barat	1	0	1	1	0	0
3	Kab. Kotawaringin Timur	1	0	1	1	1	1
4	Kab. Kapuas	1	1	1	1	1	1
5	Kab. Barito Selatan	1	0	1	1	1	1
6	Kab. Barito Utara	1	0	1	1	1	1
7	Kab. Murung Raya	1	0	1	1	0	0
8	Kab. Barito Timur	1	0	1	1	0	0
9	Kab. Gunung Mas	1	0	1	1	0	0
10	Kab. Pulang Pisau	1	0	1	1	0	0
11	Kab. Katingan	0	0	1	1	0	0
12	Kab. Seruyan	1	0	1	1	1	1
13	Kab. Sukamara	1	0	1	1	1	1
14	Kab. Lamandau	1	0	1	1	1	1
22. KALIMANTAN SELATAN							
1	Kota Banjarmasin	1	1	1	1	1	1
2	Kota Banjar Baru	1	0	1	1	1	0
3	Kab. Tanah Laut	1	1	1	1	0	0
4	Kab. Kota Baru	1	0	0	1	1	1
5	Kab. Banjar	1	0	0	1	1	0
6	Kab. Barito Kuala	1	1	0	1	1	0
7	Kab. Tapin	1	0	0	1	1	0
8	Kab. Hulu Sungai Selatan	1	0	0	1	1	0
9	Kab. Hulu Sungai Tengah	1	1	1	1	1	0
10	Kab. Hulu Sungai Utara	1	1	0	1	1	1
11	Kab. Tabalong	1	1	0	1	1	1
12	Kab. Balangan	1	1	0	1	0	0
13	Kab. Tanah Bumbu	1	1	0	1	1	1
23. KALIMANTAN TIMUR							
1	Kota Samarinda	1	0	0	1	1	1
2	Kota Balikpapan	1	0	1	1	1	1
3	Kota Tarakan*	0	1	0	1	1	1
4	Kota Bontang	0	0	1	1	0	0
5	Kab. Pasir	1	0	0	1	1	1
6	Kab. Kutai Kertanegara	1	0	1	1	1	0
7	Kab. Berau	1	0	1	1	1	1
8	Kab. Bulungan*	1	0	1	1	1	1

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Administrasi					
		Komputer	Laptop	Software	Printer	Telp	Fax
9	Kab. Tana Tidung*	1	0	1	1	0	0
10	Kab. Malinau*	1	1	0	1	1	1
11	Kab. Nunukan*	1	1	1	1	1	1
12	Kab. Kutai Barat	1	0	1	1	0	0
13	Kab. Kutai Timur	1	0	1	1	1	1
14	Kab. Penajam Pasir Utara	0	0	0	0	1	1
24. SULAWESI UTARA							
1	Kota Manado	1	0	0	1	0	0
2	Kota Bitung	1	0	0	1	0	0
3	Kota Tomohon	0	0	0	0	0	0
4	Kota Kotamobagu	0	0	0	0	0	0
5	Kab. Sangihe	1	0	0	1	0	0
6	Kab. Kep. Sitaro*	0	0	0	0	0	0
7	Kab. Talaud	1	0	0	1	1	0
8	Kab. Minahasa	0	0	1	0	0	0
9	Kab. Minahasa Utara	0	0	0	1	0	0
10	Kab. Bolaang Mongondow	1	0	0	0	0	0
11	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0	1	0	0	0	0
12	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0	0	0	0	0	0
13	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1	0	1	1	0	0
14	Kab. Minahasa Selatan	1	0	0	1	0	0
15	Kab. Minahasa Tenggara*	0	0	0	0	0	0
25. GORONTALO							
1	Kota Gorontalo	1	1	1	1	1	0
2	Kab. Gorontalo	1	1	0	1	1	0
3	Kab. Gorontalo Utara	0	1	1	1	0	0
4	Kab. Boalemo	1	1	1	1	0	0
5	Kab. Bone Bolango	1	1	0	1	0	0
6	Kab. Pohuwato	1	1	1	1	0	0
26. SULAWESI TENGAH							
1	Kota Palu	1	0	0	1	1	0
2	Kab. Banggai	1	0	0	1	0	0
3	Kab. Poso	1	0	0	1	1	1
4	Kab. Tojo Una-Una	1	0	0	0	1	0
5	Kab. Donggala	1	0	1	1	1	1
6	Kab. Sigi	0	1	0	1	0	0
7	Kab. Toli-Toli	1	1	0	1	0	0
8	Kab. Buol	1	1	0	1	0	0
9	Kab. Morowali	0	0	1	0	0	0
10	Kab. Banggai Kepulauan	1	1	0	1	0	0
11	Kab. Parigi Moutong	1	0	1	1	1	1
27. SULAWESI SELATAN							
1	Kota Makassar*	1	0	0	1	1	1

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Administrasi					
		Komputer	Laptop	Software	Printer	Telp	Fax
2	Kota Pare Pare*	1	0	0	1	0	0
3	Kota Palopo*	1	0	0	1	0	0
4	Kab. Bulukumba	1	0	1	1	1	0
5	Kab. Bantaeng	1	1	0	1	0	0
6	Kab. Jeneponto	1	0	0	1	1	0
7	Kab. Takalar*	1	1	1	1	0	0
8	Kab. Gowa	1	0	1	1	0	0
9	Kab. Sinjai*	1	1	0	1	1	0
10	Kab. Bone	1	1	0	1	1	1
11	Kab. Maros	0	1	0	1	0	0
12	Kab. Pangkep	1	0	0	1	1	0
13	Kab. Barru	1	0	0	1	1	0
14	Kab. Soppeng*	1	1	0	1	1	0
15	Kab. Wajo*	1	0	0	1	0	0
16	Kab. Sidrap*	1	0	0	1	1	0
17	Kab. Pinrang	1	0	0	1	1	1
18	Kab. Enrekang	1	0	1	1	1	0
19	Kab. Luwu	1	1	0	1	0	0
20	Kab. Luwu Timur	1	1	0	1	1	1
21	Kab. Luwu Utara	1	1	0	1	0	0
22	Kab. Tana Toraja*	1	0	0	1	1	0
23	Kab. Toraja Utara*	1	0	0	1	0	0
24	Kab. Selayar	1	1	0	1	1	0
28. SULAWESI BARAT							
1	Kab. Polewali	0	0	0	0	1	0
2	Kab. Majene	1	1	1	1	1	0
3	Kab. Mamuju	1	0	1	1	0	0
4	Kab. Mamuju Utara	0	0	0	1	0	0
5	Kab. Mamasa	1	0	0	1	0	0
29. SULAWESI TENGGARA							
1	Kota Kendari	1	0	0	1	1	1
2	Kota Bau-Bau	0	0	0	1	0	0
3	Kab. Buton	1	0	0	1	0	0
4	Kab. Buton Utara	0	0	0	0	0	0
5	Kab. Muna	1	0	0	1	1	1
6	Kab. Kolaka	1	0	0	1	1	0
7	Kab. Konawe	1	0	0	1	0	0
8	Kab. Konawe Selatan	1	0	1	1	1	0
9	Kab. Konawe Utara	1	0	0	1	0	0
10	Kab. Bombana	0	0	1	0	0	0
11	Kab. Wakatobi	1	0	1	1	0	0
12	Kab. Kolaka Utara	1	0	0	0	0	0
30. MALUKU							

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Administrasi					
		Komputer	Laptop	Software	Printer	Telp	Fax
1	Kota Ambon	1	0	1	1	0	0
2	Kota Tual	1	0	1	1	1	1
3	Kab. Maluku Tengah	1	0	1	1	0	0
4	Kab. Pulau Buru	0	0	1	0	0	0
5	Kab. Buru Selatan	0	0	1	0	0	0
6	Kab. Maluku Tenggara	1	0	1	1	0	0
7	Kab. Maluku Tenggara Barat	0	0	1	0	0	0
8	Kab. Seram Bagian Barat	1	0	1	1	0	0
9	Kab. Seram Bagian Timur	0	0	1	0	0	0
10	Kab. Kep. Aru	0	0	1	0	0	1
11	Kab. Maluku Barat Daya	0	0	1	0	0	0
31. MALUKU UTARA							
1	Kota Ternate*	1	1	1	1	1	1
2	Kota Tidore	1	0	0	1	0	0
3	Kab. Halmahera Tengah	1	1	1	1	0	0
4	Kab. Halmahera Barat	1	0	1	1	1	0
5	Kab. Halmahera Utara	1	1	1	1	0	0
6	Kab. Pulau Morotai	1	0	0	1	0	0
7	Kab. Halmahera Selatan	1	1	1	1	0	0
8	Kab. Halmahera Timur	1	0	1	1	0	0
9	Kab. Kep. Sula	1	0	0	1	0	0
32. PAPUA							
1	Kota Jayapura	1	1	0	0	1	1
2	Kab. Jayapura	1	0	0	0	0	0
3	Kab. Sarmi	1	1	1	0	0	0
4	Kab. Mamberamo Raya	1	1	0	0	1	0
5	Kab. Kerom	1	1	0	0	1	0
6	Kab. Jayawijaya	1	1	0	1	1	1
7	Kab. Lanny Jaya	1	0	0	0	0	0
8	Kab. Mamberamo Tengah	1	1	0	0	1	1
9	Kab. Nduga	1	0	0	0	0	0
10	Kab. Yalimo	1	1	0	0	1	0
11	Kab. Pegunungan Bintang	1	0	1	0	1	0
12	Kab. Yahukimo	1	1	0	0	1	1
13	Kab. Tolikara*	1	0	0	0	0	0
14	Kab. Puncak Jaya	1	1	0	0	1	0
15	Kab. Puncak	1	1	0	0	1	0
16	Kab. Merauke	1	1	0	0	1	0
17	Kab. Bovendigoel	1	1	1	0	1	0
18	Kab. Asmat	1	1	0	0	1	1
19	Kab. Mappi	1	1	1	0	1	0
20	Kab. Kep. Yapen	1	1	1	0	1	1
21	Kab. Waropen	1	1	1	0	1	0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sarana Administrasi					
		Komputer	Laptop	Software	Printer	Telp	Fax
22	Kab. Biak Numfor	1	1	0	0	1	1
23	Kab. Supiori	1	1	0	0	1	1
24	Kab. Nabire *	1	1	1	0	1	1
25	Kab. Dogiyai	1	1	1	0	1	0
26	Kab. Paniai	1	0	0	0	0	0
27	Kab. Intan Jaya	1	1	1	0	1	0
28	Kab. Deiyai	1	0	0	0	0	0
29	Kab. Mimika	1	1	0	1	0	1
33. PAPUA BARAT							
1	Kota Sorong	1	1	1	1	1	0
2	Kab. Sorong	1	0	0	1	1	1
3	Kab. Tambora	0	0	0	0	0	0
4	Kab. Sorong Selatan	0	0	0	0	0	0
5	Kab. Maybrat	0	0	0	0	0	0
6	Kab. Raja Ampat	0	0	0	0	0	0
7	Kab. Manokwari	0	0	0	0	1	1
8	Kab. Teluk Bintuni	1	1	1	1	0	0
9	Kab. Teluk Wondama	1	1	1	1	0	0
10	Kab. Fak Fak	1	1	1	1	1	1
11	Kab. Kaimana	1	0	0	1	0	0

LAMPIRAN 10

ALOKASI DEKONSENTRASI DITJEN BINFAR DAN ALKES TAHUN 2011-2013

No	Provinsi	Alokasi		
		2011	2012	2013
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Rp 688,902,000	Rp 2,249,880,000	Rp 2,393,670,000
2	Provinsi Sumatera Utara	Rp 1,151,616,000	Rp 2,270,000,000	Rp 2,419,790,000
3	Provinsi Sumatera Barat	Rp 839,471,000	Rp 1,868,705,000	Rp 1,980,613,000
4	Provinsi Riau	Rp 496,493,000	Rp 1,666,000,000	Rp 1,794,842,000
5	Provinsi Kepulauan Riau	Rp 416,269,000	Rp 1,411,000,000	Rp 1,487,480,000
6	Provinsi Jambi	Rp 651,324,000	Rp 1,682,000,000	Rp 1,796,969,000
7	Provinsi Sumatera Selatan	Rp 789,354,000	Rp 1,438,000,000	Rp 1,561,927,000
8	Provinsi Bangka Belitung	Rp 402,967,000	Rp 1,500,870,000	Rp 1,598,676,000
9	Provinsi Bengkulu	Rp 660,674,000	Rp 1,402,000,000	Rp 1,482,660,000
10	Provinsi Lampung	Rp 922,812,000	Rp 1,442,000,000	Rp 1,511,667,000
11	Provinsi DKI Jakarta	Rp 346,880,000	Rp 1,599,000,000	Rp 1,591,476,000
12	Provinsi Jawa Barat	Rp 1,019,533,000	Rp 2,457,000,000	Rp 2,609,966,000
13	Provinsi Banten	Rp 755,645,000	Rp 1,355,000,000	Rp 1,425,278,000
14	Provinsi Jawa Tengah	Rp 1,216,947,000	Rp 2,508,000,000	Rp 2,602,485,000
15	Provinsi DI Yogyakarta	Rp 531,601,000	Rp 1,338,000,000	Rp 1,295,806,000
16	Provinsi Jawa Timur	Rp 1,411,265,000	Rp 2,524,000,000	Rp 2,816,957,000
17	Provinsi Kalimantan Barat	Rp 977,427,000	Rp 1,884,460,000	Rp 1,978,272,000
18	Provinsi Kalimantan Tengah	Rp 755,620,000	Rp 1,505,000,000	Rp 1,599,300,000
19	Provinsi Kalimantan Selatan	Rp 733,808,000	Rp 1,958,000,000	Rp 2,043,647,000
20	Provinsi Kalimantan Timur	Rp 503,468,000	Rp 1,917,415,000	Rp 2,016,952,000
21	Provinsi Sulawesi Utara	Rp 799,141,000	Rp 1,653,930,000	Rp 1,725,176,000
22	Provinsi Gorontalo	Rp 781,967,000	Rp 1,579,660,000	Rp 1,622,999,000
23	Provinsi Sulawesi Tengah	Rp 920,519,000	Rp 1,618,230,000	Rp 1,660,594,000
24	Provinsi Sulawesi Selatan	Rp 1,180,874,000	Rp 1,770,000,000	Rp 1,905,213,000
25	Provinsi Sulawesi Barat	Rp 757,936,000	Rp 1,536,435,000	Rp 1,597,574,000
26	Provinsi Sulawesi Tenggara	Rp 935,888,000	Rp 1,724,000,000	Rp 1,847,712,000
27	Provinsi Bali	Rp 594,401,000	Rp 1,361,000,000	Rp 1,429,671,000
28	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Rp 881,328,000	Rp 1,618,000,000	Rp 1,682,339,000
29	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rp 1,126,834,000	Rp 2,349,880,000	Rp 2,460,378,000
30	Provinsi Maluku	Rp 918,100,000	Rp 1,780,000,000	Rp 1,877,498,000
31	Provinsi Maluku Utara	Rp 860,615,000	Rp 1,529,000,000	Rp 1,587,648,000
32	Provinsi Papua	Rp 878,652,000	Rp 2,183,000,000	Rp 2,399,367,000
33	Provinsi Papua Barat	Rp 491,669,000	Rp 1,858,340,000	Rp 1,958,412,000
Total		Rp 26,400,000,000	Rp 58,537,805,000	Rp 61,763,014,000

